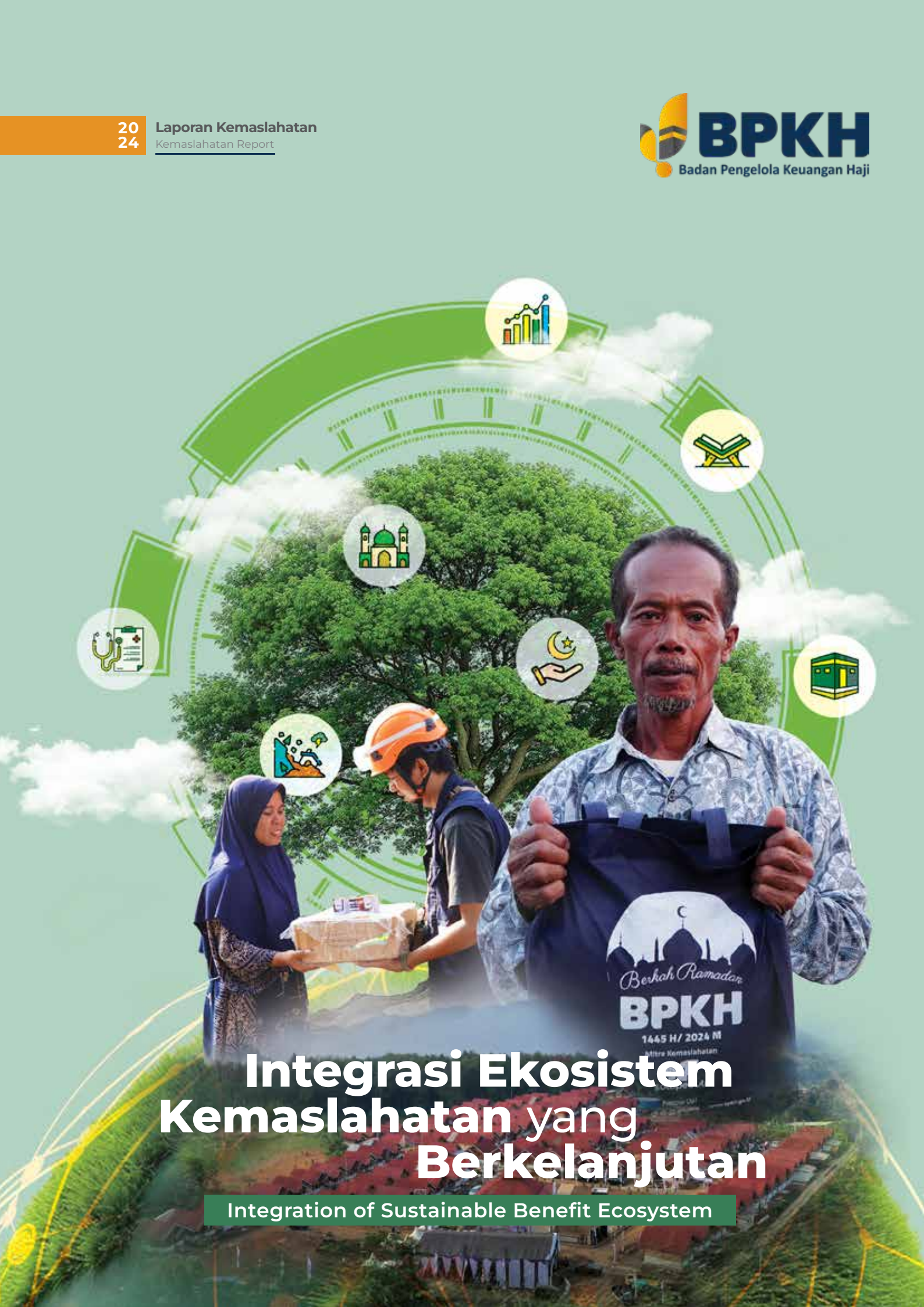




Integrasi Ekosistem Kemaslahatan yang Berkelanjutan

Integration of Sustainable Benefit Ecosystem

Penjelasan Tema Theme Explanation



Integrasi Ekosistem Kemaslahatan yang Berkelanjutan

Integration of Sustainable
Benefit Ecosystem

20
24

Laporan Kemaslahatan
Kemaslahatan Report

Sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam pelayanan jemaah haji Indonesia, BPKH terus berupaya untuk memperkuat perannya dalam melakukan pengelolaan dana haji. BPKH telah membuat serangkaian strategi untuk memperkuat fondasi kelembagaan dan perluasan investasi ekosistem haji guna meningkatkan manfaat bagi para jemaah haji Indonesia. Di samping itu, BPKH juga terus memperkuat kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, dan penyedia teknologi dalam sektor keuangan haji, serta mendorong inovasi dan digitalisasi dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji. Salah satunya adalah berupaya untuk meningkatkan inovasi layanan keuangan syariah dalam ekosistem haji, untuk mempermudah proses setoran awal haji dan lebih mudah, lebih cepat, serta lebih transparan dan aman.

Sebagai bagian dari ikhtiar memudahkan calon jemaah, saat ini BPKH juga telah memiliki aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk mendaftar haji dan melakukan setoran awal secara digital. BPKH juga senantiasa memperkuat penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) untuk memastikan pengelolaan keuangan haji yang berkelanjutan (*sustainable*) dan bermanfaat bagi umat.

As an institution with a strategic role in serving Indonesian hajj pilgrims, BPKH consistently strives to strengthen its role in managing hajj funds. BPKH has developed a series of strategies to reinforce its institutional foundation and expand investments within the hajj ecosystem, aiming to enhance benefits for Indonesian hajj pilgrims. Additionally, BPKH continues to strengthen collaborations with sharia financial institutions and technology providers in the hajj finance sector, while driving innovation and digitalization to improve services for pilgrims. One of the efforts involves elevating innovative Sharia financial services within the Hajj ecosystem to make the initial Hajj deposit process easier, faster, more transparent, and secure.

As part of its commitment to pilgrim convenience, BPKH has also launched an application that allows individuals to register for hajj and make initial deposits digitally. BPKH also consistently strengthens the implementation of Environmental, Social, and Governance (ESG) principles to ensure sustainable hajj financial management that benefits the wider Muslim community.

Daftar isi

Table of Contents


01

Pendahuluan

Introduction

Penjelasan Tema	3
Theme Explanation	
Daftar isi	4
Table of Contents	
Ikhtisar Penting Kemaslahatan	6
Key Highlights of the Benefit Program	
Sambutan Kepala Badan Pelaksana BPKH	9
Message from the Chief of BPKH's Executive Board [GRI 2-22]	
Sambutan Anggota Badan Pelaksana Bidang Kemaslahatan, Sumber Daya Manusia dan Umum	12
Message from the Member of Executive Board for Benefit Program, Human Resources and General Affairs [GRI 2-22]	
Penghargaan dan Sertifikasi 2024	18
Awards and Certifications in 2024	
Peristiwa Penting 2024	22
Event Highlights 2024	
Jejak Langkah	26
Milestones	


02

Profil BPKH

Profile of BPKH

Sekilas BPKH	30
BPKH at A Glance [GRI 2-1]	
Informasi Tentang BPKH	32
Information on BPKH [GRI 2-1, 2-2, 2-6] [SEOJK C.2, C.3, C.4]	
Visi, Misi, dan Nilai BPKH	33
BPKH Vision, Mission, and Values [GRI 2-23] [SEOJK C.1]	
Bidang Kemaslahatan BPKH	34
BPKH Benefit Program Field [GRI 2-22] [SEOJK A.1]	
Distribusi Nilai Manfaat Dana Abadi Umat (DAU)	36
Distribution of Return Value of the Ummah Endowment Fund (DAU) [GRI 3-3]	
Mitra Kemaslahatan	38
Benefit Program Partners [GRI 3-3]	
Mekanisme Penyaluran Nilai Manfaat	40
Mechanism of Return Value Distribution	

Keanggotaan Asosiasi	42
Association Membership [GRI 2-28][SEOJK C.5]	
Perubahan Signifikan	42
Significant Changes [GRI 2-6][SEOJK C.6]	


03

Rantai Kemaslahatan Umat

The Chain of Ummah's Benefit Program

Program Kemaslahatan	46
Benefit Program	
Penyaluran Nilai Manfaat	50
Distribution of DAU Benefit Value [GRI 3-3]	
Mengabdikan kepada Umat, Menebar Keberkahan	53
Serving the Ummah, Spreading Blessings [GRI 2-22][SEOJK F.1]	
Roadmap Kemaslahatan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	54
Benefit Program Roadmap and Sustainable Development Goals	
Sinergi Kemaslahatan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	58
Synergy of Benefit Program and Sustainable Development Goals [GRI 3-3][SEOJK F.28]	
Dampak Ekonomi Tidak Langsung Program Kemaslahatan	101
Indirect Economic Impact of Benefit Program [GRI 3-3][SEOJK F.23]	
Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi	105
Monitoring and Evaluation Activities [GRI 3-3] [SEOJK F.27]	


04

Inisiatif Hijau BPKH

BPKH's Green Initiative

Komitmen Operasional Ramah Lingkungan	110
Commitment to Environmentally Friendly Operations	
Aksi Bagi Lingkungan dan Masyarakat	115
Actions for the Environment and Society [SEOJK F.25]	



05

Insan BPKH BPKH PERSONNEL

Ketenagakerjaan Employment [GRI 3-3]	122
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Occupational Health and Safety [GRI 3-3] [SEOJK F.21]	129



06

Mengelola Keberlanjutan BPKH Managing BPKH's Sustainability

Mengelola Keberlanjutan BPKH Managing BPKH's Sustainability	136
Organ Tata Kelola Bidang Kemaslahatan Governance Organs of the Benefit Program Field [GRI 2-9, 2-11] [SEOJK E.1]	141
Nilai dan Integritas Values and Integrity [GRI 2-23]	151
Pengelolaan Risiko Risk Management [GRI 2-24, 2-25] [SEOJK E.3]	161
Keterlibatan Pemangku Kepentingan Stakeholder Engagement [GRI 2-13, 2-29] [SEOJK E.4]	169
Tantangan Penerapan Aspek Keberlanjutan Challenges in Sustainability Aspects Implementation [SEOJK E.5]	171



07

Tentang Laporan Kemaslahatan BPKH About BPKH Kemaslahatan Report

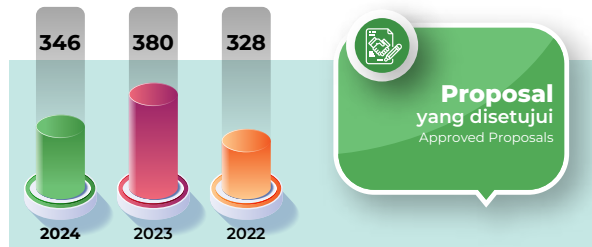
Profil Laporan Report Profile [GRI 2-2, 2-3]	174
Topik Material Material Topics	174

Lampiran Apendix

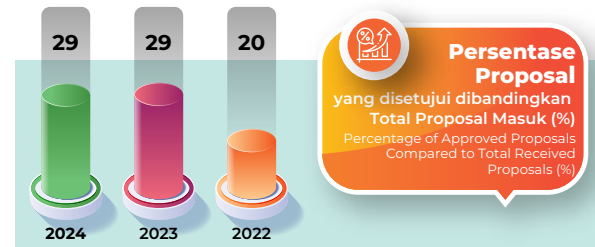
Indeks Konten GRI GRI Content Index	181
Daftar Pengungkapan Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (Seojk) Nomor 16/Seojk.04/2021 List of Disclosures According to Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) Number 16/SEOJK.04/2021 [SEOJK G.4]	188
Lembar Umpan Balik Feedback Form [SEOJK G.2]	191

Ikhtisar Penting Kemaslahatan Key Highlights of the Benefit Program

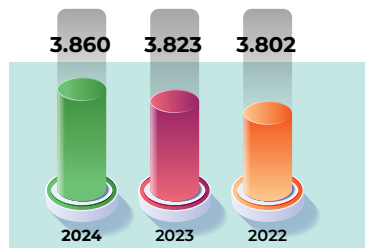
Aspek Ekonomi [SEOJK B.1]



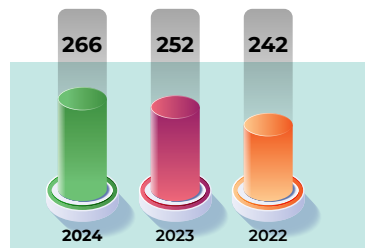
Economic Aspects [SEOJK B.1]



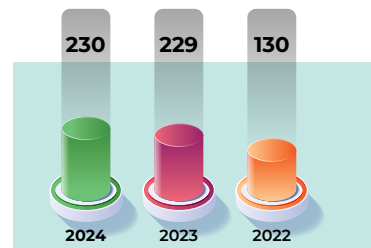
Nilai Pokok DAU DAU Initial Value



Perolehan Nilai Manfaat DAU Benefit Value Acquisition of DAU



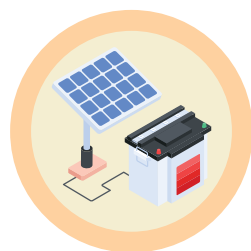
Nilai Manfaat Terdistribusi Distributed Return Value



Aspek Lingkungan [SEOJK B.2, F.3*]

Environmental Aspect [SEOJK B.2, F.3*]

Program Kemaslahatan di Bidang Lingkungan Tahun 2024 Benefit Programs in the Environmental Sector, 2024



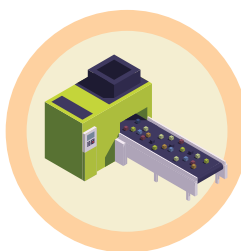
6 unit

Unit Panel Surya
Solar Panel Units



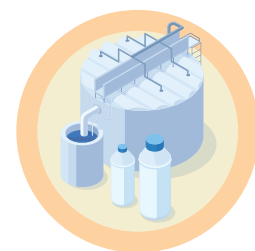
1.000 Bibit seeds

Bibit Mangrove
Mangrove Seedlings



1 unit

Mesin Pencacah Sampah Plastik
Plastic Waste Shredder Machine



5.000 liter

Akses Air Bersih
Clean Water Access



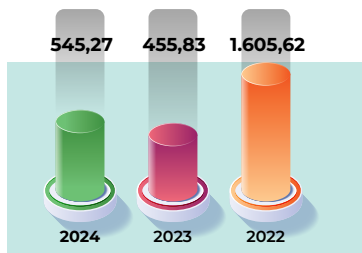
Inisiatif Ramah Lingkungan Tahun 2024 Environmental Friendly Initiatives in 2024 [SEOJK B.2, F.3*, F.26]

Pengurangan penggunaan plastik untuk distribusi hewan qurban dan paket sembako dengan menggunakan tas kain, besek, plastik ramah lingkungan, dan pembungkus berbahan dasar daun. Reducing plastic use for the distribution of sacrificial animals and basic food packages by using cloth bags, besek (woven bamboo baskets), environmentally friendly plastic, and leaf-based wrappings.

*Saat ini BPKH belum menetapkan target secara spesifik terkait kinerja program berkelanjutan, seperti penggunaan bahan bakar ramah lingkungan dan penanaman pohon. Oleh karena itu, data perbandingan antara target dan kinerja belum tersedia, namun data yang disajikan adalah realisasi program kemaslahatan di bidang lingkungan.

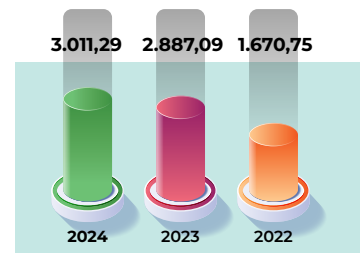
*Currently, BPKH has not set specific targets for sustainable programs, such as the use of environmentally friendly fuels and tree planting. Therefore, comparative data between targets and performance is not yet available, but the data presented is the realization of benefit programs in environmental.

Emisi GRK Cakupan 1 dan 2 yang Dihasilkan Scope 1 and 2 GHG Emissions Generated



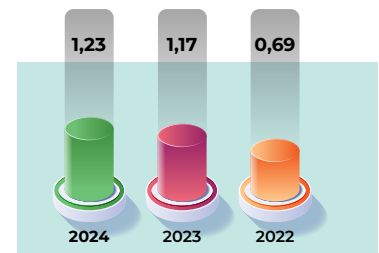
(Ton CO₂ e)

Penggunaan Energi Energy Consumption



(GJ)

Limbah Kertas yang Dihasilkan Generated Paper Waste

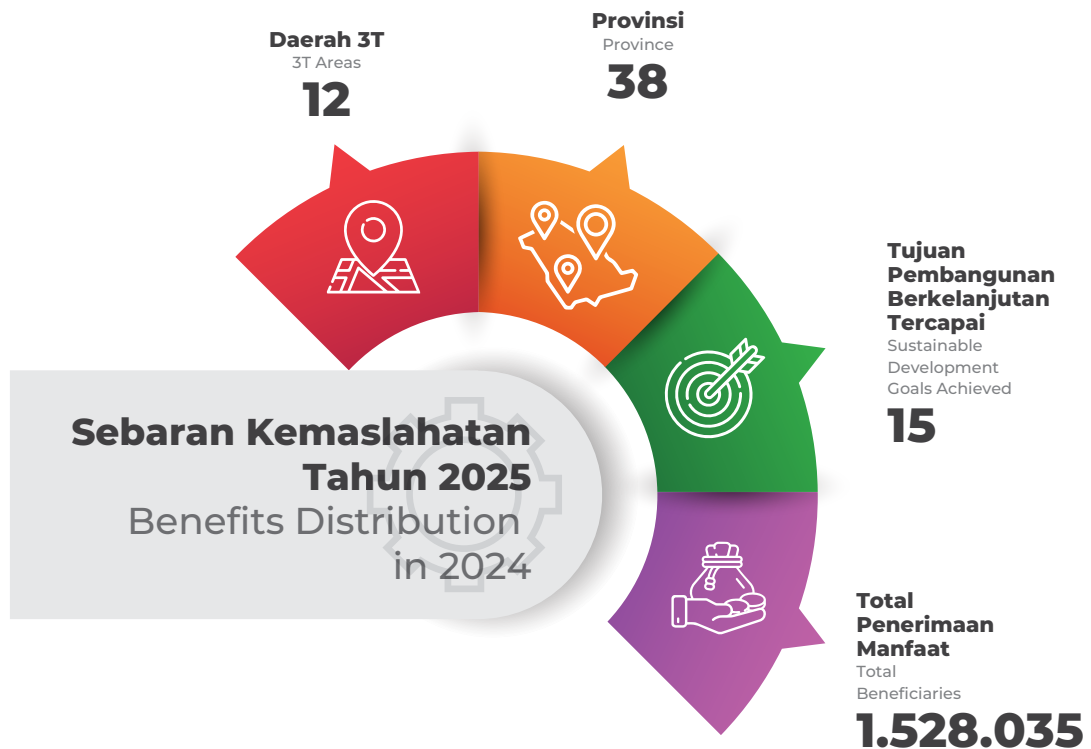


(Ton)*

*1 ton = 400 rim kertas / 1 ton = 400 reams paper

Aspek Sosial [SEOJK B.3, F.3]

Social Aspects [SEOJK B.3, F.3]



Pelatihan Tahun 2024
Training in 2024

Pelatihan Anti Korupsi Tahun 2024
Anti-Corruption Training in 2024



80 program
Program Pelatihan
Training Program



630 orang
people
Jumlah Peserta
Total Participant



13
Kepada Badan Tata Kelola
To Governance Body



146
Kepada Karyawan
To Employees

Aspek Tata Kelola [SEOJK B.3]

Social Governance [SEOJK B.3]

Komunikasi dan Kebijakan Prosedur Anti Korupsi Tahun 2024
Anti-Corruption Policies, Procedures, and Communications in 2024



30
Kepada Badan Tata Kelola
To Governance Body



119
Kepada Karyawan
To Employees



66
Kepada Mitra
To Partners

Sambutan Kepala Badan Pelaksana BPKH

Message from the Chief of BPKH's Executive Board

[GRI 2-22] [SEOJK D.1]



**Dr. Fadlul Imansyah,
S.E., M.M., CFP., AAK**
Kepala Badan Pelaksana BPKH
Chief of BPKH's Executive Board

ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga BPKH dapat kembali menyajikan *Laporan Kemaslahatan BPKH Tahun 2024*. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.

All praise and gratitude to Allah SWT for His abundant mercy and blessings, enabling BPKH to once again present the BPKH Welfare Report for 2024. May peace and blessings be upon our Prophet Muhammad SAW, his family, companions, and followers until the end of time.

Tahun 2024: Tonggak Penting Kemaslahatan

Tahun 2024 menjadi tonggak penting bagi BPKH dalam meningkatkan peran dan kontribusi untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat melalui Program Kemaslahatan. Berbagai program telah dijalankan, mencakup tujuh ruang lingkup utama: Pelayanan Ibadah Haji, Sarana dan Prasarana Ibadah, Kesehatan, Ekonomi Umat, Pendidikan dan Dakwah, Sosial Keagamaan, serta Tanggap Bencana. Setiap kegiatan dirancang secara strategis

2024: An Important Milestone for Benefit Program

The year 2024 marks an important milestone for BPKH in enhancing its role and contribution to deliver broader benefits to the community through the Benefit Programs. Various programs have been implemented, covering seven main areas: Hajj Pilgrimage Services, Religious Facilities and Infrastructure, Health, Ummah's Economy, Education and Da'wah, Social and Religious Affairs, and Disaster Response. Each activity is strategically designed

untuk menciptakan dampak nyata dan berkelanjutan, sekaligus memastikan pengelolaan dana haji dilakukan dengan amanah, transparan, dan sesuai prinsip syariah.

Pencapaian Utama Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, BPKH terus menunjukkan komitmennya dalam mengelola dana umat melalui penyelenggaraan Program Kemaslahatan. Beberapa pencapaian yang patut disampaikan antara lain:

- 1. Pelayanan Ibadah Haji** – Meningkatkan mutu layanan, sarana, dan dukungan bagi jamaah haji, seperti pembangunan Gedung Pusat Layanan Informasi dan Dokumentasi Haji dan Umrah Terpadu di Aceh.
- 2. Sarana dan Prasarana Ibadah** – Membantu meningkatkan kualitas ibadah dan memperkuat fungsi sosial masjid dan mushola sebagai pusat kegiatan umat dengan membangun dan merenovasi masjid dan mushola di berbagai daerah di Indonesia.
- 3. Kesehatan** – Membangun berbagai poliklinik di berbagai rumah sakit dan melakukan pengadaan alat kesehatan dan mobil ambulan untuk rumah sakit, klinik, puskesmas, dan yayasan di seluruh Indonesia.
- 4. Ekonomi Umat** – Dukungan bagi kelompok nelayan KUB Mina Sahabat melalui bantuan sarana tangkap ikan, yang menghasilkan nilai *Social Return on Investment* (SROI) mencapai Rp3,14 untuk setiap Rp1 yang diinvestasikan.
- 5. Pendidikan dan Dakwah** – Memberikan beasiswa untuk mendukung 1000 mahasiswa dan 1000 siswa berprestasi dari Seluruh Indonesia yang kurang mampu. Beasiswa ini memberikan kesempatan bagi para mahasiswa dan siswa untuk mengakses pendidikan tinggi tanpa hambatan finansial yang signifikan. BPKH juga membangun gedung untuk pondok pesantren dan sekolah di berbagai daerah.
- 6. Sosial Keagamaan** – Program Sedekah Qurban 1445 H berhasil menyalurkan lebih dari 1.500 hewan qurban ke berbagai pelosok Indonesia, sementara program literasi keagamaan dan sosial seperti Ekspresi BAZNAS serta Balik Kerja

to create tangible and sustainable impacts, while ensuring that hajj funds are managed in a trustworthy, transparent, and sharia-compliant manner.

Key Achievements in 2024

Throughout 2024, BPKH continued to demonstrate its commitment to managing community funds through the implementation of the Benefit Program. Some of the achievements worth mentioning include:

- 1. Hajj Pilgrimage Services** – Improving the quality of services, facilities, and support for Hajj pilgrims, such as the construction of the Integrated Hajj and Umrah Information and Documentation Service Center Building in Aceh.
- 2. Praying Facilities and Infrastructure** – Helping to improve the quality of worship and strengthen the social function of mosques and prayer rooms as centers of community activity by building and renovating mosques and prayer rooms in various regions in Indonesia.
- 3. Health** – Building various polyclinics in various hospitals and procuring medical equipment and ambulances for hospitals, clinics, community health centers, and foundations throughout Indonesia.
- 4. Economy of Ummah** – Support for the KUB Mina Sahabat fishing group through the provision of fishing equipment, which generated a Social Return on Investment (SROI) of Rp3.14 for every Rp1 invested.
- 5. Education and Da'wah** – Providing scholarships to support 1,000 university students and 1,000 high-achieving school students from all over Indonesia who are less fortunate. These scholarships provide opportunities for students to access higher education without significant financial barriers. BPKH also builds buildings for Islamic boarding schools and schools in various regions.
- 6. Dissemination of Religious Activities** – The 1445H Qurban Alms program successfully distributed more than 1,500 qurban animals to various parts of Indonesia, while religious and social literacy programs such as Ekspresi BAZNAS

Bareng BPKH turut memperkuat nilai-nilai ibadah, solidaritas sosial, dan nasionalisme. BPKH juga memberikan bantuan panel surya di tempat ibadah, penanaman 1.000 mangrove di pesisir Jakarta, serta pengadaan mesin pengolah sampah plastik di Yogyakarta mendukung energi bersih dan pelestarian lingkungan.

and Balik Kerja Bareng BPKH helped strengthen the values of worship, social solidarity, and nationalism. BPKH also provided solar panels for places of worship, planted 1,000 mangroves on the coast of Jakarta, and procured plastic waste processing machines in Yogyakarta to support clean energy and environmental preservation.

7. Tanggap Bencana – Bantuan bagi korban banjir lahar dingin di Agam, gempa bumi di Kabupaten Bandung, penyediaan mobil *rescue*, serta pembangunan Kampung Haji di Sukabumi sebagai simbol sinergi antara penanganan darurat dan pembangunan jangka panjang.

7. Disaster Response – Assistance for victims of cold lava floods in Agam, earthquakes in Bandung Regency, provision of rescue vehicles, and construction of Kampung Haji in Sukabumi as a symbol of synergy between emergency response and long-term development.

Tata Kelola dan Transisi *Roadmap*

Keberhasilan ini ditopang tata kelola yang baik. BPKH kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketujuh kalinya berturut-turut tanpa temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Seluruh program berpedoman pada *Roadmap* Kemaslahatan 2021–2025, yang pada tahun 2024 memasuki fase transisi menuju sasaran sekunder, dengan pergeseran fokus dari infrastruktur menuju pemberdayaan masyarakat dan penguatan dampak jangka panjang.

Visi ke Depan

Ke depan, BPKH berkomitmen memperkuat inovasi, meningkatkan tata kelola berbasis *Good Governance*, serta memanfaatkan teknologi digital untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji serta pelaksanaan program kemaslahatan.

Penutup

Atas nama seluruh jajaran BPKH, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh Mitra Kemaslahatan, masyarakat, serta insan BPKH yang telah berkontribusi dalam keberhasilan program tahun 2024. Semoga sinergi yang terjalin dapat terus membawa keberkahan, memberikan manfaat yang lebih luas, serta mewujudkan visi BPKH sebagai lembaga berkelas dunia dalam mengelola dana umat dan menciptakan kemaslahatan berkelanjutan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Governance and Roadmap Transition

This success is supported by good governance. BPKH has again received an Unqualified Opinion (WTP) for the seventh consecutive time with no findings from the Supreme Audit Agency (BPK). All programs are guided by the 2021–2025 Benefit Program Roadmap, which in 2024 is entering a transition phase towards secondary targets, with a shift in focus from infrastructure to community empowerment and strengthening long-term impact.

Future Vision

Looking ahead, BPKH remains committed to fostering innovation, enhancing good governance practices, and leveraging digital technology to ensure effective and accountable management of Hajj funds, as well as impactful implementation of Benefit Programs.

Closing

On behalf of the entire BPKH, I would like to express my appreciation and gratitude to all Benefit Program Partners, the community, and BPKH employees who have contributed to the success of the 2024 program. May the synergy that has been established continue to bring blessings, provide broader benefits, and realize BPKH's vision as a world-class institution in managing community funds and creating sustainable benefit.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Sambutan Anggota Badan Pelaksana Bidang Kemaslahatan, Sumber Daya Manusia dan Umum

Message from the Member of Executive Board for Benefit Program, Human Resources and General Affairs

[GRI 2-22] [SEOJK D.1]



Sulistyowati

Anggota Badan Pelaksana Bidang Kemaslahatan, SDM dan Umum

Member of Executive Board for Benefit Program, Human Resources and General Affairs

Para Pemangku Kepentingan Yang Dimuliakan Allah,
Honorable Stakeholders,

Tahun 2024 menjadi momentum penting bagi Bidang Kemaslahatan, SDM, dan Umum BPKH untuk terus memperkuat langkah pembenahan dan inovasi. Langkah itu dilakukan demi terwujudnya program kemaslahatan yang berkesinambungan sesuai visi dan misi BPKH dalam memberikan manfaat bagi umat Islam di Indonesia.

The year 2024 marked an important milestone for the Benefit Program, Human Resources, and General Affairs Division of BPKH in strengthening reforms and innovation. These measures are taken to create sustainable benefit programs that align with BPKH's vision and mission in providing benefits to Muslims in Indonesia.

Pencapaian Program

Alhamdulillah, atas kehendak Allah SWT dan dengan kerja keras serta kolaborasi seluruh pihak, Program Kemaslahatan BPKH tahun 2024 berhasil meraih berbagai pencapaian yang membanggakan. Pelaksanaan program kemaslahatan telah menjangkau seluruh 38 provinsi. Nilai manfaat

Program Achievements

Alhamdulillah, by the will of Allah SWT and through the hard work and collaboration of all parties, the 2024 BPKH Benefit Program has achieved several notable successes. The benefit program has been implemented in all 38 provinces. The total DAU benefit value distributed reached Rp230,266,843,829

DAU yang disalurkan mencapai Rp230.266.843.829 dengan total penerima manfaat 1.528.035 jiwa. Angka ini menunjukkan komitmen BPKH dalam mendistribusikan manfaat haji kepada umat Islam di berbagai wilayah Indonesia.

Pencapaian penyaluran DAU tersebut tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dalam pengajuan proposal program kepada BPKH. Secara total, BPKH menerima 1.212 proposal dari masyarakat dengan jumlah proposal yang disetujui dan sudah dilaksanakan dengan baik sebanyak 346 program.

Dalam bidang yang terkait dengan Peningkatan Sarana dan Prasarana Haji, BPKH melaksanakan beberapa program yang meliputi penyediaan 50 *speaker portable*; pembangunan Taman Miniatur Ka'bah; pembangunan Gedung Pusat Layanan Informasi dan Dokumentasi Haji dan Umrah Terpadu; hingga pengadaan perangkat kantor UPT Asrama Haji.

Dalam asnaf Pendidikan dan Dakwah, BPKH berhasil menyelenggarakan 115 inisiatif pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di berbagai wilayah di Indonesia, program inisiatif beasiswa untuk mendukung mahasiswa berprestasi yang kurang mampu. Beasiswa diterima oleh 4.045 orang yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa yang tersebar di 36 Provinsi. BPKH juga memberikan bantuan hibah kendaraan layanan dakwah sejumlah 20 unit kendaraan.

Dalam ruang lingkup Kesehatan, BPKH memberikan sumbangan 20 unit ambulan dan ambulan jenazah yang tersebar di 4 provinsi. Beberapa di antaranya adalah Pengadaan Mobil *Ambulance* Rumah Alifa Yayasan Manggala Putera Kabupaten Bandung, Penyediaan Mobil *Ambulance* Jenazah Masjid Nurul Huda Kabupaten Pesisir Selatan, Pengadaan Mobil Ambulan Klinik Utama PKU Muhammadiyah Merden Banjarnegara, dan Pengadaan Mobil *Ambulance* Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) Cisangu Kabupaten Lebak. BPKH juga memberikan bantuan alat kesehatan di Rumah Sakit Islam Surabaya dan Klinik Rumah Sehat Baznas Yogyakarta. Selain itu, BPKH mendukung pembangunan klinik gratis bagi dhuafa di Yayasan Adiguna Bakti Nusantara di Kabupaten Boyolali, serta pelaksanaan operasi katarak massal gratis yang diikuti 100 peserta di wilayah Jawa Timur.

with a total of 1,528,035 beneficiaries. This figure demonstrates BPKH's commitment to distributing hajj benefits to Muslims across Indonesia.

The achievement of DAU distribution was also supported by community participation in submitting program proposals to BPKH. In total, BPKH received 1,212 proposals from the community, with 346 programs approved and successfully implemented.

In the field related to the Improvement of Hajj Facilities and Infrastructure, BPKH implemented several programs, including the provision of 50 portable speakers; the construction of the Ka'bah Miniature Park; the construction of the Integrated Hajj and Umrah Information and Documentation Service Center Building; and the procurement of office equipment for the Hajj Dormitory Technical Implementation Unit (UPT).

In the field of Education and Da'wah, BPKH has successfully organized 115 initiatives to develop educational facilities and infrastructure across several regions of Indonesia, as well as a scholarship initiative program to support underprivileged students with outstanding academic achievements. Scholarships were awarded to 4,045 students across 36 provinces. BPKH also provided 20 vehicles as grants for da'wah services.

In the field of Health, BPKH donated 20 ambulances and hearse ambulances distributed across four provinces. Some of these include the procurement of ambulances for Rumah Alifa Yayasan Manggala Putera in Bandung Regency, the provision of a hearse ambulance for Nurul Huda Mosque in Pesisir Selatan Regency, the procurement of ambulances for PKU Muhammadiyah Merden Banjarnegara Main Clinic, and the procurement of ambulances for Village Health Posts (POSKESDES) in Cisangu, Lebak Regency. BPKH also provided medical equipment assistance to Surabaya Islamic Hospital and Baznas Yogyakarta Healthy Home Clinic. In addition, BPKH supported the construction of a free clinic for the poor at Adiguna Bakti Nusantara Foundation in Boyolali Regency, as well as the implementation of free mass cataract surgery for 100 participants in East Java.

Pada tahun 2024, untuk ruang lingkup sosial keagamaan, BPKH telah menyalurkan sebanyak 777 ekor sapi/kerbau, 777 ekor kambing/domba, 23.670 mushaf Al-Qur'an, 23.843 peralatan shalat, dan 42.464 paket sembako bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, BPKH mengadakan Program Balik Kerja Bareng BPKH yang dilaksanakan bersama 4 Mitra Kemaslahatan dengan diikuti 3.426 orang peserta.

Sepanjang tahun pelaporan, BPKH menyalurkan bantuan untuk pemberdayaan ekonomi umat sebesar Rp18.585.246.800. Beberapa program yang dilakukan berupa: program bantuan alat usaha, program bantuan modal usaha, program pemberdayaan peternak tangguh, dan program pelatihan UMKM. Program-program ini berhasil dinikmati oleh 39.593 orang penerima manfaat di berbagai daerah.

Asnaf Sarana dan Prasarana Ibadah dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas ibadah dan memperkuat fungsi sosial masjid dan mushola sebagai pusat kegiatan umat. Untuk program ini, sepanjang tahun 2024, BPKH telah menyalurkan nilai manfaat sebesar Rp23.502.911.100.

BPKH tak hanya memperluas wilayah sebaran manfaat, tapi juga cakupan program dengan menambahkan asnaf Tanggap Bencana. Penambahan asnaf ini bertujuan memberikan aksi yang cepat serta dukungan terhadap kondisi yang bersifat darurat pada wilayah bencana. Sepanjang tahun 2024, kegiatan Kemaslahatan dalam bidang tanggap bencana telah dilaksanakan pada tujuh wilayah terdampak.

Salah satu upaya membantu daerah yang terdampak bencana, BPKH membuat Kampung Haji yang diberikan kepada masyarakat penyintas bencana tanah bergerak Desa Kertaangsana Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Kampung Haji ini memiliki hunian tetap sebanyak 129 unit untuk 180 KK. Selain hunian, BPKH juga memberikan unsur keberlanjutan agar perekonomian di Kampung Haji tetap hidup dengan menyelenggarakan Program Semarak Ramadan dalam bentuk pelatihan dan bantuan modal untuk UKM. Diharapkan Kampung Haji yang diusung BPKH menjadi *icon* percontohan bagi pemerintah setempat dan masyarakat pada umumnya. Program ini menggandeng mitra kemaslahatan DT Peduli serta mitra kolaborasi Dulux - PT ICI Paints Indonesia.

In 2024, in the scope of social and religious activities, BPKH has distributed 777 cows/buffaloes, 777 goats/sheep, 23,670 copies of the Quran, 23,843 prayer equipment, and 42,464 food packages to people in need. In addition, BPKH organized the Balik Kerja Bareng BPKH (Return to Work with BPKH) Program, which was carried out in collaboration with 4 Benefit Program Partners and was attended by 3,426 participants.

Throughout the reporting year, BPKH distributed aid for ummah economic empowerment amounting to Rp18,585,246,800. Several programs were carried out, including: business equipment assistance program, business capital assistance program, resilient farmer empowerment program, and MSME training program. These programs benefited 39,593 recipients in various regions.

Asnaf Facilities and Infrastructure for Worship was implemented to improve the quality of worship and strengthen the social function of mosques and prayer rooms as centers of community activity. For this program, throughout 2024, BPKH distributed benefits worth Rp23,502,911,100.

BPKH has not only expanded the distribution of benefits, but also the scope of its programs by adding a Disaster Response asnaf. The addition of this asnaf aims to provide rapid action and support for emergency conditions in disaster areas. Throughout 2024, benefit program activities in the field of disaster response have been carried out in seven affected areas.

As part of its efforts to help disaster-affected areas, BPKH built Kampung Haji, which was given to the survivors of the landslide in Kertaangsana Village, Sukabumi Regency, West Java Province. Kampung Haji has 129 permanent housing units for 180 families. In addition to housing, BPKH also provides sustainability elements to keep the economy in Kampung Haji alive by organizing the Semarak Ramadan Program in the form of training and capital assistance for SMEs. Hopefully, Kampung Haji, which is supported by BPKH is expected to serve as a model for local governments and the community in general. This program is in collaboration with DT Peduli and Dulux - PT ICI Paints Indonesia.

Inisiatif Lingkungan

BPKH memahami bahwa perubahan iklim adalah salah satu tantangan utama yang dihadapi umat saat ini. Karena itu, BPKH melakukan langkah konkret melalui berbagai program aksi iklim yang ditujukan untuk menekan emisi gas rumah kaca sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat terhadap dampaknya.

Melalui program bantuan panel surya untuk masjid dan mushola, BPKH berhasil memberikan akses energi bersih kepada 1.800 penerima manfaat dengan estimasi produksi listrik mencapai 56 kWh per hari. Selain itu, dalam rangka memperingati hari jadi ke-7, BPKH juga melaksanakan penanaman 1.000 bibit mangrove yang melibatkan 200 pegawai. Kegiatan ini merupakan langkah awal BPKH dalam mendukung pencapaian SDG's nomor 13, sekaligus sebagai upaya meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.

Dalam menjalankan aktivitasnya, BPKH turut berkomitmen menghadirkan kantor yang ramah lingkungan. Upaya tersebut diwujudkan melalui penghematan air, pengelolaan sampah, digitalisasi untuk mengurangi penggunaan kertas, serta penerapan *co-working* dan *open space* yang lebih hemat energi. Dari langkah-langkah ini, BPKH berhasil menurunkan konsumsi energi hingga 3.068,53 GJ dan mengurangi emisi sebesar 545,27 ton CO₂. Meski demikian, perpindahan ke gedung baru dan pembukaan lantai tambahan membuat konsumsi listrik di gedung baru menjadi lebih besar, komitmen BPKH untuk menjaga keberlanjutan tetap menjadi prioritas.

Pengelolaan Mitra Kemaslahatan

Jumlah Mitra Kemaslahatan BPKH saat ini ada 12 mitra yang secara bersama-sama merealisasikan 346 program. Kami menyadari masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanaannya, namun melalui sinergi dan kolaborasi bersama Mitra Kemaslahatan, penyaluran nilai manfaat DAU dapat dijalankan secara lebih strategis dan efektif untuk meningkatkan kemaslahatan umat Islam.

Environmental Initiatives

BPKH recognizes that climate change is one of the main challenges facing humanity today. Therefore, BPKH is taking real action through several climate action programs that are meant to reduce greenhouse gas emissions while also strengthening community resilience to its impacts.

Through its solar panel assistance program for mosques and prayer rooms, BPKH successfully provided access to clean energy for 1,800 beneficiaries, with an estimated daily electricity production of 56 kWh. In addition to commemorating its 7th anniversary, BPKH also planted 1,000 mangrove seedlings with the participation of 200 employees. This activity is BPKH's first step in supporting the achievement of SDG 13, as well as an effort to increase community resilience to the impacts of climate change.

In carrying out its activities, BPKH is also committed to maintain environmentally friendly operations. These efforts are implemented through water conservation, waste management, and digitization to reduce paper usage, and the application of *co-working* and *open space* concepts that are more energy efficient. Through these measures, BPKH has succeeded in reducing energy consumption by 3,068.53 GJ and reducing emissions by 545.27 tons of CO₂. However, with the move to a new building and the opening of additional floors, electricity consumption in the new building has increased, and BPKH's commitment to sustainability remains a priority.

Management of Benefit Program Partners

There are currently 12 BPKH Benefit Program Partners who jointly implement 346 programs. We realize that there are still shortcomings in the implementation, but through collaboration with Benefit Program Partners, the distribution of DAU benefits can be carried out in a more strategic and effective manner to improve the welfare of Muslims.

Penerapan SDGs

Implementasi tujuh ruang lingkup kegiatan Kemaslahatan telah mengantarkan BPKH untuk turut berpartisipasi dalam meningkatkan dukungan terhadap SDGs dan menghadirkan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Pada tahun 2024, Program Kemaslahatan BPKH berkontribusi pada pencapaian 15 tujuan SDGs.

Dukungan tersebut mencakup tujuan SDGs yang luas seperti Penghapusan Kemiskinan; Pengentasan Kelaparan; Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik; Pendidikan Berkualitas; Akses Air Bersih dan Sanitasi; Energi Bersih yang Terjangkau; Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; Industri, Inovasi dan Infrastruktur; Berkurangnya Kesenjangan; Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan; Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; Aksi Iklim; Ekosistem Daratan; Perdamaian, Keadilan, dan Kekuatan Institusi; serta Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Tantangan dan Rencana Masa Depan

Di balik berbagai pencapaian pada tahun 2024, Program Kemaslahatan BPKH masih menghadapi tantangan penting, yaitu bagaimana memastikan manfaat dapat terdistribusi secara adil dan tepat sasaran, terutama di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Hal ini mendorong BPKH untuk terus memperkuat strategi, serta membangun sistem monitoring dan evaluasi yang menyeluruh, agar program kemaslahatan benar-benar sampai dan dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan.

Selain itu, aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana perlu senantiasa ditingkatkan. BPKH berkomitmen membangun sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel melalui pelibatan berbagai pihak serta penerapan mekanisme kontrol yang ketat. Upaya ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program-program kemaslahatan BPKH serta memastikan pengelolaan dana dilakukan secara bertanggung jawab.

BPKH juga senantiasa berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, baik di lingkungan internal maupun pada Mitra Kemaslahatan, guna

SDG Implementation

The implementation of the seven areas of benefit program activities has led BPKH to participate in increasing support for SDGs and bringing significant benefits to the community. In 2024, the BPKH Benefit Program contributed to the achievement of 15 SDGs.

This support covers broad SDG goals such as No Poverty Eradication; Zero Hunger Eradication; Good Health and Well-being; Quality Education; Access to Clean Water and Sanitation; Affordable and Clean Energy; Decent Work and Economic Growth; Industry, Innovation, and Infrastructure; Reduced Inequalities; Sustainable Cities and Communities; Responsible Consumption and Production; Climate Action; Life on Land; Peace, Justice, and Strong Institutions; and Partnerships for the Goals.

Challenges and Future Plans

Despite its achievements in 2024, the BPKH Benefit Program still faced important challenges, including how to ensure that benefits are distributed fairly and accurately, especially in 3T (Frontier, Outermost, and Disadvantaged) areas. This prompted BPKH to strengthen its strategies and develop a more comprehensive monitoring and evaluation system, ensuring that benefit programs truly reached and were felt by the communities most in need.

In addition, transparency and accountability in fund management need to be continuously improved. BPKH is committed to developing a transparent and accountable financial management system through the involvement of multiple parties and the implementation of strict control mechanisms. These efforts are important to maintain public trust in BPKH benefit programs and ensure that funds are managed responsibly.

BPKH also continuously strives to improve human resource capacity, both internally and among its Benefit Program Partners, in order to strengthen

memperkuat kualitas program serta menjamin keberhasilannya. Peningkatan kapasitas ini dilakukan melalui program pelatihan, pendampingan, dan transfer pengetahuan, sehingga pelaksanaan program kemaslahatan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Kami meyakini bahwa dengan strategi yang tepat, komitmen yang kuat, serta dukungan dari seluruh pihak, hasil *monitoring* menunjukkan program berjalan dengan baik tanpa adanya temuan dari auditor eksternal (*No Findings/No Defect*). Dengan demikian, Program Kemaslahatan BPKH dapat mencapai tujuan untuk memberikan manfaat yang merata, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi umat Islam di seluruh Indonesia. BPKH juga mengajak semua pihak untuk terus bersinergi dalam membangun program kemaslahatan yang lebih kuat dan efektif demi terwujudnya kemandirian ekonomi umat.

Penutup

Pencapaian BPKH pada tahun 2024 tidak terlepas dari kerja keras dan sinergi berbagai pihak. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh Tim Kemaslahatan, Mitra Kemaslahatan, masyarakat, serta seluruh pihak yang telah berperan dalam mendukung keberhasilan Program Kemaslahatan.

Walaupun berbagai pencapaian telah diraih, BPKH menyadari masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, BPKH berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja serta menuntaskan target-target yang tercantum dalam *Roadmap* Program Kemaslahatan 2021–2025.

Dengan sinergi dan kerja sama semua pihak, BPKH optimis dapat menghadirkan masa depan yang lebih gemilang bagi umat Islam di Indonesia. Mari bergandeng tangan untuk menjadikan BPKH semakin profesional, transparan, dan akuntabel, serta terus berperan aktif dalam mewujudkan kemaslahatan umat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

program quality and ensure its success. This capacity building is carried out through training programs, mentoring, and knowledge transfer, so that the implementation of benefit programs can run more effectively and efficiently.

We believe that with the right strategy, strong commitment, and support from all parties, the monitoring results have shown that the program has been running well without any findings from external auditors (*No Findings/No Defect*). Thus, The BPKH Benefit Program can achieve its goal of providing equitable, targeted, and sustainable benefits for Muslims throughout Indonesia. BPKH also invites all parties to continue working together in building a stronger and more effective benefit program in order to achieve economic independence for the community.

Closing

The achievements of BPKH in 2024 would not have been possible without the hard work of many parties. Therefore, we would like to express our appreciation and gratitude to the entire Benefit Program Team, Benefit Program Partners, the community, and all parties who have played a role in supporting the success of the Benefit Program.

Although various achievements have been made, BPKH realizes that there are challenges that need to be overcome. Therefore, BPKH is committed to continuing to improve its performance and completing the targets outlined in the Roadmap for the 2021–2025 Benefit Program Roadmap.

With the cooperation of all parties, BPKH is optimistic about bringing a brighter future for Muslims in Indonesia. Let's join hands to make BPKH more professional, transparent, and accountable, and continue to play an active role in realizing the welfare of the people.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Penghargaan dan Sertifikasi 2024

Awards and Certifications in 2024

Penghargaan Awards



Deskripsi Penghargaan Description of Award	: SPS Serikat Perusahaan Pers (SPS) AWARDS 2024
Tanggal Perolehan Date of Achievement	: 30 April 2024 April 30, 2024
Bidang Penghargaan Field of Award	: Indonesia Digital Media Awards (IDMA) 2024
Lembaga (yang memberikan) Institution (giving the award)	: Serikat Perusahaan Pers (SPS)
Skala Scale	: Nasional National



Deskripsi Penghargaan Description of Award	: 7 Most Popular Brand of the Year 2024
Tanggal Perolehan Date of Achievement	: 3 September 2024 September 3, 2024
Bidang Penghargaan Field of Award	: Most Popular Brand of the Year 2024
Lembaga (yang memberikan) Institution (giving the award)	: Jawa Pos 7 Most Popular Brand of the Year 2024
Skala Scale	: Nasional National



Deskripsi Penghargaan Description of Award	: Anugerah ESG Republika 2024
Tanggal Perolehan Date of Achievement	: 19 September 2024 September 19, 2024
Bidang Penghargaan Field of Award	: Environmental, Social, and Governance (ESG)
Lembaga (yang memberikan) Institution (giving the award)	: Republika
Skala Scale	: Nasional National

Deskripsi Penghargaan

Description of Award

: Gold & Platinum Winner Integrated Report Competition LACP

Tanggal Perolehan

Date of Achievement

: 4 Juli 2024
July 4, 2024

Bidang Penghargaan

Field of Award

: • Platinum Award for AR Report Gold Winner
• Top 100 reports worldwide
• Technical Achievement Award

Lembaga (yang memberikan)

Institution (giving the award)

: League of American Competition Communications Profesionasl (LACP)

Skala

Scale

: Internasional
International



Deskripsi Penghargaan

Description of Award

: Perhumas PR Excellence Awards 2024
(PREA) World Public Relation Forum 2024
Kategori Digital PR Program

Tanggal Perolehan

Date of Achievement

: 22 November 2024
November 22, 2024

Bidang Penghargaan

Field of Award

: Digital PR Program

Lembaga (yang memberikan)

Institution (giving the award)

: Perhumas Indonesia

Skala

Scale

: Nasional
National



Deskripsi Penghargaan

Description of Award

: Baznas Award 2024 – Badan Pendukung
Pengumpulan Zakat Terbaik
Baznas Award 2024 – Best Zakat Collection
Support Institution

Tanggal Perolehan

Date of Achievement

: 29 Februari 2024
Februari 29, 2024

Bidang Penghargaan

Field of Award

: Badan Pendukung Pengumpulan Zakat Terbaik
Best Zakat Collection Support Institution

Lembaga (yang memberikan)

Institution (giving the award)

: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Skala

Scale

: Nasional
National



Deskripsi Penghargaan Description of Award	: BPKH raih Penghargaan <i>Silver Award</i> dari <i>Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT)</i> BPKH received Silver Award from Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT)
Tanggal Perolehan Date of Achievement	: 22 November 2024 November 22, 2024
Bidang Penghargaan Field of Award	: Keberlanjutan dan penerapan <i>Environmental Social and Governance (ESG)</i> Sustainability and Environmental Social and Governance (ESG) Implementation
Lembaga (yang memberikan) Institution (giving the award)	: Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT)
Skala Scale	: Internasional International



Deskripsi Penghargaan Description of Award	: Realisasikan komitmen keberlanjutan, BPKH raih 2 penghargaan dalam <i>Corporate Sustainability Award 2024 (ICSA 2024)</i> Realizing its commitment to sustainability, BPKH received two awards at the 2024 Corporate Sustainability Awards (ICSA 2024)
Tanggal Perolehan Date of Achievement	: 25 November 2024 November 25, 2024
Bidang Penghargaan Field of Award	: Outstanding senior leaders in sustainability Outstanding leaders in sustainability
Lembaga (yang memberikan) Institution (giving the award)	: ICSA
Skala Scale	: Internasional International

Sertifikasi Certifications

SNI ISO 37001:2016 (Anti-Bribery Management Systems)



Masa Berlaku
Validity Period : 25 Oktober 2021 - 4 November 2023
October 25, 2021-November 4, 2023

Lingkup Sertifikasi
Scope of Certification : *Haji Fund Management (fund deposits, investments, deposit placement and corporate social responsibility) and Supporting Activities for Human Capital, Finance, Procurement and General Affairs, Legal, Compliance, and Risk Management*

Lembaga (yang memberikan)
Institution (giving the certification)



SNI ISO 9001:2015: Quality Management System



Masa Berlaku
Validity Period : 16 November 2021 - 15 November 2024
November 16, 2021 – November 15, 2024

Lingkup Sertifikasi
Scope of Certification : *Auction for Deposit Placement, Investment in Marketable Securities, Corporate Social Responsibility Management (Kemaslahatan), Regular Deposit Refund and Internal Audit Process.*

Lembaga (yang memberikan)
Institution (giving the certification)



Peristiwa Penting 2024 Event Highlights 2024



Januari | January

Musim haji 1445 H / 2024 M merupakan musim dengan kuota haji terbesar sepanjang sejarah.
The 1445 AH / 2024 AD Hajj season is the season with the largest Hajj quota in history to date.



Februari | February

Klinong-Klinong Numpak Andong, Cara BPKH Branding Andong Sekaligus Edukasi Menabung Haji serta membantu UMKM andong di Yogyakarta.
Klinong-Klinong Numpak Andong, BPKH's campaign to promote Hajj savings and support local Andong operators in Yogyakarta.



Februari | February

Berdedikasi dalam Mendukung Pengumpulan Zakat, BPKH Terima Baznas Award 2024.
Dedicated to supporting zakat collection, BPKH received the 2024 Baznas Award.



Maret | March

Balik Kerja bareng BPKH 2024 tahun ke 2 program balik kerja sukses pulangkan ribuan pemudik kembali ke rantauan.
Balik Kerja BPKH 2024, the second year of the back to work program, successfully facilitated the return of thousands of travelers to their hometowns.



Maret | March

Program Ramadan BPKH menjangkau ke seluruh Indonesia.
The BPKH Ramadan program reached all of Indonesia.



Juni | Juni

Pada 2024 pertama kali kebijakan murur diterapkan terencana dan sistematis.
In 2024 marked the first planned and systematic implementation of the murur policy.



Juni | Juni



Sedekah Qurban 1445 H / 2024 M. Melalui Program Kemaslahatan Sedekah Qurban BPKH 1445 H / 2024 M, tahun ini menyalurkan sebanyak 777 ekor sapi dan 777 ekor domba / kambing.

Qurban Charity 1445 H / 2024 M. Through the BPKH Qurban Charity Benefit Program 1445 H / 2024 M, this year distributed 777 cows and 777 sheep/goats.



Juli | July



BPKH kembali raih opini WTP 6 tahun berturut-turut dari BPK RI, Enam Kali Raih WTP, BPKH Konsisten Kelola Keuangan Haji Secara Akuntabel

BPKH has again received an unqualified opinion from the Indonesian Audit Board (BPK RI) for the sixth consecutive year. Having received an unqualified opinion six times, BPKH consistently manages Hajj finances in an accountable manner.



Juli | July



Launching program sosialisasi, literasi dan pengembangan SDM Bidang ekonomi syariah kerjasama MUI, BPKH dan Baznas

Launched a literacy, outreach, and human capital development program in Islamic economics, in collaboration with MUI and Baznas.



Agustus | August



BPKH Sambut Kolaborasi Strategis Bank Muamalat dan Muhammadiyah Perluas Kemaslahatan Umat.

BPKH Welcomes Strategic Collaboration between Bank Muamalat and Muhammadiyah to Expand Community Welfare.



Agustus | August



BPKH Resmikan Kampung Haji, Wujudkan Hunian Layak bagi Penyintas Bencana di Sukabumi

BPKH Inaugurates Kampung Haji, Realizing Decent Housing for Disaster Survivors in Sukabumi



Oktober | October



BPKH Luncurkan Program Beasiswa Haji di ISEF 2024, Dukung Generasi Muda Berprestasi

BPKH Launches Hajj Scholarship Program at ISEF 2024, Supporting outstanding youth.



November | November



BPKH raih penghargaan *silver award* dari *Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT)*.
BPKH wins silver award from Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT).



November | November



Realisasikan komitmen keberlanjutan BPKH raih 2 penghargaan dalam *Corporate Sustainability Award 2024 (ICSA)*.
Realizing its commitment to sustainability, BPKH wins 2 awards at the 2024 Corporate Sustainability Award (ICSA).



Desember | December



Ikut lestarikan lingkungan BPKH tanam 1000 mangrove di pesisir Jakarta , dalam rangka peringatan milad BPKH ke 7.
Participating in environmental conservation, BPKH planted 1,000 mangrove seedlings on the coast of Jakarta to commemorate BPKH's 7th anniversary.



Desember | December



BPKH Kemaslahatan Award Tahun 2024 bersama Seluruh Mitra Kemaslahatan.
BPKH Kemaslahatan Award 2024 with All Benefit Program Partners.



Desember | December



Peresmian Masjid Al-Munawar Kementerian Agama dengan Menteri Agama Republik Indonesia.
Inauguration of the Ministry of Religious Affairs' Al-Munawar Mosque with the Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia.





Jejak Langkah Milestones



2024

- Mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 6 tahun berturut-turut.
- Serah Terima Kampung "Haji" untuk korban bencana tanah bergerak di Sukabumi sebanyak 129 rumah.
- Received an Unqualified Opinion (WTP) from the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) for six consecutive years.
- Handover of the Kampung "Haji" for victims of landslides in Sukabumi with a total of 129 houses.

2023

- Peletakan Batu Pertama Kampung Kampung "Haji" untuk korban bencana tanah bergerak di Sukabumi.
- Mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 6 tahun berturut-turut.
- Mendirikan BPKH Limited untuk memaksimalkan ekosistem ekonomi haji dan umroh di Arab Saudi.
- Berkontribusi dalam pelestarian lingkungan dengan melakukan penanaman pohon mangrove.
- Mengadakan Program Balik Kerja Bareng BPKH yang diikuti 2.650 orang pemudik.
- Menyediakan setengah dari total kebutuhan Souvenir Ibadah Haji melalui BPS BPIH.
- Groundbreaking ceremony for Kampung Kampung "Haji" for victims of landslides in Sukabumi.
- Received an Unqualified Opinion (WTP) from the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) 6 years in a row.
- Established BPKH Limited to maximize the economic ecosystem of Hajj and Umrah in Saudi Arabia.
- Contributed to environmental conservation by planting mangrove trees.
- Organized the Balik Kerja Bareng BPKH Program, which was attended by 2,650 pilgrims.
- Provided half of the total Hajj Souvenir needs through BPS BPIH.



PROFIL BPKH

Profile of BPKH



Sekilas BPKH

BPKH at A Glance [GRI 2-1]



Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) merupakan lembaga publik yang bersifat independen dan memiliki mandat strategis dalam mengelola keuangan haji secara profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah. Cakupan pengelolannya mencakup seluruh aspek keuangan haji, mulai dari setoran awal calon jemaah hingga optimalisasi nilai manfaat melalui aktivitas investasi. Seluruh proses ini diarahkan untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas, efisien, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi umat Islam Indonesia, baik dari sisi pelayanan maupun kebermanfaatan jangka panjang.

Pada awalnya, pengelolaan dana haji menjadi tanggung jawab langsung Kementerian Agama. Namun, dengan semakin kompleksnya tugas dan meningkatnya volume dana, diperlukan entitas tersendiri yang memiliki fokus khusus dalam

The Hajj Fund Management Agency (BPKH) is an independent public institution with a strategic mandate to manage Hajj funds professionally, transparently, accountably, and in accordance with sharia principles. Its scope of management covers all aspects of hajj funds, from the initial deposits of prospective pilgrims to the optimization of benefits through investment activities. All of these processes aim to ensure the quality and efficiency of the hajj pilgrimage and to provide maximum benefits for Indonesian Muslims, both in terms of service and long-term benefits.

Initially, the management of Hajj funds was the direct responsibility of the Ministry of Religious Affairs. However, with the increasing complexity of tasks and the growing volume of funds, a separate entity with a specific focus on Hajj funds

pengelolaan keuangan haji. Maka, lahirlah Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) sebagai inisiatif awal. Selanjutnya, seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, BP DAU berevolusi menjadi BPKH dengan mandat yang lebih luas, termasuk kewenangan untuk mengelola dan menginvestasikan Dana Abadi Umat (DAU) dalam berbagai instrumen syariah seperti produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, serta instrumen keuangan lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Komitmen BPKH terhadap keberlanjutan tercermin dari pengelolaan DAU dan pelaksanaan Program Kemaslahatan yang menyasar pemberdayaan umat melalui pendekatan berbasis nilai dan manfaat. Di samping itu, sebagai bentuk dukungan terhadap keuangan berkelanjutan nasional, BPKH turut berpartisipasi dalam pembelian Sukuk Berbasis Proyek Ramah Lingkungan (SBSN PBSG-001), sebuah instrumen hijau yang mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Untuk memastikan peran dan tanggung jawabnya berjalan secara terarah dan progresif, BPKH menetapkan strategi pengembangan dalam empat tahapan utama:

1. Tahap menyiapkan fondasi kelembagaan.
2. Tahap membangun kepercayaan dan kredibilitas kelembagaan BPKH.
3. Tahap mengembangkan peran strategis dan tanggung jawab BPKH untuk kemaslahatan umat.
4. Tahap mengembangkan pengelolaan dan pelayanan haji terpadu.

management was needed. Thus, the Ummah Endowment Fund Management Agency (BP DAU) was established as an initial initiative. Subsequently, with the enactment of Law No. 34 of 2014 on Hajj Fund Management, BP DAU evolved into BPKH with a broader mandate, including the authority to manage and invest the Ummah Trust Fund (DAU) in various sharia-compliant instruments such as banking products, securities, gold, direct investments, and other financial instruments in accordance with sharia principles.

BPKH's commitment to sustainability is reflected in the management of the DAU and the implementation of the Benefit Program, which aims to empower the community through a value- and benefit-based approach. In addition, as a form of support for national sustainable finance, BPKH participated in the purchase of Environmentally Friendly Project-Based Sukuk (SBSN PBSG-001), a green instrument that supports sustainable development in Indonesia.

To ensure that its roles and responsibilities are carried out in a focused and progressive manner, BPKH has established a development strategy in four main phases:

1. The phase of preparing the institutional foundation.
2. The phase of building trust and institutional credibility of BPKH.
3. The phase of developing the strategic role and responsibilities of BPKH for the welfare of the ummah.
4. The phase of developing integrated Hajj management and services.

Informasi Tentang BPKH

Information on BPKH [GRI 2-1, 2-2, 2-6][SEOJK C.2, C.3, C.4]

Nama Resmi Legal Name	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Hajj Fund Management Agency (BPKH)
Aktivitas dan Layanan Activities and Services	BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi kegiatan perencanaan, penerimaan, pengembangan, pengeluaran, pengawasan dan pertanggungjawaban. BPKH is entrusted with managing Hajj funds, which includes planning, receipt, development, expenditure, monitoring, and accountability.
Sifat Organisasi Nature of Organization	Lembaga hukum publik independen yang bertanggung jawab langsung pada Presiden. Didirikan berdasarkan UU No. 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. An independent public legal entity that is directly responsible to the President. Established based on Law No. 34/2014 on Hajj Financial Management.
Sektor Operasional Operational Sector	Pembiayaan Syariah Sharia Funding
Skala Organisasi (Per 31 Desember 2024) Scale of Organization (As of December 31, 2024)	
Jumlah Dana Abadi Umat (DAU) Total Ummah Trust Fund (DAU)	Rp3.860 Miliar I Billion
Wilayah Operasional Operational Areas	Mencakup seluruh Indonesia yang dikontrol langsung oleh BPKH, sehingga tidak terdapat pembagian wilayah operasional. Covering all of Indonesia and directly managed by BPKH, there are no operational regional divisions.
Total Seluruh Pegawai BPKH Total of BPKH's Employees	228 orang I people
Cakupan Layanan Services Coverage	Seluruh Masyarakat Muslim di Indonesia All Muslims in Indonesia
Entitas Anak Subsidiaries	- BPKH Limited (kepemilikan saham 100,00% / share ownership of 100.00%) - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (kepemilikan saham 82,69% / share ownership of 82.69%)
Dasar Hukum Legal Basis	Dasar hukum yang terkait dengan pembentukan bidang Kemaslahatan: - UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji, - Peraturan Presiden Nomor 110 tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji. Legal basis related to the establishment of the Benefit Program Field: - Law No. 34 of 2014 on Hajj Fund Management. - Government Regulation Number 5 of 2018 on Implementation of Law Number 34 of 2014 on Hajj Fund Management Agency. - Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 110 of 2017 on Hajj Fund Management Agency.
Alamat Kantor Pusat Head Office Address	Muamalat Tower Lt./floor 15, Jl. Prof. Dr. Satrio No.Kav. 18, Jakarta Selatan/South Jakarta 12940
Call Center	(021) 83793001
Layanan via WhasApp (WA) Services via WhatsApp (WA)	+62 821 9090 6002 (WhatsApp only)
E-mail	info@bpkh.go.id
Website	www.bpkh.go.id

Visi, Misi, dan Nilai BPKH

BPKH Vision, Mission, and Values [GRI 2-23][SEOJK C.1]

VISI | Vision

Menjadi lembaga pengelola keuangan terpercaya yang memberikan nilai manfaat optimal bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat.

To become the trusted financial management agency that delivers optimal return for hajj pilgrims and contribute to the welfare of ummah.



MISI | Mission

1. Membangun kepercayaan melalui pengelolaan sistem keuangan yang transparan dan modern.
 2. Meningkatkan efisiensi dan rasionalitas BPIH melalui kerjasama strategis.
 3. Melakukan investasi pada imbal hasil yang optimal dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian dan profesionalitas.
 4. Menciptakan tata kelola dan sistem kerja yang komprehensif dan akuntabel dengan mengembangkan SDM yang berintegritas dan profesional.
 5. Memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.
1. Cultivate trust through transparent and modern financial management systems.
 2. Increase the efficiency and rationality of the Hajj Administration Cost (BPIH) through strategic partnerships.
 3. Pursue optimal returns on investments in accordance with sharia principles while prioritizing security, prudence, and professionalism.
 4. Establish comprehensive and accountable governance and operational systems by developing a workforce that is professional and possesses high integrity.
 5. Provide welfare to increase the well-being of the Muslim community.



NILAI INTI BPKH | Core Values of BPKH

1. *Integrity*
2. *Quality*
3. *Respect*
4. *Accountability*



Kode Etik BPKH | BPKH Code of Ethics



- | | |
|--|---------------------------------------|
| Penegakan Integritas | • Upholding Integrity |
| Menjaga Kerahasiaan | • Maintaining Confidentiality |
| Larangan Penyalahgunaan Jabatan | • Prohibiting Abuse of Power |
| Kepatuhan Penggunaan Dokumen | • Complying with the Use of Documents |
| Larangan Benturan Kepentingan | • Prohibiting Conflict of Interest |

Bidang Kemaslahatan BPKH

BPKH Benefit Program Field [GRI 2-22][SEOJK A.1]

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, khususnya Pasal 3 huruf c, salah satu tujuan utama dari pengelolaan keuangan haji adalah memberikan nilai manfaat yang optimal untuk kemaslahatan umat Islam. Sebagai tindak lanjut atas amanah tersebut, Pemerintah menetapkan pembentukan struktur khusus di bawah BPKH melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji.

Dalam kerangka tersebut, Bidang Kemaslahatan hadir sebagai instrumen strategis BPKH yang bertanggung jawab atas pemanfaatan nilai manfaat DAU untuk kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan umat. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa dana yang dikelola BPKH tidak hanya mendukung penyelenggaraan ibadah haji, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan sosial keagamaan secara berkelanjutan.

Penyaluran nilai manfaat DAU oleh Bidang Kemaslahatan dilakukan melalui kolaborasi bersama Mitra Kemaslahatan, baik dalam bentuk bantuan langsung seperti pembangunan fasilitas keagamaan dan pendidikan, maupun bantuan tidak langsung seperti pelatihan, penguatan kapasitas kelembagaan Islam, dan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan pendekatan tersebut, BPKH menegaskan komitmennya untuk menghadirkan dampak nyata bagi umat Islam di berbagai sektor kehidupan.

As mandated by Law No. 34 of 2014 on Hajj Fund Management on Hajj Fund Management, specifically Article 3 letter c, one of the main objectives of hajj fund management is to provide optimal benefits for the welfare of Muslims. In accordance with this mandate, the Government established a special structure under BPKH through Government Regulation No. 5 of 2018 on the Hajj Fund Management Agency.

Within this framework, the Benefit Program Field serves as a strategic instrument of the BPKH responsible for utilizing the return of DAU for activities that directly impact the improvement of the prosperity of Muslims. Its primary objective is to ensure that the funds managed by BPKH are not only support the administration of the Hajj pilgrimage, but also contribute to sustainable social and religious development.

The DAU return distribution by the Benefit Program Fieldwork is carried out through collaboration with Benefit Partners, both in the form of direct assistance, such as the construction of religious and educational facilities, and indirect assistance such as training, strengthening the institutional capacity of Islamic organizations, and empowering the economy of the Muslim community. With this approach, BPKH reaffirms its commitment to delivering tangible impacts for Muslims in various sectors of life.



Sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan visi menjadi penyelenggara Program Kemaslahatan bereputasi internasional, BPKH telah menyusun rencana strategi Program Kemaslahatan dengan jangka 5 tahun (2021- 2025). Rencana strategis ini dirancang dalam tiga tahap yang tersusun secara sistematis, dengan setiap tahap memiliki target kinerja yang jelas dan strategi pelaksanaan yang terperinci.

BPKH has developed a five-year Strategic Plan for the Benefit Program (2021–2025) as part of its commitment to realizing its vision of becoming a globally recognized Benefit Program organizer. We designed this strategic plan in three systematically organized phases, with each phase having clear performance targets and detailed implementation strategies.

Pencapaian Rencana Strategi Program Kemaslahatan

Achievement of the Strategic Plan of Benefit Program

Aspek Kuantitatif Kinerja Utama Quantitative Aspects of Key Performance	Tahap 1 Penguatan Infrastruktur Kemaslahatan Phase 1 Infrastructure Strengthening	Tahap 2 Optimasi Kemaslahatan Phase 2 Welfare Optimization		Tahap 3 Integrasi Ekosistem Phase 3 Ecosystem Integration	
	2021	2022	2023	2024	2025
Pencapaian kegiatan Kemaslahatan untuk masing masing ruang lingkup Achievement of Benefit Program activities for each scope	75%	90%	94%	99,32%	Program dilanjutkan di tahun 2025 Program will be continued in 2025
Dukungan terhadap program SDGs sesuai kebijakan Kemaslahatan yang ditetapkan Support for SDGs programs in accordance with established Benefit Program policies	10 Program SDGs I SDGs Programs	12 Program SDGs I SDGs Programs	14 Program SDGs I SDGs Programs	15 Program SDGs I SDGs Programs	
Branding kelembagaan yang diukur dari hasil survei kepuasan penerima manfaat (skala Likert 1-4) Institutional branding as measured by the results of beneficiary satisfaction surveys (Likert scale 1-4)	>3,00	>3,50	>3,50	>3,14	
Cakupan jangkauan kewilayahan kegiatan Kemaslahatan hingga daerah 3T Regional coverage of Benefit Program activities to 3T areas	34 Provinsi I Provinces*	34 Provinsi I Provinces*	37 Provinsi dan 25% Kabupaten/ Kota 37 and 25% Regencies/ Cities	38 Provinsi dan 10% Kabupaten/ Kota 38 Provinces and 10% Regencies/ Cities	
Jumlah Mitra Kemaslahatan aktif Total Benefit Program Partners	8 Mitra I Partners	12 Mitra I Partners	8 Mitra I Partners	12 Mitra I Partners	

Catatan/Notes:

*Terdapat perbedaan perhitungan persentase Kabupaten 3T yang dijangkau oleh Program Kemaslahatan pada tahun 2022 dan 2021, sehingga BPKH memutuskan untuk tidak menampilkan data persentase pada tahun tersebut. [\[GRI 2-4\]](#)

*There is a difference in the calculation of the percentage of 3T districts reached by the Kemaslahatan Program in 2022 and 2021, so BPKH decided not to display the percentage data for that year. [\[GRI 2-4\]](#)

Distribusi Nilai Manfaat Dana Abadi Umat (DAU)

Distribution of Return Value of the Ummah Endowment Fund (DAU) [GRI 3-3]

Dalam konteks pelaporan keberlanjutan, peran strategis DAU menjadi salah satu aspek penting yang mencerminkan komitmen BPKH terhadap praktik keuangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. DAU merupakan dana yang terbentuk sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, yang bersumber dari hasil pengembangan dana setoran awal jemaah haji, sisa anggaran operasional penyelenggaraan ibadah haji, dan sumber halal lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Undang-undang tersebut secara tegas menetapkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan DAU merupakan bagian dari tanggung jawab BPKH. Dalam pelaksanaannya, nilai manfaat yang diperoleh dari pengelolaan DAU diarahkan untuk mendanai berbagai kegiatan yang mendukung kemaslahatan umat Islam, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan lembaga keagamaan dan sosial.

Sebagai bentuk operasionalisasi kebijakan tersebut, BPKH mengeluarkan Peraturan BPKH Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat DAU. Regulasi ini menjadi pedoman utama dalam menentukan arah dan skala kegiatan kemaslahatan yang didanai dari nilai manfaat DAU, termasuk pengalokasian dana, kriteria pemilihan program prioritas, serta mekanisme evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.

Guna memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan DAU dalam jangka panjang, BPKH menerapkan strategi investasi yang konservatif dan berbasis syariah, dengan menempatkan dana pokok pada instrumen berisiko rendah. Dalam lima tahun terakhir, sekitar 30% dari total nilai pokok DAU dialokasikan pada produk perbankan syariah, sementara 70% sisanya diinvestasikan pada berbagai instrumen investasi syariah lainnya yang tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Kebijakan ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.

In the context of sustainability reporting, the strategic role of DAU is one of the important aspects that reflects BPKH's commitment to responsible and sustainable financial practices. The DAU is a fund established prior to the enactment of the Law No. 34 of 2014 on Hajj Fund Management, sourced from the proceeds of the initial deposits of Hajj pilgrims, the surplus of the operational budget for the Hajj pilgrimage, and other halal sources in accordance with applicable laws and regulations.

The law explicitly states that the management and utilization of DAU are part of BPKH's responsibilities. In its implementation, the benefits derived from DAU management are directed toward funding various activities that support the welfare of Muslims, including education, health, economic empowerment, and the strengthening of religious and social institutions.

As a form of operationalization of this policy, the BPKH issued Regulation No. 3 of 2023 on the Prioritization of Benefit Program Activities and the Use of Return from DAU. This regulation serves as the primary guideline for determining the direction and the scale of benefit program activities funded from the return of DAU, including fund allocation, criteria for selecting priority programs, as well as evaluation and accountability mechanisms for activity implementation.

To ensure the sustainability and continuity of DAU in the long term, BPKH implements a conservative and sharia-based investment strategy, allocating the principal funds are allocated to low-risk instruments. Over the past five years, approximately 30% of the total principal value of DAU has been allocated to sharia banking products, while the remaining 70% has been invested in various other sharia-compliant investment instruments that prioritize prudence. This policy aligns with the provisions of the Government Regulation No. 5 of 2018, which derives from Law No. 34 of 2014.

Nilai Manfaat yang Dihasilkan dan Disalurkan [SEOJK F.2]

Generated and Distributed Return Value [SEOJK F.2]

Uraian Description	Unit	2024	2023	2022
Nilai pokok DAU DAU Initial Fund	Rp	3.860.612.780.678	3.823.284.066.396	3.795.924.828.633
Nilai manfaat yang dihasilkan Generated return value		266.236.410.950	251.545.776.914	242.297.133.737
Nilai manfaat yang didistribusikan Distirbuted return value		230.266.843.829	228.581.514.254	130.318.759.229
Sisa nilai manfaat Remaining Return Value		44.584.903.265	22.964.262.660	111.978.374.508

Uraian Description	Unit	2024	2023	2022
Nilai penempatan DAU DAU placement fund	Investasi Investment	3.460.618.504.718	3.340.973.671.741	3.795.924.828.633
	Bank Syariah Sharia Bank	399.994.275.959	482.310.394.655	242.297.133.737
Nilai manfaat yang dihasilkan Generated fund	Investasi Investment	227.892.069.377	225.892.985.478	130.318.759.229
	Bank Syariah Sharia Bank	14.405.064.359	25.652.791.436	111.978.374.508

Salah satu tujuan utama dari pengelolaan keuangan haji, termasuk Dana Abadi Umat (DAU), adalah untuk mengoptimalkan nilai manfaat yang dapat digunakan bagi kemaslahatan umat Islam. Tujuan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Kemaslahatan, yang didanai dari hasil pengembangan DAU. Sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan, pemanfaatan nilai manfaat DAU pada tahun berjalan dibatasi agar tidak melebihi total nilai manfaat yang dihasilkan pada tahun sebelumnya. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2024, penggunaan nilai manfaat DAU ditetapkan sebesar 91,5% dari total nilai manfaat yang diperoleh pada tahun 2023.

One of the main objectives of hajj fund management, including DAU, is to bring more benefits to the prosperity of Muslims. This objective is realized through the implementation of the Benefit Program, which is funded from the return of DAU. In accordance with the principle of prudence and sustainability, the utilization of the DAU's return in the current year is limited so as not to exceed the total return generated in the previous year. As an illustration, in 2024, the utilization of the DAU's return is set at 91.5% of the total return obtained in 2023.

Untuk memastikan pengelolaan DAU dilakukan secara profesional dan sesuai prinsip tata kelola yang baik, BPKH secara rutin menjalani proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya. Audit ini merupakan bagian dari upaya menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan dana haji.

To ensure that DAU is managed professionally and in accordance with good governance principles, BPKH undergoes a routine audit by the State Audit Agency (BPK) every year. This audit is part of efforts to maintain integrity and transparency in Hajj fund management.

Sejak pertama kali beroperasi, BPKH secara konsisten berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama

Since its inception, BPKH has consistently achieved an Unqualified Opinion (WTP) from the Supreme Audit Agency (BPK) for seven consecutive years

7 (tujuh) tahun berturut-turut hingga tahun 2024. Lebih lanjut, pada tahun 2025, BPKH kembali berhasil mempertahankan prestasi tersebut, sehingga total opini WTP yang telah diraih mencapai 8 (delapan) kali berturut-turut. Capaian ini mencerminkan komitmen BPKH dalam mengelola keuangan haji secara akuntabel, terbuka, dan terpercaya, serta memperkuat legitimasi lembaga di mata publik dan pemangku kepentingan.

Informasi secara rinci terkait target dan realisasi kinerja seperti pendapatan dan belanja operasional telah disajikan dalam Laporan Tahunan 2025 BPKH Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen.

until 2024. Furthermore, in 2025, BPKH again succeeded in maintaining this achievement, bringing the total number of WTP opinions achieved to 8 (eight) consecutive times. This achievement reflects BPKH's commitment to managing Hajj fund in an accountable, transparent, and trustworthy manner, thereby strengthening the institution's legitimacy from the public and stakeholders perspective.

Detailed information regarding targets and performance realization, such as revenue and operational expenditure, is presented in the 2025 BPKH Annual Report, Chapter on Management Analysis and Discussion.

Mitra Kemaslahatan Benefit Program Partners [GRI 3-3]

Rantai Nilai Bidang Kemaslahatan [GRI 2-6]



Penyaluran Program Kemaslahatan oleh BPKH merupakan bentuk nyata dari pemanfaatan nilai manfaat DAU untuk menjawab kebutuhan umat. Kegiatan ini dijalankan melalui kolaborasi bersama Mitra Kemaslahatan, yang menjadi elemen krusial dalam mendukung tercapainya tujuan sosial dan keagamaan program. Sinergi yang dibangun dengan para mitra melalui komunikasi yang efektif, koordinasi yang terstruktur, dan komitmen yang selaras diharapkan mampu menghasilkan dampak positif yang luas bagi kesejahteraan umat Islam di Indonesia.

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program, Bidang Kemaslahatan menjalin kerja sama dengan organisasi yang telah ditetapkan sebagai Mitra Kemaslahatan, melalui proses seleksi yang mengacu pada Peraturan BPKH Nomor 3 Tahun 2023 beserta perubahannya. Kriteria dan persyaratan bagi mitra disusun secara sistematis untuk menjamin kesesuaian dengan nilai-nilai Kemaslahatan serta keberpihakan terhadap program-program sosial yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Value Chain of Benefit Program Field [GRI 2-6]

The distribution of benefit programs by BPKH represents a concrete form of utilizing DAU returns to meet the needs of the ummah. This initiative is implemented through collaboration with Benefit Program Partners, who play a crucial role in supporting the achievement of the program's social and religious objectives. This built with these partners through effective communication, structured coordination, and aligned commitments is expected to generate significant positive impacts on the prosperity of Muslims in Indonesia.

To ensure the effectiveness of the program implementation, the Benefit Program Field collaborates with organizations designated as Benefit Program Partners through a selection process based on BPKH Regulation No. 3 of 2023 and its amendments. The criteria and requirements for partners are systematically formulated to ensure alignment with the values of benefit program and a commitment to social programs that are inclusive and relevant to the community's needs.

Komitmen BPKH terhadap pemberdayaan ekonomi umat juga tercermin dalam kebijakan untuk mengutamakan pelibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya mitra lokal dari wilayah pelaksanaan program. Langkah ini diambil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkuat ekosistem sosial berbasis syariah. Seluruh nilai manfaat program pada tahun 2024, yang mencapai total sebesar Rp230.266.843.829, disalurkan secara eksklusif kepada mitra dalam negeri, mencerminkan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi nasional. [\[GRI 204-1\]](#)

Dalam memilih mitra, BPKH memprioritaskan organisasi yang memiliki rekam jejak kuat dalam mengelola program sosial berbasis amanah umat. Kemampuan mitra dalam memahami dinamika sosial dan budaya lokal menjadi faktor penting yang diperhatikan, guna memastikan bahwa intervensi program dapat menjangkau sasaran yang tepat dan membawa manfaat yang berkelanjutan. Organisasi seperti Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) menjadi mitra strategis utama dalam pelaksanaan program.

Untuk menjamin pelaksanaan kerja sama yang akuntabel, hubungan kemitraan dituangkan dalam perjanjian kerja sama formal yang mencakup peran, tanggung jawab, dan indikator keberhasilan program. Dokumen ini menjadi dasar bagi Bidang Kemaslahatan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, serta memastikan bahwa mitra menjalankan mandat sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2024, Bidang Kemaslahatan bekerja sama dengan 12 organisasi Mitra Kemaslahatan, seluruhnya berasal dari lembaga berbasis syariah seperti BAZ dan LAZ. Proses seleksi dilakukan melalui evaluasi ketat berbasis kriteria sosial, yang menghasilkan kemitraan dengan tingkat integritas dan komitmen yang tinggi. Kolaborasi ini telah menghasilkan 346 program Kemaslahatan, dengan total penyaluran dana mencapai Rp230,3 miliar, mencerminkan capaian signifikan dalam upaya membangun kesejahteraan umat secara inklusif. [\[GRI 414-1\]](#)

Seiring dengan bergabungnya LAZ Persis pada tahun 2024, jumlah Mitra Kemaslahatan BPKH meningkat, membuka peluang kolaborasi yang

BPKH's commitment to economic empowerment is also reflected in its policy to prioritize the involvement of micro, small, and medium enterprises (MSMEs), particularly local partners from the program implementation areas. This step is taken to support regional economic growth and strengthen the sharia-based social ecosystem. All benefit programs in 2024, totaling Rp230,266,843,829, are distributed exclusively to domestic partners, reflecting a tangible contribution to national economic development. [\[GRI 204-1\]](#)

In selecting partners, BPKH prioritizes organizations with a proven track record in managing social programs based on public trust. The partners' ability to understand local social and cultural dynamics is a key factor considered to ensure that program interventions reach the intended targets and bring sustainable benefits. Organizations such as the Zakat Management Agency (BAZ) and the Zakat Management Institution (LAZ) are key strategic partners in program implementation.

To ensure accountable cooperation, partnerships are formalized through cooperation agreements that clearly define roles, responsibilities, and program success indicators. This document serves as the basis for the Benefit Program Field to monitor and evaluate program implementation, and ensure that partners carry out their mandates in accordance with applicable standards and regulations.

In 2024, the Benefit Program Field collaborated with 12 Benefit Program Partner organizations, all of which are sharia-based institutions such as BAZ and LAZ. This selection process, conducted through rigorous evaluation based on social criteria, resulted in partnerships built on high integrity and strong commitment. This collaboration has produced 346 Benefit Programs, with a total disbursement of Rp230.3 billion, reflecting significant achievements in efforts to build inclusive community prosperity. [\[GRI 414-1\]](#)

With the joining of LAZ Persis in 2024, the number of BPKH Benefit Program Partners has increased, opening up broader opportunities for collaboration

lebih luas dan memperbesar cakupan penerima manfaat. Guna mendukung keberlanjutan pelaksanaan program, BPKH juga memberikan dukungan dalam bentuk *management fee* bagi mitra. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya penguatan kapasitas kelembagaan mitra serta mendukung ekosistem keuangan sosial syariah, termasuk zakat dan wakaf.

Penilaian berkala terhadap kinerja Mitra Kemaslahatan dilakukan secara menyeluruh, termasuk evaluasi dampak sosial dari program yang dijalankan. Berdasarkan hasil penilaian terhadap 12 mitra, tidak ditemukan adanya indikasi dampak negatif, baik secara aktual maupun potensial. Oleh karena itu, selama periode pelaporan tidak terdapat pemutusan hubungan kerja dengan mitra sebagai akibat dari hasil evaluasi tersebut.

and expanding the scope of beneficiaries. To support the sustainability of program implementation, BPKH also provides support in the form of management fees for partners. This initiative is part of efforts to strengthen the institutional capacity of partners and support the Islamic social finance ecosystem, including zakat and waqf.

Periodic evaluations of the performance of Benefit Program Partners are conducted comprehensively, including assessments of the social impact of the programs implemented. Based on the evaluation results of 12 partners, no indications of negative impacts, either actual or potential, were found. Therefore, during the reporting period, there were no terminations of partnerships with partners as a result of the evaluation findings.

Jumlah Mitra Aktif | Total Active Partners

Uraian Description	Unit	2024	2023	2022
Jumlah Mitra Aktif Total Active Partners	Mitra Partners	12	12	11

Pada tahun 2024, BPKH telah melakukan survei kepuasan kepada Mitra Kemaslahatan dengan hasil 75,88%, sama/meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. [SEOJK F.30]

In 2024, BPKH has conducted satisfaction survey to Benefit Program partners with the result of 75.88%, same/increased compared to previous year. [SEOJK F.30]

Mekanisme Penyaluran Nilai Manfaat Mechanism of Return Value Distribution

Pemanfaatan nilai manfaat DAU diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dirancang untuk memberikan dampak nyata bagi kemaslahatan umat Islam. Dalam rangka memperluas jangkauan dan relevansi program, BPKH membuka ruang partisipasi bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk instansi pemerintah, organisasi Mitra Kemaslahatan, dan publik umum, untuk terlibat secara aktif dalam proses perancangan kegiatan. Masyarakat dapat menyampaikan usulan program atau kegiatan melalui kanal daring seperti situs resmi BPKH di www.bpkh.go.id, alamat email Kemaslahatan@bpkh.go.id, maupun melalui jalur konvensional (non-elektronik) yang telah disediakan.

The utilization of DAU funds is realized through various activities designed to have a tangible impact on the Muslim' prosperity. In order to expand the reach and relevance of the program, BPKH opens opportunities for participation in all elements of society, including government agencies, benefits partner organizations, and the general public, to actively engage in the design process of the activity. The public can submit program or activity proposals through online channels such as the BPKH official website at www.bpkh.go.id, the email address Kemaslahatan@bpkh.go.id, or through conventional (non-electronic) channels that have been provided.

Setiap usulan program yang diterima akan melalui proses seleksi dan evaluasi menyeluruh oleh Divisi Registrasi dan Analisis Kemaslahatan. Proses ini mengacu pada kriteria kelayakan yang telah ditetapkan guna memastikan bahwa hanya program dengan dampak signifikan dan kelayakan implementasi tinggi yang mendapat persetujuan. Pendekatan ini memungkinkan Program Kemaslahatan untuk secara tepat sasaran merespons tantangan sosial dan kebutuhan nyata di tengah masyarakat.

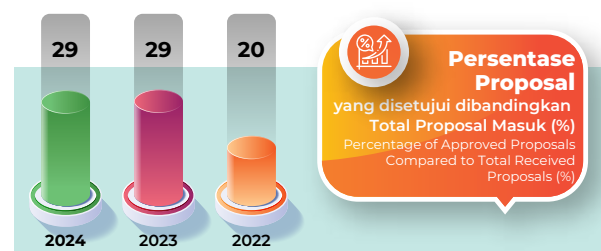
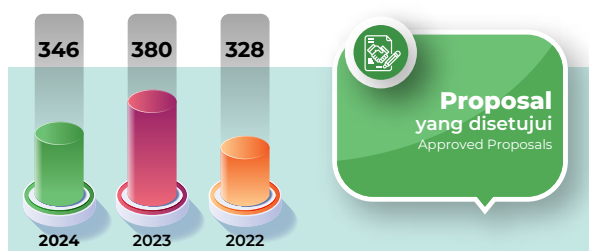
Dalam menjaga kualitas tata kelola dan integritas pelaksanaan program, Bidang Kemaslahatan telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015. Standar ini diberlakukan di seluruh tahapan pengelolaan, mulai dari penerimaan proposal, evaluasi dan seleksi, hingga pelaporan dan penyelesaian kegiatan. Dengan penerapan sistem mutu ini, BPKH memastikan bahwa seluruh proses berjalan secara adil, terukur, dan sesuai prosedur operasional standar yang berlaku. Semua proposal ditangani secara objektif dan konsisten berdasarkan standar kualitas dan transparansi. [SEOJK F.17]

Sebagai bagian dari transformasi digital dan peningkatan efisiensi layanan, pada tahun 2024 Sistem Informasi Manajemen (SIM) Kemaslahatan telah diperbarui dan diimplementasikan secara penuh. Sistem ini dirancang untuk mempercepat proses registrasi, penilaian, dan pemantauan proposal, sekaligus memudahkan koordinasi antarunit kerja dan mitra. Dampaknya terasa nyata: sepanjang tahun 2024, tingkat persetujuan proposal sama dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 29%, mencerminkan kinerja yang tetap responsif dan adaptif terhadap aspirasi umat. Pada tahun 2024, tidak terdapat produk/jasa yang ditarik kembali. [SEOJK F.29]

Every program proposal received will undergo a comprehensive selection and evaluation process by the Registration and Benefit Program Analysis Division. This process is based on established eligibility criteria to ensure that only programs with significant impact and high implementation feasibility receive approval. This approach enables the Benefit Program to effectively address social challenges and real needs within the community.

To maintain the quality of governance and the integrity of program implementation, the Benefit Program Field has adopted the ISO 9001:2015 Quality Management System. This standard is applied across all stages of management from proposal receipt, evaluation, and selection to reporting and completion. With the implementation of this quality system, BPKH ensures that all processes are conducted fairly, measurably, and in accordance with the applicable standard operating procedures. All proposals are evaluated objectively and consistently, based on established quality and transparency standards. [SEOJK F.17]

As part of digital transformation and service efficiency improvements, in 2024 the Benefit Program Management Information System (SIM) was updated and fully implemented. This system is designed to accelerate the registration, assessment, and monitoring of proposals, while also facilitating coordination between work units and partners. The impact is tangible: throughout 2024, the approval rate for proposals is the same as the previous year of 29% compared to the previous year, reflecting more responsive and adaptive performance in addressing community aspirations. In 2024, there were no recalled products/services. [SEOJK F.29]



Keanggotaan Asosiasi

Association Membership [GRI 2-28][SEOJK C.5]

BPKH berperan sebagai lembaga independen yang memiliki mandat untuk mengelola dan mengawasi keuangan yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Dalam menjalankan fungsinya, BPKH tidak menjadi bagian dari asosiasi manapun, sehingga dapat menjaga netralitas dan objektivitas dalam setiap pengambilan keputusan. Mengingat pengelolaan keuangan haji merupakan area yang sangat sensitif dan membutuhkan pengawasan yang ketat, posisi independen ini memberikan BPKH keleluasaan dalam bertindak secara profesional, bebas dari intervensi pihak eksternal maupun kepentingan tertentu.

BPKH serves as an independent institution with the mandate to manage and oversee the fund-related to the administration of the Hajj pilgrimage. In carrying out its functions, BPKH is not affiliated with any association, thereby ensuring neutrality and objectivity in all decision-making processes. Given that the management of the Hajj fund is a highly sensitive area requiring strict oversight, this independent status grants the BPKH the autonomy to act professionally, free from external interference or specific interests.

Perubahan Signifikan

Significant Changes [GRI 2-6][SEOJK C.6]

Pada tahun 2024, tidak terdapat perubahan signifikan pada BPKH seperti adanya *merger*/penggabungan usaha, penutupan kantor cabang atau unit usaha, dan pembukaan kantor cabang atau unit usaha baru, sama dengan periode di tahun sebelumnya yang tidak terdapat perubahan signifikan.

In 2024, there were no significant changes to BPKH, such as business mergers/acquisitions, branch or business unit closures, or the opening of new branches or business unit, same as period in previous year with no significant changes.





RANTAI KEMASLAHATAN UMAT

The Chain of Ummah's
Benefit Program



Program Kemaslahatan Benefit Program

Program Kemaslahatan BPKH yang diluncurkan pada akhir tahun 2018 merupakan salah satu wujud nyata implementasi Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Program ini dirancang untuk menyalurkan nilai manfaat dari pengelolaan DAU melalui berbagai inisiatif yang mendukung peningkatan kesejahteraan umat Islam. Pelaksanaannya berada di bawah pengawasan Deputy Kemaslahatan, yang bertugas memastikan bahwa setiap program dirancang dan dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan strategis BPKH. Melalui peran Bidang Kemaslahatan, BPKH memastikan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan DAU dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil yang berkelanjutan.

Sejalan dengan mandat tersebut, Program Kemaslahatan BPKH difokuskan pada berbagai sektor prioritas yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Bidang Kemaslahatan berperan aktif dalam menyusun kebijakan, memfasilitasi kerja sama dengan berbagai mitra, serta memantau efektivitas program agar manfaat yang diberikan dapat dirasakan secara luas.

Penyaluran nilai manfaat BPKH difokuskan pada tujuh kategori utama atau asnaf, yang dirancang untuk menjangkau berbagai aspek penting dalam kehidupan umat, meliputi:

1. Pelayanan Ibadah Haji – peningkatan kualitas layanan, fasilitas, dan pendampingan bagi jamaah haji.
2. Sarana dan Prasarana Ibadah – pengembangan infrastruktur penunjang kegiatan keagamaan untuk mendukung kenyamanan beribadah.
3. Kesehatan – peningkatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat dan jamaah haji, baik preventif maupun kuratif.
4. Ekonomi Umat – pemberdayaan masyarakat melalui program peningkatan kapasitas ekonomi, usaha produktif, dan inklusi keuangan.
5. Pendidikan dan Dakwah – dukungan terhadap pengembangan pendidikan Islam dan kegiatan dakwah yang memperkuat nilai-nilai keagamaan.

The BPKH Benefit Program, launched at the end of 2018, is a concrete manifestation of the implementation of Law No. 34 of 2014 on Hajj Financial Management. This program is designed to channel the benefits of DAU management through various initiatives that support the improvement of the welfare of Muslims. Its implementation is supervised by the Deputy for Benefit Program, who is responsible for ensuring that every program is designed and implemented in accordance with the provisions of laws and regulations as well as BPKH's strategic policies. Through the role of the Benefit Program Field, BPKH ensures that the management and utilization of DAU are carried out transparently, accountably, and oriented towards sustainable results.

In line with this mandate, the BPKH's Benefit Program focuses on various priority sectors that have a real impact on society. The Benefit Program Field plays an active role in formulating policies, facilitating cooperation with various partners, and monitoring the effectiveness of programs so that the benefits can be felt widely.

The distribution of BPKH benefits is focused on seven main categories or asnaf, designed to cover various important aspects of people's lives, including:

1. Hajj Pilgrimage Services – Enhancing the quality of services, facilities, and guidance for Hajj pilgrims.
2. Praying facilities and Infrastructure – development of infrastructure to support religious activities and enhance the worship experience.
3. Health – expanding access to healthcare services for the community and Hajj pilgrims, both preventive and curative.
4. Economy of Ummah – empowering the community through programs to enhance economic capacity, productive enterprises, and financial inclusion.
5. Education and Da'wah – support for the development of Islamic education and Dissemination of Religious Activities that strengthen religious values.

6. Sosialisasi Keagamaan – penyebaran informasi, edukasi, dan literasi terkait ajaran serta praktik ibadah untuk meningkatkan pemahaman umat.
7. Tanggap Bencana – penyaluran bantuan kemanusiaan dan pemulihan pascabencana untuk masyarakat terdampak.

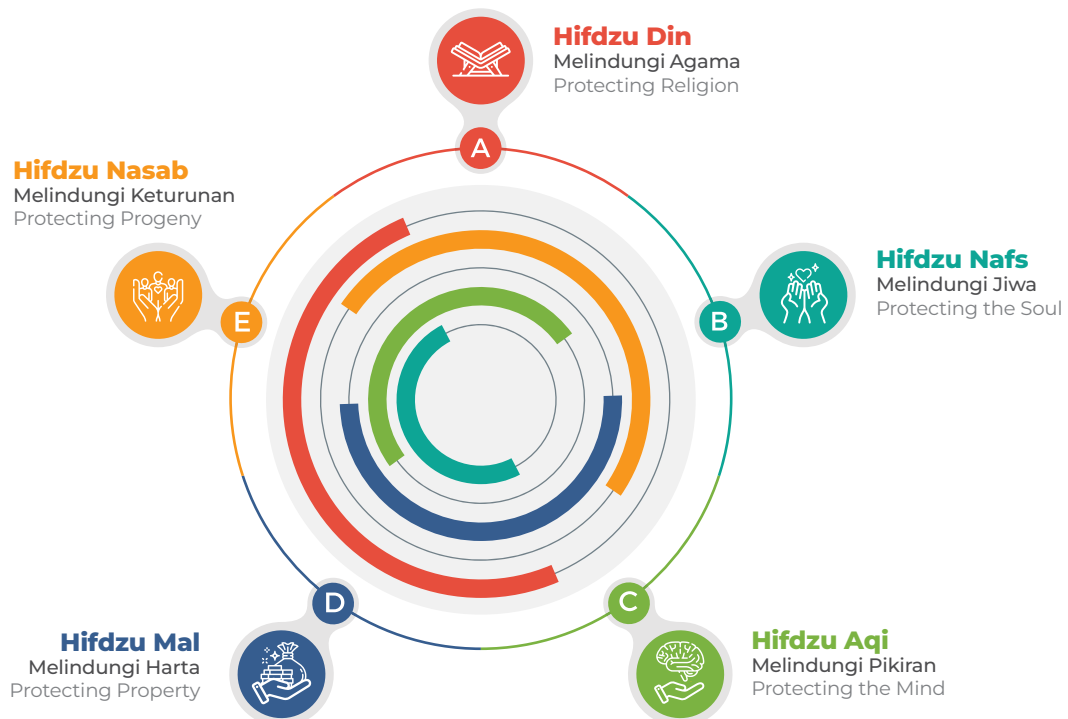
Dengan strategi yang terukur, BPKH berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan jangkauan Program Kemaslahatan, sehingga manfaat pengelolaan dana haji dapat dirasakan secara optimal dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan umat di seluruh Indonesia.

6. Social-Religious Matter – Disseminating information, education, and literacy related to religious teachings and practices to enhance community understanding.
7. Disaster Response – distribution of humanitarian aid and post-disaster recovery assistance for affected communities.

With a measurable strategy, BPKH is committed to continuously improve the quality and reach of the Benefit Programs, ensuring that the benefits of Hajj fund management are optimally felt and contribute meaningfully to the welfare of the Muslim community across Indonesia.

Pilar Program Kemaslahatan Sesuai dengan Maqashid Syariah

Pillars of Benefit Program Based on Maqashid Sharia



Dalam pelaksanaan Program Kemaslahatan, BPKH menempatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum sebagai aspek yang sangat penting untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai peraturan yang berlaku. Setiap inisiatif atau program yang dijalankan harus dirancang dan dieksekusi dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan, regulasi terkait, serta pedoman internal yang berlaku. Pendekatan ini dilakukan untuk meminimalkan risiko potensi pelanggaran hukum maupun kebijakan yang dapat memengaruhi kredibilitas dan keberlanjutan program.

In implementing the Benefit Program, BPKH places compliance with legal provisions as a very important aspect to ensure that all activities are carried out in accordance with applicable regulations. Every initiative or program implemented must be designed and executed in accordance with applicable laws and regulations, relevant regulations, and internal guidelines. This approach is adopted to minimize the risk of potential legal or policy violations that could impact the program's credibility and sustainability.

Lebih dari itu, seluruh kegiatan wajib berlandaskan pada prinsip-prinsip utama BPKH, yaitu syariah, kehati-hatian, kebermanfaatan, nirlaba, transparansi, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dasar dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program, sehingga manfaat yang disalurkan dapat diterima secara optimal oleh masyarakat.

Dasar Hukum Program Kemaslahatan BPKH

1. Undang-undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelola Keuangan Haji.
2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelola Keuangan Haji.
3. Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji.
4. Peraturan BPKH No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPKH No. 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat.
5. Peraturan BPKH No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BPKH No. 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat.
6. Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 2 Tahun 2018 tentang Kriteria, Persyaratan, Penetapan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Mitra Kemaslahatan dan Penerima Manfaat Kegiatan Kemaslahatan.
7. Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Kegiatan Kemaslahatan.
8. Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Kegiatan Kemaslahatan.
9. Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Kegiatan Kemaslahatan.
10. Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Kegiatan Kemaslahatan.

Furthermore, all activities must be based on the core principles of BPKH, namely sharia, prudence, benefit, non-profit, transparency, and accountability. These principles serve as the foundational guidelines in every stage of planning, implementation, and evaluation of programs, ensuring that the distributed benefits are optimally received by the community.

Legal Basis of BPKH's Benefit Program

1. Law of the Republic of Indonesia No. 34 of 2014 on Hajj Fund Management.
2. Government Regulation No. 5 of 2018 on Implementation of Law No. 34 of 2014 on Hajj Fund Management.
3. Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 110 of 2017 on Hajj Fund Management Agency.
4. BPKH Regulation No. 2 of 2019 on Amendment to BPKH Regulation No. 7 of 2018 on Prioritization of Benefit Program Activities and Use of Return Value from Ummah Trust Fund.
5. BPKH Regulation No. 4 of 2020 on the Second Amendment to BPKH Regulation No. 7 of 2018 on Prioritization of Benefit Program Activities and Use of Return Value from Ummah Trust Fund.
6. Regulation of Head of Executive Board of BPKH No. 2 of 2018 on Criteria, Requirements, Determination, Reporting and Accountability of Benefit Program Partners and Beneficiaries of Benefit Program Activities.
7. Regulation of Head of Executive Board of BPKH No. 3 of 2020 on Technical Guidelines for Benefit Program Activities.
8. Regulation of Head of Executive Board of BPKH No. 17 of 2020 on Amendment to Regulation of Head of Executive Board of BPKH No. 3 of 2020 on Technical Guidelines for Benefit Program Activities.
9. Regulation of Head of Executive Board of BPKH No. 18 of 2020 on the Second Amendment to Regulation of Head of Executive Board of BPKH No. 3 of 2020 on Technical Guidelines for Benefit Program Activities.
10. Regulation of Head of Executive Board of BPKH No. 29 of 2020 on the Third Amendment to Regulation of Head of Executive Board of BPKH No. 3 of 2020 on Technical Guidelines for Benefit Program Activities.

11. Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Kegiatan Kemaslahatan.
12. Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Kegiatan Kemaslahatan.
13. Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat.
14. Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat.
11. Regulation of Head of Executive Board of BPKH No. 34 of 2020 on the Fourth Amendment to Regulation of Head of Executive Board of BPKH No.3 of 2020 on Technical Guidelines for Benefit Program Activities.
12. Regulation of Head of Executive Board of BPKH No. 11 of 2021 on the Fifth Amendment to Regulation of Head of Executive Board of BPKH No.3 of 2020 on Technical Guidelines for Benefit Program Activities.
13. Hajj Fund Management Agency Regulation Number 3 of 2023 on the Prioritization of Benefit Program Activities and Use of the Return Value from Ummah Trust Fund.
14. Regulation of the Head of the Hajj Fund Management Agency Number 8 of 2023 on the Implementation of the Hajj Fund Management Agency Regulation Number 3 of 2023 on the Prioritization of Benefit Program Activities and Use of the Return Value from Ummah Trust Fund.

Penyaluran Nilai Manfaat Distribution of DAU Benefit Value [GRI 3-3]

Sebaran Penyaluran Nilai Manfaat Tahun 2024
Distribution of Return Value in 2024

No.	Provinsi Province	Jiwa People	Nilai Alokasi Allocation Value (Rp)	No.	Provinsi Province	Jiwa People	Nilai Alokasi Allocation Value (Rp)
1	Aceh	30.008	5.797.092.214,61	11	Jawa Timur East Java	117.774	24.934.271.859,86
2	Bali	14.882	2.752.137.080,00	12	Kalimantan Barat West Kalimantan	1.244	276.750.000,00
3	Banten	40.565	7.469.909.260,71	13	Kalimantan Selatan South Kalimantan	19.855	5.301.137.026,00
4	Bengkulu	16.212	4.650.475.688,00	14	Kalimantan Tengah Central Kalimantan	610	110.000.000,00
5	D.I. Yogyakarta Special Region of Yogyakarta	73.294	7.125.954.858,87	15	Kalimantan Timur East Kalimantan	2.602	875.345.400,00
6	Daerah Khusus Ibukota Jakarta Special Region of Jakarta	376.848	16.809.972.744,84	16	Kalimantan Utara North Kalimantan	520	97.000.000,00
7	Gorontalo	27.390	2.524.329.640,00	17	Kep. Bangka Belitung Bangka Belitung Islands	735	208.750.000,00
8	Jambi	1.750	1.228.100.992,60	18	Kep. Riau Riau Islands	710	235.000.000,00
9	Jawa Barat West Java	125.785	44.997.838.110,24	19	Lampung	26.455	3.087.003.490,00
10	Jawa Tengah Central Java	316.980	50.722.523.364,10				



No.	Provinsi Province	Jiwa People	Nilai Alokasi Allocation Value (Rp)
20	Maluku	720	142.750.000,00
21	Maluku Utara North Maluku	1.180	429.348.039,20
22	Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara	21.365	2.243.310.400,00
23	Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara	13.402	2.111.345.000,00
24	Papua	1.150	339.490.000,00
25	Papua Barat West Papua	625	276.000.000,00
26	Papua Barat Daya Southwest Papua	4.139	243.579.492,60
27	Papua Pegunungan	200	50.098.039,20
28	Papua Tengah Central Papua	200	16.554.492,60
29	Papua Selatan South Papua	760	216.225.000,00

No.	Provinsi Province	Jiwa People	Nilai Alokasi Allocation Value (Rp)
30	Riau	95.695	2.902.668.653,00
31	Sulawesi Barat West Sulawesi	6.214	2.063.100.588,32
32	Sulawesi Selatan South Sulawesi	47.790	9.089.868.004,32
33	Sulawesi Tengah Central Sulawesi	7.151	1.552.681.520,00
34	Sulawesi Tenggara Southeast Sulawesi	2.120	699.000.000,00
35	Sulawesi Utara North Sulawesi	1.110	319.950.000,00
36	Sumatra Barat West Sumatra	72.286	11.078.757.750,00
37	Sumatra Selatan South Sumatra	1.497	489.921.266,60
38	Sumatra Utara North Sumatra	56.210	9.954.272.217,10



Pada periode 2024, Program Kemaslahatan BPKH berhasil menjangkau 38 provinsi di Indonesia dengan pola pendistribusian nilai manfaat yang dilakukan secara proporsional. Pendekatan ini mempertimbangkan jumlah Jemaah haji pada setiap wilayah, sehingga alokasi manfaat dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat. Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi penerima manfaat terbesar mengingat tingginya persentase Jemaah haji yang masih berada dalam antrean keberangkatan. Dengan demikian, implementasi program dapat memastikan manfaat pengelolaan DAU tersalurkan secara lebih tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi umat Islam.

Sumber pendanaan Program Kemaslahatan berasal dari nilai manfaat hasil pengelolaan DAU. Dengan prinsip syariah sebagai landasan utama, program ini didesain untuk memberikan manfaat secara luas kepada umat Islam di Indonesia tanpa mengabaikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian. Sejalan dengan arahan *Roadmap* Program Kemaslahatan sejak 2021, BPKH menempatkan prioritas penyaluran manfaat pada daerah 3T sebagai wujud komitmen pemerataan akses kesejahteraan.

Hingga tahun 2024, Program Kemaslahatan telah menyentuh 12 (dua belas) kabupaten di wilayah 3T. Pencapaian ini tidak hanya memperluas jangkauan distribusi manfaat, tetapi juga menunjukkan keseriusan BPKH dalam menciptakan peluang yang setara bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk mereka yang berada di daerah dengan keterbatasan akses dan fasilitas. Dengan pendekatan ini, BPKH memastikan bahwa kebermanfaatn program dapat dirasakan secara inklusif dan berkelanjutan.

In 2024, the BPKH Benefit Program successfully reached 38 provinces in Indonesia with a proportional distribution of benefits. This approach takes into account the number of Hajj pilgrims in each region, allowing the allocation of benefits to be adjusted to the actual needs of the community. West Java, Central Java, and East Java provinces were the largest beneficiaries, due to the high percentage of Hajj pilgrims still awaiting departure. Thus, the program's implementation ensures that the benefits of DAU are distributed more accurately and provide direct impact for the Muslim community.

The funding source for the Benefit Program comes from the proceeds of DAU management. Based on Sharia principles as its core foundation, this program is designed to provide widespread benefits to Muslims in Indonesia while maintaining transparency, accountability, and prudence. In line with the 2021 Benefit Program Roadmap, BPKH prioritizes the distribution of benefits to 3T areas as a manifestation of its commitment to equitable access to welfare.

By 2024, the Benefit Program had reached 12 (twelve) regencies in 3T areas. This achievement not only expands the reach of benefit distribution but also demonstrates BPKH's seriousness in creating equal opportunities for all Indonesian citizens, including those in areas with limited access and facilities. Through this approach, BPKH ensures that the benefits of the program are felt inclusively and sustainably.

Sebaran Program Kemaslahatan Benefit Program Distribution

Uraian Description	Unit	2024	2023	2022
Jumlah Provinsi Number of Provinces	Provinsi Provinces	38	37	34
Jumlah Wilayah 3T Number of 3T Areas	Kabupaten/Kota Regencies/Cities	12*	6	11

*Mencakup Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pesisir Barat, Sumba Timur, Manggarai Timur, Donggala, Tojo Una-Una, Sigi, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Teluk Bintuni, Sorong, Nabire

*Covering Regency of Kepulauan Mentawai, West Pesisir, East Sumba, East Manggarai, Donggala, Tojo Una-Una, Sigi, Western Seram, Eastern Seram, Teluk Bintuni, Sorong, Nabire

Mengabdikan Kepada Umat, Menebarkan Kebahagiaan

Serving the Ummah, Spreading Blessings [GRI 2-22][SEOJK F.1]

Sebagai wujud komitmen BPKH dalam mendukung pencapaian visi dan misi, Program Kemaslahatan menjadi salah satu inisiatif strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam mewujudkan misi kelima BPKH, yakni meningkatkan kesejahteraan umat. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa pemanfaatan DAU dilakukan secara efektif, efisien, transparan, serta sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui pendekatan yang terukur dan berbasis pada prinsip syariah, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik, program ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan umat Islam secara menyeluruh.

Pada tahun 2024, pelaksanaan Program Kemaslahatan menunjukkan peningkatan yang signifikan baik dari sisi efektivitas maupun intensitas pelaksanaan, berkat penguatan pada aspek tata kelola kelembagaan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan BPKH adalah menambah divisi di bawah Deputi Kemaslahatan dari 2 menjadi 3 (tiga) yakni Divisi Registrasi dan Analisis Kemaslahatan, Divisi Program Strategis dan Pelaksanaan Mandiri Kemaslahatan, serta Divisi *Monitoring*, Evaluasi, dan Pelaporan Kemaslahatan. Keberadaan seluruh divisi tersebut tidak hanya mempercepat proses pengelolaan proposal program, tetapi juga meningkatkan kualitas evaluasi dan pemantauan atas implementasi program yang dijalankan.

Melalui penguatan ini, BPKH memastikan bahwa seluruh proses penyaluran nilai manfaat berjalan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi hasil. Pendekatan ini selaras dengan semangat BPKH untuk “menebar manfaat” secara lebih merata, memastikan setiap program memberikan dampak optimal, dan mendukung keberlanjutan kemaslahatan umat di berbagai wilayah Indonesia.

As a manifestation of BPKH's commitment to supporting the achievement of its vision and mission, the Benefit Program is one of the strategic initiatives to improve the quality of life of the community, particularly in realizing BPKH's fifth mission, namely enhancing the welfare of the ummah. This program is designed to ensure that the utilization of DAU is carried out effectively, efficiently, transparently, and in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. Through a measurable approach based on sharia principles, accountability, and good governance, this program is expected to have a real impact on improving the welfare of Muslims as a whole.

In 2024, the implementation of the Benefit Program showed a significant increase in both effectiveness and intensity, due to strengthened institutional governance. One of the strategic steps taken by BPKH was to add from two to three divisions under the Deputy for Benefit Program, namely Registration and Analysis of Benefit Program Field, Strategic Program and Independent Implementation of Benefit Program Field, as well as Monitoring, Evaluation, and Reporting of Benefit Program Field. The existence of these divisions not only accelerates the program proposal management process, but also improves the quality of evaluation and monitoring of program implementation.

Through these enhancements, BPKH ensures that the entire process of distributing benefits aligns with the principles of Good Corporate Governance (GCG), from the planning stage to the evaluation of results. This approach aligns with BPKH's spirit to “spread benefits” more equitably, ensuring that every program delivers optimal results and supports the sustainability of welfare for communities across Indonesia.

Roadmap Kemaslahatan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Benefit Program Roadmap and Sustainable Development Goals

BPKH telah menyusun *Roadmap* Program Kemaslahatan 2021–2025 sebagai panduan strategis yang diuraikan dalam Buku BPKH Bermaslahat. *Roadmap* ini menjadi landasan utama dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi setiap inisiatif Program Kemaslahatan, sejalan dengan semangat “Menebar Manfaat untuk Kemaslahatan Umat”. Fokus utama program ini adalah meningkatkan keragaman dan kualitas kegiatan Kemaslahatan, memperluas cakupan layanan ke wilayah-wilayah 3T, serta memastikan kebermanfaatan nilai pengelolaan DAU dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pada periode 2024–2025, BPKH memasuki Tahap III dalam *Roadmap* Program Kemaslahatan, yang menitikberatkan pada pemantapan dan optimalisasi program. Tahap ini difokuskan untuk memastikan tingkat kepuasan penerima manfaat semakin meningkat melalui pendekatan program yang lebih terintegrasi, inklusif, dan adaptif. Dengan strategi ini, BPKH berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan dan langkah yang diambil memberikan dampak nyata, signifikan, dan berkelanjutan terhadap peningkatan kesejahteraan umat Islam di Indonesia.

Selama periode pelaporan, BPKH memperkuat integrasi ekosistem kemaslahatan melalui kolaborasi aktif dengan mitra strategis dan pemangku kepentingan. Bidang Kemaslahatan terus memperluas cakupan penerima manfaat dengan pendekatan yang lebih inklusif, memastikan partisipasi dari kelompok-kelompok masyarakat yang sebelumnya kurang terjangkau. Upaya ini mencakup peningkatan akses program hingga ke wilayah 3T, sehingga manfaat Program Kemaslahatan dapat dirasakan secara merata di seluruh Indonesia. Pada tahun 2024, cakupan kegiatan telah mencapai 38 provinsi dengan dukungan 12 mitra kemaslahatan aktif, memperkuat dampak program bagi masyarakat luas.

Selain memperluas cakupan, BPKH juga fokus meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program melalui mekanisme evaluasi menyeluruh. Proses penilaian dilakukan sejak tahap pengajuan proposal, pelaksanaan, hingga pasca-

BPKH has developed a 2021–2025 Benefit Program Roadmap as a strategic guideline outlined in the BPKH Bermaslahat Book. This roadmap serves as the main foundation for designing, implementing, and evaluating every Benefit Program initiative, in line with the spirit of “Spreading Benefits for the Welfare of the People.” The main focus of this program is to increase the diversity and quality of benefit program activities, expand the coverage of services to 3T areas, and ensure that the benefits of DAU management are felt evenly by all levels of society.

In the 2024–2025 period, BPKH entered Phase III of the Benefit Program Roadmap, which focuses on program consolidation and optimization. This phase is focused on ensuring that the level of beneficiary satisfaction continues to increase through a more integrated, inclusive, and adaptive program approach. With this strategy, BPKH strives to ensure that every policy and step taken has a real, significant, and sustainable impact on improving the welfare of Muslims in Indonesia.

During the reporting period, BPKH strengthened the integration of the benefit program ecosystem through active collaboration with strategic partners and stakeholders. The Benefit Program Field continued to expand the coverage of beneficiaries with a more inclusive approach, ensuring the participation of the previously underserved community groups. These efforts include increasing program access to 3T areas, so that the benefits of the Benefit Program can be felt evenly throughout Indonesia. In 2024, the scope of activities has reached 38 provinces with the support of 12 active benefit program partners, strengthening the impact of the program for the wider community.

In addition to expanding coverage, BPKH also focuses on improving the effectiveness and accountability of program implementation through comprehensive evaluation mechanisms. The assessment process is carried out from the proposal

program, dengan kewajiban mitra untuk menyampaikan laporan evaluasi kinerja secara berkala. Sejalan dengan itu, beberapa program telah dianalisis menggunakan metode *Social Return on Investment* (SROI) untuk menilai dampak sosial secara terukur dan memastikan setiap rupiah yang dikelola memberikan manfaat optimal. Hasil evaluasi pada periode pelaporan menunjukkan bahwa tidak terdapat insiden atau dampak negatif terhadap masyarakat penerima manfaat, sehingga menegaskan komitmen BPKH dalam menjaga keberlanjutan dan integritas pelaksanaan program. [GRI 413-2]

submission stage, implementation, to post-program, with partners required to submit periodic performance evaluation reports. In line with this, several programs have been analyzed using the Social Return on Investment (SROI) method to quantify social impact and ensure that every rupiah managed delivers optimal benefit value. The evaluation results for the reporting period showed that there were no incidents or negative impacts on beneficiaries reaffirming BPKH's commitment to ensuring the sustainability and integrity of program implementation. [GRI 413-2]

Roadmap Kemaslahatan 2021-2025

Benefit Program Roadmap 2021-2025



Tahap 01 (2021) | Phase 01 (2021)

Penguatan Infrastruktur Kemaslahatan Fokus pada tahap ini adalah:

- Penguatan organisasi dan kapabilitas SDM
- Sinkronisasi ketentuan operasional mekanisme pengelolaan dana
- Pengendalian risiko yang akuntabel dan *prudent* dalam penyaluran program kemaslahatan
- Pengembangan sistem informasi manajemen yang akurat dan komprehensif
- Peran dan kerjasama pemangku kepentingan yang lebih sinergis dan professional

Infrastructure Development for Benefit Program the focus of this phase is:

- Strengthening organizational structure and human resource capabilities
- Aligning operational procedures for fund management mechanisms
- Implementing accountable and prudent risk management in the disbursement of benefit programs
- Developing an accurate and comprehensive management information system
- Enhancing the role and collaboration of stakeholders for more synergistic and professional cooperation



Tahap 02 (2022-2023) | Phase 02 (2022-2023)

Optimasi Kemaslahatan

Fokus pada tahap ini adalah perluasan jangkauan layanan kewilayahan kegiatan kemaslahatan hingga daerah 3T (tertinggal, terluar dan terdepan) wilayah Indonesia, sehingga diharapkan mampu memperkuat branding kelembagaan.

Optimization of Benefit Program

The focus at this stage is to expand the coverage of regional benefit program activities to the 3T (remote, outermost, and frontier) areas of Indonesia, thereby strengthening institutional branding.



Tahap 03 (2024-2025) | Phase 03 (2024-2025)

Integrasi Ekosistem Kemaslahatan

Fokus pada tahap ini adalah melakukan pemantapan program kemaslahatan pada level nasional maupun internasional, yang bermuara pada tingginya tingkat kepuasan penerima manfaat serta pengakuan dan dukungan yang tinggi dan berkelanjutan dari para pemangku kepentingan (dalam dan luar negeri). Pada tahap ini Program Kemaslahatan dapat menjadi benchmark program sejenis di tingkat global.

Integration of the Benefit Program Ecosystem

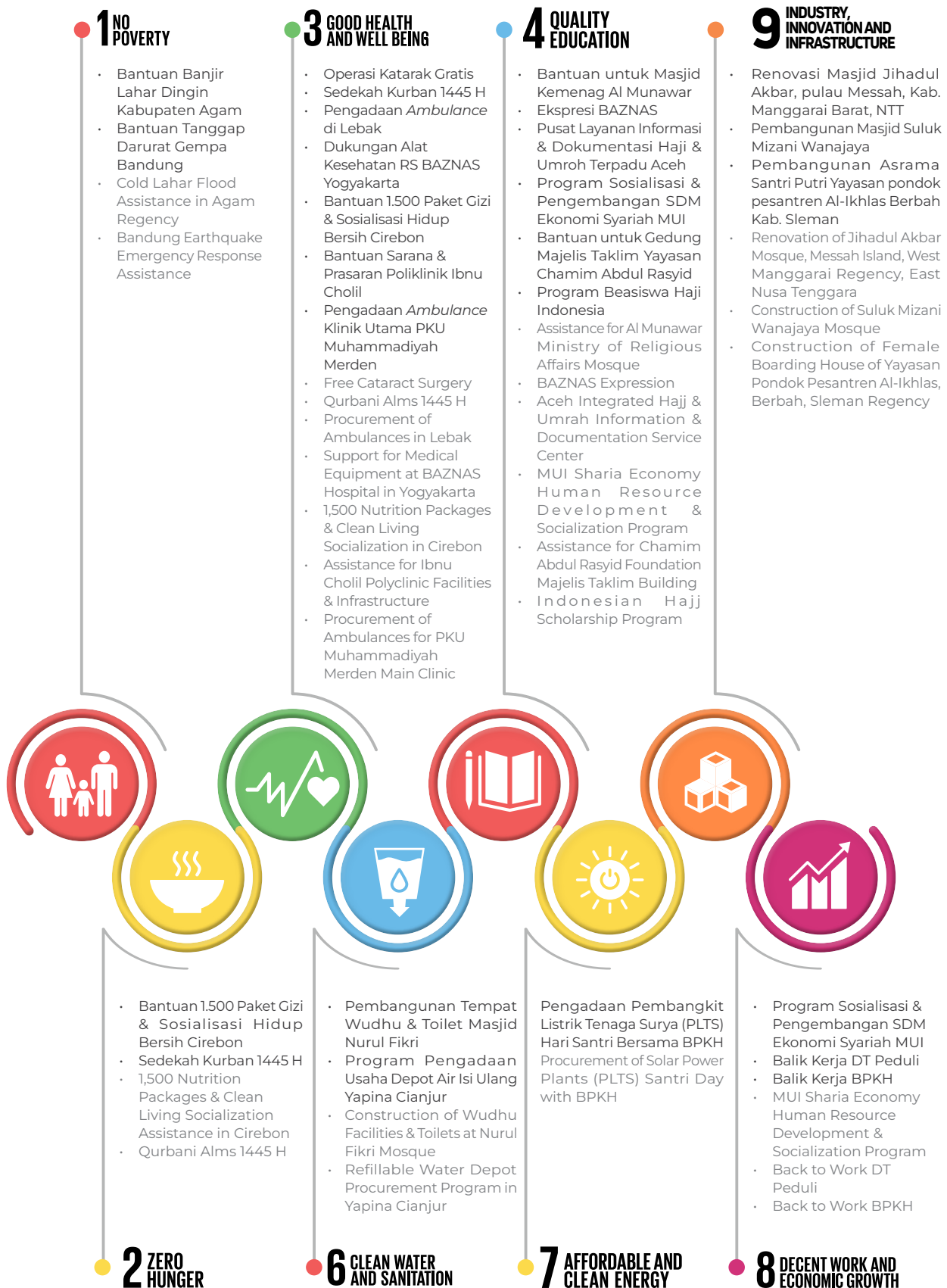
The focus at this stage is to consolidate benefit programs at the national and international levels, resulting in high levels of beneficiary satisfaction and strong and sustained recognition and support from stakeholders (both domestic and international). At this stage, the Benefit Program can become a benchmark for similar programs at the global level.

VISI | VISION

Menjadi Penyelenggara Program Kemaslahatan bereputasi internasional
Becoming an Internationally Renowned Organizer of Benefit Programs

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2024

Achievement of Sustainable Development Goals in 2024



11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES

- Bantuan untuk Masjid Kemenag Al Munawar
- Kampung Haji Sukabumi
- Bantuan Banjir Lahar Dingin Kabupaten Agam
- Pusat Layanan Informasi & Dokumentasi Haji & Umroh Terpadu Aceh
- Bantuan Tanggap Darurat Gempa Bandung
- Pengadaan Mobil *Rescue* Muhammadiyah Jawa Tengah
- Pengadaan Mobil Siaga Bencana *NU Care-LAZISNU*
- Bantuan untuk Gedung Majelis Taklim Yayasan Chamim Abdul Rasyid
- Pembangunan Tempat Wudhu & Toilet Masjid Nurul Fikri
- Assistance for Al Munawar Ministry of Religious Affairs Mosque
- Sukabumi Hajj Village
- Cold Lahar Flood Assistance in Agam Regency
- Aceh Integrated Hajj & Umrah Information & Documentation Service Center
- Emergency Assistance for Bandung Earthquake
- Procurement of Muhamma-diyah Rescue Vehicles in Central Java
- Procurement of NU Care-LAZISNU Disaster Response Vehicles
- Assistance for the Chamim Abdul Rasyid Foundation's Majelis Taklim Building
- Construction of Wudhu Facilities & Toilets at the Nurul Fikri Mosque

13 CLIMATE ACTION

- Penanaman 1.000 Mangrove
- Mesin Pengolah Sampah Plastik, *Garbage Care* Yogyakarta
- Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Hari Santri Bersama BPKH
- Planting 1,000 Mangroves
- Plastic Waste Processing Machine, Garbage Care Yogyakarta
- Procurement of Solar Power Plant (PLTS) Santri Day with BPKH

16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS

- Pusat Layanan Informasi & Dokumentasi Haji & Umroh Terpadu Aceh
- Aceh Integrated Hajj & Umrah Information & Documentation Service Center



- Balik Kerja DT Peduli
- Balik Kerja BPKH
- Back to Work DT Peduli
- Back to Work BPKH

10 REDUCED INEQUALITIES



- Mesin Pengolah Sampah Plastik, *Garbage Care* Yogyakarta
- Plastic Waste Processing Machine, Garbage Care Yogyakarta

12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION



- Penanaman 1.000 Mangrove
- Mesin Pengolah Sampah Plastik, *Garbage Care* Yogyakarta
- Planting 1,000 Mangroves
- Plastic Waste Processing Machine, Garbage Care Yogyakarta

15 LIFE ON LAND



- Ekspresi BAZNAS
- BAZNAS Expression



17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

Sinergi Kemaslahatan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan [GRI 3-3][SEOJK F.28]

Synergy of Benefit Program and Sustainable Development Goals



Sebagai bagian dari mandatnya untuk menebar manfaat seluas-luasnya, BPKH merancang Program Kemaslahatan untuk berkontribusi langsung terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Program ini menjadi wujud nyata komitmen BPKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, serta mendukung perlindungan lingkungan dan penanganan perubahan iklim. Melalui pendekatan yang holistik dan berbasis dampak, setiap kegiatan Kemaslahatan dirancang agar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, selaras dengan semangat pembangunan berkelanjutan dan prinsip-prinsip syariah.

Komitmen ini tercermin dalam pelaksanaan program yang secara khusus diselenggarakan dengan 17 Tujuan dan 169 Target SDGs yang ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2030. BPKH memastikan bahwa 100% program Kemaslahatan disusun berdasarkan hasil pemetaan sosial dan analisis kebutuhan masyarakat di setiap wilayah, sehingga pelaksanaannya tepat sasaran. Pendekatan ini memastikan setiap program memberikan manfaat nyata tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap penerima manfaat, masyarakat sekitar, maupun lingkungan. [GRI 413-1]

As part of its mandate to spread benefits as widely as possible, BPKH has designed the Benefit Program to contribute directly to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). This program is a concrete manifestation of BPKH's commitment to improving community welfare, reducing social inequalities, and supporting environmental protection and climate change mitigation. Through a holistic and impact-based approach, each Benefit Program activity is designed to provide long-term benefits to the community, in line with the spirit of sustainable development and sharia principles.

This commitment is reflected in the implementation of programs that are specifically aligned with the 17 Goals and 169 Targets of the SDGs are set to be achieved by 2030. BPKH ensures that 100% of its benefit programs are developed based on social mapping and needs analysis in each region, ensuring that their implementation is targeted and effective. This approach ensures that every program delivers tangible benefits without causing negative impacts on beneficiaries, surrounding communities, or the environment. [GRI 413-1]

Untuk mencapai dampak berkelanjutan, BPKH menjalankan program-program Kemaslahatan melalui tujuh ruang lingkup utama: (1) pelayanan ibadah haji, (2) sarana dan prasarana ibadah, (3) kesehatan, (4) ekonomi umat, (5) pendidikan dan dakwah, (6) sosial keagamaan, dan (7) tanggap bencana. Seluruh ruang lingkup ini diperkuat dengan kerja sama strategis bersama Mitra Kemaslahatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi sesuai bidangnya. Kolaborasi ini memungkinkan distribusi manfaat secara luas, termasuk menjangkau 38 provinsi di Indonesia serta memprioritaskan wilayah 3T guna menciptakan pemerataan kesejahteraan.

Pada tahun 2024, Program Kemaslahatan BPKH berhasil memberikan kontribusi terhadap 15 dari 17 Tujuan SDGs melalui berbagai inisiatif strategis, antara lain: Penghapusan Kemiskinan (SDG 1); Pengentasan Kelaparan (SDG 2); Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik (SDG 3); Pendidikan Berkualitas (SDG 4); Akses Air Bersih dan Sanitasi (SDG 6); Energi Bersih yang Terjangkau (SDG 7); Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (SDG 8); Industri, Inovasi dan Infrastruktur (SDG 9); Berkurangnya Kesenjangan (SDG 10); Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan (SDG 11); Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (SDG 12); Aksi Iklim (SDG 13); Ekosistem Daratan (SDG 15); Perdamaian, Keadilan, dan Kekuatan Institusi (SDG 16); serta Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (SDG 17).

Keberhasilan ini tercermin melalui beragam kegiatan yang dijalankan, termasuk penyediaan layanan haji, pembangunan fasilitas ibadah, penyelenggaraan program kesehatan masyarakat, peningkatan akses pendidikan dan dakwah, serta bantuan tanggap darurat bencana. Melalui strategi berbasis keberlanjutan ini, BPKH tidak hanya mendukung peningkatan kualitas ibadah umat, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi, memperluas akses layanan sosial, dan menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat secara menyeluruh.

Sebagai penyelenggara Program Kemaslahatan, BPKH tidak hanya berfokus pada pencapaian dampak positif, tetapi juga secara proaktif mengantisipasi potensi dampak negatif yang dapat timbul dari pelaksanaan program, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan

To achieve sustainable impact, BPKH implements its benefit programs through seven main areas: (1) Hajj pilgrimage services, (2) religious facilities and infrastructure, (3) health, (4) ummah's economy, (5) education and da'wah, (6) social and religious affairs, and (7) disaster response. All of these areas are strengthened through strategic partnerships with Benefit Program Partners who have the capacity and expertise in their respective fields. This collaboration enables the widespread distribution of benefits, including reaching 38 provinces in Indonesia and prioritizing the 3T areas to create equitable welfare.

In 2024, the BPKH Benefit Program successfully contributed to 15 out of 17 SDGs through various strategic initiatives, including: No Poverty (SDG 1); Zero Hunger (SDG 2); Good Health and Well-being (SDG 3); Quality Education (SDG 4); Clean Water and Sanitation (SDG 6); Affordable and Clean Energy (SDG 7); Decent Work and Economic Growth (SDG 8); Industry, Innovation, and Infrastructure (SDG 9); Reduced Inequalities (SDG 10); Sustainable Cities and Communities (SDG 11); Responsible Consumption and Production (SDG 12); Climate Action (SDG 13); Life on Land (SDG 15); Peace, Justice, and Strong Institutions (SDG 16); and Partnerships for Sustainable Development (SDG 17).

This success is reflected in various activities carried out, including the provision of Hajj services, the construction of praying facilities, the implementation of public health programs, the improvement of access to education and religious outreach, and emergency response assistance for disasters. Through this sustainability-based strategy, BPKH not only supports the improvement of the quality of praying for the community, but also strengthens economic competitiveness, expands access to social services, and creates tangible benefits for the community as a whole.

As the organizer of the Benefit Program, BPKH does not only focus on achieving positive impacts but also proactively anticipates potential negative impacts that may arise from the program implementation, particularly those related to public safety and health. Such risks may arise, for example,

masyarakat. Risiko tersebut dapat muncul, misalnya, apabila infrastruktur yang dibangun tidak sesuai dengan standar keamanan, atau jika bantuan pangan yang disalurkan tidak memenuhi ketentuan kesehatan. Untuk memitigasi hal tersebut, Bidang Kemaslahatan menerapkan kebijakan pencegahan yang ketat dengan mewajibkan setiap Mitra Kemaslahatan memastikan bahwa seluruh kegiatan dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penerima manfaat.

Sejalan dengan komitmen terhadap keberlanjutan, peningkatan dukungan Program Kemaslahatan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) juga seiring dengan bertambahnya jumlah Penerima Manfaat dari berbagai program yang dijalankan. Para penerima manfaat ini berasal dari beragam latar belakang usia, *gender*, dan kondisi demografis, menciptakan inklusivitas dan keberagaman yang menjadi fondasi penting dalam upaya pencapaian tujuan SDGs. Keberagaman tersebut memperkuat dampak sosial dari program, sekaligus menjadi bukti nyata bahwa manfaat yang dihasilkan menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

if the infrastructure built does not meet safety standards, or if the food aid distributed does not meet health requirements. To mitigate these risks, the Benefit Program Field implements strict preventive policies by requiring all Benefit Program Partners to ensure that all activities are designed and implemented with consideration for the safety, security, and comfort of the beneficiaries.

In line with its commitment to sustainability, the increased support for the Benefit Program in relation to Sustainable Development Goals (SDGs) aligns with the increasing number of beneficiaries from various programs implemented. These beneficiaries come from diverse backgrounds in terms of age, gender, and demographic conditions, fostering inclusivity and diversity that form a crucial foundation for achieving SDG objectives. This diversity strengthens the social impact of the programs while serving as tangible evidence that the benefits generated reach all segments of society in an equitable manner.

Syariah
Sharia



Kehati-hatian
Prudence



Manfaat
Benefit



Nirlaba
Non-Profit



Transparan
Transparency



Akuntabel
Accountability



Prinsip penyaluran DAU:

The principle of DAU distribution:

Penyaluran nilai manfaat mencakup tujuh asnaf/golongan:

The distribution of return value covers seven asnaf/groups:



Pelayanan Ibadah Haji
Haji Pilgrimage Services



Sarana dan Prasarana ibadah
Praying Facilities and Infrastructure



Kesehatan
Health



Ekonomi Umat
Ummah's Economy



Pendidikan dan Dakwah
Education and Da'wah Benefit



Sosial Keagamaan
Socio-Religious Matter



Tanggap Bencana
Disaster Responses



PELAYANAN IBADAH HAJI HAJJ PILGRIMAGE SERVICES



Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan ibadah haji bagi umat Islam Indonesia, BPKH terus memperkuat perannya melalui Program Kemaslahatan di bidang Pelayanan Ibadah Haji. Pada tahun 2024, total nilai penyaluran untuk program pada ruang lingkup ini mencapai Rp5.740.644.000, yang diarahkan untuk mendukung peningkatan akses, kualitas, dan kenyamanan layanan bagi calon jemaah haji.

Pada tahun 2024, program kemaslahatan pelayanan ibadah haji mencakup:

1. Pembangunan Gedung Pusat Layanan Informasi dan Dokumentasi Haji dan Umroh Terpadu di Aceh

Salah satu inisiatif strategis BPKH pada tahun 2024 adalah konstruksi Gedung Pusat Layanan Informasi dan Dokumentasi Haji dan Umroh Terpadu yang berlokasi di Provinsi Aceh. Fasilitas ini dibangun untuk meningkatkan kualitas pelayanan, menyediakan pusat informasi yang terintegrasi, dan memudahkan masyarakat dalam mengakses data serta layanan terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umroh.

Gedung ini diproyeksikan memberikan manfaat langsung bagi sekitar 26.700 penerima manfaat setiap tahunnya, termasuk calon jemaah haji, petugas layanan, dan masyarakat umum. Melalui kehadiran fasilitas ini, diharapkan masyarakat Aceh dan sekitarnya mendapatkan akses informasi yang lebih akurat, cepat, dan transparan, sehingga dapat meningkatkan pengalaman pelayanan haji secara menyeluruh.

2. Pengadaan Barang untuk Pelayanan Ibadah Haji

Selain pembangunan gedung layanan, BPKH juga melaksanakan program pengadaan berbagai fasilitas dan barang penunjang pelayanan ibadah haji. Inisiatif ini dirancang untuk memperkuat kesiapan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan ibadah haji, termasuk peningkatan kualitas peralatan dan kelengkapan yang secara langsung mendukung jemaah.

As part of its commitment to improving the quality of Hajj pilgrimage services for Indonesian Muslims, BPKH continues to strengthen its role through the Benefit Program in the field of Hajj Pilgrimage Services. In 2024, the total allocation for this program reached Rp5,740,644,000, aimed at supporting improved access, quality, and comfort of services for prospective Hajj pilgrims.

In 2024, the Hajj pilgrimage service benefit program includes:

1. Construction of an Integrated Hajj and Umrah Information and Documentation Center in Aceh

One of the strategic initiatives of BPKH in 2024 is the construction of an Integrated Hajj and Umrah Information and Documentation Center in Aceh Province. This facility is being built to improve service quality, provide an integrated information center, and facilitate public access to data and services related to the organization of Hajj and Umrah pilgrimage services.

The building is projected to directly benefit approximately 26,700 beneficiaries annually, including prospective Hajj pilgrims, service staff, and the general public. Through this facility, it is expected that the people of Aceh and surrounding areas will have access to more accurate, timely, and transparent information, thereby improving the overall Hajj service experience.

2. Procurement of Goods for Hajj Services

In addition to the construction of the service building, BPKH is also implementing a program to procure various facilities and goods to support Hajj services. This initiative is directed to strengthen the infrastructure and facilities needed for the implementation of Hajj, including improving the quality of equipment and facilities that directly support pilgrims.

Program ini diperkirakan memberikan manfaat bagi 1.750 penerima manfaat yang terdiri dari calon jemaah haji dan petugas layanan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya BPKH dalam menjamin kenyamanan, keamanan, dan kualitas pelayanan sehingga calon jemaah haji dapat menjalankan ibadah dengan lebih baik, sesuai prinsip syariah, transparansi, dan akuntabilitas.

This program is estimated to benefit 1,750 beneficiaries, consisting of prospective Hajj pilgrims and service staff. This initiative is part of BPKH's efforts to ensure comfort, safety, and quality of service, enabling prospective Hajj pilgrims to perform their religious duties more effectively, in accordance with Sharia principles, transparency, and accountability.

Uraian Description	Unit	2024	2023	2022
Pengelolaan Dana Haji Hajj Fund Management	Rp triliun	171,65	166,7	166,54
Nilai Penyaluran Pelayanan Ibadah Haji Disbursement Value of Hajj Pilgrimage Service	Rp	5.740.644.000	29.220.283.297	2.334.033.000

Inisiatif Program Kemaslahatan Pelayanan Ibadah Haji Tahun 2024

Benefit Program Initiatives of Hajj Pilgrimage Service in 2024

Inisiatif Initiatives	Penjelasan Inisiatif Initiatives Description	Jumlah Bantuan Number of Benefit Programs	Estimasi Penerima Manfaat Estimated Beneficiaries	SDGs
Konstruksi Construction	Program ini merupakan kegiatan pembangunan dan penyediaan sarana fisik serta infrastruktur pendukung yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas layanan, kemudahan akses, serta efektivitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bagi masyarakat. Kegiatan ini diwujudkan melalui pembangunan pusat layanan, gedung, maupun fasilitas terpadu yang dapat digunakan oleh jemaah, calon jemaah, maupun masyarakat umum sebagai sumber informasi, edukasi, konsultasi, dan pelayanan administrasi terkait haji dan umrah. This program is a development activity and the provision of physical facilities and supporting infrastructure that serve to improve service quality, ease of access, and the effectiveness of the implementation of Hajj and Umrah for the community. This activity is realized through the construction of service centers, buildings, and integrated facilities that can be used by pilgrims, prospective pilgrims, and the general public as sources of information, education, consultation, and administrative services related to Hajj and Umrah.	3	26.700	  
Pengadaan Barang Goods Procurement	Pengadaan barang dalam ruang lingkup pelayanan ibadah haji yang dilakukan oleh BPKH merupakan kegiatan penyediaan peralatan, perlengkapan, dan sarana penunjang operasional yang digunakan untuk meningkatkan mutu layanan, efektivitas, serta efisiensi penyelenggaraan ibadah haji.	2	1.750	   

Inisiatif Initiatives	Penjelasan Inisiatif Initiatives Description	Jumlah Bantuan Number of Benefit Programs	Estimasi Penerima Manfaat Estimated Beneficiaries	SDGs
	The procurement of goods within the scope of Hajj services carried out by BPKH is an activity to provide equipment, supplies, and operational support facilities used to improve service quality, effectiveness, and efficiency in the implementation of the Hajj pilgrimage.			



AHMAD IMAM MUJADID RAIS
Ketua Badan Pengurus Lazismu Pusat
Head of the Central Management Board of Lazismu

“Kerja sama ini adalah bukti nyata kontribusi Lazismu dan BPKH dalam memajukan layanan ibadah haji dan umroh di Indonesia, khususnya di Aceh. Gedung ini dibangun agar memenuhi kebutuhan informasi yang cepat dan akurat bagi calon jemaah, terutama bagi lansia yang membutuhkan akses lebih mudah. Lebih dari sekadar bangunan, fasilitas ini menjadi pusat pelayanan terpadu, sekaligus memperkuat pelayanan administratif dan logistik. Selaras dengan visi pemberdayaan umat, semoga PLIDHUT menjadi sarana yang membawa manfaat langsung untuk masyarakat dan memperkuat semangat kemaslahatan umat.”

"This collaboration is a concrete contribution by Lazismu and BPKH in advancing Hajj and Umrah services in Indonesia, especially in Aceh. This building was constructed to meet the need for fast and accurate information for prospective pilgrims, especially the elderly who need easier access. More than just a building, this facility serves as an integrated service center, while also strengthening administrative and logistical services. In line with the vision of empowering the community, hopefully PLIDHUT will become a means of bringing direct benefits to the community and strengthening the spirit of ummah benefit."

Jumlah Penerima Manfaat Ruang Lingkup Pelayanan Ibadah Haji

Number of Beneficiaries in Hajj Pilgrimage Service Scope

Uraian Description		Unit	2024	2023	2022
Jenis Kelamin Gender	Laki-laki Male	28.450 Jiwa* 28,450 People*	14.412	115.663	4.642
	Perempuan Female		14.041	148.725	4.546
	Jumlah Total		28.450	37.358	9.188
Usia Age	<30 Tahun <30 Years old		14.498	7.650	4.456
	30-50 Tahun 30-50 Years old		9.296	148.725	2.740
	>50 Tahun >50 Years old		4.656	92.752	1.992
	Jumlah Total		28.450	115.663	9.188
Daerah 3T 3T Areas	3T		0	1.364	0
	Non-3T		28.450	249.127	9.188

*Pada tahun 2024, BPKH tidak melakukan penghitungan penerima manfaat dengan kategori jenis kelamin, usia, dan daerah 3T.

*In 2024, BPKH did not calculate beneficiaries by gender, age, and 3T areas.

Roadmap Ruang Lingkup Pelayanan Ibadah Haji

Dalam upaya meningkatkan kualitas pengalaman ibadah jemaah, Program Kemaslahatan difokuskan pada optimalisasi layanan haji secara menyeluruh. Program ini mencakup berbagai aspek, mulai dari persiapan pra-keberangkatan, bimbingan manasik, hingga dukungan layanan ketika jemaah berada di Tanah Suci dan setelah kembali ke Tanah Air. Pendekatan yang diambil tidak hanya menyentuh aspek spiritual, tetapi juga menyeluruh terhadap fasilitas penunjang dan infrastruktur layanan ibadah haji.

Memasuki tahun 2024, pelaksanaan kegiatan pada ruang lingkup Pelayanan Ibadah Haji diarahkan pada penguatan infrastruktur dan peningkatan aksesibilitas layanan. Bidang Kemaslahatan melakukan sinergi intensif dengan Kementerian Agama untuk menetapkan prioritas program yang relevan dengan kebutuhan jemaah. Salah satu fokus utama pada tahun ini adalah mendukung inisiatif digitalisasi proses pendaftaran dan pengelolaan data haji yang dijalankan pemerintah.

Roadmap of Hajj Pilgrimage Service Scope

In order to improve the quality of the pilgrims' worship experience, the Benefit Program focuses on optimizing all aspects of the Hajj service. This program covers various aspects, ranging from pre-departure preparations, guidance on rituals, to support services while the pilgrims are in the Holy Land and after their return to Indonesia. The approach taken not only touches on spiritual aspects, but also comprehensively addresses supporting facilities and infrastructure for Hajj services.

Entering 2024, activities in the scope of Hajj Services are directed at strengthening infrastructure and improving service accessibility. The Benefit Program Field is working closely with the Ministry of Religious Affairs to determine program priorities that are relevant to the needs of pilgrims. One of the main focuses this year is supporting the government's initiative to digitize the Hajj registration process and data management.

Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akurasi informasi, dan efisiensi dalam pelayanan, sekaligus memastikan jemaah haji mendapatkan pengalaman yang lebih nyaman, modern, dan terintegrasi.

This effort is expected to enhance transparency, accuracy of information, and efficiency in service delivery, while ensuring that Hajj pilgrims experience a more comfortable, modern, and integrated journey.



PENDIDIKAN DAN DAKWAH EDUCATION AND DA'WAH

Pada tahun 2024, program Kemaslahatan BPKH dalam bidang Pendidikan dan Dakwah bertujuan untuk memperkuat kualitas pendidikan dan dakwah bagi umat di Indonesia. Dukungan yang diberikan meliputi kegiatan sosial, konstruksi, pengadaan barang, pengadaan mobil *ambulance*, pengadaan mobil dakwah, dan program beasiswa. Pada tahun 2024, total nilai penyaluran untuk program pada ruang lingkup ini mencapai Rp67.091.824.155.

In 2024, the BPKH Benefit Program in the field of Education and Da'wah aims to strengthen the quality of education and da'wah for the people of Indonesia. The support provided includes social activities, construction, procurement of goods, procurement of ambulances and da'wah vehicles and scholarship programs. In 2024, the total value of disbursements for programs within this scope reached Rp67,091,824,155.

Upaya kegiatan kemaslahatan pada ruang lingkup pendidikan dan dakwah pada tahun 2024 mencakup:

The benefit program activities in the field of education and da'wah in 2024 include:

1. Peresmian Gedung Majelis Taklim Yayasan Chamim Abdul Rasyid di Jepara

Pada Februari 2025, BPKH bersama mitra kemaslahatan SoloPeduli meresmikan secara resmi Gedung Majelis Taklim Yayasan Chamim Abdul Rasyid di Desa Margoyoso, Jepara.

1. The inauguration of the Chamim Abdul Rasyid Foundation's Majelis Taklim Building in Jepara

In February 2025, BPKH and its benefit program partner SoloPeduli officially inaugurated the Chamim Abdul Rasyid Foundation's Majelis Taklim Building in Margoyoso Village, Jepara.

Gedung Majelis Taklim ini dibangun sejak Agustus 2024 dan rampung pada Januari 2025. Fasilitasnya mencakup aula utama yang mampu menampung banyak jemaah, ruang VIP, gudang penyimpanan perlengkapan, tempat wudhu, serta toilet biasa dan VIP. Dibangun dengan tujuan menjadi pusat kegiatan pengajian mingguan bagi ibu-ibu Muslimat NU Ratu Kalimanyatan dan komunitas sekitar, fasilitas ini diharapkan memperkuat akses dakwah dan pendidikan Islam secara lokal.

The Majelis Taklim Building was constructed in August 2024 and completed in January 2025. The facilities include a main hall capable of accommodating many attendees, a VIP room, a storage room for equipment, a place for ablution, as well as regular and VIP restrooms. Built with the aim of becoming a center for weekly religious study sessions for Muslimat NU Ratu Kalimanyatan women and the surrounding community, this facility is expected to strengthen access to Islamic preaching and education at the local level.

2. Program Ekspresi BAZNAS

BPKH berkolaborasi dengan BAZNAS melalui Program Ekspresi BAZNAS untuk meningkatkan literasi zakat, haji, dan kecintaan terhadap tanah air. Kegiatan ini mencakup edukasi interaktif dan kreatif bagi masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai pentingnya zakat dan peranannya dalam pemerataan kesejahteraan sosial. Melalui pendekatan visual, diskusi tematik, dan kegiatan edukatif, peserta diajak memahami keterkaitan zakat dengan keberlangsungan kehidupan umat.

Program ini juga menumbuhkan kesadaran kebangsaan dengan menekankan peran haji dan zakat dalam membangun kesejahteraan kolektif. Dengan demikian, BPKH dan BAZNAS berharap literasi umat semakin meningkat, mendorong optimalisasi penghimpunan dan pemanfaatan zakat, sekaligus menanamkan semangat berbagi sebagai bagian dari kontribusi nyata terhadap pembangunan sosial dan spiritual bangsa.

3. Pengadaan Mobil Dakwah

Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat layanan pendidikan dan dakwah di berbagai wilayah, Program Kemaslahatan BPKH turut memberikan mobil dakwah untuk mendukung kegiatan dakwah di beberapa daerah.

4. Program Beasiswa

Pada acara *Indonesia Sharia Economic Festival* (ISEF) 2024, BPKH meluncurkan secara resmi Program Beasiswa Haji Indonesia sebagai implementasi konkret pemanfaatan Nilai Manfaat DAU, untuk mendukung generasi muda berprestasi. Program ini dirancang untuk mencegah putus sekolah atau kuliah akibat kendala finansial, dengan memberikan beasiswa kepada 1.000 pelajar setingkat SMA dan 1.000 mahasiswa aktif program vokasi atau sarjana. Selain meringankan beban biaya pendidikan, program ini juga berupaya memperluas akses pendidikan, meningkatkan partisipasi pendidikan, serta mengurangi angka putus sekolah di wilayah Sabang–Merauke.

Selain bantuan biaya pendidikan, para penerima beasiswa mendapatkan pelatihan *capacity &*

2. BAZNAS Expression Program

BPKH collaborates with BAZNAS through the BAZNAS Expression Program to enhance literacy on zakat, Hajj, and national awareness. This program includes interactive and creative educational activities for the public, particularly the younger generation, on the importance of zakat and its role in promoting social welfare. Through visual approaches, thematic discussions, and educational activities, participants are encouraged to understand the connection between zakat and the sustainability of community life.

The program also fosters national awareness by emphasizing the role of Hajj and zakat in building collective welfare. Thus, BPKH and BAZNAS hope that community literacy will increase, encouraging the optimal collection and utilization of zakat, while instilling a spirit of generosity as a tangible contribution to the social and spiritual development of the nation.

3. Dakwah Vehicles Program

As part of its ongoing efforts to strengthen education and dakwah services in various regions, the BPKH Benefit Program also provides dakwah vehicles to support dakwah activities in several areas.

4. Scholarship Program

At the *Indonesia Sharia Economic Festival* (ISEF) 2024, BPKH officially launched the Indonesian Hajj Scholarship Program as a concrete utilization of the DAU Benefit Value, to support outstanding young people. This program is designed to prevent school or college dropouts due to financial constraints by providing scholarships to 1,000 high school students and 1,000 active vocational or undergraduate students. In addition to easing the burden of education costs, this program also seeks to expand access and participation in education, and reduce dropout rates in the Sabang–Merauke region.

In addition to educational assistance, scholarship recipients receive capacity and character building

character building serta pembekalan terkait keuangan haji selama dua semester (satu tahun), yang disampaikan secara daring melalui *Learning Management System* (LMS) eksklusif BPKH. Program ini tidak hanya ditujukan untuk mencetak insan unggul secara akademis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keislaman dan kepedulian terhadap kemajuan umat dan bangsa, sebuah strategi pendidikan holistik yang mengintegrasikan aspek spiritual dan kompetensi generasi muda Indonesia.

training as well as guidance related to Hajj finances for two semesters (one year), which is delivered online through BPKH's exclusive Learning Management System (LMS). This program is not only aimed at producing academically excellent individuals, but also at instilling Islamic values and concern for the progress of the people and the nation, a holistic educational strategy that integrates the spiritual aspects and competencies of Indonesia's young generation.

5. Pengadaan PLTS Hari Santri Bersama BPKH

Sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung kemandirian energi sekaligus mendorong praktik keberlanjutan di lingkungan pesantren, BPKH bersama mitra pelaksana melaksanakan Program Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2023 di Kalimantan Selatan. Program ini menysasar 11 pondok pesantren yang tersebar di berbagai kabupaten/kota seperti Banjarmasin, Banjarbaru, Tanah Laut, hingga Hulu Sungai Selatan, dengan total kapasitas terpasang mencapai 16.500 Watt Peak (Wp). Melalui bantuan PLTS ini, pondok pesantren tidak hanya memperoleh akses energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan, tetapi juga turut serta dalam gerakan transisi energi nasional menuju sumber energi terbarukan.

Pemasangan PLTS ini memberikan manfaat konkret bagi operasional pondok pesantren, seperti mengurangi biaya listrik, memastikan pasokan energi yang lebih stabil, serta menjadi sarana edukatif bagi santri dan masyarakat sekitar mengenai pentingnya energi hijau. Tidak hanya itu, pengadaan PLTS ini juga memperkuat ketahanan fasilitas pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan kebutuhan energi jangka panjang. Program ini mencerminkan sinergi antara nilai-nilai keagamaan, teknologi, dan keberlanjutan yang selaras dengan prinsip kemaslahatan umat yang diusung oleh BPKH.

5. Procurement of Solar Power Plants for Santri Day with BPKH

As part of its commitment to supporting energy independence while promoting sustainable practices in Islamic boarding schools, BPKH and its implementing partners are implementing a Solar Power Plant (PLTS) Procurement Program to commemorate National Santri Day 2023 in South Kalimantan. This program targets 11 Islamic boarding schools spread across various districts/cities such as Banjarmasin, Banjarbaru, Tanah Laut, and Hulu Sungai Selatan, with a total installed capacity of 16,500 Watt Peak (Wp). Through this PLTS assistance, Islamic boarding schools not only gain access to more efficient and environmentally friendly energy, but also participate in the national energy transition movement towards renewable energy sources.

The installation of PLTS provides concrete benefits for the operation of Islamic boarding schools, such as reducing electricity costs, ensuring a more stable energy supply, and serving as an educational tool for students and the surrounding community on the importance of green energy. Not only that, the procurement of this PLTS also strengthens the resilience of Islamic educational facilities in facing the challenges of climate change and long-term energy needs. This program reflects the synergy between religious values, technology, and sustainability that is in line with the principle of ummah's benefit implemented by BPKH.

Uraian Description	Unit	2024	2023	2022
Nilai Penyaluran Pendidikan dan Dakwah Disbursement Value of Education and Da'wah	Rp	67.091.824.155	49.441.416.806	44.612.854.493

Inisiatif Kegiatan Kemaslahatan pada Ruang Lingkup Pendidikan dan Dakwah Tahun 2024

Benefit Program Initiatives of Education and Da'wah in 2024

Inisiatif Initiatives	Penjelasan Inisiatif Initiatives Description	Jumlah Bantuan Number of Benefit Programs	Estimasi Penerima Manfaat Estimated Beneficiaries	SDGs
Kegiatan Sosial Social Activities	Program kegiatan sosial dalam ruang lingkup pendidikan dan dakwah yang dilaksanakan oleh BPKH adalah inisiatif kemaslahatan umat yang berfokus pada peningkatan literasi keagamaan, pendidikan Islam, serta penguatan dakwah sebagai sarana pembinaan akhlak dan karakter generasi muda. Program ini diwujudkan melalui kegiatan pembelajaran, pembinaan, dan syiar Islam yang dikemas secara edukatif, kreatif, serta inspiratif. The social activities program in the scope of education and da'wah carried out by BPKH is a Benefit Program initiative that focuses on improving religious literacy, Islamic education, and strengthening da'wah as a means of fostering the morals and character of the younger generation. This program is realized through educational, creative, and inspiring learning, guidance, and Islamic preaching activities.	1	1.500	   
Konstruksi Construction	Program konstruksi dalam ruang lingkup pendidikan dan dakwah merupakan kegiatan pembangunan dan penyediaan fasilitas fisik penunjang pendidikan dan dakwah untuk meningkatkan akses, kualitas, serta keberlanjutan layanan pendidikan Islam dan syiar dakwah bagi masyarakat. The construction program in the scope of education and da'wah is an activity to build and provide physical facilities to support education and da'wah in order to improve access, quality, and sustainability of Islamic education and da'wah services for the community.	60	57.114	   

Inisiatif Initiatives	Penjelasan Inisiatif Initiatives Description	Jumlah Bantuan Number of Benefit Programs	Estimasi Penerima Manfaat Estimated Beneficiaries	SDGs
Pengadaan Barang Goods Procurement	Program pengadaan barang dalam ruang lingkup pendidikan dan dakwah merupakan kegiatan penyediaan peralatan, perlengkapan, dan sarana penunjang yang bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, kegiatan dakwah, serta syiar agama di tengah masyarakat. The goods procurement program in the scope of education and da'wah is an activity to provide equipment, supplies, and supporting facilities aimed at supporting the implementation of education, da'wah activities, and religious outreach in the community.	59	88.803	     
Program Beasiswa Scholarship Program	Program inisiatif beasiswa merupakan program untuk mendukung mahasiswa dan siswa berprestasi namun kurang mampu. Beasiswa ini memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk mengakses pendidikan tinggi tanpa hambatan finansial yang signifikan. The scholarship initiative program is a program to support outstanding but underprivileged students. These scholarships provide opportunities for students to access higher education without significant financial barriers.	2	4.045	 



KHRISNA AFIF KURNIAWAN

Mahasiswa Akuntansi Sektor Publik, UGM
Public Sector Accounting Student, UGM

"Saya sangat berterima kasih atas kesempatan Beasiswa Haji yang diberikan oleh BPKH. Bantuan ini benar-benar meringankan beban biaya pendidikan saya, terutama sebagai mahasiswa dari keluarga menengah yang kadang tidak termasuk dalam kategori penerima bantuan sosial. Dengan adanya beasiswa ini, saya bisa lebih fokus dalam belajar tanpa harus terlalu khawatir tentang biaya kuliah dan kebutuhan harian lainnya. Ini bukan sekadar bantuan finansial, tapi juga dorongan moral dan kepercayaan terhadap potensi generasi muda. Saya berharap, ke depan program ini bisa terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak mahasiswa di seluruh Indonesia."

"I am very grateful for the Hajj Scholarship opportunity provided by BPKH. This assistance has truly eased my educational expenses, especially as a student from a middle-class family who is sometimes not eligible for other social assistance programs. With this scholarship, I can focus more on my studies without having to worry too much about tuition fees and other daily needs. This is not just financial assistance, but also moral support and trust in the potential of the younger generation. I hope that in the future, this program can continue and reach more students throughout Indonesia."

Jumlah Penerima Manfaat Ruang Lingkup Pendidikan dan Dakwah

Number of Beneficiaries in Education and Da'wah Scope

Uraian Description		Unit	2024	2023	2022
Jenis Kelamin Gender	Laki-laki Male	151.462 Jiwa* 151,462 People*	72.591	22.110	25.967
	Perempuan Female		78.871	18.334	25.364
	Jumlah Total		151.462	40.444	51.331
Usia Age	<30 Tahun <30 Years old		92.061	36.386	32.151
	30-50 Tahun 30-50 Years old		42.249	3.260	12.289
	>50 Tahun >50 Years old		17.152	798	6.891
	Jumlah Total		151.462	40.444	51.331
Daerah 3T 3T Areas	3T		235	50	0
	Non-3T		151.439	40.394	51.331

*Pada tahun 2024, BPKH tidak melakukan penghitungan penerima manfaat dengan kategori jenis kelamin, usia, dan daerah 3T.

*In 2024, BPKH did not calculate beneficiaries by gender, age, and 3T areas.

Roadmap Ruang Lingkup Pendidikan dan Dakwah

Ruang Lingkup Pendidikan dan Dakwah dalam Program Kemaslahatan BPKH memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas umat Islam melalui penyediaan sarana, prasarana, serta dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan penguatan syiar Islam. Program ini dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan, tetapi juga mendorong keberdayaan masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan dakwah, pembinaan keagamaan, dan penyediaan infrastruktur pendukung.

Pada tahun 2024, pelaksanaan kegiatan Kemaslahatan di bidang Pendidikan dan Dakwah berjalan sesuai dengan agenda yang ditetapkan dalam *roadmap* Kemaslahatan. Fokus kegiatan mulai diarahkan pada sasaran sekunder yang menyentuh aspek pengembangan kapasitas masyarakat dan peningkatan mutu pendidikan Islam. BPKH juga terus memperluas distribusi program hingga menjangkau wilayah 3T, memastikan manfaat program dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Roadmap of Education and Da'wah Scope

The scope of education and da'wah in the BPKH Benefit Program has a strategic role in improving the quality and capacity of Muslims through the provision of facilities, infrastructure, and support for religious activities and the strengthening of Islamic preaching. This program is designed not only to meet educational facility needs but, also to empower communities through the implementation of da'wah activities, religious guidance, and the provision of supporting infrastructure.

In 2024, the implementation of benefit program activities in the field of education and da'wah is proceeding in accordance with the agenda set out in the benefit program roadmap. The focus of activities are now being directed toward secondary targets that address focus on community capacity development and the improvement of the quality of Islamic education. BPKH also continues to expand the distribution of its programs to reach 3T areas, ensuring that the benefits of the programs are felt evenly by all segments of society.

Sasaran Primer Primary Objective

Membangun karakter umat, khususnya pada pendidikan level anak usia dini untuk membangun sikap mental dan budi pekerti (akhlakul karimah).
Building the ummah's character, especially at the early childhood education level to build noble mental attitudes and character (akhlakul karimah).

Sasaran Sekunder Secondary Objectives

Membangun karakter masyarakat yang tangguh dan mandiri sesuai dengan karakter yang diamanahkan Islam.
Building community characters that are resilient and independent that align with Islamic teaching.

Sasaran Tersier Tertiary Objective

Membangun program dakwah di daerah terluar dan terpencil serta daerah rawan akidah.
Building da'wah programs in outermost and remote areas and areas with low aqeedah.



KESEHATAN HEALTH



Dalam bidang kesehatan, Program Kemaslahatan BPKH terus memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas inisiatif yang ditujukan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Berbagai kegiatan telah dirancang dan dijalankan secara terintegrasi sebagai wujud komitmen BPKH dalam mendukung peningkatan layanan kesehatan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Total nilai penyaluran untuk program pada ruang lingkup ini mencapai Rp33.223.358.550 pada tahun 2024.

Sepanjang tahun 2024, beragam program kesehatan telah dilaksanakan, mulai dari penyediaan fasilitas layanan medis, dukungan sarana prasarana kesehatan, hingga penyuluhan dan edukasi masyarakat, sebagai berikut:

1. Operasi Katarak Gratis untuk Masyarakat Jawa Timur

BPKH bersama mitra strategis menyelenggarakan Operasi Katarak Gratis bagi masyarakat kurang mampu di Jawa Timur. Program ini dirancang untuk memberikan akses layanan kesehatan mata berkualitas, khususnya bagi kelompok dhuafayang selama ini menghadapi keterbatasan biaya dan fasilitas medis. Melalui kegiatan ini, BPKH ingin memastikan bahwa masyarakat yang mengalami gangguan penglihatan dapat kembali melihat dengan lebih baik dan menjalani kehidupan yang lebih produktif.

In the health scope, BPKH Benefit Program continues to expand the reach and improve the quality of initiatives aimed at providing direct benefits to the community. Various activities have been designed and implemented in an integrated manner as a manifestation of BPKH's commitment to support the improvement of health services, especially for groups in need. The total value of disbursements for programs within this scope reached Rp33,223,358,550 in 2024.

Throughout 2024, a variety of health programs have been implemented, ranging from the provision of medical facilities, support for health infrastructure, to community outreach and education, as follows:

1. Free Cataract Surgery for the People of East Java

BPKH, in collaboration with strategic partners, organized Free Cataract Surgery for underprivileged communities in East Java. This program was designed to provide access to quality eye care services, particularly for vulnerable groups who have faced financial constraints and limited access to medical facilities. Through this activity, BPKH aims to ensure that individuals with vision impairments can regain their sight and lead more productive lives.

Lebih dari sekadar pelayanan medis, kegiatan ini juga menjadi bagian dari misi kemanusiaan BPKH untuk meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat. Dengan penanganan operasi yang dilakukan oleh tenaga medis berpengalaman, program ini tidak hanya membantu memulihkan kesehatan pasien, tetapi juga mendorong terciptanya masyarakat yang lebih inklusif, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

More than just medical services, this activity is also part of BPKH's humanitarian mission to improve the quality of life of beneficiaries. With surgeries performed by experienced medical personnel, this program not only helps restore patients' health, but also promotes the creation of a more inclusive society where everyone has equal opportunities to contribute to social and economic life.

2. Penyaluran 1.500 Paket Gizi dan Sosialisasi Hidup Sehat di Cirebon

BPKH bersama BAZNAS mendistribusikan 1.500 paket gizi kepada masyarakat di Cirebon, khususnya di sekitar Pondok Pesantren Baitussakhi. Kegiatan ini juga dilengkapi dengan program edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai langkah preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Program ini menjadi wujud nyata komitmen BPKH dalam membantu memperbaiki kondisi gizi keluarga kurang mampu sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

2. Distribution of 1,500 Nutrition Packages and Healthy Living Socialization in Cirebon

BPKH together with BAZNAS distributed 1,500 nutrition packages to the community in Cirebon, especially around the Baitussakhi Islamic Boarding School. This activity was also accompanied by a Clean and Healthy Lifestyle (PHBS) education program as a preventive measure to raise public awareness of the importance of maintaining personal and environmental hygiene. This program is a tangible manifestation of BPKH's commitment to help improve the nutritional status of underprivileged families while also improving the quality of public health.

Selain penyaluran bantuan, sosialisasi PHBS dilakukan secara interaktif agar peserta dapat langsung mempraktikkan cara hidup sehat sehari-hari. Upaya ini diharapkan dapat menekan angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak serta generasi penerus. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan manfaat sesaat, tetapi juga mendorong perubahan perilaku jangka panjang yang mendukung terciptanya masyarakat yang lebih sehat dan produktif.

In addition to distributing aid, the PHBS socialization was conducted interactively, so that participants could immediately practice healthy daily habits. This effort is expected to reduce stunting rates and improve the welfare of children and future generations. Thus, this program not only provides immediate benefits but also encourages long-term behavioral changes that support the creation of a healthier and more productive society.

3. Bantuan Alat USG untuk Klinik Rumah Sehat BAZNAS Yogyakarta

Dalam rangka memperkuat pelayanan kesehatan, BPKH memberikan bantuan berupa alat ultrasonografi (USG) kepada Klinik Rumah Sehat BAZNAS Yogyakarta. Penyerahan bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, khususnya bagi para mustahik yang membutuhkan layanan prenatal dan konsultasi medis berkualitas tanpa harus terbebani biaya. Langkah ini merupakan bentuk dukungan BPKH terhadap upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui fasilitas pelayanan medis yang memadai.

3. Ultrasound Equipment Assistance for the BAZNAS Yogyakarta Healthy Home Clinic

To strengthen healthcare services, BPKH provided ultrasound (USG) equipment to the BAZNAS Yogyakarta Healthy Home Clinic. The donation aims to improve the quality of maternal and child health examinations, particularly for beneficiaries in need of quality prenatal care and medical consultations without financial burden. This initiative reflects BPKH's support for community health improvement through adequate medical facilities.

Selain memberikan fasilitas, BPKH juga berperan dalam memperluas jangkauan layanan kesehatan melalui kolaborasi strategis dengan BAZNAS. Dengan adanya alat USG baru, klinik dapat melayani lebih banyak pasien, mempercepat proses diagnosis, dan memberikan penanganan medis yang lebih tepat. Program ini selaras dengan visi BPKH untuk berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta memperkuat sistem pelayanan medis yang inklusif dan berkeadilan.

In addition to providing facilities, BPKH also plays a role in expanding healthcare coverage through strategic collaboration with BAZNAS. With the new ultrasound machine, the clinic can serve more patients, expedite diagnosis processes, and provide more accurate medical treatment. This program aligns with BPKH's vision to contribute to improving community health quality and strengthening an inclusive and an equitable healthcare system.

4. Pembangunan Fasilitas Poliklinik Ibnu Cholil di Rembang

BPKH bekerja sama dengan BAZNAS mendukung pembangunan dan penyediaan sarana-prasarana kesehatan di Poliklinik Ibnu Cholil, Rembang. Dukungan ini meliputi renovasi fasilitas, penyediaan peralatan medis, dan penambahan sarana pelayanan kesehatan lainnya untuk meningkatkan kapasitas klinik dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Program ini menjadi salah satu bentuk nyata komitmen BPKH dalam menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses.

4. Construction of the Ibnu Cholil Polyclinic in Rembang

BPKH collaborated with BAZNAS to support the construction and provision of health facilities at the Ibnu Cholil Polyclinic in Rembang. This support included renovating facilities, providing medical equipment, and adding other health service facilities to increase the clinic's capacity to provide the best services to the community. This program is a tangible manifestation of BPKH's commitment to providing quality and accessible healthcare services.

Dengan fasilitas yang lebih lengkap, Poliklinik Ibnu Cholil kini dapat memberikan layanan pemeriksaan dan perawatan kesehatan yang lebih komprehensif, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kehadiran fasilitas ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan akses terhadap layanan medis di wilayah Rembang dan sekitarnya. Selain itu, program ini juga mendukung agenda pembangunan kesehatan nasional melalui penyediaan fasilitas medis modern yang dapat dimanfaatkan secara luas.

With more complete facilities, the Ibnu Cholil Polyclinic can now provide more comprehensive health check-ups and treatment, especially for low-income communities. The presence of this facility is expected to reduce gaps in access to medical services in Rembang and its surrounding areas. In addition, this program also supports the national health development agenda through the provision of modern medical facilities that can be widely utilized.

5. Penyaluran Empat Unit Ambulan ke Kabupaten Lebak

BPKH menyalurkan empat unit ambulans untuk mendukung layanan kesehatan darurat di Kabupaten Lebak. Bantuan ini diberikan sebagai upaya memperkuat fasilitas kesehatan di daerah yang memiliki keterbatasan sarana transportasi medis, sehingga masyarakat dapat memperoleh penanganan cepat saat keadaan darurat. Ambulans ini dialokasikan ke beberapa Puskesmas dan Pos Kesehatan Desa yang membutuhkan fasilitas mobilitas untuk layanan kesehatan masyarakat.

5. Distribution of Four Ambulances to Lebak Regency

BPKH distributed four ambulances to support emergency health services in Lebak Regency. This assistance was provided as an effort to strengthen health facilities in areas with limited medical transportation facilities, so that the community can receive quick treatment in emergencies. These ambulances were allocated to several Community Health Centers and Village Health Posts that needed mobility facilities for public health services.

Selain meningkatkan akses layanan kesehatan, keberadaan ambulans juga diharapkan mempercepat proses rujukan pasien ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Dengan adanya bantuan ini, masyarakat di daerah terpencil tidak lagi mengalami keterlambatan dalam mendapatkan perawatan darurat, yang pada akhirnya dapat menurunkan risiko komplikasi dan angka kematian akibat keterlambatan penanganan medis.

In addition to improving access to health services, the ambulances are also expected to speed up the process of referring patients to advanced health facilities. With this assistance, people in remote areas will no longer experience delays in receiving emergency care, which will ultimately reduce the risk of complications and mortality due to delayed medical treatment.

6. Bantuan Mobil Ambulans ke Klinik PKU Muhammadiyah Merden, Banjarnegara

BPKH melalui kerja sama dengan LAZISMU memberikan satu unit mobil ambulans kepada Klinik Utama PKU Muhammadiyah Merden di Banjarnegara. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan medis, terutama untuk penanganan kasus darurat dan kegiatan rujukan pasien. Dengan fasilitas ini, klinik dapat memberikan layanan kesehatan yang lebih cepat, tepat, dan efisien bagi masyarakat setempat.

6. Ambulance Assistance to the PKU Muhammadiyah Merden Clinic, Banjarnegara

BPKH, in collaboration with LAZISMU, provided an ambulance to the PKU Muhammadiyah Merden Main Clinic in Banjarnegara. This assistance is expected to improve the quality of medical services, especially for emergency cases and patient referrals. With this facility, the clinic can provide faster, more accurate, and more efficient health services to the local community.

Bantuan ambulans ini juga menjadi bagian dari upaya BPKH untuk memperkuat jejaring pelayanan kesehatan berbasis komunitas. Keberadaannya akan membantu menjangkau wilayah yang sulit diakses dan memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Program ini menunjukkan komitmen BPKH dalam meningkatkan kesejahteraan umat melalui penguatan fasilitas kesehatan di berbagai daerah.

This ambulance assistance is also part of BPKH's efforts to strengthen community-based health service networks. Its presence will help reach areas that are difficult to access and ensure that the community receives adequate health services. This program demonstrates BPKH's commitment to improving the welfare of the people through the strengthening of health facilities in various regions.

Uraian Description	Unit	2024	2023	2022
Nilai Penyaluran Kesehatan Disbursement Value of Health	Rp	33.223.358.550	14.800.947.875	16.253.732.225

Inisiatif Kegiatan Kemaslahatan pada Ruang Lingkup Kesehatan Tahun 2024

Benefit Program Initiatives of Health in 2024

Inisiatif Initiatives	Penjelasan Inisiatif Initiatives Description	Jumlah Bantuan Number of Benefit Programs	Estimasi Penerima Manfaat Estimated Beneficiaries	SDGs
Kegiatan Sosial Social Activities	Program kegiatan sosial dalam ruang lingkup kesehatan merupakan serangkaian inisiatif kemaslahatan umat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui layanan kesehatan yang gratis, inklusif, dan berkelanjutan. Social programs in the health sector are a series of public benefit program initiatives that aim to improve the quality of life of the community through free, inclusive, and sustainable health services.	3	4.600	  
Konstruksi Construction	Program kegiatan konstruksi dalam ruang lingkup kesehatan merupakan upaya pembangunan dan penyediaan sarana serta prasarana kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan masyarakat. Kegiatan ini diwujudkan melalui pembangunan fasilitas kesehatan, seperti klinik, poliklinik, rumah sakit kecil, maupun sarana pendukung lainnya, yang dapat digunakan secara berkelanjutan untuk memberikan layanan medis, baik bersifat promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Construction programs in the health sector are efforts to develop and provide health facilities and infrastructure aimed at improving access to and the quality of public health services. These activities are taken through the construction of health facilities, such as clinics, polyclinics, small hospitals, and other supporting facilities, which can be used on an ongoing basis to provide medical services, whether promotive, preventive, curative, or rehabilitative in nature.	3	40.516	  

Inisiatif Initiatives	Penjelasan Inisiatif Initiatives Description	Jumlah Bantuan Number of Benefit Programs	Estimasi Penerima Manfaat Estimated Beneficiaries	SDGs
Pengadaan Barang Goods Procurement	Program pengadaan barang dalam ruang lingkup kesehatan merupakan kegiatan penyediaan dan distribusi peralatan serta kebutuhan medis yang ditujukan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Program ini mencakup pengadaan alat kesehatan, perlengkapan medis, maupun sarana penunjang lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh fasilitas Kesehatan. The program for the procurement of goods in the health sector involves the provision and distribution of medical equipment and supplies aimed at supporting the improvement of the quality of public health services. This program includes the procurement of medical equipment, supplies, and supporting facilities that can be utilized by health facilities.	4	25.450	   
Pengadaan Mobil Ambulance Ambulance Car Procurement	Program pengadaan mobil ambulans dalam ruang lingkup Kesehatan merupakan kegiatan penyediaan kendaraan darurat medis yang difungsikan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya dalam penanganan gawat darurat, evakuasi pasien, dan layanan kesehatan berbasis komunitas. Melalui program ini, BPKH berupaya menghadirkan fasilitas kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh rumah sakit, puskesmas, klinik, dan poliklinik The ambulance procurement program in the health sector is an activity to provide emergency medical vehicles that are used to support public health services, particularly in handling emergencies, evacuating patients, and providing community-based health services. Through this program, BPKH strives to provide health facilities that can be used by hospitals, community health centers, clinics, and polyclinics.	20	132.200	  



SUPADMI

Peserta Operasi Katarak
Cataract Surgery Participant

"Saya mengucapkan terima kasih kepada BPKH, BMM, dan Klinik Mata INOVEYE yang telah mengadakan operasi katarak gratis. Karena operasi katarak cukup mahal dan saya pasti tidak mampu untuk melakukan operasi katarak. Semoga semua yang terlibat dalam kegiatan operasi ini mendapatkan pahala jariyah."

"I would like to thank BPKH, BMM, and INOVEYE Eye Clinic for conducting free cataract surgeries. Cataract surgery is costly, and I would not have been able to afford it. May all those involved in this surgery receive blessings for their kindness."

Jumlah Penerima Manfaat Ruang Lingkup Kesehatan

Number of Beneficiaries in Health Scope

Uraian Description		Unit	2024	2023	2022
Jenis Kelamin Gender	Laki-laki Male	202.766 Jiwa* 202,766 People*	100.689	119.997	227.497
	Perempuan Female		102.077	149.776	222.968
	Jumlah Total		202.766	269.753	450.465

Uraian Description		Unit	2024	2023	2022
Usia Age	<30 Tahun <30 Years old		86.714	53.776	-
	30-50 Tahun 30-50 Years old		74.387	86.280	-
	>50 Tahun >50 Years old		41.665	129.697	-
	Jumlah Total		202.766	269.753	450.465
Daerah 3T 3T Areas	3T		0	0	-
	Non-3T		202.766	269.753	-

*Pada tahun 2024, BPKH tidak melakukan penghitungan penerima manfaat dengan kategori jenis kelamin, usia, dan daerah 3T.

*In 2024, BPKH did not calculate beneficiaries by gender, age, and 3T areas.

Roadmap Ruang Lingkup Kesehatan

Ruang lingkup kesehatan dalam Program Kemaslahatan BPKH diarahkan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, khususnya umat Muslim di Indonesia. Program ini dirancang tidak hanya bersifat tanggap terhadap kebutuhan mendesak, tetapi juga bersifat preventif dan berkelanjutan.

Selama tahun pelaporan, BPKH melaksanakan berbagai kegiatan kemaslahatan di bidang kesehatan sesuai dengan rencana yang tertuang dalam *roadmap*. Pada tahap ini, fokus diarahkan pada perluasan manfaat kepada sasaran sekunder dengan hasil yang cukup signifikan. Salah satu prioritas utama adalah peningkatan layanan kesehatan melalui dukungan terhadap Rumah Sakit, klinik, dan poliklinik di berbagai daerah, sehingga fasilitas pelayanan medis dapat lebih optimal dan mudah diakses oleh masyarakat luas.

Roadmap of Health Scope

The scope of health in the BPKH Benefit Program is directed at improving the health of the community, particularly Muslims in Indonesia. This program is designed not only to respond to urgent needs, but also to be preventive and sustainable.

During the reporting year, BPKH implemented various benefit program activities in the health sector in accordance with the plans outlined in the roadmap. At this stage, the focus was directed to expanding benefits to secondary targets with significant results. One of the main priorities was improving health services through support for hospitals, clinics, and polyclinics in various regions, so that medical facilities could be more optimal and easily accessible to the wider community.





SOSIAL KEAGAMAAN SOCIAL-RELIGIOUS MATTER



Pada tahun 2024, program kemaslahatan BPKH dalam ruang lingkup sosial keagamaan menempatkan perhatian besar pada dukungan terhadap kegiatan sosial dan pelestarian lingkungan hidup. Melalui berbagai inisiatif, BPKH tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan umat, tetapi juga menghadirkan dampak positif bagi masyarakat secara luas.

Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah program penanaman mangrove sebagai upaya menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan pengadaan mesin pengolah sampah plastik untuk mendorong pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat peran BPKH dalam memberikan kemaslahatan yang inklusif, baik bagi umat Islam maupun seluruh lapisan masyarakat.

Berikut adalah rincian kegiatan di tahun 2024:

1. Program Sedekah Kurban 1445H

Pada momentum Idul adha 1445H, BPKH menyalurkan sebanyak 1.554 hewan kurban yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia melalui Program Sedekah Kurban. Program ini bertujuan memberikan manfaat bagi umat Islam, khususnya masyarakat kurang mampu, agar mereka dapat merasakan keberkahan hari raya. Pelaksanaan program melibatkan berbagai lembaga mitra, memastikan penyaluran hewan kurban dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip syariah.

Selain memberikan manfaat konsumsi pangan, program ini juga menjadi sarana untuk memperkuat kepedulian sosial dan kebersamaan antarumat. Melalui pendistribusian hewan kurban ke pelosok negeri, BPKH berupaya menjaga nilai gotong royong serta meningkatkan rasa solidaritas di tengah masyarakat. Inisiatif ini juga selaras dengan misi BPKH dalam mendukung kesejahteraan umat melalui pengelolaan dana kemaslahatan secara efektif.

In 2024, BPKH's Benefit program in the social-religious matters placed a strong emphasis on supporting social activities and environmental conservation. Through various initiatives, BPKH not only focuses on meeting the needs of the community, but also deliver positive and meaningful impacts for society at large.

One concrete step taken is the mangrove planting program as an effort to maintain the protect and restore coastal ecosystems of plastic waste processing machines to promote more sustainable environmental management. This initiative is expected to strengthen BPKH's role in providing inclusive benefits, both for Muslims and all segments of society.

Here are the details of activities in 2024:

1. Eid al-Adha Sacrifice Program 1445H

During the Eid al-Adha 1445H, BPKH distributed 1,554 sacrificial animals across various regions in Indonesia through the Qurbani Donation Program. This program aims to benefit Muslims, particularly the less fortunate, so they can experience the blessings of the holiday. The program involves various partner institutions to ensure the distribution of sacrificial animals is properly targeted and in accordance with Sharia principles.

In addition to providing food benefits, the program also serves as a means to strengthen social awareness and unity among the community. Through the distribution of sacrificial animals to remote areas, BPKH strives to uphold the value of mutual cooperation and enhance solidarity within society. This initiative aligns with BPKH's mission to support the welfare of the community through effective management of charitable funds.

2. Program Balik Kerja BPKH

Program Balik Kerja Bareng BPKH menjadi salah satu wujud nyata komitmen BPKH dalam membantu masyarakat setelah arus mudik Lebaran melalui sinergi dengan DT Peduli. Melalui penyediaan ribuan kuota transportasi gratis ke berbagai kota besar, BPKH memastikan para pekerja dapat kembali tepat waktu dan melanjutkan aktivitasnya tanpa terkendala biaya perjalanan.

Program ini juga menjadi bagian dari strategi BPKH dalam meningkatkan dampak sosial kemaslahatan melalui kebermanfaatan langsung bagi masyarakat. Selain memberikan fasilitas perjalanan, BPKH bekerja sama dengan berbagai mitra strategis untuk memastikan keamanan, kelancaran, dan kualitas layanan transportasi. Upaya ini tidak hanya membantu masyarakat tetapi juga menciptakan multiplier effect dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keberlangsungan produktivitas nasional.

3. Program Penanaman Mangrove Jakarta

Sebagai bentuk komitmen terhadap pelestarian lingkungan, BPKH melaksanakan program Penanaman 1.000 Bibit Mangrove di kawasan pesisir Jakarta. Program ini bertujuan untuk mendukung upaya mitigasi perubahan iklim, melindungi ekosistem pesisir, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan.

Melalui kolaborasi dengan komunitas lokal, BPKH memastikan keberlanjutan ekosistem mangrove sekaligus memberdayakan masyarakat sekitar melalui edukasi dan pendampingan. Dengan adanya program ini, BPKH tidak hanya berfokus pada aspek sosial keagamaan, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata terhadap kelestarian alam dan keberlanjutan lingkungan hidup sebagai bagian integral dari dana kemaslahatan.

4. Program Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Plastik – *Garbage Care Yogyakarta*

BPKH melalui dana kemaslahatan memberikan dukungan kepada Komunitas *Garbage Care and Education* Yogyakarta dengan menyalurkan mesin pencacah plastik, mesin pelumer plastik, dan alat pendukung lainnya. Program ini bertujuan untuk mengurangi volume sampah plastik, mencegah pencemaran lingkungan,

2. BPKH Return-to-Work Program

The BPKH Return-to-Work Program is a concrete manifestation of BPKH's commitment to assisting the community after the Eid al-Fitr exodus through collaboration with DT Peduli. By providing thousands of free transportation seats to major cities, BPKH ensures that workers can return home on time and resume their activities without being hindered by travel costs.

This program is also part of BPKH's strategy to enhance the social benefit impact through direct benefits for the community. In addition to providing transportation facilities, BPKH collaborates with various strategic partners to ensure safety, convenience, and quality of transportation services. These efforts not only assist the community, but also create a multiplier effect in maintaining economic stability and the continuity of national productivity.

3. Jakarta Mangrove Planting Program

As part of its commitment to environmental conservation, BPKH is implementing a program to plant 1,000 mangrove seedlings in the coastal areas of Jakarta. This program aims to support climate change mitigation efforts, protect coastal ecosystems, and raise public awareness of the importance of preserving the environment.

Through collaboration with local communities, BPKH ensures the sustainability of mangrove ecosystems while empowering local communities through education and mentoring. With this program, BPKH not only focuses on socio-religious aspects, but also demonstrates a real commitment to nature conservation and environmental sustainability as an integral part of its benefit program funds.

4. Plastic Waste Processing Machine Procurement Program – *Garbage Care Yogyakarta*

BPKH, through its benefit program fund, provides support to the Garbage Care and Education Community in Yogyakarta by distributing plastic shredders, plastic melters, and other supporting tools. This program aims to reduce the volume of plastic waste, prevent environmental pollution, and increase economic

serta meningkatkan nilai ekonomi melalui pemanfaatan kembali sampah plastik menjadi produk bernilai guna seperti *paving blok*.

Selain memberikan bantuan peralatan, program ini juga mendorong peningkatan edukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Komunitas penerima manfaat di Desa Parangtritis aktif mengajak masyarakat untuk memilah, mengolah, dan memanfaatkan kembali sampah plastik. Melalui pendekatan ini, BPKH berkontribusi dalam menciptakan dampak lingkungan yang berkelanjutan sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.

value by reusing plastic waste into useful products such as paving blocks.

In addition to providing equipment, the program also promotes community education on waste management based on a circular economy. The beneficiary community in Parangtritis Village actively encourages residents to sort, process, and reuse plastic waste. Through this approach, BPKH contributes to creating sustainable environmental impacts while empowering the local economy.

Uraian Description	Unit	2024	2023	2022
Nilai Penyaluran Sosial Keagamaan Disbursement Value of Social-Religious Matter	Rp	82.876.341.000	87.789.334.509	31.436.732.320

Inisiatif Kegiatan Kemaslahatan pada Ruang Lingkup Sosial Keagamaan Tahun 2024

Benefit Program Initiatives of Social-Religious Matter in 2024

Inisiatif Initiatives	Penjelasan Inisiatif Initiatives Description	Jumlah Bantuan Number of Benefit Programs	Estimasi Penerima Manfaat Estimated Beneficiaries	SDGs
Kegiatan Sosial Social Activities	Program kegiatan sosial dalam ruang lingkup sosial keagamaan merupakan bentuk pemanfaatan dana kemaslahatan untuk mendukung dan memperkuat praktik ibadah, kepedulian sosial, serta solidaritas umat Islam. Social programs within the scope of religious activities are a form of utilizing welfare funds to support and strengthen worship practices, social awareness, and solidarity among Muslims.	34	635.582	     
Pengadaan Barang Goods Procurement	Program pengadaan barang dalam ruang lingkup sosial keagamaan merupakan kegiatan penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas penunjang ibadah serta layanan sosial keagamaan yang ditujukan untuk meningkatkan kenyamanan, kelancaran, dan kebermanfaatan masjid maupun lembaga keagamaan bagi masyarakat. Procurement programs within the scope of social and religious activities are activities that provide the means, infrastructure, and facilities to support worship and social and religious services aimed at improving the comfort, smooth running, and usefulness of mosques and religious institutions for the community.	23	101.791	  



PEKERJA DI JAKARTA

Penerima Manfaat Balik Kerja BPKH asal Surabaya
Beneficiary of Balik Kerja BPKH Program from Surabaya

Saya sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program Balik Kerja BPKH ini. Setelah lebaran, saya sempat bingung bagaimana bisa kembali ke tempat kerja saya di Jakarta karena biaya transportasi yang tinggi. Alhamdulillah, lewat bantuan BPKH dan BMM, saya bisa pulang dengan nyaman dan gratis. Program ini sangat membantu pekerja seperti saya agar tetap bisa produktif tanpa terbebani ongkos yang besar.”

I am very grateful and relieved by Balik Kerja BPKH program. After Eid, I was confused about how I could return to my workplace in Jakarta due to the high transportation costs. Alhamdulillah, with the help of BPKH and BMM, I was able to return home comfortably and for free. This program is very helpful for workers like me so that we can remain productive without being burdened by high costs.

Jumlah Penerima Manfaat Ruang Lingkup Sosial Keagamaan

Number of Beneficiaries in Social-Religious Matter Scope

Uraian Description		Unit	2024	2023	2022
Jenis Kelamin Gender	Laki-laki Male	737.373 Jiwa* 737,373 People*	367.806	211.347	96.222
	Perempuan Female		369.567	215.325	94.259
	Jumlah Total		737.373	190.481	190.481

Uraian Description		Unit	2024	2023	2022
Usia Age	<30 Tahun <30 Years old		319.696	106.414	90.298
	30-50 Tahun 30-50 Years old		253.788	181.896	56.812
	>50 Tahun >50 Years old		163.889	138.362	43.292
	Jumlah Total		737.373	426.672	190.481
Daerah 3T 3T Areas	3T		2743	1.314	9.700
	Non-3T		734.630	425.358	180.781

*Pada tahun 2024, BPKH tidak melakukan penghitungan penerima manfaat dengan kategori jenis kelamin, usia, dan daerah 3T.

*In 2024, BPKH did not calculate beneficiaries by gender, age, and 3T areas.

Roadmap Ruang Lingkup Sosial Keagamaan

Kegiatan Kemaslahatan pada ruang lingkup Sosial Keagamaan difokuskan untuk memperkuat kontribusi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Program ini diarahkan tidak hanya pada dukungan terhadap berbagai aktivitas sosial dan pemberdayaan umat Islam, tetapi juga menciptakan manfaat nyata yang dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat, khususnya di Indonesia.

Memasuki tahun 2024, pelaksanaan program Kemaslahatan di bidang sosial keagamaan masih berada pada tahap awal atau fase pertama, yang berorientasi pada penguatan fondasi dan infrastruktur pendukung. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerentanan bencana yang tinggi. Sepanjang tahun, beberapa peristiwa bencana memerlukan penanganan cepat, sehingga kehadiran program Kemaslahatan BPKH menjadi penting untuk memberikan dukungan tanggap darurat dan membantu masyarakat terdampak secara optimal.

Roadmap of Social-Religious Matter Scope

Benefit Program Activities in the Social-Religious Matter is focused on strengthening the community's contribution to achieving the well-being of the people. This program is not only aimed at supporting various social activities and empowering the Muslim community, but also creating tangible benefits that can be widely felt by the community, particularly in Indonesia.

As we enter 2024, the implementation of the benefit programs in the social-religious matter are still in its initial phase, focusing on strengthening foundations and supporting infrastructure. The primary focus is on enhancing capacity and preparedness to address various potential disasters, given that Indonesia is one of the countries with the highest levels of disaster vulnerability. Throughout the year, several disaster events required swift action, making the presence of the BPKH Benefit Program is crucial in providing emergency response support and assisting affected communities effectively.



EKONOMI UMAT UMMAH'S ECONOMY



BPKH senantiasa berupaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi umat melalui pendidikan, pembinaan SDM, stimulasi ekonomi lokal, dan pemberian layanan dasar yang esensial secara inklusif dan strategis. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari Program Kemaslahatan BPKH ruang lingkup Ekonomi Umat yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di kalangan umat Islam. Berikut adalah beberapa kegiatan untuk mendukung ekonomi umat di tahun 2024:

1. Program Sosialisasi & Pengembangan SDM Ekonomi Syariah MUI

BPKH, bersama BAZNAS dan MUI, meluncurkan program kolaboratif untuk meningkatkan literasi dan kapasitas sumber daya manusia di bidang ekonomi syariah. *Launching* program ini dilaksanakan dalam rangkaian Milad ke-49 MUI, yang turut dihadiri oleh Wakil Presiden, Kepala BPKH, Ketua BAZNAS, dan jajaran MUI, sebagai wujud dukungan terhadap literasi dan transformasi ekonomi berbasis syariah di Indonesia.

Rangkaian pelatihan dilakukan dalam berbagai tema penting seperti Muamalah Maliyah, Pengawas Syariah, Ahli Syariah Pasar Modal, hingga literasi media syariah, dengan peserta berasal dari lebih dari 55 ormas. BPKH berharap program ini menjadi motor penggerak ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat fondasi ekonomi umat di berbagai sektor masyarakat.

2. Program H-Mart

Sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, Program H-Mart merupakan inisiatif BPKH yang bekerja sama dengan mitra strategis untuk menyediakan fasilitas minimarket di lingkungan masjid. Program ini tidak hanya bertujuan menyediakan kebutuhan harian jamaah dan masyarakat sekitar, tetapi juga menjadi sumber pendapatan berkelanjutan bagi masjid. Contohnya, pengadaan H-Mart di Masjid Al-Muhajirin dan Mushalla Al-Adil di Kota Padang, Sumatra Barat, telah memberikan manfaat ekonomi langsung, sekaligus

BPKH always strives to strengthen the economic independence of the community through education, human resource development, local economic stimulation, and the provision of essential basic services in an inclusive and strategic manner. This is done as part of the BPKH Benefit Program in the scope of Ummah's Economy, which aims to reduce economic disparities among Muslims. The following are some of the activities to support the economy of the Muslim community in 2024:

1. Socialization & Human Resource Development Program for Islamic Economy by MUI

BPKH, together with BAZNAS and MUI, launched a collaborative program to enhance literacy and human resource capacity in the field of Islamic economics. The program was launched as part of MUI's 49th anniversary celebrations, attended by the Vice President, the Head of BPKH, the Chairman of BAZNAS, and MUI officials, as a demonstration of support for literacy and the transformation of the economy based on Islamic principles in Indonesia.

The training sessions covered various important themes such as Islamic Finance, Sharia Supervision, Sharia Capital Market Experts, and Sharia Media Literacy, with participants from over 55 civil society organizations. BPKH hopes this program will serve as a driving force for an inclusive and sustainable Islamic economy, strengthening the economic foundation of the Muslim community across various sectors of society.

2. H-Mart Program

As part of a community-based economic empowerment, the H-Mart Program is an initiative of BPKH in collaboration with strategic partners to provide minimarket facilities around mosques. This program not only aims to provide daily necessities for worshippers and the surrounding community, but also serves as a source of sustainable income for mosques. For example, the establishment of H-Mart at Al-Muhajirin Mosque and Al-Adil Mushalla in Padang City, West Sumatra, has provided direct economic benefits while strengthening the role of mosques

memperkuat peran masjid sebagai pusat kegiatan sosial dan ekonomi umat.

as centers of social and economic activities for the community.

3. Program Budidaya Ternak Kambing dan Sapi

Program budidaya ternak kambing dan sapi difokuskan untuk mendorong kemandirian ekonomi kelompok tani dan peternak di berbagai wilayah, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatra Utara. Melalui bantuan bakalan ternak, pendampingan teknis, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung, program ini menciptakan siklus ekonomi baru yang melibatkan masyarakat lokal. Kegiatan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan penghasilan keluarga penerima manfaat, tetapi juga berkontribusi terhadap ketahanan pangan berbasis komunitas. Beberapa program bahkan mencakup pendekatan *breeding* dan *fattening* secara berkelanjutan untuk memperbesar nilai ekonomi peternakan.

3. Goat and Cattle Farming Program

The goat and cattle farming program focuses on promoting economic independence among farmer and rancher groups in various regions, such as Central Java, East Java, West Nusa Tenggara, and North Sumatra. Through livestock assistance, technical guidance, and the provision of supporting facilities and infrastructure, this program build a sustainable local economic cycle that involves the local community. These activities not only have an impact on increasing the income of beneficiary families, but also contribute to community-based food security. Some programs even include sustainable breeding and fattening approaches to increase the economic value of livestock farming.

4. Program Pengadaan Alat Mesin Pertanian

Untuk meningkatkan efisiensi dan hasil produksi pertanian, BPKH melalui Program Ekonomi Umat menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) seperti traktor dan peralatan pengolahan lahan kepada kelompok tani. Program ini tersebar di berbagai daerah, termasuk Jawa Timur, Gorontalo, dan Lampung, serta melibatkan mitra pelaksana seperti PPPA Daarul Qur'an dan Rumah Zakat. Dengan adanya alsintan, para petani dapat menghemat waktu dan biaya produksi sekaligus meningkatkan produktivitas lahan mereka. Selain dampak ekonomi, program ini juga memperkuat solidaritas kelompok tani dalam mengelola lahan secara kolektif dan profesional.

4. Agricultural Machinery Procurement Program

To improve agricultural efficiency and production, BPKH, through the Ummah Economy Program, distributes agricultural machinery and equipment (alsintan), such as tractors and land cultivation equipment, to farmer groups. This program is spread across various regions, including East Java, Gorontalo, and Lampung, and involves implementing partners such as PPPA Daarul Qur'an and Rumah Zakat. With alsintan, farmers can save time and operational costs while increasing the productivity of their land. In addition to the economic impact, this program also strengthens the solidarity of farmer groups in managing land collectively and professionally.

Uraian Description	Unit	2024	2023	2022
Nilai Penyaluran Ekonomi Umat Disbursement Value of Ummah's Economy	Rp	19.251.283.800	23.170.881.067	6.103.546.000

Inisiatif Kegiatan Kemaslahatan pada Ruang Lingkup Ekonomi Umat Tahun 2024

Benefit Program Initiatives of Ummah's Economy in 2024

Inisiatif Initiatives	Penjelasan Inisiatif Initiatives Description	Jumlah Bantuan Number of Benefit Programs	Estimasi Penerima Manfaat Estimated Beneficiaries	SDGs
Kegiatan Pembangunan Ekonomi Economic Development Activities	Kegiatan pembangunan ekonomi dalam ruang lingkup ekonomi umat merupakan serangkaian aktivitas pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat berbasis umat, melalui dukungan modal, fasilitas, dan pendampingan usaha yang berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memperkuat daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis syariah. Economic development activities within the scope of the ummah's economy are a series of activities aimed at empowering and strengthening the ummah-based economy through capital support, facilities, and sustainable business assistance. This program aims to increase economic independence, create jobs, and strengthen the competitiveness of sharia-based micro, small, and medium enterprises (MSMEs).	51	37.371	
Pengadaan Barang Goods Procurement	Pengadaan barang dalam ruang lingkup ekonomi umat merupakan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan usaha produktif masyarakat yang ditujukan untuk memperkuat kapasitas ekonomi umat, meningkatkan produktivitas, serta mendorong kemandirian usaha berbasis syariah. Procurement of goods within the scope of the ummah's economy is an activity to provide facilities and infrastructure to support productive community businesses, aimed at strengthening the economic capacity of the community, increasing productivity, and encouraging sharia-based business independence.	17	2.222	



MUKSIN

Ketua Kelompok Ternak Kedaton Bahagia & Kelompok Ternak Millenial, Desa Suka Makmur, Gerung, Lombok Barat

Head of the Kedaton Bahagia Livestock Group & Millenial Livestock Group, Suka Makmur Village, Gerung, West Lombok

"Alhamdulillah, kami merasa sangat terbantu dengan bantuan enam ekor sapi dari DT Peduli dan BPKH. Sebagai peternak lokal di Lombok Barat, sapi ini bukan hanya sekadar hewan ternak, ini adalah peluang untuk meningkatkan produksi dan pendapatan keluarga kami. Dengan sapi bantuan ini, kami berharap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga mendukung biaya sekolah anak-anak kami. Kami berkomitmen untuk merawat sapi ini sebaik mungkin agar berkembang dan menjadi sumber penghasilan yang berkelanjutan. Semoga program seperti ini terus dilakukan, karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat yang membutuhkan."

"Alhamdulillah, we feel greatly assisted by the six cows donated by DT Peduli and BPKH. As local farmers in West Lombok, these cows are not just livestock; they are an opportunity to increase our family's production and income. With these donated cows, we hope to meet our daily needs and also support our children's school fees. We are committed to taking the best possible care of these cows so that they thrive and become a sustainable source of income. We hope that programs like this will continue, because they are of great benefit to communities in need."

Jumlah Penerima Manfaat Ruang Lingkup Ekonomi Umat

Number of Beneficiaries in the Ummah Economy Scope

Uraian Description		Unit	2024	2023	2022
Jenis Kelamin Gender	Laki-laki Male	39.593 Jiwa* 39,593 People*	22.722	5.154	4.011
	Perempuan Female		16.871	3.571	3.909
	Jumlah Total		39.593	8.725	7.920

Uraian Description		Unit	2024	2023	2022
Usia Age	<30 Tahun <30 Years old		12.773	4.067	3.868
	30-50 Tahun 30-50 Years old		21.666	3.802	2.348
	>50 Tahun >50 Years old		5.154	856	1.704
	Jumlah Total		39.593	8.725	7.980
Daerah 3T 3T Areas	3T		59	0	0
	Non-3T		39.534	8.725	7.920

*Pada tahun 2024, BPKH tidak melakukan penghitungan penerima manfaat dengan kategori jenis kelamin, usia, dan daerah 3T.
*In 2024, BPKH did not calculate beneficiaries by gender, age, and 3T areas.

Roadmap Ruang Lingkup Ekonomi Umat

Ruang lingkup Ekonomi Umat dalam Program Kemaslahatan berperan penting dalam mendorong kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai inisiatif pemberdayaan ekonomi. Program ini difokuskan untuk menciptakan peluang usaha, mendukung pertumbuhan sektor produktif, serta memberikan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Sepanjang tahun 2024, pelaksanaan kegiatan Kemaslahatan di bidang Ekonomi Umat masih berfokus pada fase 1 sesuai dengan peta jalan yang telah ditetapkan. Prioritas utama diarahkan pada penguatan infrastruktur Kemaslahatan, termasuk program-program yang mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta peningkatan pendapatan masyarakat. Melalui berbagai kolaborasi strategis, BPKH berupaya memberikan dampak nyata dalam membangun fondasi ekonomi umat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Roadmap of Ummah's Economy Scope

The scope of the Ummah's Economy in the Benefit Program plays an important role in promoting independence and improving the benefit of the community through various economic empowerment initiatives. This program is focused on creating business opportunities, supporting the growth of productive sectors, and providing the facilities and infrastructure needed by the community to improve their standard of living.

Throughout 2024, the implementation of the benefit program activities in the Ummah's Economy scope remained focused on Phase 1 in accordance with the established roadmap. The main priority was directed toward strengthening benefit program infrastructure, including programs that promote the growth of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and increase community income. Through various strategic collaborations, BPKH strives to make a tangible impact in building a more inclusive and a sustainable economics foundation for the community.





SARANA DAN PRASARANA IBADAH PRAYING FACILITIES AND INFRASTRUCTURE

Dalam rangka meningkatkan kualitas sarana peribadatan sekaligus memperkuat peran masjid dan musala sebagai pusat pembinaan umat, Program Kemaslahatan BPKH secara konsisten mengambil bagian aktif dalam pembangunan, renovasi, dan penyediaan fasilitas pendukung ibadah.

Sepanjang tahun 2024, BPKH melaksanakan berbagai inisiatif untuk memperbaiki dan menambah fasilitas ibadah, sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktivitas keagamaan dengan lebih nyaman. Upaya ini sekaligus menjadi wujud komitmen BPKH dalam meningkatkan kesejahteraan umat, memperkuat nilai-nilai dakwah, serta mendukung perkembangan pendidikan Islam di berbagai wilayah Indonesia.

Berikut program kegiatan yang dilakukan di tahun 2024:

1. Renovasi dan Perluasan Masjid Al Munawar Kemenag Jakarta

Pada 17 Desember 2024, Menteri Agama Nasaruddin Umar meresmikan hasil renovasi dan perluasan Masjid Al-Munawar di kompleks Kemenag Jakarta. Pembangunan ini dilakukan selama enam bulan sejak Juni lalu, dengan dukungan dana kemaslahatan umat dari BPKH yang dikelola melalui mitra, LAZISNU. Gedung yang terdiri dari dua lantai dirancang untuk memenuhi kebutuhan jamaah pria dan wanita, dilengkapi toilet umum serta fasilitas bagi penyandang disabilitas. Menteri menaruh harapan besar agar masjid ini tidak hanya dijaga dan dirawat, tetapi juga dimakmurkan sebagai pusat kajian dan diskusi keumatan di pusat ibu kota.

2. Pembangunan Fasilitas Wudhu, Toilet, dan Asrama Belajar di Depok

Pada Agustus 2024, BPKH bekerja sama dengan Dompot Dhuafa membangun fasilitas ibadah di tiga lokasi masjid di Kecamatan Sukmajaya, Depok. Peningkatan meliputi pembangunan tempat wudhu dan toilet modern bertingkat di

In order to improve the quality of praying facilities and strengthen the role of mosques and prayer rooms as centers for community development, the BPKH Benefit Program consistently takes an active part in the construction, renovation, and provision of worship support facilities.

Throughout 2024, BPKH implemented various initiatives to improve and add praying facilities so that the community can carry out religious activities more comfortably. These efforts are also a manifestation of BPKH's commitment to improving the benefit of the community, strengthening the values of da'wah, and supporting the development of Islamic education in various regions of Indonesia.

The following are the programs carried out in 2024:

1. Renovation and Expansion of Al Munawar Mosque, Ministry of Religious Affairs, Jakarta

On December 17, 2024, Minister of Religion Nasaruddin Umar officially inaugurated the renovated and expanded Al-Munawar Mosque at the Ministry of Religion complex in Jakarta. The construction, which began in June, was completed in six months with funding from BPKH's community welfare funds managed through its partner, LAZISNU. The two-story building is designed to accommodate male and female worshippers, equipped with public restrooms and facilities for people with disabilities. The Minister expressed his hope that the mosque will not only be maintained but also developed as a center for religious studies and discussions in the heart of the capital city.

2. Construction of Wudhu Facilities, Toilets, and Study Dormitories in Depok

In August 2024, BPKH collaborated with Dompot Dhuafa to build worship facilities at three mosques in Sukmajaya District, Depok. The improvements include the construction of modern multi-level wudu facilities and toilets

Masjid Al Manar Taman Duta serta ruang belajar dan asrama bagi anak yatim di Yayasan Babussalam. Fasilitas ini ditujukan untuk meningkatkan kenyamanan beribadah, khususnya bagi lansia, serta mendukung aktivitas belajar yang layak, aman, dan produktif. Pembangunan rampung dalam waktu singkat, tepat sasaran sesuai kebutuhan komunitas lokal.

3. Program Peningkatan Fasilitas Ibadah untuk Kenyamanan Umat Lainnya

Sebagai wujud nyata kepedulian terhadap peningkatan kualitas ibadah umat Islam, BPKH melalui Program Kemaslahatan terus memberikan dukungan terhadap penyediaan sarana dan prasarana ibadah di berbagai daerah. Pada tahun 2024, program ini diwujudkan melalui sejumlah kegiatan strategis, seperti pengadaan karpet dan *sound system* untuk 12 masjid di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan bersama mitra PPPA Daarul Qur'an. Bantuan ini bertujuan meningkatkan kenyamanan jamaah dalam melaksanakan ibadah, serta memperkuat fungsi masjid sebagai pusat aktivitas spiritual dan sosial masyarakat.

Selain itu, bantuan serupa juga diberikan untuk Masjid Al Furqon di Kampung Baru, Riau, berupa *sound system* guna menunjang kegiatan keagamaan yang lebih optimal. Di sisi lain, untuk mendukung pelayanan sosial keagamaan yang terintegrasi dengan ibadah, BPKH bersama BAZNAS juga memberikan bantuan mobil ambulans jenazah untuk Masjid Nurul Falah di Sumatra Barat. Dukungan ini memperluas cakupan manfaat program dengan tidak hanya menyentuh aspek spiritual, tetapi juga layanan sosial berbasis masjid yang bermanfaat luas bagi masyarakat.

at Masjid Al Manar Taman Duta, as well as study rooms and dormitories for orphaned children at the Babussalam Foundation. These facilities aim to enhance the comfort of worship, particularly for the elderly, and support safe, productive, and quality learning activities. The construction was completed promptly, on time, and in line with the local community's needs.

3. Program to Improve Worship Facilities for the Comfort of Other Faiths

As a tangible action to improve the quality of worship for Muslims, BPKH, through its Benefit Program, continues to provide support for the provision of worship facilities and infrastructure in various regions. In 2024, this program was taken through a number of strategic activities, such as the procurement of carpets and sound systems for 12 mosques in the Special Region of Yogyakarta, which was carried out in collaboration with PPPA Daarul Qur'an. This assistance aims to improve the comfort of worshippers in performing their worship, as well as to strengthen the function of mosques as centers of spiritual and social activities for the community.

In addition, similar assistance was also provided to the Al Furqon Mosque in Kampung Baru, Riau, in the form of a sound system to support more optimal religious activities. On the other hand, to support religious social services integrated with worship, BPKH together with BAZNAS also provided a funeral ambulance for the Nurul Falah Mosque in West Sumatra. This support expands the scope of the program's benefits by not only focusing on spiritual aspects, but also mosque-based social services that are widely beneficial to the community.

Uraian Description	Unit	2024	2023	2022
Nilai Penyaluran Sarana dan Prasaran Ibadah Disbursement Value of Praying Facilities and Infrastructure	Rp	22.523.941.100	23.359.355.600	32.691.464.791

Inisiatif Kegiatan Kemaslahatan pada Ruang Lingkup Sarana dan Prasarana Ibadah Tahun 2024

Benefit Program Initiatives of Praying Facilities and Infrastructure in 2024

Inisiatif Initiatives	Penjelasan Inisiatif Initiatives Description	Jumlah Bantuan Number of Benefit Programs	Estimasi Penerima Manfaat Estimated Beneficiaries	SDGs
Konstruksi Construction	Program konstruksi dalam ruang lingkup sarana dan prasarana ibadah, merupakan kegiatan pembangunan, renovasi, dan penyediaan infrastruktur fisik penunjang ibadah yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan beribadah yang lebih layak dan nyaman Program ini mencakup pembangunan dan perbaikan rumah ibadah, fasilitas pendukung, serta sarana kebersihan dan kenyamanan yang dapat digunakan oleh jamaah secara berkesinambungan. The construction program within the scope of praying facilities and infrastructure is an activity involving the construction, renovation, and provision of physical infrastructure to support praying, with the aim of creating a more suitable and comfortable environment for praying. This program includes the construction and repair of houses of praying, supporting facilities, and hygiene and comfort facilities that can be used by worshippers on an ongoing basis.	26	53.106	    
Pengadaan Barang Goods Procurement	Program pengadaan barang dalam ruang lingkup sarana dan prasarana ibadah merupakan kegiatan penyediaan peralatan, perlengkapan, dan fasilitas penunjang ibadah yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan, kualitas, serta kelancaran aktivitas beribadah umat Islam. Program ini diwujudkan dalam bentuk pengadaan barang-barang yang dibutuhkan oleh jamaah, seperti perlengkapan shalat, sistem tata suara, pendingin ruangan, maupun sarana kebersihan. The goods procurement program within the scope of praying facilities and infrastructure is an activity to provide equipment, supplies, and facilities to support praying, which aims to improve the comfort, quality, and smooth running of Muslim praying activities. This program is realized in the form of procuring goods needed by worshippers, such as prayer equipment, sound systems, air conditioning, and hygiene facilities.	19	237.153	   



HALIM

Pengurus DKM Masjid Al Manar

DKM Management of Al Manar Mosque

"Kami sangat bersyukur atas adanya fasilitas baru ini. Selama ini, kami memang sangat membutuhkan tempat wudu yang lebih layak. Kalau ada tamu dan jemaah yang ingin shalat dari luar, mereka agak bingung cari tempat berwudu dan agak lebih jauh dari tempat shalat, kurang nyaman jadinya bagi lansia. Alhamdulillah, bantuan pembangunan fasilitas melalui BPKH dan Dompot Dhuafa ini disiplin dan tepat waktu dalam tiga bulan sejak Mei hingga Juli,"

"We are very grateful for this new facility. We have been in dire need of a more suitable place for wudu. When guests and worshippers from outside want to pray, they have difficulty finding a place for wudu, and it is quite far from the prayer area, which is inconvenient for the elderly. Alhamdulillah, the construction of this facility through BPKH and Dompot Dhuafa was carried out in a disciplined and timely manner within three months from May to July."

Jumlah Penerima Manfaat Ruang Lingkup Sarana dan Prasarana Ibadah

Number of Beneficiaries in Praying Facilities and Infrastructure Scope

Uraian Description		Unit	2024	2023	2022
Jenis Kelamin Gender	Laki-laki Male	290.259 Jiwa* 290,259 People*	153.626	73.655	147.668
	Perempuan Female		136.633	21.653	144.696
	Jumlah Total		290.259	95.308	292.264

Uraian Description		Unit	2024	2023	2022
Usia Age	<30 Tahun <30 Years old		115.691	27.305	141.609
	30-50 Tahun 30-50 Years old		119.469	41.961	87.230
	>50 Tahun >50 Years old		55.099	26.042	63.447
	Jumlah Total		290.259	95.308	292.364
Daerah 3T 3T Areas	3T		0	0	12.229
	Non-3T		290.259	95.308	279.135

*Pada tahun 2024, BPKH tidak melakukan penghitungan penerima manfaat dengan kategori jenis kelamin, usia, dan daerah 3T.

*In 2024, BPKH did not calculate beneficiaries by gender, age, and 3T areas.

Roadmap Ruang Lingkup Sarana dan Prasarana Ibadah

Ruang lingkup sarana dan prasarana ibadah difokuskan pada penyediaan fasilitas yang memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah umat Muslim. Upaya ini meliputi pembangunan, perbaikan, serta pengembangan berbagai fasilitas keagamaan, seperti masjid, musala, dan tempat ibadah lainnya, agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Sepanjang tahun 2024, pelaksanaan Program Kemaslahatan pada bidang ini telah memasuki tahap ketiga sesuai dengan agenda *roadmap* yang telah ditetapkan. Pada fase ini, fokus diarahkan pada pencapaian sasaran tersier, yaitu memperkuat peran masjid dan musala sebagai pusat pembinaan umat serta bagian penting dari pengembangan peradaban Islam.

Roadmap of Praying Facilities and Infrastructure Scope

The scope of the praying facilities and infrastructure is focused on providing adequate facilities to support the smooth implementation of Muslim worship. These efforts include the construction, repair, and development of various religious facilities, such as mosques, prayer rooms, and other places of worship, so that they can be optimally utilized by the community.

Throughout 2024, the implementation of the Benefit Program in this scope has entered its third phase in accordance with the established roadmap. In this phase, the focus is on achieving tertiary objectives, namely strengthening the role of mosques and prayer rooms as centers for community development and an integral part of the development of Islamic civilization.





TANGGAP BENCANA DISASTER RESPONSES



Program Kemaslahatan melalui ruang lingkup Tanggap Bencana yang dilaksanakan oleh BPKH merupakan wujud nyata pemanfaatan dana haji untuk memberikan kebermanfaatan bagi umat, khususnya dalam menghadapi situasi darurat akibat bencana alam maupun krisis kemanusiaan. Program ini dirancang untuk menyalurkan bantuan secara tepat sasaran kepada masyarakat terdampak dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Pelaksanaan kegiatan tanggap bencana dilakukan secara terkoordinasi dan efektif, terutama ketika pemerintah pusat atau daerah menetapkan status darurat bencana. Dalam kondisi tersebut, BPKH bersama para mitra strategisnya segera bergerak memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok, layanan medis, dan dukungan logistik lainnya untuk meminimalkan dampak bencana serta membantu percepatan pemulihan masyarakat.

Sepanjang tahun 2024, beberapa kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Banjir Lahar Dingin di Kabupaten Agam – Dapur Umum

Setelah terjadinya banjir lahar dingin di Kabupaten Agam pada 11 Mei 2024, BPKH melalui mitra Rumah Zakat tanggap dengan mendukung operasional dapur umum di tiga kecamatan terdampak. Sebanyak 3.000 porsi nasi bungkus berhasil didistribusikan pada 13 Mei, sebagai bentuk dukungan pangan cepat bagi masyarakat terdampak.

Keberadaan dapur umum ini terbukti sangat membantu dalam mendukung ketahanan pangan pasca-bencana, dan relawan menyatakan komitmennya untuk melanjutkan dukungan secara berkelanjutan ke hari-hari berikutnya.

2. Gempa Bumi Kabupaten Bandung – Bantuan Tanggap Darurat

Gempa berkekuatan Magnitudo 5 yang mengguncang Kabupaten Bandung pada 18 September 2024 memicu respons cepat dari

The Benefit Program through the Disaster Response scope implemented by BPKH is a concrete manifestation of the utilization of hajj funds to provide benefits to the community, particularly in facing emergency situations caused by natural disasters or humanitarian crises. This program is designed to ensure accurate and timely distribution of assistance to affected communities while upholding the principles of Sharia and ensuring compliance with applicable regulations.

Disaster response activities are carried out in a coordinated and effective manner, especially when the central or local government declares a state of emergency. In such conditions, BPKH, together with its strategic partners, immediately moves to provide assistance in the form of basic necessities, medical services, and other logistical support to minimize the impact of disasters and help accelerate community recovery.

Throughout 2024, several activities were carried out, including:

1. Cold Lahar Flood in Agam Regency – Community Kitchen

Following the cold lahar flood in Agam Regency on May 11, 2024, BPKH, through its partner Rumah Zakat, responded by supporting the operation of community kitchens in three affected sub-districts. A total of 3,000 packed meals were distributed on May 13 as a form of emergency food assistance for the affected communities.

The community kitchen proved to be very helpful in supporting post-disaster food security, and volunteers expressed their commitment to continue their support in the days that followed.

2. Earthquake in Bandung Regency – Emergency Response Assistance

A magnitude 5 earthquake that struck Bandung Regency on September 18, 2024, triggered a swift response from BPKH together with Rumah

BPKH bersama Rumah Zakat. Pada 29 September, bantuan diserahkan di kantor Kecamatan Kertasari, dengan paket bantuan mencakup 500 hygiene kits, 500 kitchen set, dan kebutuhan pokok untuk mendukung operasional dapur umum selama lima hari, menjangkau sekitar 2.000 penerima manfaat.

Bantuan ini diharapkan meringankan beban masyarakat terdampak dan memperkuat proses pemulihan pascabencana melalui kolaborasi strategis antara BPKH dan Rumah Zakat.

Zakat. On September 29, assistance was delivered at the Kertasari Subdistrict Office, with aid packages including 500 hygiene kits, 500 kitchen sets, and essential supplies to support the operation of community kitchens for five days, reaching approximately 2,000 beneficiaries.

This assistance is expected to alleviate the burden on affected communities and strengthen post-disaster recovery efforts through strategic collaboration between BPKH and Rumah Zakat.

3. Mobil Rescue Muhammadiyah – Jawa Tengah

Pada 6 November 2024, BPKH bersama Lazismu menyerahkan satu unit mobil *rescue* kepada Pemuda Muhammadiyah (KOKAM) Jawa Tengah, sebagai bagian dari program “One Muhammadiyah *One Response*” untuk memperkuat respons kebencanaan. Penyerahan simbolis dilakukan di Semarang dan dihadiri oleh pihak BPKH, Lazismu, serta jajaran Muhammadiyah dan MDMC.

Mobil *rescue* ini adalah wujud nyata bahwa pemanfaatan DAU ditujukan untuk aksi kemanusiaan yang nyata, terutama dalam menghadapi situasi darurat. Diharapkan kendaraan ini dapat dijadikan perangkat operasional efektif untuk merespons bencana dengan cepat dan menyelamatkan nyawa.

3. Muhammadiyah Rescue Vehicle – Central Java

On November 6, 2024, BPKH together with Lazismu handed over one rescue vehicle to Muhammadiyah Youth (KOKAM) Central Java, as part of the “One Muhammadiyah *One Response*” program to strengthen disaster response. The symbolic handover took place in Semarang and was attended by representatives from BPKH, Lazismu, as well as Muhammadiyah and MDMC officials.

This rescue vehicle is a concrete example of how DAU is utilized for tangible humanitarian actions, especially in emergency situations. Hopefully, this vehicle will serve as an effective operational tool to respond swiftly to disasters and save lives.

4. Mobil Siaga Bencana Jakarta dan Jawa Tengah

Pada 13 Desember 2024, BPKH melalui NU Care-LAZISNU menyerahkan satu unit Toyota Hilux sebagai Mobil Siaga Bencana kepada LPBI PBNU. Serah terima dilaksanakan di Gedung PBNU, Jakarta, dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dari PBNU, NU Care-LAZISNU, serta BPKH.

Kendaraan ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan organisasi dalam melaksanakan operasi penyelamatan taktis saat bencana, terutama untuk penanganan di lapangan yang memerlukan mobilitas tinggi.

Selain itu, BPKH juga menggulirkan program Siaga Bencana di Jawa Tengah melalui Solo Peduli, sebagai bentuk perluasan dukungan dan kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat.

4. Jakarta and Central Java Disaster Response Vehicles

On December 13, 2024, BPKH through NU Care-LAZISNU handed over one unit of Toyota Hilux as a Disaster Response Vehicle to LPBI PBNU. The handover ceremony was held at the PBNU Building in Jakarta and was attended by a number of important figures from PBNU, NU Care-LAZISNU, and BPKH.

This vehicle is expected to strengthen the organization's ability to carry out tactical rescue operations during disasters, especially for handling situations in the field that require high mobility.

In addition, BPKH also rolled out a Disaster Preparedness program in Central Java through Solo Peduli, as a form of expanding support and preparedness in facing emergency conditions.

Langkah ini menjadi wujud nyata penguatan sinergi nilai-nilai kemanusiaan dan kebencanaan antara BPKH dan Mitra Kemaslahatan dalam memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

This step is a tangible manifestation of the strengthening of synergy between BPKH and Benefit Program Partners in terms of humanitarian and disaster management to provide broader benefits to the community.

5. Kampung Haji Sukabumi – Hunian Layak Penyintas Bencana

Di Sukabumi, BPKH membangun Kampung Haji di Desa Kertaangsana, Kecamatan Nyalindung menyediakan 129 unit hunian tetap bagi 180 keluarga penyintas bencana tanah bergerak. Proses pembangunan yang dimulai tahun 2023 dan resmi diresmikan Agustus 2024 ini mengubah nasib penyintas dengan menyediakan hunian layak sekaligus sarana pendukung seperti masjid, taman, miniatur Ka'bah, serta pengelolaan air bersih.

5. Sukabumi Hajj Village – Decent Housing for Disaster Survivors

In Sukabumi, BPKH built a Hajj Village in Kertaangsana Village, Nyalindung District, providing 129 permanent housing units for 180 families who survived a landslide. The construction process, which began in 2023 and was officially inaugurated in August 2024, has transformed the lives of the survivors by providing decent housing along with supporting facilities such as a mosque, a park, a miniature Ka'bah, and clean water management.

Lebih dari sekadar hunian, Kampung Haji ini dirancang sebagai pusat komunitas yang mendukung kehidupan sosial dan ekonomi warga setempat.

More than just housing, Kampung Haji is designed as a community center supporting the social and economic lives of local residents.

Uraian Description	Unit	2024	2023	2022
Nilai Penyaluran Tanggap Bencana Disbursement Value of Disaster Response	Rp	6.878.761.500	899.295.000	11.500.000.000

Inisiatif Kegiatan Kemaslahatan pada Ruang Lingkup Tanggap Bencana Tahun 2024

Benefit Program Initiatives of Disaster Response in 2024

Inisiatif Initiatives	Penjelasan Inisiatif Initiatives Description	Jumlah Bantuan Number of Benefit Programs	Estimasi Penerima Manfaat Estimated Beneficiaries	SDGs
Pengadaan Barang Goods Procurement	Program pengadaan barang dalam ruang lingkup tanggap bencana merupakan kegiatan penyediaan sarana, perlengkapan, dan kebutuhan dasar darurat bagi masyarakat terdampak bencana alam maupun bencana sosial. Program ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan mendukung kelancaran penanganan darurat bencana, sehingga masyarakat terdampak dapat segera memperoleh bantuan berupa barang yang layak, cepat tersedia, dan sesuai kebutuhan lapangan.	3	29.350	

Inisiatif Initiatives	Penjelasan Inisiatif Initiatives Description	Jumlah Bantuan Number of Benefit Programs	Estimasi Penerima Manfaat Estimated Beneficiaries	SDGs
	The procurement program for goods within the scope of disaster response is an activity to provide facilities, equipment, and basic emergency needs for communities affected by natural and social disasters. This program is aimed at meeting basic needs and supporting the smooth handling of disaster emergencies, so that affected communities can immediately obtain assistance in the form of goods that are suitable, quickly available, and in line with field needs.			
Pengadaan Mobil <i>Rescue</i> Rescue Car Procurement	Pengadaan mobil <i>rescue</i> dalam ruang lingkup tanggap bencana merupakan kegiatan penyediaan kendaraan operasional penyelamatan yang difungsikan untuk mendukung proses evakuasi, distribusi bantuan, dan penanganan darurat di wilayah terdampak bencana The procurement of rescue vehicles within the scope of disaster response is an activity to provide operational rescue vehicles that are used to support the evacuation process, distribution of aid, and emergency response in disaster-affected areas.	4	12.500	   
Tanggap Bencana Disaster Response	Tanggap bencana merupakan kegiatan respon cepat, terpadu, dan terarah untuk membantu masyarakat terdampak bencana alam maupun bencana sosial, melalui pemberian bantuan darurat, penyediaan kebutuhan dasar, dan dukungan pemulihan awal pascabencana. Disaster response is a rapid, integrated, and targeted activity to help communities affected by natural and social disasters through the provision of emergency assistance, basic necessities, and initial post-disaster recovery support.	12	36.282	      



PENGHUNI KAMPUNG HAJI SUKABUMI

Residents of Kampung Haji Sukabumi

“Saya sangat bersyukur bisa tinggal di Kampung Haji ini. Setelah bencana tanah bergerak yang membuat kami kehilangan rumah, kami sempat tidak tahu harus tinggal di mana. Sekarang, dengan adanya hunian layak dari BPKH, hidup kami lebih tenang dan nyaman. Fasilitasnya lengkap, ada masjid, ruang terbuka hijau, dan akses air bersih. Ini bukan hanya rumah, tapi awal baru untuk kami dan keluarga.”

“I am very grateful to be able to live in Kampung Haji. After the landslide that destroyed our homes, we didn't know where to live. Now, with decent housing from BPKH, our lives are more safer and more comfortable. The facilities are complete, there is a mosque, green open space, and access to clean water. This is not just a house, but a new beginning for us and our families.”

Jumlah Penerima Manfaat Ruang Lingkup Tanggap Bencana

Number of Beneficiaries in Disaster Response Scope

Uraian Description		Unit	2024	2023
Jenis Kelamin Gender	Laki-laki Male	78.132 Jiwa* 78,132 People*	38.611	2.475
	Perempuan Female		39.521	3.575
	Jumlah Total		78.132	6.050
Usia Age	<30 Tahun <30 Years old		29.212	2.100
	30-50 Tahun 30-50 Years old		28.751	3.200
	>50 Tahun >50 Years old		20.169	750
	Jumlah Total		78.132	6.050
Daerah 3T 3T Areas	3T		0	9
	Non-3T		78.132	6.050

*Pada tahun 2024, BPKH tidak melakukan penghitungan penerima manfaat dengan kategori jenis kelamin, usia, dan daerah 3T.

*In 2024, BPKH did not calculate beneficiaries by gender, age, and 3T areas.

Dampak Ekonomi Tidak Langsung Program Kemaslahatan

Indirect Economic Impact of Benefit Program [GRI 3-3][SEOJK F.23]

Donasi Investasi Infrastruktur dan Dukungan Layanan BPKH [GRI 203-1]

BPKH's Infrastructure Investments Donation and Services Support [GRI 203-1]

Jenis Infrastruktur dan Layanan yang Didukung Types of Infrastructure and Services Supported	Dampak yang Dihasilkan The Impact Produced
Infrastruktur Pendidikan Educational Infrastructure (in-kind)	Pembangunan ruang kelas baru, madrasah, pondok pesantren, dan gedung dakwah berdampak langsung pada peningkatan mutu layanan pendidikan. Dengan tersedianya sarana belajar yang lebih layak, nyaman, dan aman, proses pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif. Selain itu, kapasitas daya tampung sekolah dan madrasah meningkat sehingga lebih banyak siswa maupun santri yang dapat memperoleh akses pendidikan. Hal ini turut mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan lembaga pendidikan Islam sebagai pusat pengembangan ilmu dan akhlak. The construction of new classrooms, madrasas, Islamic boarding schools, and da'wah buildings has a direct impact on improving the quality of educational services. With the availability of improved, comfortable, and safe learning facilities, the learning process can take place more effectively. In addition, the capacity of schools and madrasas has increased, allowing more students and santri to gain access to education. This supports efforts to improve the quality of human resources by strengthening Islamic educational institutions as centers for Islamic learning and character development.
Infrastruktur Keagamaan Religious Matters Infrastructure (in-kind)	Renovasi dan pembangunan masjid maupun mushalla memberikan ruang ibadah yang lebih representatif, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Selain berfungsi sebagai tempat beribadah, masjid juga berperan sebagai pusat dakwah, pendidikan nonformal, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Dengan adanya perbaikan infrastruktur masjid, masyarakat dapat lebih mudah mengakses kegiatan keagamaan dan kebersamaan sosial, sehingga memperkuat ukhuwah Islamiyah serta meningkatkan kualitas kehidupan religius di lingkungan sekitar. The renovation and construction of mosques and prayer rooms provides a more representative, safe, and comfortable place of worship for the community. Apart from functioning as a place of worship, mosques also serve as centers for preaching, non-formal education, and social activities. With the improvement of mosque infrastructure, the community can more easily access religious activities and social gatherings, thereby strengthening community unity and Islamic fellowship, as well as enhancing the quality of religious life in the surrounding environment.

Jenis Infrastruktur dan Layanan yang Didukung Types of Infrastructure and Services Supported	Dampak yang Dihasilkan The Impact Produced
Infrastruktur Kesehatan Health Infrastructure (in-kind)	Pembangunan poliklinik dan rumah sakit serta pengadaan alat penunjang kesehatan berkontribusi besar dalam memperluas akses layanan kesehatan masyarakat. Keberadaan fasilitas kesehatan yang lebih dekat dan mudah dijangkau mengurangi hambatan jarak maupun biaya bagi masyarakat yang membutuhkan pengobatan. Dampaknya adalah meningkatnya derajat kesehatan melalui layanan promotif, preventif, dan kuratif. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur kesehatan tidak hanya membantu masyarakat dalam penanganan penyakit, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. The construction of polyclinics and hospitals as well as the provision of medical equipment greatly contributes to expanding access to public health services. The presence of health facilities that are closer and more accessible reduces distance and cost barriers for people who need medical treatment. The impact is an improvement in public health outcomes through promotive, preventive, and curative services. Thus, the development of health infrastructure not only helps the community in dealing with disease but also improves overall quality of life.
Infrastruktur Sosial & Pemberdayaan Masyarakat Social Infrastructure & Community Empowerment (in-kind)	Pembangunan Kampung Haji bagi masyarakat penyintas bencana memberikan dampak ganda, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Hunian yang layak membantu memulihkan kondisi kehidupan penyintas secara fisik, sementara pelibatan masyarakat sebagai tenaga pendukung teknis memberikan peluang pemberdayaan dan peningkatan keterampilan. Dengan pendekatan ini, masyarakat terdampak tidak hanya mendapatkan tempat tinggal baru, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk bangkit, mandiri, serta lebih tangguh menghadapi tantangan di masa depan. The development of Hajj Village for disaster survivors has a dual positive impact, both socially and economically. Decent housing helps restore the physical condition of survivors, while the involvement of the community as technical support provides opportunities for empowerment and skill improvement. With this approach, the affected community not only gets a new place to live, but also the opportunity to rise, become independent, and be more resilient in facing future challenges.
Infrastruktur Pelayanan Publik Keagamaan Religious Public Service Infrastructure (in-kind)	Pembangunan Gedung Pusat Layanan Informasi dan Dokumentasi Haji dan Umrah menghadirkan fasilitas yang mendukung pelayanan publik di bidang keagamaan. Dampaknya, jamaah dapat memperoleh akses informasi, administrasi, dan dokumentasi dengan lebih cepat, mudah, dan transparan. Keberadaan gedung ini memperkuat tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah, meningkatkan akuntabilitas, serta memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dengan demikian, layanan haji dan umrah menjadi lebih profesional dan terpercaya. The construction of the Hajj and Umrah Information and Documentation Center Building provides facilities that support public services in the religious sector. As a result, pilgrims can obtain information, administration, and documentation more quickly, easily, and transparently. The existence of this building strengthens the governance of Hajj and Umrah administration, increases accountability, and improves the quality of government services to the community. Thus, Hajj and Umrah services become more professional and reliable.

Salah satu prioritas utama Program Kemaslahatan BPKH adalah penguatan ekonomi umat melalui dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat. Berbagai program dirancang untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat

One of the main priorities of the BPKH Benefit Program is to strengthen the economy of the community through support for community-based economic growth. Various programs are designed to provide opportunities for the community to

agar dapat mengembangkan produktivitas dan kemandirian secara berkelanjutan. Pendekatan ini dilakukan melalui pemberian bantuan modal, penyediaan sarana usaha, dan peralatan pendukung yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan kegiatan ekonomi mereka.

Lebih dari sekadar memberikan bantuan finansial, program ini juga berperan dalam memberdayakan penerima manfaat dengan mendorong terciptanya sumber penghasilan baru. Salah satu contohnya adalah Program Kemaslahatan BPKH melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mina Sahabat berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dengan memberikan bantuan sarana penangkapan ikan serta peralatan pendukung operasional nelayan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi hasil tangkapan, sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan dan keluarganya. Dengan adanya dukungan ini, anggota KUB Mina Sahabat diharapkan mampu mengoptimalkan potensi sumber daya laut dan memperoleh pendapatan yang lebih stabil.

BPKH telah melakukan kajian dampak, dimana program ini memberikan nilai *Social Return on Investment* (SROI) sebesar Rp238.682.750 atas total investasi sebesar Rp164.350.000. Artinya, setiap Rp1 yang diinvestasikan oleh BPKH menghasilkan nilai manfaat sosial sebesar sekitar Rp1,45 bagi masyarakat. Rasio ini menunjukkan tingkat efektivitas program dalam memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan nelayan serta penguatan ekonomi lokal. [\[GRI 413-1\]](#)

Implementasi program ini terbukti meningkatkan taraf hidup penerima manfaat. Nelayan yang tergabung dalam KUB Mina Sahabat kini memiliki akses pada peralatan modern, memungkinkan mereka untuk meningkatkan volume dan kualitas hasil tangkapan. Selain itu, peningkatan produktivitas turut berdampak pada peningkatan daya saing nelayan di pasar lokal dan regional. Tidak hanya pada sisi ekonomi, program ini juga mendorong kolaborasi antaranggota KUB, memperkuat semangat kebersamaan, dan memunculkan inisiatif kolektif dalam mengelola sumber daya perikanan secara lebih berkelanjutan.

develop productivity and independence in a sustainable manner. This approach is carried out through the provision of capital assistance, business facilities, and supporting equipment needed to support the success of their economic activities.

More than just providing financial assistance, this program also plays a role in empowering beneficiaries by encouraging the creation of new sources of income. One example is the BPKH Benefit Program through the Mina Sahabat Joint Business Group (KUB), which focuses on empowering coastal communities by providing fishing equipment and operational support for fishermen. This program aims to increase the production capacity of fish catches while improving the well-being of fishermen and their families. With this support, members of the Mina Sahabat KUB are expected to optimize the potential of marine resources and achieve more stable income.

BPKH has conducted an impact assessment, which shows that the program has generated a Social Return on Investment (SROI) of Rp238,682,750 on a total investment of Rp164,350,000. This means that every Rp1 invested by BPKH generates approximately Rp1.45 in social benefits for the community. This ratio demonstrates the program's effectiveness in delivering significant social and economic impacts on improving fishermen's incomes and strengthening the local economy. [\[GRI 413-1\]](#)

The implementation of this program has proven to improve the living standards of beneficiaries. Fishermen who are members of the Mina Sahabat KUB now have access to modern equipment, enabling them to increase the volume and quality of their catches. Additionally, increased productivity has also enhanced fishermen's competitiveness in local and regional markets. Not only on the economic side, this program also encourages collaboration among KUB members, strengthens the spirit of togetherness, and sparks collective initiatives in managing fishery resources more sustainably.

Selain menghasilkan dampak positif, program ini juga memiliki payback period yang relatif cepat. Dengan total dampak tahunan mencapai hampir Rp238 juta, modal investasi diproyeksikan kembali dalam kurun waktu sekitar delapan bulan. Keberhasilan ini memberikan landasan kuat untuk memperluas model program serupa ke wilayah pesisir lainnya. Ke depan, penguatan kapasitas manajemen kelompok dan peningkatan akses pasar akan menjadi fokus utama agar manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkan dapat terus berkelanjutan serta mendukung kemandirian ekonomi nelayan secara lebih optimal.

Meskipun Program Kemaslahatan BPKH memberikan dampak positif yang signifikan, terdapat potensi tantangan yang perlu diantisipasi. Salah satu risiko yang dapat timbul adalah munculnya ketergantungan penerima manfaat terhadap bantuan yang diberikan. Jika tidak dikelola dengan tepat, kondisi ini dapat mengurangi dorongan penerima manfaat untuk mengembangkan kemandirian ekonomi secara berkelanjutan.

Sebagai langkah mitigasi, BPKH merancang program pendampingan dan pelatihan yang difokuskan pada peningkatan keterampilan, manajemen usaha, serta pengelolaan sumber daya. Upaya ini diharapkan dapat membekali penerima manfaat dengan kompetensi yang memadai agar mampu mengembangkan usaha secara mandiri dan menjaga keberlangsungan manfaat program dalam jangka panjang. [\[GRI 203-2\]](#)

Pada tahun 2024, BPKH telah melakukan survei kepuasan Penerima Manfaat Kemaslahatan dengan hasil rata-rata 95%. [\[SEOJK F.30\]](#)

In addition to generating positive impacts, this program also has a relatively fast payback period. With a total annual impact of nearly Rp238 million, the investment capital is projected to be recovered within approximately eight months. This success provides a strong foundation for expanding similar programs to other coastal areas. Moving forward, strengthening group management capacity and improving market access will be key priorities to ensure that the economic and social benefits generated remain sustainable and support fishermen's economic independence more effectively.

Although the BPKH Benefit Program has had a significant positive impact, there are potential challenges that need to be anticipated. One of the risks that may arise is the emergence of beneficiary dependency on the assistance provided. If not managed properly, this condition could reduce motivation of beneficiaries to develop sustainable economic independence.

As a mitigation measure, BPKH has designed mentoring and training programs focused on enhancing skills, business management, and resource management. These efforts are expected to equip beneficiaries with adequate competencies to develop their businesses independently and ensure the long-term sustainability of program benefits. [\[GRI 203-2\]](#)

In 2024, BPKH has conducted satisfaction survey to Benefit Program Recipients with the average result of 95%. [\[SEOJK F.30\]](#)

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi

Monitoring and Evaluation Activities [GRI 3-3][SEOJK F.27]



Untuk memastikan seluruh kegiatan Program Kemaslahatan berjalan sesuai dengan tujuan serta memberikan dampak yang optimal, Divisi Pelaksanaan dan *Monitoring* (Monev) Kemaslahatan BPKH melaksanakan proses pemantauan dan evaluasi secara rutin dan sistematis. Evaluasi dilakukan melalui pelaporan berkala, kunjungan lapangan, serta observasi langsung guna memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan program. Setiap kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif, sehingga penilaian terhadap pencapaian tujuan dapat dilakukan secara menyeluruh.

To ensure that all activities of the Benefit Program run in accordance with their objectives and deliver optimal impact, the Benefit Program Implementation and Monitoring Division (Monev) of BPKH conducts routine and systematic monitoring and evaluation processes. Evaluations are carried out through periodic reporting, field visits, and direct observation to ensure that implementation is in line with program planning. Each activity is equipped with performance indicators that cover quantitative and qualitative aspects, so that the achievement of objectives can be assessed comprehensively.

Program Kemaslahatan BPKH bertujuan menciptakan manfaat nyata sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap para penerima manfaat. Oleh karena itu, proses pemantauan dan evaluasi diarahkan untuk:

1. Memastikan sasaran program tercapai sesuai target;
2. Mengidentifikasi kendala dan potensi risiko yang relevan;
3. Menemukan peluang perbaikan dan pengembangan program;
4. Membantu penanggung jawab dalam mengelola sumber daya dan mengendalikan pelaksanaan;
5. Memastikan program dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Menegakkan asas syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparansi, dan akuntabilitas.

Berikut adalah beberapa poin usulan perbaikan dari hasil pemantauan evaluasi program kemaslahatan:

1. Bantuan Mobil Operasional

BPKH memperketat proses pemantauan penggunaan mobil operasional untuk memastikan bantuan dimanfaatkan sesuai tujuan. Evaluasi menemukan adanya potensi penyalahgunaan sehingga direkomendasikan pengalihan jenis bantuan ke kendaraan yang lebih jelas manfaatnya, seperti ambulans atau mobil siaga bencana. Langkah ini bertujuan meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas program.

2. Bantuan Ternak

Proses seleksi penerima bantuan ternak dilakukan lebih ketat dengan mewajibkan calon penerima terdaftar di SIMLUHTAN. Selain itu, evaluasi menekankan pentingnya pembaruan perjanjian asuransi serta pelaksanaan program melalui skema strategis bersama mitra yang memiliki kapasitas untuk melanjutkan proses pemberdayaan masyarakat.

3. Bantuan Sembako/Bingkisan

Kegiatan bantuan sembako berpotensi disalahgunakan sebagai alat politik, terutama menjelang pemilu. Oleh karena itu, BPKH

The BPKH Benefit Program aims to create tangible benefits while minimizing negative impacts on beneficiaries. Therefore, the monitoring and evaluation process is directed at:

1. Ensuring that program targets are achieved;
2. Identifying relevant obstacles and potential risks;
3. Finding opportunities for program improvement and development;
4. Assisting those responsible for managing resources and controlling implementation;
5. Ensuring that the program is carried out in accordance with the provisions of laws and regulations;
6. Upholding the principles of sharia, prudence, benefit, non-profit, transparency, and accountability.

The following are some suggestions for improvement based on the results of the benefit program evaluation monitoring:

1. Operational Vehicle Assistance

BPKH tightened the monitoring process for the use of operational vehicles to ensure that assistance was used for its intended purpose. The evaluation found potential misuse, so it was recommended that the type of assistance be changed to vehicles with clearer benefits, such as ambulances or disaster response vehicles. This step aims to improve the effectiveness and accountability of the program.

2. Livestock Assistance

The selection process for livestock assistance recipients is carried out more strictly by requiring prospective recipients to be registered in SIMLUHTAN. In addition, the evaluation emphasizes the importance of updating insurance agreements and implementing the program through a strategic scheme with partners who have the capacity to continue the community empowerment process.

3. Food Assistance/Gift Packages

Food assistance activities have the potential to be misused as a political tool, especially ahead of elections. Therefore, BPKH has established

menetapkan kebijakan untuk tidak menyalurkan bantuan pada periode sensitif dan memastikan distribusi dilakukan melalui perencanaan matang serta kesepakatan transparan dengan mitra pelaksana.

4. Batas Maksimum Bantuan

Untuk mendorong pemerataan manfaat, BPKH menetapkan batas nominal bantuan per penerima serta pembatasan penerimaan hanya satu kali dalam satu tahun anggaran. Kebijakan ini dirancang untuk menghindari ketergantungan dan memperluas cakupan penerima manfaat.

5. Program Kolaborasi

Pemantauan menunjukkan bahwa keberhasilan program kolaborasi bergantung pada keterlibatan sejak tahap perencanaan. Oleh karena itu, BPKH memastikan seluruh mitra diajak berdiskusi sejak awal untuk menyusun program strategis bersama sehingga pelaksanaan dapat lebih efektif dan terkendali.

6. Program dengan Persetujuan Sebagian

Evaluasi menegaskan bahwa persetujuan parsial program dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan. Oleh karena itu, BPKH mendorong penerima bantuan untuk menyelesaikan komitmen proyek hingga fungsional dan menghindari pemberian persetujuan hanya sebagian.

Sepanjang tahun 2024, seluruh kegiatan Program Kemaslahatan (100%) telah melalui proses pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh. Hasil evaluasi menunjukkan tingkat kepatuhan tinggi terhadap prosedur dan prinsip syariah. Selain itu, tidak terdapat laporan insiden terkait keselamatan dan kesehatan penerima manfaat, yang mencerminkan efektivitas pengelolaan risiko dan kualitas implementasi program.

a policy to refrain from distributing assistance during sensitive periods and to ensure distribution is conducted through careful planning and transparent agreements with implementing partners.

4. Maximum Assistance Limits

To encourage equitable distribution of benefits, BPKH has set a nominal limit on assistance per recipient and restricted recipients to receiving assistance only once per fiscal year. This policy is designed to prevent dependency and expand the coverage of beneficiaries.

5. Collaborative Programs

Monitoring shows that the success of collaborative programs depends on involvement from the planning stage. Therefore, BPKH ensures that all partners are involved in discussions from the outset to develop joint strategic programs so that implementation can be more effective and controlled.

6. Programs with Partial Approval

The evaluation confirmed that partial program approval can affect the smooth implementation of programs. Therefore, BPKH encourages aid recipients to complete their project commitments until they are functional and to avoid giving only partial approval.

Throughout 2024, all activities under the Benefit Program (100%) have undergone comprehensive monitoring and evaluation. Evaluation results indicate high compliance with procedures and Sharia principles. Additionally, there were no reports of incidents related to the safety and health of beneficiaries, reflecting effective risk management and program implementation quality.



INISIATIF HIJAU BPKH

BPKH's Green Initiative





BPKH
PENANJARAN MANGROVE BERKAWA BUKIT
PLANT THE FUTURE
Amri Yusuf

BPKH
PENANJARAN MANGROVE BERKAWA BUKIT
PLANT THE FUTURE
Rojikin

BPKH
PENANJARAN MANGROVE BERKAWA BUKIT
PLANT THE FUTURE
Dyah Rukhyo

BPKH
PENANJARAN MANGROVE BERKAWA BUKIT
PLANT THE FUTURE
Amri Yusuf

Komitmen Operasional Ramah Lingkungan Commitment to Environmentally Friendly Operations

BPKH memahami bahwa meskipun aktivitas operasional dan rantai nilainya tidak menimbulkan dampak lingkungan yang besar, tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam tetap menjadi bagian penting dari prinsip moral, sosial, dan spiritual yang dipegang. Sebagai wujud amanah manusia sebagai khalifah di bumi sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, BPKH berkomitmen untuk berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan melalui praktik internal yang menekankan efisiensi sumber daya dan pengurangan jejak lingkungan dalam aktivitas sehari-hari.

BPKH understands that although its operational activities and value chain do not have a significant environmental impact, the responsibility to preserve nature remains an important part of its moral, social, and spiritual principles. As a fulfillment of humanity's role as stewards of the earth, as mentioned in the Quran, BPKH is committed to contributing to environmental conservation through internal practices that emphasize resource efficiency and the reduction of environmental footprints in daily activities.

Penghematan Air [SEOJK F.8]

BPKH terus mendorong penerapan perilaku hemat air di lingkungan kerja, baik di kalangan pegawai maupun dalam operasional sehari-hari, seperti tulisan himbauan penghematan air di dekat wastafel. Upaya ini bertujuan untuk menghindari pemborosan serta memastikan pemanfaatan sumber daya air dilakukan secara efisien dan bijak. Inisiatif ini juga mencerminkan nilai-nilai Islam yang menekankan kesederhanaan dan larangan berlebih-lebihan dalam penggunaan nikmat yang telah Allah SWT anugerahkan.

Saving Water [SEOJK F.8]

BPKH continues to encourage water conservation in the workplace, both among employees and in daily operations, such as signs urging water conservation near the sink. This effort aims to avoid waste and ensure that water resources are used efficiently and wisely. This initiative also reflects Islamic values that emphasize simplicity and prohibit excess in the use of the blessings that Allah SWT has bestowed upon us.

Sepanjang tahun 2024, kebutuhan air di lingkungan kantor BPKH dipenuhi melalui sumber air yang digunakan oleh pengelola gedung, yang digunakan untuk keperluan domestik pegawai. Rincian penggunaan air selama periode pelaporan adalah sebagai berikut:

Throughout 2024, the water needs of BPKH offices were met through water source used by building management, which was used for domestic purposes of employees. The details of water usage during the reporting period are as follows:

Penggunaan Air
Water Consumption [303-5][SEOJK F.8]

Uraian Description	Unit	2024	2023	2022
Penggunaan Air Water Consumption	m ³	3.146,4	2.746,2	165,6

Pengelolaan Sampah Domestik [SEOJK F.14]

Hingga saat ini, BPKH berfokus pada pengelolaan sampah dengan meminimalkan volume limbah domestik yang dikirim ke tempat pembuangan akhir, dimana pengelolaan dan pengolahan sampah

Domestic Waste Treatment [SEOJK F.14]

Currently, BPKH focuses on waste management by minimizing the volume of domestic waste sent to landfills, where waste management and processing are carried out by building managers.

dilakukan oleh pengelola gedung. Salah satu jenis limbah terbesar yang dihasilkan dari aktivitas operasional adalah limbah kertas. BPKH terus mendorong efisiensi penggunaan kertas sebagai bagian dari upaya pengurangan dampak lingkungan. Adapun data terkait limbah kertas yang dihasilkan selama periode pelaporan adalah sebagai berikut:

One of the largest types of waste generated from operational activities is paper waste. BPKH continues to promote efficient use of paper as part of its efforts to minimize environmental impact. The data related to paper waste generated during the reporting period is as follows:

Limbah yang Dihasilkan
Generated Waste [306-3] [SEOJK F.13]

Uraian Description	Unit	2024	2023	2022
Limbah dari Kertas yang Dihasilkan Generated Waste from Paper	Kg	1.233,04	1.172,69	693,18

Pada tahun 2024, tidak terdapat tumpahan limbah yang terjadi dan tidak terdapat pengaduan terkait lingkungan yang diterima. In 2024, there were no waste spills occurred and complaints received related to environment. [SEOJK F.15, F.16]

Pengurangan Penggunaan kertas [SEOJK F.5]

Saving Paper [SEOJK F.5]

Di luar limbah domestik, sebagian besar limbah yang dihasilkan BPKH berasal dari aktivitas administrasi perkantoran. Untuk menekan timbulan limbah, khususnya limbah kertas, BPKH mengadopsi kebijakan digitalisasi dalam pengelolaan dokumen dan komunikasi internal. Saat ini, hampir seluruh proses administrasi telah beralih ke sistem *e-office*, sementara transaksi dan pencatatan keuangan dilaksanakan melalui sistem *Cash Management System* (CMS). Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan dampak lingkungan.

Apart from domestic waste, most of the waste generated by BPKH comes from office administrative activities. To reduce waste generation, particularly paper waste, BPKH has adopted a digitalization policy for document management and internal communication. Currently, nearly all administrative processes have transitioned to an *e-office* system, while financial transactions and record-keeping are conducted through the *Cash Management System* (CMS). This approach not only enhances operational efficiency but also contributes to reducing environmental impact.

Pada tahun 2024, BPKH mencatatkan peningkatan penggunaan kertas sebagai konsekuensi dari semakin intensifnya kegiatan operasional, termasuk pengelolaan Program Kemaslahatan yang melibatkan lebih banyak mitra dan pelaporan administratif. Meskipun demikian, BPKH tetap berkomitmen terhadap prinsip keberlanjutan dan efisiensi sumber daya. Untuk itu, berbagai inisiatif *offsetting* diterapkan sebagai langkah pengimbangan terhadap penggunaan kertas yang meningkat, salah satunya melalui kebijakan digitalisasi dalam pengelolaan dokumen dan komunikasi internal. Melalui pendekatan tersebut, BPKH berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan produktivitas kerja dan kepedulian terhadap lingkungan.

In 2024, BPKH recorded an increase in paper usage as a consequence of increasingly intensive operational activities, including the management of the Benefit Program, which involved more partners and administrative reporting. Nevertheless, BPKH remains committed to the principles of sustainability and resource efficiency. To that end, various offset initiatives were implemented to counterbalance the increased use of paper, one of which was through a policy of digitization in document management and internal communications. Through this approach, BPKH strives to maintain a balance between increased work productivity and concern for the environment.

Penggunaan Kertas

Paper Use

Uraian Description	Unit	2024	2023	2022
Penggunaan Kertas Paper Use	Rim Ream	756	719	425

Sebagai salah satu inisiatif ramah lingkungan dari aspek material, BPKH melakukan pengurangan penggunaan plastik untuk distribusi hewan qurban dan paket sembako dengan menggunakan penggunaan tas kain, besek, plastik ramah lingkungan, dan pembungkus berbahan dasar daun. [SEOJK F.5]

As one of its environmentally friendly initiatives in terms of materials, BPKH reduced the use of plastic for the distribution of sacrificial animals and food packages by using cloth bags, besek (woven bamboo baskets), environmentally friendly plastic, and leaf-based wrappings. [SEOJK F.5]

Change Transformation Office

[SEOJK F.26]

Change Transformation Office (CTO) merupakan inisiatif strategis yang dibentuk untuk mengakselerasi transformasi digital di lingkungan BPKH dalam menjawab dinamika perkembangan teknologi dan tuntutan efisiensi layanan publik. Inisiatif ini menjadi fondasi penting dalam mendorong perubahan sistemik di seluruh lini kerja, dengan tujuan utama meningkatkan efektivitas operasional, kualitas pelayanan kepada umat, serta kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan hidup.

Change Transformation Office

[SEOJK F.26]

The Change Transformation Office (CTO) is a strategic initiative established to accelerate digital transformation within BPKH in response to the dynamics of technological developments and demands for public service efficiency. This initiative serves as an important foundation in driving systemic change across all lines of work, with the main objectives of improving operational effectiveness, quality of service to the community, and contribution to environmental sustainability.

Melalui CTO, BPKH mengadopsi berbagai pendekatan inovatif, termasuk digitalisasi dokumen dan implementasi sistem manajemen dokumen elektronik guna mengurangi ketergantungan pada kertas. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mendukung pelestarian lingkungan dengan menekan konsumsi kertas dan dampak turunan seperti penebangan pohon dan emisi karbon dari proses produksi kertas. CTO juga mendorong pembaruan infrastruktur teknologi informasi (TI) untuk memastikan penggunaan energi yang lebih efisien, andal, dan ramah lingkungan.

Through the CTO, BPKH has adopted various innovative approaches, including document digitization and the implementation of an electronic document management system to reduce dependence on paper. This step is part of efforts to support environmental conservation by reducing paper consumption and its downstream impacts, such as deforestation and carbon emissions from paper production processes. The CTO also promotes the renewal of information technology (IT) infrastructure to ensure more efficient, reliable, and environmentally friendly energy use.

Sebagai bagian dari transformasi ini, BPKH telah mengembangkan penggunaan e-office dan *Cash Management System* (CMS) dalam kegiatan administrasi dan pengelolaan keuangan. Selain itu, BPKH menggandeng penyedia layanan pengelolaan arsip digital untuk mengonversi arsip-arsip penting ke dalam sistem berbasis daring. Digitalisasi arsip ini tidak hanya mengurangi

As part of this transformation, BPKH has developed the use of e-office and Cash Management System (CMS) in administrative and financial management activities. In addition, BPKH has partnered with a digital archive management service provider to convert important archives into an online-based system. This digitization of archives not only reduces the need for physical space and paper waste but

kebutuhan ruang fisik dan limbah kertas, tetapi juga meningkatkan keamanan data, efisiensi penyimpanan, serta kemudahan akses informasi secara *real-time* bagi seluruh unit kerja. Melalui CTO, BPKH membuktikan komitmennya dalam membangun tata kelola yang modern, adaptif, dan berwawasan lingkungan.

Pengelolaan Energi dan Emisi [SEOJK F.7, F.12]

Sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan dan efisiensi operasional, BPKH secara aktif mengelola konsumsi energi dan berupaya menekan emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas perkantoran. Berbagai langkah konkret telah diterapkan guna mendukung pengurangan jejak lingkungan sekaligus menciptakan budaya kerja yang lebih ramah lingkungan.

Beberapa inisiatif yang dijalankan BPKH dalam pengelolaan energi dan pengurangan emisi meliputi:

- Penerapan konsep *co-working* dan *open space* di lingkungan kantor, yang dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan ruang kerja, mengurangi kebutuhan pendinginan dan pencahayaan berlebih, serta meningkatkan kolaborasi antar pegawai.
- Pemilihan moda transportasi ramah lingkungan untuk aktivitas dinas luar kantor, dengan mendorong pegawai menggunakan transportasi publik atau berbagi kendaraan (*carpooling*) guna menekan konsumsi bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca.
- Kampanye kesadaran hemat energi yang dijalankan secara rutin di internal BPKH, melalui imbauan dan edukasi kepada pegawai untuk menggunakan listrik dan perangkat elektronik secara bijak serta mematikan alat yang tidak digunakan.
- Inventarisasi emisi secara berkala, sebagai upaya mengukur dan memetakan sumber emisi yang signifikan. Melalui langkah ini, BPKH dapat menyusun strategi pengurangan emisi yang lebih terarah dan terukur, serta mendukung pencapaian target pengelolaan lingkungan jangka panjang.

Seluruh upaya ini tidak hanya bertujuan untuk efisiensi energi, tetapi juga mencerminkan peran aktif BPKH dalam mendukung agenda keberlanjutan nasional melalui pengelolaan energi dan emisi yang bertanggung jawab.

also enhances data security, storage efficiency, and real-time access to information for all departments. Through the CTO, BPKH demonstrates its commitment to building a modern, adaptive, and environmentally conscious governance framework.

Energy and Emission Management [SEOJK F.7, F.12]

As part of its commitment to sustainability and operational efficiency, BPKH actively manages energy consumption and strives to reduce carbon emissions generated from office activities. Various practical measures have been implemented to support the reduction of its environmental footprint while creating a more environmentally friendly work culture.

Some of the initiatives implemented by BPKH in energy management and emission reduction include:

- Implementation of *co-working* and *open space* concepts in the office environment, designed to optimize the use of workspace, reduce the need for excessive cooling and lighting, and enhance collaboration among employees.
- Selecting environmentally friendly transportation modes for off-site business activities, encouraging employees to use public transportation or carpooling to reduce fossil fuel consumption and greenhouse gas emissions.
- Conducting regular energy-saving awareness campaigns within BPKH, through reminders and education to employees to use electricity and electronic devices wisely and turn off unused equipment.
- Conducting regular emissions inventories to measure and map significant emission sources. Through this initiative, BPKH can develop targeted and measurable emission reduction strategies, supporting the achievement of long-term environmental management goals.

All these efforts are aimed not only at energy efficiency but also reflect BPKH's active role in supporting the national sustainability agenda through responsible energy and emissions management.

Pada tahun 2024, BPKH mencatat adanya peningkatan konsumsi energi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh penambahan penggunaan satu lantai gedung yang sebelumnya tidak dioperasikan secara rutin, dan mulai difungsikan sebagai ruang serbaguna untuk menyelenggarakan berbagai acara. Konsekuensinya, terjadi pula peningkatan emisi energi sebagai dampak dari peningkatan kebutuhan listrik dan pendingin ruangan pada lantai tersebut. Meskipun demikian, BPKH tetap berkomitmen untuk memantau konsumsi energi secara berkala dan mendorong efisiensi melalui pengaturan operasional yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.

In 2024, BPKH recorded an increase in energy consumption compared to the previous year. This was mainly due to the addition of one floor of the building that was not previously in regular use, which began to function as a multipurpose space for holding various events. As a result, there was also an increase in energy emissions due to the increased demand for electricity and air conditioning on that floor. Nevertheless, BPKH remains committed to monitoring energy consumption regularly and promoting efficiency through environmentally responsible operational management.

Konsumsi Energi

Energy Consumption [SEOJK F.6]

Uraian Description	Unit	2024	2023	2022
BBM Fuel	GJ	1.068,44	1.280,24	1.515,16
Listrik Electricity	GJ	1.942,85	1.606,85	155,59
Jumlah Total	GJ	3.011,29	2.887,09	1.670,75

Intensitas Energi

Energy Intensity [GRI 302-3] [SEOJK F.6]

Uraian Description	Unit	2024	2023	2022
Jumlah Konsumsi Energi Total Energy Consumption	GJ	3.068,53	2.887,09	1.670,75
Jumlah Karyawan Total Employee	Orang People	228	199	12
Intensitas Energi Energy Intensity	GJ/orang GJ/person	13,46	14,51	139,23

Emisi yang Dihasilkan

Generated Emissions [GRI 305-1, 305-2, 305-3] [SEOJK F.11]

Uraian Description	Sumber Sources	Unit	2024	2023	2022
Emisi GRK Cakupan 1 Scope 1 GHG Emissions	BBM yang digunakan untuk operasional Fuel used for operations	Ton CO ₂ e	89,78	76,44	90,46
Emisi GRK Cakupan 2 Scope 2 GHG Emissions	Listrik yang diperoleh dari PLN Electricity obtained from PLN		455,49	379,39	1.515,16
Emisi GRK Cakupan 3 Scope 3 GHG Emissions	Penggunaan energi oleh Mitra Kemaslahatan Energy consumption by Benefit Program Partner		120,57	83,02	-

Uraian Description	Sumber Sources	Unit	2024	2023	2022
Jumlah Emisi GRK Cakupan 1 dan 2 Total GHG Emissions Scope 1 and 2		Ton CO ₂ e	545,27	455,83	1.605,62
Jumlah Emisi GRK Cakupan 1, 2, dan 3 Total GHG Emissions Scope 1, 2, and 3			665,84	538,85	1.605,62

Penghitungan emisi untuk tahun 2024 menggunakan conversion rate berikut:

Emissions calculations for 2024 use the following conversion rates:

- per liter = 2,4 kg CO₂ e
- per liter = 2.4 kg CO₂ e
- per kwh = 0,84 kg CO₂ e
- per kWh = 0.84 kg CO₂ e

Intensitas Emisi

Emissions Intensity [GRI 305-4] [SEOJK F.11]

Uraian Description	Unit	2024	2023	2022
Jumlah Emisi GRK Cakupan 1 dan 2 Total GHG Emissions Scope 1 and 2	Ton CO ₂ e	545,27	455,83	1.605,62
Jumlah Karyawan Total Employees	Orang People	228	199	12
Intensitas Emisi GRK Cakupan 1 dan 2 GHG Emissions Intensity Scope 1 and 2	Ton CO ₂ e / orang Ton CO ₂ e / person	2,39	2,29	133,80

Dampak Terhadap Keanekaragaman Hayati [SEOJK F.9]

Wilayah operasional BPKH tidak berada di dekat atau di daerah konservasi atau memiliki keanekaragaman hayati, meskipun demikian BPKH senantiasa turut berpartisipasi dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati seperti melalui program penanaman mangrove.

Impact to Biodiversity [SEOJK F.9]

BPKH's operational area is not located near or within a conservation area or one with biodiversity, but nevertheless the BPKH always participates in biodiversity conservation efforts, such as through mangrove planting programs.

Aksi Bagi Lingkungan dan Masyarakat

Actions for the Environment and Society [SEOJK F.25]

Kegiatan Penanaman Mangrove [SEOJK F.10]

Dalam rangka memperingati hari jadi ke-7 sekaligus memperingati Hari Pohon Sedunia, BPKH menyelenggarakan aksi penanaman mangrove di kawasan ekowisata Mangrove PIK sebagai bagian dari program kepedulian terhadap lingkungan. Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen BPKH dalam mendukung pelestarian alam dan menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Mangrove dipilih karena memiliki peran strategis dalam melindungi garis pantai dari ancaman abrasi dan gelombang badai, serta menjadi habitat penting bagi berbagai spesies laut yang mendukung keberlanjutan ekosistem lokal.

Mangrove Planting Activities [SEOJK F.10]

In celebration of its 7th anniversary and World Tree Day, BPKH organized a mangrove planting initiative at the Mangrove PIK eco-tourism area as part of its environmental awareness program. This activity is a concrete manifestation of BPKH's commitment to supporting nature conservation and maintaining coastal ecosystem balance. Mangroves were chosen because of their strategic role in protecting coastlines from erosion and storm surges, as well as serving as a vital habitat for various marine species that support the sustainability of local ecosystems.

Lebih dari sekadar aktivitas simbolis, penanaman mangrove ini merupakan bentuk kontribusi BPKH terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin ke-13: Penanganan Perubahan Iklim. Mangrove dikenal sebagai penyerap karbon alami yang sangat efektif dalam mengurangi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Dengan langkah ini, BPKH turut ambil bagian dalam upaya global menanggulangi pemanasan global dan menjaga keberlangsungan bumi sebagai amanah ciptaan Allah SWT. Aksi ini juga diharapkan memberikan manfaat ekologis dan sosial jangka panjang bagi masyarakat sekitar serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi lingkungan.

More than just a symbolic gesture, this mangrove planting initiative represents BPKH's contribution to achieving Sustainable Development Goal (SDG) 13: Climate Action. Mangroves are known as highly effective natural carbon sinks in reducing greenhouse gas concentrations in the atmosphere. Through this initiative, BPKH is actively participating in global efforts to combat global warming and preserve the Earth as a sacred trust from Allah SWT. This action is also expected to provide long-term ecological and social benefits for the surrounding community and enhance awareness of the importance of environmental conservation.

Kegiatan Penanaman Mangrove Tahun 2024

Mangrove Planting Activities in 2024

Uraian Description	Jumlah Bibit Number of Seeds	Estimasi Penyerapan Karbon Carbon Storage Estimate	Peserta yang Mengikuti Kegiatan Participants
Penanaman Mangrove Mangrove Planting	1.000 bibit mangrove mangrove seedlings	15.000 kg CO ₂ e/tahun kg CO ₂ e/year	200 karyawan BPKH BPKH Employees

Program Bantuan Panel Surya

Di berbagai wilayah terpencil di Indonesia, akses terhadap listrik masih menjadi tantangan serius. Infrastruktur yang belum memadai, ditambah tingginya biaya instalasi dan operasional, membuat sebagian masyarakat belum dapat menikmati penerangan dan energi yang layak. Menyadari urgensi permasalahan ini, BPKH menjalankan inisiatif bantuan penyediaan panel surya sebagai solusi energi alternatif yang berkelanjutan bagi masyarakat di daerah tertinggal.

Salah satu bentuk nyata dari program ini adalah pengadaan dan pemasangan panel surya di masjid dan musala yang berada di Kecamatan Elar dan Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur. Inisiatif ini tidak hanya menjawab kebutuhan dasar akan listrik, tetapi juga mendukung kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial masyarakat setempat. Kehadiran panel surya memberikan akses listrik yang stabil, mandiri, dan ramah lingkungan, sehingga masyarakat dapat melaksanakan ibadah dengan lebih nyaman dan anak-anak dapat belajar dalam suasana yang lebih terang dan produktif. Program ini menjadi wujud kepedulian BPKH dalam membangun kemandirian energi dan memperkuat nilai-nilai keberlanjutan di tingkat akar rumput.

Solar Panel Support Program

In many remote areas of Indonesia, access to electricity remains a serious challenge. Inadequate infrastructure, coupled with high installation and operational costs, means that many communities still lack access to adequate lighting and energy. Recognizing the urgency of this issue, BPKH has launched an initiative to provide solar panels as a sustainable alternative energy solution for communities in remote areas.

One concrete example of this program is the procurement and installation of solar panels at mosques and prayer halls in Elar Sub-district and Sambu Rampas Sub-district, Manggarai Timur Regency. This initiative not only addresses the basic need for electricity but also supports religious, educational, and social activities of the local community. The presence of solar panels provides stable, independent, and environmentally friendly electricity, enabling the community to perform their religious duties more comfortably and children to study in a brighter and more productive environment. This program embodies BPKH's commitment to fostering energy independence and strengthening sustainability values at the grassroots level.

Program Bantuan Panel Surya Tahun 2024
Solar Panel Support Program in 2024 [GRI F.4]

Uraian Description	Jumlah Panel Surya Number of Solar Panel	Distribusi Nilai Manfaat Return Value Distribution	Estimasi Dukungan Listrik Estimated Electricity Support
Bantuan Panel Surya Solar Panel Support	6 unit	Rp670.155.000	13.200 Wp

Program Bantuan Air Bersih

Menghadapi dampak musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia dan menyebabkan krisis air bersih, BPKH mengambil langkah proaktif melalui program penyediaan sumur bor bagi masyarakat yang terdampak. Program ini merupakan bagian dari inisiatif kemaslahatan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya akses terhadap air bersih yang menjadi hak fundamental setiap individu.

Bekerja sama dengan berbagai Mitra Kemaslahatan, BPKH melakukan pengadaan depot air isi ulang di wilayah-wilayah rawan kekeringan yang mengalami kesulitan akses terhadap air bersih, terutama selama musim kemarau. Depot air isi ulang ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka menengah yang efektif untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat secara higienis, terjangkau, dan berkelanjutan. Selain itu, keberadaan fasilitas ini juga mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat, seperti memasak dan menjaga kebersihan lingkungan. Dengan adanya program ini, BPKH berharap dapat membantu meringankan beban masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, serta menjaga ketahanan lingkungan dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Program ini juga mencerminkan komitmen BPKH dalam memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan umat melalui pemenuhan kebutuhan dasar yang berkelanjutan.

Clean Water Support Program

In response to the impact of the dry season affecting several regions in Indonesia and causing a clean water crisis, BPKH has taken proactive steps through a program to provide bore wells for affected communities. This program is part of a benefit program initiative focused on meeting the basic needs of the community, particularly access to clean water, which is a fundamental right of every individual.

In collaboration with various Benefit Program Partners, BPKH has established refillable water depots in drought-prone areas that have difficulty accessing clean water, especially during the dry season. These refillable water depots are expected to be an effective medium-term solution to meet the community's need for hygienic, affordable, and sustainable drinking water. In addition, the existence of these facilities also supports the daily activities of the community, such as cooking and maintaining environmental hygiene. Through this program, BPKH hopes to alleviate the burden on communities, improve the quality of life, and maintain environmental sustainability and overall community health. This initiative also reflects BPKH's commitment to making a tangible contribution to the well-being of the community through the sustainable fulfillment of basic needs.

Sebaran Pengadaan Depot Isi Ulang Tahun 2024
Distribution of Refillable Water Depots in 2024

Uraian Description	Lokasi Location
Sebaran Pengadaan Depot Isi Ulang Distribution of Refillable Water Depots	1

Program Pengadaan Depot Isi Ulang Tahun 2024

Refillable Water Depots Program in 2024 [GRI F.4]

Uraian Description	Jumlah Depot Isi Ulang Number of Refillable Water Depots	Distribusi Nilai Manfaat Return Value Distribution	Estimasi Dukungan Air Bersih Estimated Clean Water Support
Pengadaan Depot Isi Ulang Refillable Water Depots Program	1 unit	Rp142.328.000	5.000 Liter

Program Pengolahan Sampah Plastik

Sebagai bentuk kepedulian terhadap permasalahan lingkungan, BPKH melalui Program Kemaslahatan menyalurkan bantuan mesin pengolah sampah plastik kepada Komunitas *Garbage Care and Education* di Parangtritis, Bantul, Yogyakarta. Program ini bertujuan mengurangi timbunan sampah plastik yang banyak dihasilkan dari aktivitas wisata dan laut di sekitar Pantai Parangtritis. Selain itu, inisiatif ini mendorong penerapan prinsip ekonomi sirkular dengan memanfaatkan sampah plastik sebagai bahan baku untuk menghasilkan produk bernilai ekonomi seperti *paving block*, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, BPKH bekerja sama dengan DT Peduli dan Komunitas *Garbage Care and Education* untuk merancang program yang tepat sasaran. Melalui serangkaian survei dan diskusi, disepakati bantuan berupa 1 (satu) unit mesin pencacah plastik, 2 (dua) unit mesin pelumer plastik, 20 (dua puluh) alat pencapit sampah, 2 (dua) set alat pelindung diri, dan 3 (tiga) tabung gas. Mesin-mesin ini dimanfaatkan untuk mengolah sampah plastik menjadi material yang lebih ramah lingkungan dan memiliki nilai jual. Program ini tidak hanya berfokus pada penyediaan peralatan, tetapi juga mencakup edukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah dan pemanfaatannya secara berkelanjutan.

Melalui program ini, komunitas penerima manfaat diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan sampah plastik di wilayah Parangtritis serta mengajak masyarakat sekitar untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Hasil pengolahan sampah plastik menjadi *paving block* membuka peluang terciptanya sumber pendapatan baru, sekaligus mengurangi volume sampah yang berpotensi mencemari laut dan pantai.

Plastic Waste Management Program

As part of its commitment to environmental issues, BPKH, through its Benefit Program, distributed plastic waste processing machines to the Garbage Care and Education Community in Parangtritis, Bantul, Yogyakarta. The program aims to reduce the large amount of plastic waste generated from tourism and marine activities around Parangtritis Beach. In addition, this initiative encourages the application of circular economy principles by utilizing plastic waste as raw material to produce products with economic value, such as paving blocks, thereby providing a positive impact on the environment while improving community welfare.

In its implementation, BPKH collaborated with DT Peduli and the Garbage Care and Education Community to design a targeted program. Through a series of surveys and discussions, it was agreed to provide assistance in the form of 1 (one) plastic shredder machine, 2 (two) plastic melting machines, 20 (twenty) trash pickers, 2 (two) sets of personal protective equipment, and 3 (three) gas cylinders. These machines are utilized to process plastic waste into environmentally responsible materials with market value. The program not only focuses on providing equipment but also includes community education on waste management and its sustainable utilization.

Through this program, the beneficiary community is expected to optimize plastic waste management in the Parangtritis area and encourage surrounding communities to be more mindful of environmental cleanliness. The processing of plastic waste into paving blocks opens up opportunities for new income sources while reducing the volume of waste that could potentially pollute the sea and beaches.



PENERIMA MANFAAT KOMUNITAS GARBAGE CARE AND EDUCATION

Parangtritis, Bantul, Yogyakarta

"Kami sangat bersyukur atas bantuan mesin pengolah sampah plastik yang diberikan melalui Program Kemaslahatan BPKH. Sebelum adanya program ini, sampah plastik di lingkungan kami sering menumpuk dan sulit diolah, bahkan sebagian besar berakhir di tempat pembuangan akhir. Dengan adanya mesin ini, kami dapat mengolah sampah plastik menjadi produk bernilai ekonomis seperti bijih plastik daur ulang yang dapat dijual kembali."

"Program ini tidak hanya membantu menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar. Kami kini dapat memberdayakan lebih banyak warga untuk terlibat dalam proses pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah. Dampaknya terasa nyata, baik secara ekonomi maupun sosial, dan kami berharap program seperti ini terus berlanjut untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat."

"We are very grateful for the plastic waste processing machine provided through the BPKH Benefit Program. Before this program, plastic waste in our neighborhood often piled up and was difficult to process, with most of it ending up in landfills. With this machine, we can process plastic waste into economically valuable products such as recycled plastic pellets that can be resold."

"This program not only helps maintain environmental cleanliness but also opens up new business opportunities for the surrounding community. We can now empower more residents to participate in the process of collecting, sorting, and processing waste. The impact is tangible, both economically and socially, and we hope that programs like this will continue to create a cleaner and healthier environment."



INSAN BPKH

BPKH Personnel





Ketenagakerjaan

Employment [GRI 3-3]

Setiap program dan layanan Kemaslahatan yang dijalankan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) merupakan wujud dari komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan umat secara menyeluruh. Dalam pelaksanaan program tersebut, peran karyawan BPKH sebagai garda terdepan institusi menjadi sangat penting. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, aman, dan mendukung produktivitas menjadi prioritas utama dalam pengelolaan sumber daya manusia.

BPKH berkomitmen untuk mengelola tenaga kerja secara adil dan profesional, dengan menghormati hak-hak setiap pegawai serta menjamin kesetaraan dalam pengembangan karier, tanpa membedakan latar belakang, jenis kelamin, atau preferensi individu. Prinsip meritokrasi dan kompetensi menjadi dasar dalam setiap kebijakan pengelolaan pegawai, termasuk dalam pengembangan kapasitas, pemberian kesempatan pelatihan, serta penempatan jabatan. Semua pegawai didorong untuk tumbuh dan berkontribusi secara optimal sesuai dengan potensi masing-masing. Tidak ada tenaga kerja anak dan paksa yang menjadi pegawai BPKH. [SEOJK F.18, F.19]

Sebagai bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas, data terkait komposisi pegawai BPKH disusun secara sistematis berdasarkan jumlah individu yang aktif hingga akhir periode pelaporan, yakni per 31 Desember 2024. Seluruh informasi tersebut diperoleh dari sistem manajemen kepegawaian resmi yang dikelola Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia BPKH, guna memastikan akurasi dan keterandalan data. Metodologi yang digunakan mencakup penarikan data terkini dari sistem secara sistematis dengan asumsi bahwa seluruh individu yang tercatat merupakan pegawai tetap dan/atau kontrak yang masih aktif menjalankan tugas sesuai struktur organisasi BPKH. Per akhir 2024, jumlah karyawan BPKH tercatat sebanyak 228 orang, meningkat dari 199 orang di tahun sebelumnya atau bertambah 29 orang. Kenaikan ini tidak tergolong fluktuasi signifikan, namun merupakan bagian dari strategi penguatan kapasitas organisasi untuk mendukung peningkatan fungsi kelembagaan dan efektivitas pelaksanaan program pengelolaan keuangan haji. [GRI 2-7]

Every program and service provided by the Hajj Fund Management Agency (BPKH) is a manifestation of its commitment to improving the overall community welfare. In implementing these programs, the role of BPKH employees as the institution's frontline is of utmost importance. Therefore, creating an inclusive, safe, and productive work environment is a top priority in human resource management.

BPKH is committed to managing its workforce fairly and professionally, respecting the rights of every employee and ensuring equality in career development, regardless of background, gender, or individual preferences. The principles of meritocracy and competence form the foundation of all employee management policies, including capacity development, training opportunities, and job placement. All employees are encouraged to grow and contribute optimally according to their respective potentials. There were no child and forced labour in BPKH employees. [SEOJK F.18, F.19]

As part of the principles of transparency and accountability, data related to the composition of BPKH employees is systematically compiled based on the number of individuals who are active until the end of the reporting period, as of December 31, 2024. All information is obtained from the official employee management system managed by Human Resources Management Division of BPKH, to ensure data accuracy and reliability. The methodology used includes systematically extracting the latest data from the system, assuming that all individuals recorded are permanent and/or contract employees who are still actively performing their duties in accordance with the BPKH organizational structure. At the end of 2024, the number of BPKH employees was recorded at 228, an increase from 199 in the previous year, or an increase of 29 people. This increase is not considered a significant fluctuation, but is part of the strategy to strengthen organizational capacity to support the improvement of institutional functions and the effectiveness of the implementation of the Hajj financial management program. [GRI 2-7]

Dengan dukungan sumber daya manusia yang andal dan berintegritas, BPKH senantiasa memastikan setiap program Kemaslahatan terlaksana secara efektif, berdampak, dan mampu menjawab kebutuhan umat Islam di berbagai bidang kehidupan.

With the support of capable and integrity-driven human resources, BPKH consistently ensures that every Benefit Program is implemented effectively, impactfully, and capable of addressing the needs of Muslims in various aspects of life.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Wilayah Kerja

Employee Composition by Work Area

(dalam satuan orang / in people)

Uraian Description	2024		2023		2022*	
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female
Nasional National	151	77	142	57	140	56
Jumlah Total	151	77	142	57	140	56
Jumlah Karyawan Number of Employees	228		199		196	

*Disclosure: data tahun 2022 update dari sebelumnya.

*Disclosure: 2022 data updated from previous data.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Employee Composition by Employment Status

(dalam satuan orang / in people)

Uraian Description	2024		2023		2022*	
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female
Karyawan Tetap Permanent Employee	105	50	103	48	104	36
Karyawan Kontrak Contract Employee	47	27	39	9	49	7
Jumlah Total	151	77	142	57	140	56

*Disclosure: data tahun 2022 update dari sebelumnya.

*Disclosure: 2022 data updated from previous data.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Employee Composition by Position Level

(dalam satuan orang / in people)

Uraian Description	2024		2023		2022*	
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female
Deputi dan jabatan yang setara Deputy and equivalent positions	13	2	9	2	7	1

(dalam satuan orang / in people)

Uraian Description	2024		2023		2022*	
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female
Kepala Divisi dan jabatan yang setara Head of Division and equivalent positions	31	7	35	6	33	7
Senior Manajer Senior Manager	13	6	0	0	0	0
Manajer Manager	32	20	42	22	37	16
Asisten Manajer Assistant Manager	3	3	17	18	27	25
Staff Staff	0	4	15	9	0	0
Officer Development Program Officer Development Program	7	16	0	0	0	0
Personal Assistant Personal Assistant	16	7	0	0	11	7
Driver Driver	23	0	24	0	25	0
Jumlah Total	151	77	142	57	140	56

*Disclosure: data tahun 2022 update dari sebelumnya.

*Disclosure: 2022 data updated from previous data.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Rentang Usia

Employee Composition by Age Range

(dalam satuan orang / in people)

Uraian Description	2024		2023		2022*	
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female
≤ 30 tahun ≤ 30 years old	23	41	11	16	24	26
30 – 50 tahun 30 – 50 years old	106	33	120	40	109	29
> 50 tahun > 50 years old	22	3	11	1	7	1
Jumlah Total	151	77	142	57	140	56

Catatan/Notes:

1. *Disclosure: data tahun 2022 update dari sebelumnya.

*Disclosure: 2022 data updated from previous data.

2. BPKH merupakan lembaga Nasional, sehingga tidak memiliki pembagian wilayah kerja.

BPKH is a national institution, so it does not have a division of work areas.

3. Seluruh karyawan BPKH, baik yang berstatus tetap maupun kontrak, merupakan karyawan penuh waktu yang bertugas di seluruh wilayah Indonesia (nasional). Dengan demikian, tidak ada kategori karyawan lain selain yang telah disebutkan, dan BPKH tidak memiliki karyawan dengan jam kerja tidak pasti atau pekerja paruh waktu. [2-8]
BPKH's nationwide scope of work is served by full-time permanent and contract employees. In other words, all BPKH employees work full-time and there are no guaranteed hour or part-time employees. [2-8]

Jumlah Perekrutan Karyawan

Total Employee Recruitment

Uraian Description	2024		2023		2022*	
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female
Jumlah Karyawan Baru Berdasarkan Usia Number of New Employees by Age (dalam satuan orang / in people)						
≤ 30 tahun ≤ 30 years old	11	21	1	3	6	3
30 – 50 tahun 30 – 50 years old	0	0	0	0	11	1
> 50 tahun > 50 years old	0	0	0	0	3	0
Jumlah Total	11	21	1	3	20	4
Persentase Karyawan Baru Berdasarkan Usia Rate of New Employees by Age (dalam % / in %)						
≤ 30 tahun ≤ 30 years old	34	66	25	75	67	33
30 – 50 tahun 30 – 50 years old	0	0	0	0	91	9
> 50 tahun > 50 years old	0	0	0	0	100	0

Tingkat Turnover Karyawan BPKH

Employee Turnover Rate

Uraian Description	2024		2023		2022*	
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female
Jumlah Karyawan Meninggalkan BPKH Berdasarkan Usia Number of Employees who Left BPKH by Age (dalam satuan orang / in people)						
≤ 30 tahun ≤ 30 years old	0	0	0	1	0	3
30 – 50 tahun 30 – 50 years old	0	0	3	2	3	0
> 50 tahun > 50 years old	1	0	1	0	0	0
Jumlah Total	1	0	4	3	3	3
Persentase Turnover Karyawan Berdasarkan Usia Employee Turnover Rate by Age (dalam % / in %)						
≤ 30 tahun ≤ 30 years old	0	0	0	14	0	100
30 – 50 tahun 30 – 50 years old	0	0	43	29	100	0
> 50 tahun > 50 years old	1	0	14	0	0	0

Remunerasi Pegawai

Sistem remunerasi di BPKH disusun berdasarkan landasan hukum yang kuat untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Bagi anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas, ketentuan mengenai gaji dan hak keuangan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 49/LN.2020/No. 85, yang selanjutnya dijabarkan secara teknis dalam Peraturan BPKH Nomor 5 Tahun 2020 mengenai tata cara pembayaran gaji, tunjangan, dan hak keuangan lainnya. Regulasi ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan remunerasi bagi unsur pimpinan lembaga secara terstruktur dan terukur.

Sementara itu, pengelolaan remunerasi bagi pegawai BPKH secara keseluruhan mengacu pada Peraturan BPKH (PBPKH) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kepegawaian BPKH, yang diperkuat oleh Peraturan Kepala Badan Pelaksana (PKBP) Nomor 15 Tahun 2023 sebagai peraturan pelaksanaannya. Kedua regulasi tersebut mencakup pengaturan menyeluruh atas sistem penggajian, tunjangan, serta prinsip-prinsip manajemen kepegawaian berbasis kompetensi, kinerja, dan keadilan. Melalui kerangka tersebut, BPKH berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan mendukung pencapaian kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Persentase Remunerasi Karyawan Tetap di Tingkat Terendah Terhadap Upah Minimum Regional [SEOJK F.20]

Uraian Description	2024	2023	2022
Laki-laki Male	122%	120%	138%
Perempuan Female	140%	118%	134%

Serikat Pegawai [GRI 2-30]

Serikat pegawai umumnya dibentuk sebagai wadah aspirasi dan perlindungan hak-hak karyawan dalam suatu organisasi. Namun hingga saat ini, BPKH belum menetapkan pembentukan serikat pekerja, mempertimbangkan jumlah karyawan yang relatif kecil, yaitu sebanyak 228 orang, serta struktur

Employee Remuneration

The remuneration system at BPKH is structured based on a strong legal foundation to ensure transparency, accountability, and compliance with applicable regulations. For members of the Executive Board and the Supervisory Board, provisions regarding salaries and financial rights are regulated in Presidential Regulation No. 49/LN.2020/No. 85, which is further detailed in BPKH Regulation No. 5 of 2020 on the procedures for payment of salaries, allowances, and other financial rights.

These regulations serve as guidelines for the implementation of remuneration policies for the institution's leadership in a structured and measurable manner. Meanwhile, the remuneration management for BPKH employees as a whole refers to BPKH Regulation (PBPKH) No. 4 of 2023 on BPKH Personnel Management, which is reinforced by the Executive Agency Head Regulation (PKBP) No. 15 of 2023 as its implementing regulation. Both regulations cover comprehensive provisions on the salary system, allowances, and principles of competency-based, performance-based, and fair human resources management. Through this framework, BPKH is committed to creating a professional work environment that supports the achievement of sustainable organizational performance.

Percentage of Permanent Employees Remuneration at the Lowest Level Compared to the Regional Minimum Wage [SEOJK F.20]

Uraian Description	2024	2023	2022
Laki-laki Male	122%	120%	138%
Perempuan Female	140%	118%	134%

Employee Union [GRI 2-30]

Employee unions are generally formed as a forum for expressing aspirations and protecting the rights of employees within an organization. However, BPKH has not established an employee union to date, considering the relatively small number of employees, namely 228 people, as well as the

organisasi yang terpusat di satu kantor tanpa adanya cabang. Dengan kondisi ini, komunikasi internal dapat berlangsung secara langsung, terbuka, dan efisien antara pimpinan dan seluruh jajaran pegawai, sehingga kebutuhan koordinasi maupun penyampaian aspirasi tetap dapat terjaga dengan baik.

BPKH menerapkan berbagai mekanisme untuk menampung dan merespons masukan dari pegawai, baik melalui forum formal seperti Rapat Koordinasi dan pertemuan dengan Bidang Sumber Daya Manusia, maupun melalui pendekatan informal seperti kegiatan kebersamaan yang rutin dilaksanakan. Strategi ini mendukung terciptanya lingkungan kerja yang partisipatif dan harmonis, di mana seluruh pegawai memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka secara langsung. Kendati demikian, BPKH tetap membuka kemungkinan untuk membentuk serikat pekerja di masa mendatang apabila diperlukan sebagai bagian dari penguatan perlindungan dan representasi pegawai.

Pengembangan Pegawai [GRI 3-3] [SEOJK F.22]

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia merupakan aspek strategis yang mendukung pencapaian visi dan misi BPKH. Dalam rangka memastikan kesiapan dan relevansi kompetensi pegawai terhadap kebutuhan organisasi yang terus berkembang, BPKH secara berkelanjutan mengembangkan program-program peningkatan kompetensi yang terarah dan sistematis. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan SDM yang adaptif, produktif, dan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap layanan publik yang dikelola oleh BPKH.

Selama periode pelaporan, BPKH telah melaksanakan berbagai program pelatihan yang mencakup penguatan kompetensi perilaku (*soft skills*), kompetensi teknis (*hard skills*), serta kompetensi kepemimpinan bagi pegawai pada berbagai jenjang jabatan. Pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja maupun tuntutan profesionalisme dalam tata kelola keuangan haji yang kompleks dan dinamis. Inisiatif ini mencerminkan komitmen BPKH untuk membentuk budaya pembelajaran yang berkelanjutan serta mendukung pengembangan karier pegawai secara holistik.

centralized organizational structure in one office without any branches. Under these conditions, internal communication can take place directly, openly, and efficiently between management and all employees, so that coordination and the expression of aspirations can be maintained properly.

BPKH implements various mechanisms to accommodate and respond to input from employees, both through formal forums such as coordination meetings and meetings with the Human Resources Division, as well as through informal approaches such as regular social activities. This strategy supports the creation of a participatory and harmonious work environment where all employees have the opportunity to express their opinions and aspirations directly. However, BPKH remains open to the possibility of forming an employee union in the future if deemed necessary as part of strengthening employee protection and representation.

Employee Development [GRI 3-3] [SEOJK F.22]

Human resource capacity development is a strategic aspect that supports the achievement of BPKH's vision and mission. In order to ensure the readiness and relevance of employee competencies to the ever-evolving needs of the organization, BPKH continuously develops targeted and systematic competency improvement programs. These efforts aim to create human resources who are adaptive, productive, and able to contribute optimally to the public services managed by BPKH.

During the reporting period, BPKH has implemented various training programs covering behavioral competencies (*soft skills*), technical competencies (*hard skills*), and leadership competencies for employees at various job levels. The training is tailored to the needs of work units and the demands of professionalism in the complex and dynamic management of Hajj Fund. This initiative reflects BPKH's commitment to fostering a culture of continuous learning and supporting the holistic development of its employees' careers.

Rata-rata Jam Pelatihan Berdasarkan Jenjang Jabatan [GRI 404-1] [SEOJK F.22]

Average Training Hours by Position Level [GRI 404-1] [SEOJK F.22]

(dalam satuan jam / in hours)

Uraian Description	2024		2023		2022	
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female
Deputi dan jabatan yang setara Deputy and equivalent positions	143,00	48,62	32,7	26,7	23,6	28,6
Kepala Divisi dan jabatan yang setara Head of Division and equivalent positions	90,86	92,8	32,7	26,8	29,1	26,4
Manajer Manager	30,08	44,05	25,8	27	21,3	23,8
Asisten Manajer Assistant Manager	32,29	39,38	24,7	24,5	19	19,6
Staff Staff	74,74	63,81	26,4	22,7	14,2	12
Driver Driver	0	0	8	0	0	0

Pelatihan/Pendidikan Untuk Pengembangan Potensi Tahun 2024

Training/Education for Potential Development in 2024

No.	Topik Pelatihan Training Topics	Jumlah Peserta Number of Participants
1	Pelatihan Pendamping ODP (<i>Problem Solving, Mentoring and Coaching</i>)	12
2	Pelatihan Kepemimpinan – <i>Leader's Role Batch 1 Serial 1</i>	25
3	<i>HR for Non HR Batch 1</i>	17
4	<i>HR for Non HR Batch 2</i>	19
5	Pelatihan Kepemimpinan – <i>Leader's Role Batch 1 Serial 2</i>	16
6	Pelatihan Kepemimpinan – <i>Leader's Role Batch 2 Serial 1</i>	16
7	<i>Training Becoming Digital Leaders in the Era of Disruption</i>	6
8	<i>Practical Problem Solving</i>	23
9	<i>Strategic Mindset / Personal Leadership</i>	23
10	Pelatihan <i>Effective Communication & Interpersonal Skills and Public Speaking</i>	7
11	<i>Protocol 101: Keterampilan Dasar Sekretariat Pimpinan dan Protokoler</i>	28
12	Pelatihan Membangun <i>Etiquette Excellence</i> dengan IQRA untuk ODP	23
13	<i>Corporate Training on the Merger and Acquisitions Masterclass</i>	9
14	<i>Workshop and Awarding The 3rd INDONESIA DEI & ESG AWARDS (IDEAS) 2024</i>	1

BPKH secara rutin menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai di bidang tata kelola, investasi syariah, manajemen risiko, serta dukungan terhadap sertifikasi profesional. Hingga akhir tahun 2024, BPKH belum melakukan program bantuan transisi menjelang

BPKH regularly conducts training to improve employee competencies in the areas of governance, sharia investment, risk management, and support for professional certification. Until the end of 2024, BPKH did not conduct any transition assistance programs for retirement, such as financial

pensiun, seperti pelatihan pengelolaan keuangan dan pembekalan wirausaha. [GRI 404-2]

Seluruh karyawan BPKH (100%) telah mengikuti proses tinjauan kinerja dan pengembangan karier secara berkala selama tahun 2024, mencakup seluruh kategori jabatan dan tanpa membedakan gender. [GRI 404-3]

Pekerja Bukan Karyawan [GRI 2-8]

Selama tahun 2024, BPKH tidak melibatkan pekerja bukan karyawan dalam operasionalnya.

Anti Diskriminasi [GRI 2-23, 2-24, 406-1][SEOJK F.18]

Dalam proses penempatan dan pengelolaan pegawai, BPKH menerapkan prinsip meritokrasi yang berfokus pada pencapaian kinerja dan kompetensi individu, tanpa memandang gender atau latar belakang lainnya. Struktur organisasi BPKH mencerminkan keberagaman yang seimbang, baik dari segi jenis kelamin, tingkat pendidikan, rentang usia, pengalaman profesional, maupun keahlian teknis dan manajerial. Komitmen terhadap kesetaraan dan keberagaman ini menjadi bagian integral dari budaya kerja yang inklusif dan profesional.

BPKH menjunjung tinggi nilai-nilai etika kerja dan tata perilaku, serta berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi dalam bentuk apa pun. Seluruh pejabat dan pegawai diharapkan untuk mematuhi prinsip-prinsip tersebut dalam setiap aspek hubungan kerja. Selama periode pelaporan, tidak terdapat laporan atau temuan terkait insiden diskriminasi di lingkungan BPKH, yang mencerminkan efektivitas pengawasan internal dan penerapan nilai-nilai institusional yang kuat.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Occupational Health and Safety [GRI 3-3][SEOJK F.21]

Pegawai merupakan bagian penting dari ekosistem organisasi dan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi BPKH. Sebagai aset utama sekaligus Mitra Strategis, BPKH memiliki komitmen yang tinggi untuk melindungi keselamatan dan kesehatan setiap pegawai. Untuk

management training and entrepreneurship preparation. [GRI 404-2]

All BPKH employees (100%) have undergone periodic performance reviews and career development throughout 2024, covering all job categories and without gender discrimination. [GRI 404-3]

Non-Employee Workers [GRI 2-8]

Throughout 2024, no non-employee workers were involved in the operation of BPKH.

Anti-Discrimination [GRI 2-23, 2-24, 406-1][SEOJK F.18]

In the process of employee placement and management, BPKH applies the principle of meritocracy that focuses on individual performance and competence, regardless of gender or other backgrounds. BPKH's organizational structure reflects a balanced diversity in terms of gender, education level, age range, professional experience, and technical and managerial expertise. This commitment to equality and diversity is an integral part of an inclusive and professional work culture.

BPKH upholds ethical work values and conduct, and is committed to creating a work environment free from discrimination in any form. All officials and employees are expected to adhere to these principles in every aspect of their working relationships. During the reporting period, there were no reports or findings related to incidents of discrimination within BPKH, reflecting the effectiveness of internal oversight and the strong implementation of institutional values.

itu, BPKH secara proaktif menerapkan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di seluruh lingkungan kerja sebagai bentuk upaya preventif dan perlindungan yang berkelanjutan terhadap risiko kerja, sekaligus menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan produktif.

Prinsip dan Komitmen Penerapan K3 [GRI 2-23]

BPKH menempatkan keselamatan dan kesehatan seluruh pegawai serta mitra kerja sebagai prioritas utama dalam setiap aktivitas operasional. Untuk mendukung hal tersebut, BPKH menerapkan prinsip-prinsip keselamatan kerja yang selaras dengan peraturan perundang-undangan, khususnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 35 Ayat (3). Ketentuan ini menegaskan bahwa selain kewajiban memperkerjakan tenaga kerja, pemberi kerja juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan yang menyeluruh, mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik fisik maupun mental bagi setiap individu yang bekerja.

Sebagai bentuk implementasi dari komitmen tersebut, BPKH terus mengembangkan kebijakan dan prosedur keselamatan kerja yang aplikatif dan adaptif terhadap berbagai risiko operasional. Upaya ini tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mencerminkan budaya kerja yang peduli terhadap kualitas hidup dan produktivitas tenaga kerja. Dengan demikian, BPKH memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam lingkungan kerja mendapatkan perlindungan yang layak dan merasa aman dalam menjalankan tugasnya.

Program Keselamatan Kerja

Setiap aktivitas kerja yang dijalankan oleh pegawai BPKH memiliki potensi risiko tertentu, sehingga membangun budaya keselamatan menjadi hal yang krusial dalam mendukung lingkungan kerja yang sehat dan terlindungi. Untuk itu, BPKH secara konsisten mengimplementasikan berbagai program K3 yang mencakup penyediaan perlengkapan keselamatan, pelaksanaan simulasi tanggap darurat secara berkala, pembentukan tim respons darurat di lingkungan kerja, serta penempatan *Crisis Management Team* (CMT) pada setiap lantai

end, BPKH proactively implements Occupational Safety and Health (OSH) policies across all work environments as a preventive measure and ongoing protection against workplace risks, while also creating a safe, healthy, and productive work environment.

Principles and Commitment to OHS Implementation [GRI 2-23]

BPKH places the safety and health of all employees and business partners as its top priority in all operational activities. To support this, BPKH implements occupational safety principles that are in line with laws and regulations, specifically referring to Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, Article 35 Paragraph (3). This provision emphasizes that, in addition to the obligation to employ workers, employers also have the responsibility to ensure comprehensive protection, including well-being, safety, and both physical and mental health for every individual who works.

As part of its commitment, BPKH continues to develop practical and adaptive occupational safety policies and procedures tailored to various operational risks. These efforts are not only aimed at ensuring compliance with regulations but also reflect a workplace culture that prioritizes the quality of life and productivity of its workforce. As a result, BPKH ensures that all parties involved in the workplace receive adequate protection and feel safe in performing their duties.

Occupational Safety Program

Every work activity carried out by BPKH employees has certain potential risks, so building a culture of safety is crucial in supporting a healthy and protected work environment. To this end, BPKH consistently implements various OHS programs, including the provision of safety equipment, regular emergency response simulations, the formation of emergency response teams within the workplace, and the deployment of Crisis Management Teams (CMT) representatives on each floor of operational buildings. Through these initiatives, BPKH instills

gedung operasional. Melalui berbagai inisiatif ini, BPKH menanamkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjalankan perilaku kerja yang aman serta menciptakan suasana kerja yang mendukung keselamatan bagi seluruh pegawai dan mitra kerja.

Layanan Kesehatan Pegawai

Sebagai wujud kepedulian terhadap hak-hak pegawai dan komitmen menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif, BPKH menyelenggarakan program layanan kesehatan pegawai secara menyeluruh. Fokus utama program ini adalah memastikan seluruh pegawai memperoleh akses yang mudah, cepat, dan layak terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Dalam implementasinya, BPKH secara rutin menyediakan fasilitas *Medical Check-Up* tahunan bagi seluruh pegawai guna memantau kondisi kesehatan secara berkala dan mendeteksi potensi risiko sedini mungkin. Selain itu, pegawai juga mendapatkan perlindungan tambahan melalui fasilitas asuransi kesehatan, sebagai bagian dari upaya perlindungan menyeluruh terhadap risiko kesehatan yang dapat muncul selama menjalankan tugas pekerjaan.

Keselamatan Mitra Kemaslahatan

Saat ini, BPKH belum menetapkan regulasi khusus yang mengatur aspek K3 dalam pelaksanaan kerja sama dengan Mitra Kemaslahatan. Namun demikian, dalam menjalankan kegiatan Kemaslahatan yang melibatkan mitra, khususnya pada sektor yang memiliki risiko tinggi seperti proyek konstruksi, BPKH tetap memastikan penerapan standar K3 dengan merujuk pada ketentuan dan pedoman yang diberlakukan oleh masing-masing Mitra Kemaslahatan. Pendekatan ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian dan tanggung jawab dalam menjaga keselamatan seluruh pihak yang terlibat.

Komite K3

Dari sisi regulasi dan struktur kelembagaan, BPKH saat ini belum memiliki Komite khusus yang menangani isu K3. Namun, sebagai langkah antisipatif terhadap situasi darurat di lingkungan kerja, BPKH telah membentuk satuan khusus berupa CMT yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam penanganan insiden darurat di area kantor. Tim ini disiapkan untuk memastikan *respons* cepat

collective awareness of the importance of safe work practices and creates a work environment that supports safety for all employees and business partners.

Employee Health Services

As a manifestation of its concern for employee rights and its commitment to creating a healthy and productive work environment, BPKH implements a comprehensive employee health service program. The primary focus of this program is to ensure that all employees have easy, quick, and equitable access to quality healthcare services. In its implementation, BPKH regularly provides annual medical check-ups for all employees to monitor their health condition on a regular basis and detect potential risks as early as possible. Additionally, employees receive extra protection through health insurance coverage, as part of the comprehensive efforts to safeguard against health risks that may arise while performing their job duties.

Partner's Safety

Currently, BPKH has not established specific regulations governing OHS aspects in the implementation of cooperation with Benefit Program Partners. However, in carrying out benefit program activities involving partners, particularly in high-risk sectors such as construction projects, BPKH ensures the implementation of OHS standards by referring to the provisions and guidelines established by each Benefit Program Partner. This approach is adopted as a precautionary measure and a demonstration of responsibility in safeguarding the safety of all parties involved.

OHS Committee

From a regulatory and institutional structure perspective, BPKH currently does not have a special committee that handles OHS issues. However, as a proactive measure against emergency situations in the workplace, BPKH has formed a special unit called the CMT to serve as the frontline in handling emergency incidents in the office area. This team is prepared to ensure a prompt and coordinated

dan terkoordinasi dalam menjaga keselamatan pegawai serta kelangsungan operasional.

Kasus Kecelakaan Kerja

Sepanjang periode pelaporan, tidak ditemukan adanya insiden kerja maupun pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, baik di lingkungan kerja internal BPKH maupun dalam pelaksanaan program bersama Mitra Kemaslahatan. Seluruh aktivitas berjalan dengan lancar dan sesuai dengan standar operasional serta regulasi yang ditetapkan.

response to safeguard employee safety and operational continuity.

Work Accident Cases

Throughout the reporting period, there were no incidents or violations of applicable regulations, either within BPKH's internal work environment or in the implementation of joint programs with Benefit Program Partners. All activities ran smoothly and in accordance with established operational standards and regulations.





MENGELOLA KEBERLANJUTAN BPKH

Managing BPKH's
Sustainability



Mengelola Keberlanjutan BPKH

Managing BPKH's Sustainability



Tata Kelola BPKH

Penerapan tata kelola yang baik (*Good Governance*) merupakan fondasi utama dalam membangun BPKH sebagai lembaga yang profesional, akuntabel, dan berintegritas tinggi, sekaligus selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan operasional lembaga. Seluruh jajaran di BPKH, mulai dari pimpinan hingga pelaksana, memiliki tanggung jawab kolektif dalam mewujudkan sistem tata kelola yang transparan, efisien, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

BPKH Governance

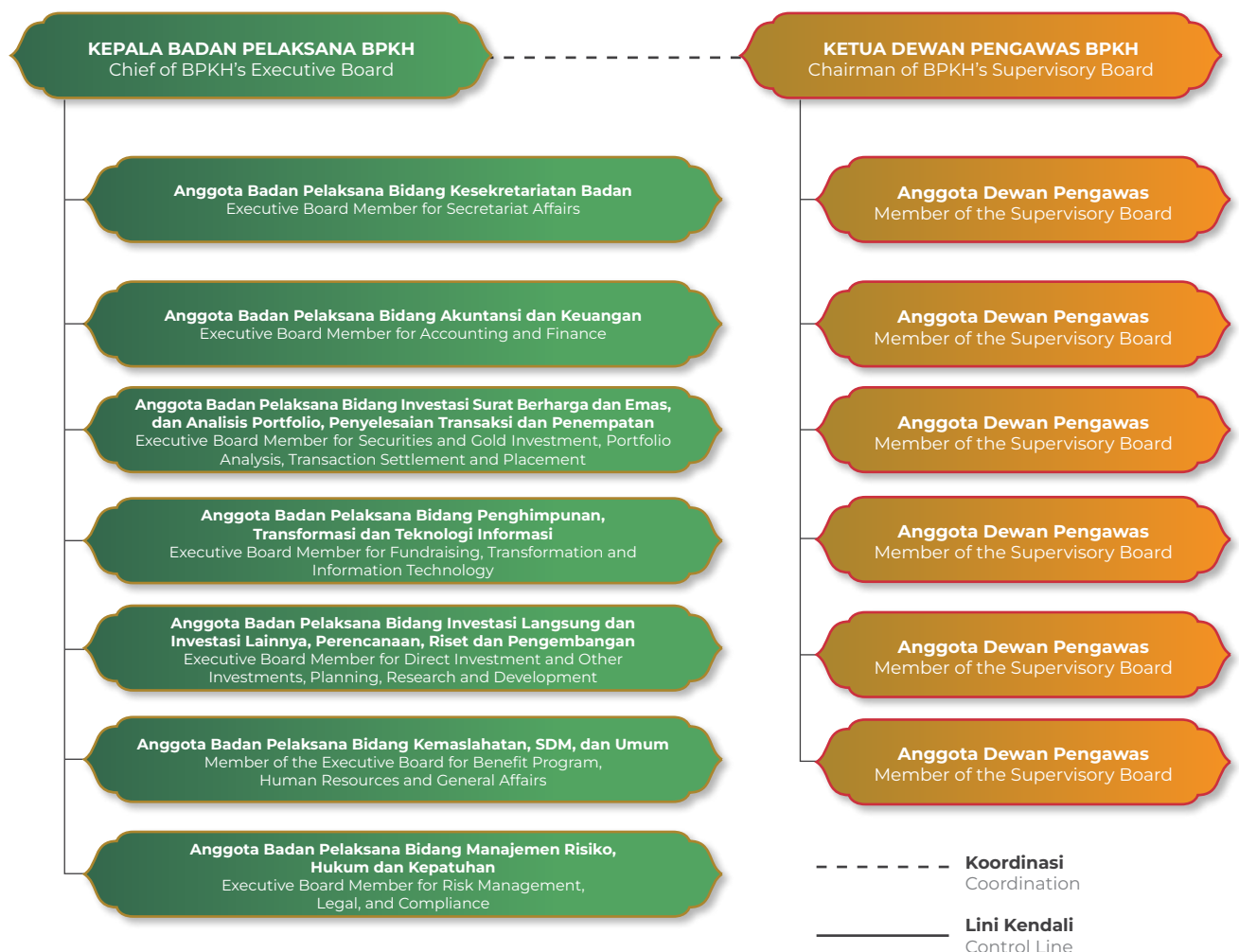
The implementation of good governance is the cornerstone in establishing BPKH as a professional, accountable, and highly integrity-driven institution, while aligning with the principles of Sharia principles that serve as the operational foundation of the institution. All BPKH personnel, from the leadership to the staff, have a collective responsibility to realize a transparent, efficient, and benefit-oriented governance system.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, BPKH secara konsisten melaksanakan evaluasi berkala terhadap efektivitas penerapan tata kelola organisasi. Proses ini dilakukan minimal satu kali dalam setahun, dan dikoordinasikan oleh Bidang Kepatuhan atau unit terkait lainnya yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam menilai aspek kepatuhan dan kinerja tata kelola. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi area perbaikan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta memperkuat budaya kerja yang bertanggung jawab dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis.

As part of this commitment, BPKH consistently conducts periodic evaluations of the effectiveness of organizational governance. This process is conducted at least once a year and coordinated by the Compliance Division or other relevant units with the authority and expertise to assess compliance and governance performance. The evaluation aims to identify areas for improvement, ensure compliance with regulations, and strengthen a responsible and adaptive work culture in response to strategic environmental dynamics.

Struktur Tata Kelola BPKH [GRI 2-9]

BPKH Governance Structure [GRI 2-9]



Komposisi Dewan Pengawas BPKH [GRI 2-9, 2-11]

Composition of BPKH's Supervisory Board [GRI 2-9, 2-11]

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Kelamin Gender	Kompetensi Utama Main Competence	Unsur Keanggotaan Element of Membership	Masa Jabatan Term of Office
H. Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc., CA., Asean CPA.	Ketua Dewan Pengawas merangkap Anggota Chief of Supervisory Board concurrently serving as a Member	Pria Male	Sekretariat Kepala Pelaksana, Pengembangan, Pengkajian, dan Sekretariat Dewan Pengawas Executive Secretary, Development, Research, and Supervisory Board Secretariat	Pemerintah Government	2022-2027
Dr. H Deni Suardini, S.E., Ak., M.M., CFA., CA., QIA., CGCAE.	Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board	Pria Male	Manajemen Risiko Bisnis, Manajemen Risiko Korporasi, Akuntansi dan Pelaporan, serta Perencanaan Business Risk Management, Corporate Risk Management, Accounting and Reporting, as well as Planning	Masyarakat Public	2022-2027
H. Heru Muara Sidik, Ak., CMA., CA., M.M., QIA.	Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board	Pria Male	Investasi Surat Berharga, Investasi Emas dan Surat Berharga Lainnya, Transformasi Digital, dan Teknologi Informasi Securities Investment, Gold Investment and Other Securities, Digital Transformation, and Information Technology	Masyarakat Public	2022-2027
Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA., QIA., QGIA.	Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board	Pria Male	Kepatuhan, Investasi Luar Negeri, Kerja Sama Luar Negeri, serta Advisory dan Support Luar Negeri Compliance, Foreign Investment, Foreign Cooperation, as well as Foreign Advisory and Support	Masyarakat Public	2022-2027
Dr. H. Mulyadi, S.E., Akt., M.M., M.Si., CPMA., SAS., CA.	Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board	Pria Male	Tresuri dan Pengendalian Keuangan, Penghimpunan, Penempatan, serta Investasi Langsung dan Investasi Lainnya Dalam Negeri Treasury and Financial Control, Collection, Placement, as well as Direct and Other Domestic Investments	Masyarakat Public	2022-2027

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Kelamin Gender	Kompetensi Utama Main Competence	Unsur Keanggotaan Element of Membership	Masa Jabatan Term of Office
Dr. H. Rojikin. S.H., M.Si., QIA.	Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board	Pria Male	Pengendalian Mutu dan Pengembangan Audit, Teknis Pemeriksaan, Hukum, SDM, serta Pengadaan dan Umum Quality Control and Audit Development, Technical Inspection, Legal, Human Resources, as well as Procurement and General Affairs	Masyarakat Public	2022-2027
Prof. Dr. H. Hamka Hasan Lc., M.A.	Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board	Pria Male	Administrasi Keuangan, Humas dan Administrasi Kantor, Registrasi dan Analisa Kemaslahatan, serta Pelaksanaan dan Monev Kemaslahatan Financial Administration, Public Relations and Office Administration, Registration and Analysis of Benefit Program, as well as the Implementation and Monitoring of Benefit Program	Pemerintah Government	2024-2027

Komposisi Badan Pelaksana BPKH [GRI 2-9]

Composition of BPKH's Executive Board [GRI 2-9]

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Kelamin Gender	Kompetensi Competence	Unsur Keanggotaan Element of Membership	Masa Jabatan Term of Office
Dr. Fadlul Imansyah. S.E., M.M., CIFP., AAK.	Kepala Badan Pelaksana merangkap sebagai Anggota Badan Pelaksana Bidang Kesekretariatan Badan Head of the Executive Board concurrently as a Member of the Executive Board for Secretariat Affairs	Pria Male	Kesekretariatan Badan Secretariat Affairs	Masyarakat Public	2022-2027
Amri Yusuf, S.E., Ak., CA., M.M., CACP	Anggota Badan Pelaksana Bidang Akuntansi dan Keuangan Member of the Executive Board for Accounting and Finance	Pria Male	Akuntansi dan Keuangan Accounting and Finance	Masyarakat Public	2022-2027

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Kelamin Gender	Kompetensi Competence	Unsur Keanggotaan Element of Membership	Masa Jabatan Term of Office
Dr. H. Indra Gunawan, S.E., SIP, M.Sc., CIMBA., CIB., CPM., CSA., ACiArb., CRP	Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi Surat Berharga dan Emas, dan Analisis Portfolio, Penyelesaian Transaksi dan Penempatan Member of the Executive Board for Securities and Gold Investment, Portfolio Analysis, Transaction Settlement and Placement	Pria Male	Investasi Surat Berharga dan Emas, dan Analisis Portfolio, Penyelesaian Transaksi dan Penempatan Securities and Gold Investment, Portfolio Analysis, Transaction Settlement and Placement	Masyarakat Public	2022-2027
Harry Alexander, S.H., M.H., LL.M.	Anggota Badan Pelaksana Bidang Penghimpunan, Transformasi dan Teknologi Informasi Member of the Executive Board for Fundraising, Transformation and Information Technology	Pria Male	Penghimpunan, Transformasi dan Teknologi Informasi Fundraising, Transformation and Information Technology	Masyarakat Public	2022-2027
Prof. Dr. H. M. Arief Mufraini, Lc., M.Si.	Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi Langsung dan Investasi Lainnya, Perencanaan, Riset dan Pengembangan Member of the Executive Board for Direct Investment and Other Investments, Planning, Research and Development	Pria Male	Investasi Langsung dan Investasi Lainnya, Perencanaan, Riset dan Pengembangan Direct Investment and Other Investments, Planning, Research and Development	Masyarakat Public	2022-2027
Dr. Sulistyowati, M.E., WMI., CFP.	Anggota Badan Pelaksana Bidang Kemaslahatan, SDM, dan Umum Member of the Executive Board for Benefit Program, Human Resources and General Affairs	Wanita Female	Kemaslahatan, SDM, dan Umum Benefit Program, Human Resources and General Affairs	Masyarakat Public	2022-2027
Dr. Ir. Acep Riana Jayaprawira, M.Si.	Anggota Badan Pelaksana Bidang Manajemen Risiko, Hukum dan Kepatuhan Member of the Executive Board for Risk Management, Legal, and Compliance	Pria Male	Manajemen Risiko, Hukum dan Kepatuhan Risk Management, Legal, and Compliance	Masyarakat Public	2022-2027

Ketua badan tata kelola tertinggi BPKH, yaitu Ketua Dewan Pengawas, bukanlah bagian dari manajemen eksekutif organisasi. Pemisahan ini sejalan dengan struktur tata kelola dua tingkat BPKH, sesuai dengan tata kelola lembaga publik berdasarkan hukum Indonesia, yang memastikan pemisahan yang jelas antara fungsi pengawasan dan manajemen. Hal ini mendukung pengawasan yang efektif, akuntabilitas, dan mitigasi potensi konflik kepentingan. Informasi lebih rinci terkait komposisi badan tata kelola tertinggi termasuk peran, tugas dan tanggung jawab, independensi, rangkap jabatan dapat dilihat pada laporan tahunan 2024 BPKH pada bab Tata Kelola Perusahaan. [\[GRI 2-9, 2-11, 2-12\]](#)

The Chair of the highest governance body of BPKH, namely the Chairman of the Supervisory Board, is not part of the organization's executive management. This separation is in line with BPKH's two-tier governance structure, in accordance with public institutional governance under Indonesian law, ensuring a clear division between supervisory and management functions. It supports effective oversight, accountability, and the mitigation of potential conflicts of interest. For more detailed information related to the composition of highest governance body including the roles, duties, and responsibilities, independence and concurrent position can be found in the 2024 BPKH Annual Report in Corporate Governance chapter. [\[GRI 2-9, 2-11, 2-12\]](#)

Organ Tata Kelola Bidang Kemaslahatan

Governance Organs of the Benefit Program Field [\[GRI 2-9, 2-11\]](#)

[\[SEOJK E.1\]](#)

Sebagai wujud komitmen terhadap keberlanjutan dan kemaslahatan umat, BPKH berupaya menyalurkan nilai manfaat DAU melalui pelaksanaan program-program yang mempertimbangkan secara seimbang aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola. Untuk mendukung tujuan tersebut, BPKH membentuk Bidang Kemaslahatan sebagai unit khusus yang bertanggung jawab dalam merancang, mengelola, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan kemaslahatan agar tepat sasaran, berdampak luas, dan berkelanjutan.

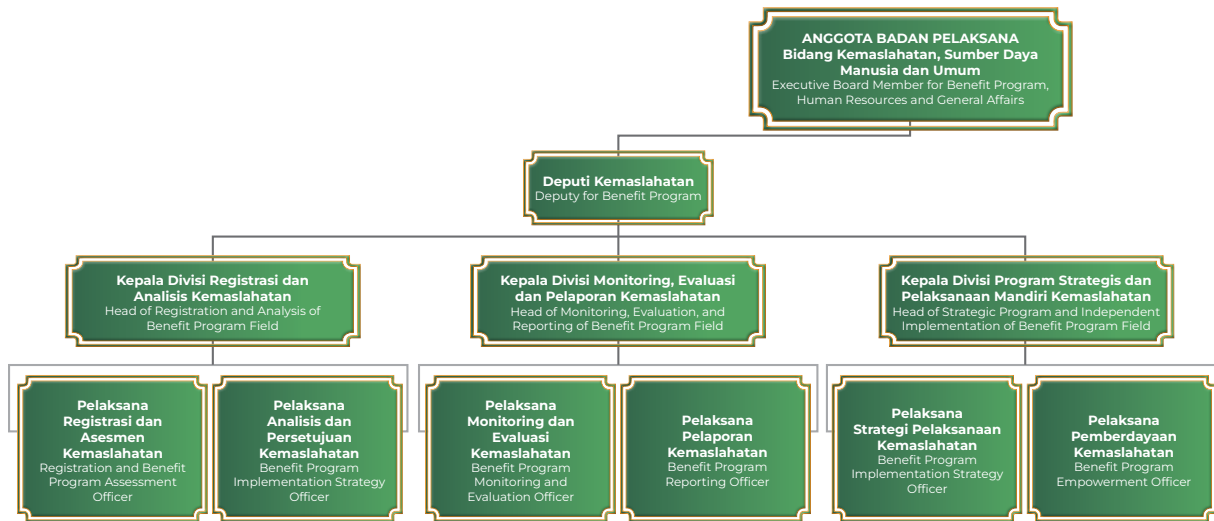
As a manifestation of its commitment to sustainability and the welfare of the people, BPKH strives to channel the benefits of DAU through the implementation of programs that take into account social, environmental, and governance aspects in a balanced manner. To support this objective, BPKH has established the Benefit Program Field as a specialized unit responsible for designing, managing, and overseeing the implementation of benefit program activities to ensure they are targeted, impactful, and sustainable.

Struktur organisasi Bidang Kemaslahatan dirancang untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program. Unit ini berada di bawah pengawasan langsung Anggota Badan Pelaksana yang membidangi kemaslahatan, dan didukung oleh Deputi Kemaslahatan dalam fungsi koordinatif dan administratif. Secara operasional, pelaksanaan teknis Program Kemaslahatan dilaksanakan oleh tiga divisi utama, yaitu Divisi Registrasi dan Analisis Kemaslahatan; Divisi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kemaslahatan; serta Divisi Program Strategis dan Pelaksanaan Mandiri Kemaslahatan.

The organizational structure of the Benefit Program Field is designed to ensure accountability and effectiveness in program implementation. This unit is under the direct supervision of the Executive Board member in charge of benefit program and supported by the Deputy of Benefit Program in a coordinating and administrative capacity. Operationally, the technical implementation of the Benefit Program is carried out by three main divisions, namely Registration and Analysis of Benefit Program Field; Monitoring, Evaluation, and Reporting of Benefit Program Field; and Strategic Program and Independent Implementation of Benefit Program Field.

Struktur Tata Kelola Bidang Kemaslahatan

Governance Structure of the Benefit Program Field



Anggota Badan Pelaksana Bidang Kemaslahatan [GRI 2-12, 2-14]

Anggota Badan Pelaksana yang membidangi Kemaslahatan merupakan otoritas tertinggi dalam struktur Bidang Kemaslahatan BPKH, yang pengangkatannya dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 29. Proses seleksi dilakukan secara ketat oleh Panitia Seleksi independen yang terdiri dari perwakilan berbagai lembaga pemerintah, dengan kandidat berasal dari kalangan profesional. Dalam menjalankan tugasnya, setiap anggota wajib mematuhi regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan larangan rangkap jabatan. Masa bakti Anggota Badan Pelaksana ditetapkan selama lima tahun, dengan peluang untuk diangkat kembali satu kali masa jabatan berikutnya.

Tugas utama Anggota Badan Pelaksana Bidang Kemaslahatan mencakup pengelolaan administrasi perkantoran, penguatan hubungan kelembagaan, pengelolaan komunikasi publik BPKH, serta koordinasi pelaksanaan Program Kemaslahatan yang mencakup tujuh golongan penerima manfaat (asnaf). Dalam penyusunan Laporan Kemaslahatan (Laporan Keberlanjutan BPKH), Anggota berperan dalam menetapkan topik material, standar pelaporan, serta menyetujui isi laporan. [GRI 2-14]

Executive Board Member of the Benefit Program Field [GRI 2-12, 2-14]

Members of the Executive Board responsible for welfare are the highest authority within the benefit program field of BPKH, appointed directly by the President of the Republic of Indonesia in accordance with the provisions of Law No. 34 of 2014, Article 29. The selection process is conducted rigorously by an independent selection committee comprising representatives from various government agencies, with candidates drawn from professional circles. In performing their duties, each member is required to comply with applicable regulations, including provisions prohibiting the holding of multiple positions. The term of office for members of the Executive Board is five years, with the possibility of reappointment for one additional term.

The main duties of Executive Board members in the Benefit Program Field include office administration, strengthening institutional relations, managing BPKH public communications, and coordinating the implementation of the Benefit Program, which covers seven beneficiary groups (asnaf). In the preparation of the Kemaslahatan Report (BPKH Sustainability Report), members play a role in determining material topics, reporting standards, and approving the content of the report. [GRI 2-14]

Selain itu, Anggota juga bertanggung jawab dalam merumuskan strategi, kebijakan, dan sasaran keberlanjutan yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan turut melibatkan pemangku kepentingan. Pemantauan dan evaluasi atas implementasi strategi dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan, guna memastikan arah kebijakan tetap selaras dengan tujuan keberlanjutan BPKH. Hasil evaluasi tersebut menjadi masukan penting untuk perbaikan program ke depan. [GRI 2-12]

Deputi Kemaslahatan

Deputi Kemaslahatan berperan sebagai pelaksana utama dan penghubung langsung dari Anggota Badan Pelaksana Bidang Kemaslahatan dalam memastikan koordinasi yang efektif atas seluruh aspek kegiatan di Bidang Kemaslahatan. Tanggung jawabnya mencakup pengelolaan administrasi perkantoran, penguatan kerja sama lintas lembaga, pengelolaan komunikasi publik, serta pengorganisasian kegiatan-kegiatan kemaslahatan yang menyasar umat Islam sebagai penerima manfaat. Selain mengelola operasional, Deputi Kemaslahatan juga memiliki peran strategis dalam mengawasi implementasi dan dampak dari program-program kemaslahatan yang dijalankan BPKH, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Deputi Kemaslahatan berkomitmen pada prinsip integritas, yang ditandai dengan penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk pencegahan potensi konflik kepentingan. Bersama Anggota Badan Pelaksana, Deputi Kemaslahatan juga bertanggung jawab untuk melaporkan capaian dan dampak program secara berkala kepada Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPKH. Proses pelaporan dilakukan dalam forum Rapat Evaluasi yang diselenggarakan setiap tiga bulan sekali, sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas dan pengawasan internal yang mendukung tata kelola organisasi yang baik. [GRI 2-11, 2-13]

Divisi Registrasi dan Analisa Kemaslahatan

Divisi Registrasi dan Analisis Kemaslahatan merupakan unit yang berperan penting dalam tahapan awal pelaksanaan Program Kemaslahatan BPKH. Divisi ini terdiri atas Kepala Divisi, Manajer, dan Asisten Manajer yang terbagi dalam dua fungsi

Additionally, members are responsible for formulating strategies, policies, and sustainability targets that encompass economic, social, and environmental dimensions with the involvement of the stakeholders. Monitoring and evaluation of strategy implementation are conducted periodically as needed to ensure that policy direction remains aligned with BPKH's sustainability objectives. The results of these evaluations serve as important inputs for improving future programs. [GRI 2-12]

Deputy of the Benefit Program

The Deputy for Benefit Program serves as the main executive and direct liaison to the Executive Board Members for Benefit Program in ensuring effective coordination of all aspects of activities in the Benefit Program Field. Its responsibilities include office administration, strengthening inter-agency cooperation, managing public communications, and organizing benefit program activities targeting Muslims as beneficiaries. In addition to managing operations, the Deputy for Benefit Program also has a strategic role in overseeing the implementation and impact of benefit programs run by BPKH, from an economic, social, and environmental perspective.

In carrying out their duties, the Deputy for Benefit is committed to the principle of integrity, which is marked by the signing of an integrity pact as a form of prevention of potential conflicts of interest. Together with the Executive Board members, the Deputy for Benefit Program is also responsible for reporting program achievements and impacts on a regular basis to the Supervisory Board and the Executive Board of BPKH. The reporting process is conducted in the Evaluation Meeting forum held every three months, as part of the accountability and internal oversight mechanisms supporting good organizational governance. [GRI 2-11, 2-13]

Registration and Analysis of Benefit Program Field

The Registration and Analysis of Benefit Program Field is a key unit in the initial stages of implementing the BPKH Benefit Program. This division consists of a Division Head, Manager, and Assistant Manager, divided into two main functions: Proposal

utama, yakni Registrasi dan Analisis Proposal serta Persetujuan Proposal. Tugas utama divisi ini adalah menerima, mencatat, dan melakukan evaluasi awal terhadap seluruh proposal kegiatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umat Islam.

Setiap proposal yang masuk akan diproses secara objektif dengan memperhatikan berbagai aspek, seperti jenis dan cakupan kegiatan, wilayah pelaksanaan, nilai anggaran yang diajukan, legalitas dan kapasitas penerima manfaat, serta kelayakan teknis pelaksanaan. Setelah melalui tahap analisis awal, proposal yang memenuhi kriteria akan diajukan dalam Rapat Komite Evaluasi Kemaslahatan untuk mendapatkan persetujuan. Setelah itu, Manajer bersama Asisten Manajer akan menentukan Mitra Kemaslahatan yang paling sesuai untuk melakukan penilaian dan verifikasi lebih lanjut terhadap proposal yang telah disetujui. Proses ini dirancang untuk menjamin transparansi, akurasi, dan kesesuaian program dengan tujuan kemaslahatan umat.

Divisi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kemaslahatan

Divisi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kemaslahatan memiliki peran penting dalam memastikan seluruh pelaksanaan Program Kemaslahatan berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Divisi ini bertanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap semua kegiatan kemaslahatan, termasuk di dalamnya program di bidang pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, pembangunan sarana dan prasarana ibadah, serta tanggap bencana yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Melalui pelaporan yang sistematis dan berbasis indikator kinerja, divisi ini memberikan masukan penting bagi pengambilan keputusan strategis. Kegiatan monitoring dilakukan baik melalui pelaporan mitra, kunjungan lapangan, hingga pelibatan pihak independen dalam evaluasi dampak. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi umat serta sejalan dengan prinsip syariah, asas kebermanfaatan, kehati-hatian, dan akuntabilitas publik.

Registration and Analysis, as well as Proposal Approval. The primary responsibility of this division is to receive, record, and conduct an initial evaluation of all proposals related to the welfare of the Muslim community.

Each proposal is processed objectively, taking into account various aspects such as the type and scope of the activity, the implementation area, the proposed budget, the legality and capacity of the beneficiaries, and the technical feasibility of the implementation. After the initial analysis stage, proposals that meet the criteria are submitted to the Benefit Program Evaluation Committee Meeting for approval. Following this, the Manager, together with the Assistant Manager, will determine the most suitable Benefit Program Partner to conduct further assessment and verification of the approved proposals. This process is designed to ensure transparency, accuracy, and alignment of the program with the objectives of the welfare of the Muslim community.

Monitoring, Evaluation, and Reporting of Benefit Program Field

The Monitoring, Evaluation, and Reporting of Benefit Program Field plays an important role in ensuring that all Benefit Programs are implemented effectively, efficiently, and accountably. This division is responsible for conducting regular monitoring and evaluation of all benefit program activities, including programs in the areas of Hajj services, education and da'wah, health, social and religious affairs, ummah's economics, development of worship facilities and infrastructure, and disaster response across various regions in Indonesia.

Through systematic reporting based on performance indicators, this division provides important input for strategic decision-making. Monitoring activities are carried out through partner reports, field visits, and the involvement of independent parties in impact evaluations. This aims to ensure that the programs implemented truly benefit the community and are in line with the principles of sharia, the principles of benefit, prudence, and public accountability.

Divisi Program Strategis dan Pelaksanaan Mandiri Kemaslahatan

Divisi ini memiliki mandat utama dalam mengoordinasikan pelaksanaan program kemaslahatan, khususnya yang bersifat strategis dan dilakukan secara langsung (mandiri) oleh BPKH. Tugasnya mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian terhadap implementasi program di berbagai bidang kemaslahatan yang telah disetujui, seperti pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, infrastruktur ibadah, dan tanggap bencana.

Sebagai ujung tombak eksekusi, divisi ini memastikan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk mitra pelaksana, pemerintah daerah, serta masyarakat penerima manfaat. Selain itu, Divisi Program Strategis dan Pelaksanaan Mandiri juga berperan dalam mengembangkan model-model pemberdayaan umat yang inovatif dan berdampak luas, sejalan dengan visi BPKH untuk mengoptimalkan kemaslahatan dana haji bagi kesejahteraan umat.

Komunikasi Masalah Penting [GRI 2-16]

Rapat Gabungan antara Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana merupakan forum strategis yang digunakan untuk menyampaikan berbagai isu penting kepada Badan Tata Kelola Tertinggi di lingkungan BPKH. Rapat ini dilaksanakan secara rutin setiap bulan dan menjadi wadah evaluasi menyeluruh atas seluruh aspek operasional, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program di Bidang Kemaslahatan.

Untuk isu-isu yang bersifat mendesak atau masuk dalam kategori kejadian luar biasa, penanganannya dilakukan secara cepat oleh *Crisis Management Team* (CMT) guna memastikan respons awal yang tepat dan segera diteruskan kepada pimpinan. Isu tersebut kemudian dibahas secara khusus dalam Rapat Badan Pelaksana dan dilaporkan kepada Dewan Pengawas melalui mekanisme Rapat Gabungan di luar jadwal reguler. Selama periode pelaporan tahun ini, tidak ditemukan kejadian luar biasa yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di Bidang Kemaslahatan.

Strategic Program and Independent Implementation of Benefit Program Field

This division has the primary mandate of coordinating the implementation of benefit programs, particularly those that are strategic and carried out directly (independently) by BPKH. Its duties include planning, implementation, and control of the implementation of programs in various approved benefit program areas, such as Hajj services, education and da'wah, health, religious social affairs, Islamic economic empowerment, worship infrastructure, and disaster response.

As the spearhead of execution, this division ensures synergy between various stakeholders, including implementing partners, local governments, and beneficiary communities. In addition, the Strategic Programs and Independent Implementation of Benefit Program Field also plays a role in developing innovative and wide-ranging community empowerment models, in line with BPKH's vision to optimize the welfare of Hajj funds for the benefit of the community.

Communication of Significant Problems [GRI 2-16]

The Joint Meeting between the Supervisory Board and the Executive Board is a strategic forum used to convey various important issues to the highest governing body within BPKH. This meeting is held regularly every month and serves as a platform for comprehensive evaluation of all operational aspects, including matters related to the implementation of programs in the Benefit Program Field.

For urgent issues or those classified as extraordinary incidents, they are handled promptly by the Crisis Management Team (CMT) to ensure an appropriate initial response, which is then immediately escalated to senior management. These issues are subsequently discussed in a special meeting of the Executive Board and reported to the Supervisory Board through the Joint Meeting mechanism outside the regular schedule. During the reporting period this year, no extraordinary incidents related to the implementation of activities in the Benefit Program Field were identified.

Pengembangan Kompetensi Terkait Aspek Keberlanjutan

[GRI 2-17][SEOJK E.2]

Untuk memperkuat pelaksanaan program keberlanjutan, BPKH menyadari pentingnya peningkatan kapasitas bagi para pemangku kepentingan internal yang terlibat langsung dalam Kegiatan Kemaslahatan. Oleh karena itu, BPKH secara aktif mendorong pelaksanaan berbagai program pengembangan kompetensi, baik dalam bentuk pelatihan teknis, lokakarya, maupun sertifikasi profesional yang relevan dengan aspek keberlanjutan.

Sepanjang tahun 2024, sejumlah pejabat struktural BPKH, termasuk Anggota Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Deputi Kemaslahatan, telah mengikuti dua program pengembangan khusus yang berfokus pada isu-isu keberlanjutan terkini. Kegiatan ini menunjukkan komitmen BPKH dalam memastikan bahwa setiap pihak yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan program Kemaslahatan memiliki pemahaman yang kuat, adaptif, dan selaras dengan praktik terbaik global dalam bidang keberlanjutan. Melalui pendekatan ini, BPKH terus berupaya membangun kapasitas kelembagaan yang mampu merespons tantangan keberlanjutan secara progresif dan berdampak.

Pengembangan Kompetensi Terkait Aspek Keberlanjutan Tahun 2024

Competency Development Related to Sustainability Aspects

[GRI 2-17][SEOJK E.2]

To strengthen the implementation of sustainability programs, BPKH recognizes the importance of capacity building for internal stakeholders who are directly involved in benefit program activities. Therefore, BPKH actively encourages the implementation of various competency development programs, including technical training, workshops, and professional certification relevant to sustainability aspects.

Throughout 2024, a number of BPKH structural officials, including members of the Executive Board, the Supervisory Board, and the Deputy for Benefit Program, have participated in two specialized capacity-building programs focused on current sustainability issues. These activities demonstrate BPKH's commitment to ensuring that all parties with strategic roles in managing benefit programs have a strong, adaptive, and aligned understanding of global best practices in sustainability. Through this approach, BPKH continues to build institutional capacity capable of responding to sustainability challenges in a progressive and impactful manner.

Competency Development Related to Sustainability Aspects in 2024

No.	Topik Pelatihan Training Topics	Jumlah Peserta Number of Participants
1	SSB Standards Training Course and Certified Sustainability Reporting Assurer	1
2	Pelatihan Penerapan Penurunan Nilai atas Aset Keuangan Syariah sesuai PSAK 413	5
3	Semnas Internal Audit 2024: Cultural Transformation: Integrating ESG, Cybersecurity, and Innovative Risk Management	8
4	Indonesia Human Capital & Beyond Summit – a force for greater good in human development toward Indonesia Emas 2045	3
5	International Islamic Finance Certification	3
6	Pelatihan dan Sertifikasi Pengawas Syariah dan Ahli Syariah Pasar Modal	6

Nominasi Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana [GRI 2-10]

Proses pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas serta Badan Pelaksana BPKH dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia dengan berlandaskan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 serta Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2017. Untuk menjamin transparansi dan partisipasi yang luas, Presiden akan menunjuk Panitia Seleksi (Pansel) independen yang terdiri dari para profesional berintegritas dan memiliki kompetensi sesuai dengan ruang lingkup tugas BPKH.

Pansel dibentuk dengan komposisi 9 (sembilan) anggota, yakni 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah dan 6 (enam) orang dari unsur masyarakat, mencerminkan sinergi antara negara dan publik dalam pengelolaan lembaga. Dalam menjalankan tugasnya, Pansel tidak hanya mempertimbangkan aspek kompetensi teknis dan integritas moral, tetapi juga memperhatikan prinsip representasi, mencakup keberagaman latar belakang etnis, agama, jenis kelamin, dan pengalaman profesional. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan struktur organisasi yang inklusif serta mampu menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih berimbang dan komprehensif.

Adapun hasil seleksi dari Panitia Seleksi adalah sebagai berikut:

- Anggota Dewan Pengawas berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas 5 (lima) orang dari unsur masyarakat dan 2 (dua) orang dari unsur pemerintah, di mana unsur pemerintah wajib berasal dari kementerian yang menangani urusan keagamaan dan keuangan negara.
- Anggota Badan Pelaksana ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang atau lebih, yang seluruhnya berasal dari kalangan profesional. Para anggota ini memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun, dan dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan mekanisme ini, BPKH memastikan bahwa pengisian posisi strategis dalam lembaga dilaksanakan secara objektif, inklusif, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Nomination of Executive Board Members and The Supervisory Board Members [GRI 2-10]

The appointment and dismissal of members of the Supervisory Board and the Executive Board of BPKH are carried out by the President of the Republic of Indonesia based on the provisions contained in Law Number 34 of 2014 and Presidential Regulation Number 10 of 2017. To ensure transparency and broad participation, the President will appoint an independent Selection Committee (Pansel) composed of professionals of integrity and competence commensurate with the scope of the BPKH's duties.

The Pansel is formed with a composition of 9 (nine) members, comprising 3 (three) representatives from the government and 6 (six) representatives from the public, reflecting the synergy between the state and the public in the management of the institution. In carrying out its duties, the Pansel will not only consider technical competence and moral integrity, but also pay attention to the principle of representation, including diversity in ethnic background, religion, gender, and professional experience. This approach aims to create an inclusive organizational structure that is capable of producing more balanced and comprehensive decisions.

The results of the Selection Committee's selection are as follows:

- The Supervisory Board consists of seven (7) members, comprising five (5) members from the community and two (2) members from the government, where the government members must come from ministries responsible for religious affairs and state finances.
- The Executive Board consists of 5 (five) members or more, all of whom are professionals. These members have a term of office of 5 (five) years and may be considered for reappointment in accordance with applicable regulations.

Through this mechanism, the BPKH ensures that the filling of strategic positions within the institution is carried out objectively, inclusively, and in accordance with the principles of good governance.

Remunerasi Badan Pelaksana [GRI 2-19, 2-20]

Penetapan kebijakan remunerasi dan kompensasi tahunan bagi Anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020 tentang Gaji atau Upah dan Hak Keuangan Lainnya. Regulasi ini menjadi dasar hukum utama dalam menentukan besaran hak keuangan berdasarkan tanggung jawab, profesionalisme, serta kompleksitas tugas yang diemban oleh masing-masing anggota dalam pengelolaan dana haji.

Dalam pelaksanaannya, BPKH tidak memiliki kewenangan untuk menunda pembayaran, menarik kembali (*clawback*), atau menangguhkan pembayaran tantiem dan insentif kinerja tunai yang telah diberikan, karena ketentuan tersebut tidak diatur dalam Perpres yang berlaku. Hal ini mencerminkan ketegasan kebijakan dalam menjamin kepastian hak keuangan bagi para pejabat lembaga, sepanjang memenuhi tanggung jawab dan kinerja sesuai mandat yang ditetapkan.

Penetapan remunerasi juga mempertimbangkan sejumlah indikator penting seperti besaran dana dan aset yang dikelola, tingkat inflasi, kemampuan keuangan lembaga, dan faktor relevan lainnya, termasuk pengelolaan atas aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Seluruh kebijakan ini disusun untuk memastikan adanya keseimbangan antara penghargaan atas kinerja dan prinsip efisiensi keuangan.

Meskipun remunerasi telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden, penilaian kinerja Badan Pelaksana dilakukan secara independen oleh Dewan Pengawas, tanpa keterlibatan Badan Pelaksana dalam proses evaluasinya. Komposisi Dewan Pengawas berasal dari unsur masyarakat, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Agama yang merupakan representasi pemangku kepentingan strategis dan profesional di bidangnya. Proses evaluasi dilakukan melalui metode internal yang objektif dan sistematis, tanpa menggunakan jasa konsultan eksternal atau mekanisme voting. Dengan demikian, BPKH memastikan bahwa kebijakan remunerasi mencerminkan integritas tata kelola, transparansi,

Remuneration of Executive Board Members [GRI 2-19, 2-20]

The determination of annual remuneration and compensation policies for members of the Executive Board and Supervisory Board of BPKH is based on Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 49 of 2020 concerning Salaries or Wages and Other Financial Rights. This regulation serves as the primary legal basis for determining the amount of financial rights based on the responsibilities, professionalism, and complexity of the tasks carried out by each member in the management of Hajj Funds.

In its implementation, the BPKH does not have the authority to delay payment, claw back, or suspend the payment of bonuses and cash performance incentives that have been granted, as such provisions are not stipulated in the applicable Presidential Regulation. This reflects the firmness of the policy in ensuring the certainty of financial rights for officials of the institution, provided they fulfill their responsibilities and performance in accordance with the mandate established.

The determination of remuneration also takes into account several important indicators such as the size of funds and assets managed, inflation rates, the financial capacity of the institution, and other relevant factors, including the management of economy, environmental, and social aspect. All these policies are designed to ensure a balance between rewarding performance and the principle of financial efficiency.

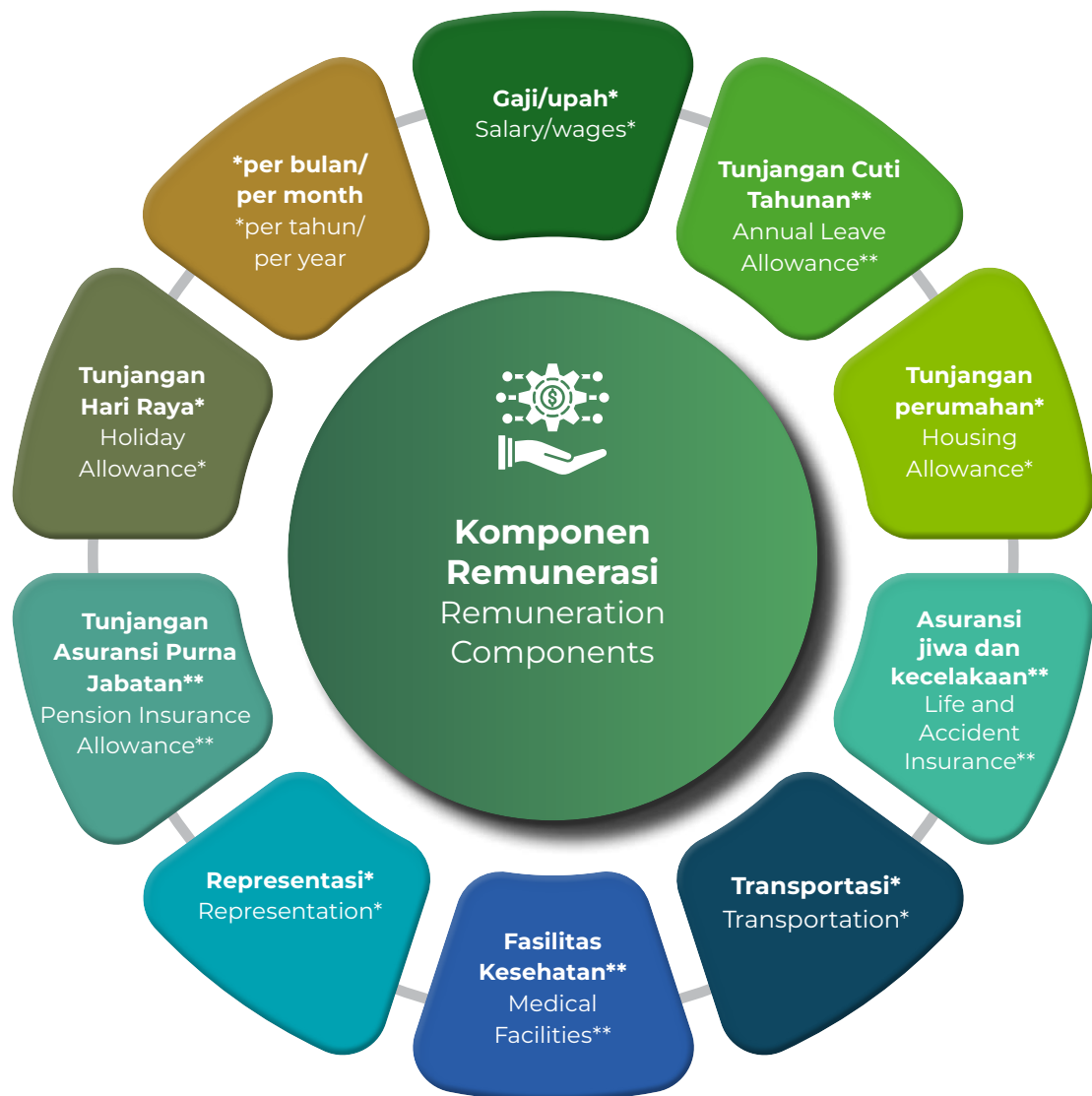
Although remuneration has been determined through a Presidential Regulation, the performance of the Executive Board is assessed independently by a Supervisory Board, without the involvement of the Executive Board in the evaluation process. The composition of the Supervisory Board consists of members from the public, the Ministry of Finance, and the Ministry of Religious Affairs, who represent strategic stakeholders and professionals in their respective fields. The evaluation process is conducted through objective and systematic internal methods, without using external consultants or voting mechanisms. Thus, BPKH ensures that remuneration policies reflect governance integrity, transparency, and

dan akuntabilitas sesuai prinsip syariah dan prinsip organisasi publik yang baik.

accountability in accordance with sharia principles and good public organization principles.

Berikut adalah cakupan remunerasi Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas hingga 31 Desember 2024.

The following is the scope of remuneration for the Executive Board and Supervisory Board until December 31, 2024.



Kompensasi Tahunan Organ Kemaslahatan Dibandingkan Pimpinan BPKH [GRI 2-21]

Ratio of Total Annual Compensation of Welfare Governance Organs to BPKH Chairman [GRI 2-21]

Uraian Description	2024	2023	2022
Rasio Total Kompensasi Tahunan Organ Kemaslahatan Dibandingkan Pimpinan BPKH Ratio of Total Annual Compensation for Welfare Governance Compared to BPKH Leaders	5,45:1	4,64:1	4,05:1

Catatan: Rasio total kompensasi tahunan Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas terhadap total kompensasi tahunan rata-rata semua pegawai.

Notes: The ratio of the total annual compensation of Executive Board Members and the Supervisory Board Members to the average total annual compensation of all employees.

Pada tahun 2024, persentase kenaikan kompensasi tahunan individu dengan bayaran tertinggi di BPKH tercatat sebesar 5,95%, sedangkan median kenaikan kompensasi tahunan seluruh karyawan adalah sebesar 1,73%, sehingga rasio total kompensasi tahunan organ kemaslahatan dibandingkan pimpinan BPKH adalah 5,45:1.

In 2024, the percentage increase in annual compensation for the highest-paid individual at BPKH was recorded at 5.95%, while the median increase in annual compensation for all employees was 1.73%, resulting in a total annual compensation ratio for benefit organs compared to BPKH chairman of 5.45:1.

Evaluasi Kinerja Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana [GRI 2-12, 2-18]

Evaluation of Executive Board Members and the Supervisory Board Members [GRI 2-12, 2-18]

BPKH meyakini bahwa penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten merupakan fondasi penting dalam mendorong kinerja berkelanjutan dan menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan diwujudkan melalui struktur tata kelola yang jelas dan fungsional. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, Dewan Pengawas memiliki mandat utama untuk mengawasi pelaksanaan tugas Badan Pelaksana agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sekaligus memberikan arahan strategis guna mendukung pencapaian visi dan tujuan BPKH.

BPKH believes that consistent implementation of *Good Corporate Governance* (GCG) principles is an important foundation for promoting sustainable performance and creating added value for all stakeholders. Commitment to transparency, accountability, responsibility, independence, and equality is realized through a clear and functional governance structure. In accordance with the mandate of Law No. 34 of 2014, the Supervisory Board has the primary responsibility to oversee the implementation of the Executive Board's duties in accordance with applicable laws and regulations, while also providing strategic direction to support the achievement of BPKH's vision and objectives.

Dalam pelaksanaan fungsinya, Dewan Pengawas menjalankan pengawasan aktif terhadap implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2024 dan penerapan prinsip-prinsip GCG di seluruh unit organisasi. Pengawasan ini tidak hanya administratif, melainkan juga bersifat evaluatif dan preventif, dengan pendekatan *Early Warning System* guna mendeteksi potensi risiko sedini mungkin serta memastikan sistem

In performing its functions, the Supervisory Board conducts active oversight of the implementation of the 2024 Work Plan and Annual Budget (RKAT) and the application of GCG principles across all organizational units. This oversight is not only administrative but also evaluative and preventive, utilizing an *Early Warning System* to detect potential risks as early as possible and ensure that internal control systems operate effectively to support the

pengendalian internal berjalan secara efektif untuk mendukung pencapaian kinerja lembaga.

Dewan Pengawas juga menerapkan pendekatan pengawasan berbasis risiko yang mengacu pada indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators/ KPI*) yang telah ditetapkan, termasuk aspek keberlanjutan yang meliputi dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya fokus pada kinerja keuangan, tetapi juga mencakup dampak menyeluruh dari aktivitas BPKH terhadap masyarakat dan lingkungan, selaras dengan prinsip keberlanjutan. Evaluasi atas pencapaian kinerja dilakukan secara independen dan setiap tahun.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pada tahun 2024, Dewan Pengawas telah memberikan berbagai nasihat strategis, evaluasi kebijakan, dan rekomendasi operasional kepada Badan Pelaksana terkait penguatan pelaksanaan strategi kelembagaan, penyempurnaan kebijakan, serta pengambilan keputusan penting lainnya, dan tidak terdapat perubahan komposisi badan tata kelola tertinggi. Dewan juga memberikan persetujuan atas kebijakan tertentu sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Rekomendasi dan arahan tersebut telah diimplementasikan oleh Badan Pelaksana sebagai bagian dari komitmen terhadap tata kelola yang adaptif, responsif, dan berkelanjutan.

achievement of institutional performance.

The Supervisory Board also applies a risk-based oversight approach based on the established Key Performance Indicators (KPIs), including sustainability aspects encompassing economic, social, and environmental dimensions. Thus, oversight is not solely focused on financial performance but also encompasses the overall impact of BPKH's activities on society and the environment, in alignment with sustainability principles. Evaluation on the performance achievement is conducted independently and annually.

Based on the evaluation result, in 2024, the Supervisory Board provided various strategic recommendations, policy evaluations, and operational recommendations to the Executive Board regarding the strengthening of institutional strategy implementation, policy refinement, and other important decision-making processes, and no changes in the composition of the highest governance body. The Board also approved specific policies within the scope of its authority as stipulated in applicable regulations. These recommendations and guidelines have been implemented by the Executive Board as part of its commitment to adaptive, responsive, and sustainable governance.

Nilai dan Integritas Values and Integrity [GRI 2-23, 2-24]

BPKH menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai bagian dari prinsip dasar dalam tata kelola organisasi. Komitmen ini sejalan dengan standar internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* dan konvensi yang diakui oleh *International Labour Organization* (ILO). Prinsip-prinsip tersebut diinternalisasi ke dalam berbagai kebijakan internal BPKH, termasuk melalui penerapan Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang wajib dipatuhi oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan BPKH. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan moral dan profesional yang mengatur perilaku dalam berinteraksi, baik secara vertikal maupun horizontal di lingkungan kerja.

BPKH upholds the values of human rights as part of its fundamental principles of organizational governance. This commitment is in line with international standards such as the *Universal Declaration of Human Rights* and conventions recognized by the *International Labour Organization* (ILO). These principles are internalized into various internal policies of BPKH, including through the implementation of a *Code of Conduct* that must be adhered to by all officials and employees within BPKH. This document serves as a moral and professional guide that regulates behavior in interactions, both vertically and horizontally in the work environment.

Code of Conduct BPKH dirancang untuk membentuk budaya kerja yang berintegritas, saling menghormati, dan bertanggung jawab. Ketentuan ini ditetapkan dalam Peraturan BPKH Nomor 3 Tahun 2018, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji serta regulasi lainnya yang relevan. Seluruh pegawai, tanpa kecuali, diwajibkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai ini dalam pelaksanaan tugas sehari-hari demi menjaga reputasi, kepercayaan publik, dan kredibilitas lembaga. Dokumen lengkap dapat diakses melalui tautan resmi berikut: <https://bpkh.go.id/download/salinan-pbpkh-no-3-tahun-2018>.

Code of Conduct BPKH berlaku secara menyeluruh dan tidak membedakan jenjang jabatan, sehingga menciptakan kesetaraan dalam standar perilaku. Pedoman ini tidak hanya menjadi instrumen pengendalian perilaku, tetapi juga sebagai fondasi dalam membangun lingkungan kerja yang positif, kondusif, dan menghargai keberagaman. Kepatuhan terhadap pedoman ini menjadi indikator penting dalam membentuk budaya organisasi yang sehat. *Code of Conduct* BPKH telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan termasuk mitra dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam hal terjadi dugaan pelanggaran terhadap kode etik, BPKH telah menyediakan mekanisme pelaporan melalui *Whistleblowing System* (WBS). Apabila laporan yang masuk melibatkan pejabat tinggi seperti Kepala Badan Pelaksana, Anggota Badan Pelaksana, Ketua atau Anggota Dewan Pengawas, maka BPKH akan membentuk Dewan Kehormatan Kode Etik bersifat *ad hoc*. Dewan ini terdiri dari unsur Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas, serta dapat melibatkan pihak independen dari luar lembaga jika dipandang perlu, untuk menjamin objektivitas dan integritas proses penanganan. [GRI 2-25]

The BPKH Code of Conduct is designed to foster a work culture of integrity, mutual respect, and accountability. These provisions are set forth in BPKH Regulation No. 3 of 2018, which is derived from Law No. 34 of 2014 on Hajj Financial Management and other relevant regulations. All employees, without exception, are required to uphold these values in the performance of their daily duties to maintain the reputation, public trust, and credibility of the institution. The full document can be accessed via the official link: <https://bpkh.go.id/download/salinan-pbpkh-no-3-tahun-2018>.

The BPKH Code of Conduct applies universally and does not discriminate based on job level, thereby ensuring equality in behavioral standards. This guideline is not only a tool for behavioral control but also a foundation for building a positive, conducive, and diverse work environment. Compliance with this guideline is an important indicators for shaping a healthy organizational culture. The BPKH Code of Conduct has been disseminated to all employees, including partners and other stakeholders.

In the event of suspected violations of the code of ethics, BPKH has established a reporting mechanism through the Whistleblowing System (WBS). If the report involves high-ranking officials such as the Head of the Executive Board, Members of the Executive Board, the Chairperson or Members of the Supervisory Board, the BPKH will establish an *ad hoc* Ethics Code Honorary Council. This council consists of members from the Executive Board and the Supervisory Board, and may involve independent parties from outside the institution if deemed necessary, to ensure the objectivity and integrity of the handling process. [GRI 2-25]

Kode Etik BPKH BPKH Code of Ethics	Tata Perilaku Pejabat dan Pegawai Code of Conduct for Officials and Employees
1. Penegakan integritas 2. Menjaga kerahasiaan 3. Larangan penyalahgunaan jabatan 4. Kepatuhan penggunaan dokumen 5. Larangan benturan kepentingan	1. Kepatuhan terhadap hukum 2. Benturan kepentingan 3. Pengendalian gratifikasi 4. Anti diskriminasi 5. Integritas laporan keuangan 6. Perlindungan informasi BPKH 7. Informasi orang dalam (insider trading) 8. Perlindungan harta BPKH 9. Kegiatan sosial dan politik 10. Perilaku etis terhadap sesama pegawai
1. Enforcement of integrity 2. Maintain confidentiality 3. Prohibition of abuse of position 4. Document usage compliance 5. Prohibition of conflict of interest	

Kode Etik BPKH
BPKH Code of Ethics

Tata Perilaku Pejabat dan Pegawai
Code of Conduct for Officials and Employees

1. Compliance with the law
2. Conflict of interest
3. Gratification management
4. Anti-discrimination
5. Financial reporting integrity
6. Protection of BPKH information
7. Insider information (insider trading)
8. Protection of BPKH assets
9. Social and political activities
10. Ethical behavior towards fellow employees

Asas Pengelolaan Keuangan Haji

Sebagai lembaga publik yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana haji, BPKH menjadikan prinsip tata kelola yang baik sebagai pijakan utama dalam menjalankan seluruh aktivitasnya. Komitmen ini diperkuat melalui Peraturan BPKH Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan GCG), Kode Etik, dan Pakta Integritas. Regulasi tersebut menetapkan asas-asas penting sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan haji, yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Asas-asas ini tidak hanya ditujukan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi, tetapi juga untuk memperkuat integritas kelembagaan dalam mengelola dana umat secara profesional dan syariah-compliant. Prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan menjadi pilar utama dalam seluruh pengambilan keputusan dan proses kerja di lingkungan BPKH.

Sebagai bentuk nyata dari integritas kelembagaan, BPKH menetapkan Kode Etik dan prinsip pengelolaan keuangan haji yang mengatur perilaku seluruh jajaran organisasi, baik dalam relasi internal maupun eksternal. Kode etik ini menekankan pada pelaksanaan tugas yang menjunjung tinggi nilai moral, etika kerja, serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, BPKH secara aktif menerapkan prinsip *due diligence* dalam setiap kebijakan dan program, untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional dilakukan secara bertanggung jawab dan berlandaskan asas kehati-hatian.

Principles of Hajj Fund Management

As a public institution responsible for managing hajj funds, BPKH has adopted good governance principles as the main foundation for all its activities. This commitment is reinforced through BPKH Regulation No. 3 of 2018 on Compliance Policy, Implementation of Good Corporate Governance (GCG), Code of Ethics, and Integrity Pact. This regulation establishes important principles as guidelines for the management of Hajj funds, in line with the mandate of Law No. 34 of 2014 on the Management of Hajj Funds.

These principles are not only aimed at ensuring accountability, transparency, and efficiency but also at strengthening institutional integrity in managing funds for the public in a professional and Sharia-compliant manner. The principle of prudence, transparency, accountability, and compliance with laws and regulations form the cornerstones of all decision-making and operational processes within the BPKH.

As a tangible manifestation of institutional integrity, BPKH has established a Code of Ethics and principles of Hajj financial management that govern the conduct of all organizational staff, both in internal and external relations. This code of ethics emphasizes the performance of duties that uphold moral values, work ethics, and respect for human rights (HAM). In addition, BPKH actively applies the principle of due diligence in every policy and program to ensure that all operational activities are carried out responsibly and based on the principle of prudence.

Untuk memastikan implementasi prinsip-prinsip ini secara konsisten, BPKH menanamkan nilai-nilai etika dan tata kelola dalam setiap proses kerja, baik pada tataran strategis maupun operasional. Sosialisasi internal, pemantauan kepatuhan, serta evaluasi berkala menjadi bagian dari mekanisme pengawasan yang mendukung terciptanya budaya organisasi yang berintegritas dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

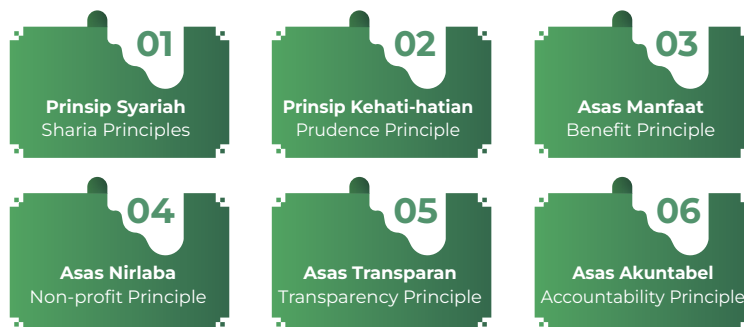
Melalui penerapan asas pengelolaan keuangan haji yang kokoh, BPKH tidak hanya membangun kredibilitas sebagai lembaga pengelola dana publik, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga amanah umat secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

To ensure consistent implementation of these principles, BPKH instills ethical values and governance in every work process, both at the strategic and operational levels. Internal socialization, compliance monitoring, and periodic evaluations are part of the supervisory mechanisms that support the creation of an organizational culture that is integrity-based and oriented towards the welfare of the people.

Through the implementation of sound Hajj Fund management principles, BPKH has not only built credibility as a public fund management institution, but also contributed to safeguarding the trust of the people in a sustainable and responsible manner.

Prinsip-prinsip Pengelola Keuangan Haji

Hajj Fund Management Principles



Konflik Kepentingan [GRI 2-15]

Sebagai lembaga keuangan publik yang mengelola dana umat, BPKH memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap keputusan yang diambil berlandaskan kepentingan publik secara menyeluruh. Komitmen terhadap integritas dan transparansi menjadi prinsip utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Untuk itu, BPKH menerapkan kebijakan pencegahan benturan kepentingan sebagai bagian dari tata kelola yang baik, merujuk pada Peraturan BPKH Nomor 3 Tahun 2018, khususnya Bagian IV.1 Angka 2 Lampiran I.

Sebagai bentuk implementasi, seluruh Anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas diwajibkan untuk mengisi Formulir Deklarasi yang menyatakan tidak memiliki rangkap jabatan maupun konflik kepentingan terhadap Mitra Kemaslahatan atau pihak lain yang memiliki hubungan langsung dengan aktivitas BPKH. Selain itu, mereka juga harus menyampaikan Surat Pernyataan Hubungan Kekeluargaan, yang menginformasikan keterkaitan dengan pegawai lain di lingkungan BPKH, guna

Conflict of Interests [GRI 2-15]

As a public financial institution that manages public funds, BPKH has a major responsibility to ensure that every decision made is based on the overall public interest. Commitment to integrity and transparency are key principles in maintaining public trust. To this end, BPKH has implemented a conflict of interest prevention policy as part of its good governance framework, in accordance with BPKH Regulation No. 3 of 2018, particularly Section IV.1, Point 2 of Annex I.

As part of its implementation, all members of the Executive Board and the Supervisory Board are required to complete a Declaration Statement stating that they do not hold any dual positions or have any conflicts of interest with Benefit Program Partners or other parties directly related to BPKH activities. In addition, they must also submit a Statement of Family Relationships, which informs the BPKH of any relationships with other employees within the BPKH, to ensure that decisions are free

memastikan pengambilan keputusan bebas dari pengaruh hubungan pribadi.

Dalam situasi apabila terjadi dugaan benturan kepentingan, BPKH memiliki mekanisme penanganan yang jelas dan tegas. Lembaga akan membentuk Dewan Kehormatan Kode Etik yang bersifat *ad hoc* untuk menindaklanjuti laporan atau temuan tersebut. Dewan ini terdiri dari unsur Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas, dan jika diperlukan, dapat melibatkan pihak independen dari luar BPKH untuk menjaga objektivitas serta integritas proses. Proses ini dijalankan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta laporan kasus akan disampaikan kepada pemangku kepentingan melalui jalur komunikasi yang telah ditetapkan.

Selama tahun 2024, tidak ditemukan kasus atau potensi benturan kepentingan di lingkungan Bidang Kemaslahatan BPKH. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pencegahan yang diterapkan telah berjalan secara efektif, serta menggambarkan komitmen seluruh jajaran organisasi dalam menjaga etika dan kepercayaan publik atas pengelolaan dana umat.

Selain menerapkan kebijakan dan langkah-langkah pencegahan, BPKH berkomitmen untuk mengungkapkan potensi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi kepercayaan pemangku kepentingan. BPKH memantau keanggotaan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana yang tumpang tindih, kepemilikan saham silang dengan pemasok dan mitra, serta hubungan keuangan lainnya yang dapat menunjukkan potensi konflik.

Informasi mengenai pihak terkait, termasuk hubungan mereka, sifat transaksi, dan saldo yang belum diselesaikan, diungkapkan secara transparan dalam Laporan Tahunan BPKH pada bab Analisis dan Pembahasan Manajemen, yang dapat diakses publik di situs web. [\[GRI 2-15\]](#)

Anti Korupsi [\[GRI 3-3\]](#)

Sebagai institusi yang mengelola dana haji umat secara amanah dan transparan, BPKH memegang teguh prinsip *zero-tolerance* terhadap segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Komitmen ini diwujudkan melalui penetapan kebijakan internal yang ketat, termasuk pelarangan keras atas penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun, sebagaimana diatur dalam Peraturan BPKH Nomor

from the influence of personal relationships.

In the event of a suspected conflict of interest, the BPKH has a clear and firm mechanism for handling such situations. The institution will form an ad hoc Ethics Code Honorary Council to follow up on such reports or findings. This council consists of members from the Executive Board and the Supervisory Board, and if necessary, may involve independent parties from outside BPKH to ensure the objectivity and integrity of the process. This process is carried out based on the principles of transparency and accountability, and case reports will be submitted to stakeholders through established communication channels.

During the year 2024, no cases or potential conflicts of interest were identified within the Benefit Program Field of the BPKH. This indicates that the preventive mechanisms in place are functioning effectively and reflects the commitment of all organizational staff to maintaining ethical standards and public trust in the management of public funds.

In addition to implementing policies and preventive measures, BPKH is committed to disclosing potential conflicts of interest that may affect stakeholders' trust. BPKH monitors cross-board memberships, cross-shareholding with suppliers and partners, and any financial relationships that may indicate potential conflicts.

Information on related parties, including their relationships, nature of transactions, and outstanding balances, is disclosed transparently in BPKH Annual Report on chapter Management Discussion and Analysis, which are publicly accessible on the website. [\[GRI 2-15\]](#)

Anti-Corruption [\[GRI 3-3\]](#)

As an institution that manages the Hajj funds of the Muslim community with integrity and transparency, BPKH upholds a zero-tolerance policy toward all forms of corruption, collusion, and nepotism. This commitment is realized through the implementation of strict internal policies, including a firm prohibition on the acceptance of any form of gratuity, as stipulated in BPKH Regulation

3 Tahun 2018. Kebijakan ini menjadi landasan moral dan hukum bagi seluruh pejabat dan pegawai BPKH dalam menjalankan tugasnya agar tetap berada dalam koridor integritas dan profesionalisme.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, BPKH juga telah membangun sistem pengawasan dan kontrol internal yang kokoh, mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pelaksana Nomor 8 Tahun 2019. Melalui peraturan ini, BPKH menekankan pentingnya deteksi dini terhadap potensi penyimpangan, serta menetapkan mekanisme tanggap cepat terhadap laporan dugaan pelanggaran, baik dari internal maupun eksternal. Penguatan sistem pengawasan ini merupakan bagian dari strategi berkelanjutan dalam membangun organisasi yang bersih dan akuntabel.

Dalam rangka menstandarisasi upaya pencegahan korupsi secara global, sejak tahun 2020 BPKH telah menerapkan dan mendapatkan sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016. Penerapan sistem ini didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pelaksana No. 6 Tahun 2024, yang menjadi pedoman teknis bagi seluruh unit kerja untuk menjalankan sistem anti-penyuapan secara konsisten dan terukur. SMAP ini mencakup pengendalian risiko penyuapan, pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), serta evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem.

Lebih lanjut, BPKH juga aktif membangun budaya integritas dan kepatuhan melalui edukasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pelatihan reguler terkait etika kerja, anti-korupsi, serta pelaporan pelanggaran diselenggarakan bagi seluruh jajaran mulai dari staf hingga manajemen puncak. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan kerja yang transparan, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam setiap pengambilan keputusan. [\[GRI 2-24\]](#)

Dengan berbagai langkah tersebut, BPKH tidak hanya menunjukkan komitmen formal terhadap pemberantasan korupsi, tetapi juga menegaskan peranannya sebagai lembaga pengelola dana umat yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab secara sosial.

No. 3 of 2018. This policy serves as a moral and legal foundation for all BPKH officials and employees in carrying out their duties to remain within the bounds of integrity and professionalism.

To support this policy, BPKH has also established a robust internal monitoring and control system, referring to Regulation of the Head of the Executive Board Number 8 of 2019. Through this regulation, BPKH emphasizes the importance of early detection of potential irregularities and establishes a rapid response mechanism for reports of alleged violations, both internal and external. The strengthening of the monitoring system is part of a sustainable strategy to build a clean and accountable organization.

To standardize global anti-corruption prevention efforts, since 2020 BPKH has implemented and obtained certification for the Anti-Bribery Management System (ABMS) ISO 37001:2016. The implementation of this system is based on the Regulation of the Head of the Executive Board No. 6 of 2024, which serves as a technical guideline for all work units to implement the anti-bribery system consistently and measurably. The ABMS covers bribery risk control, reporting of violations (*whistleblowing system*), and periodic evaluation of the effectiveness of the system.

Furthermore, BPKH actively promotes a culture of integrity and compliance through education and capacity building for human resources. Regular training on work ethics, anti-corruption, and reporting violations is conducted for all staff, from entry-level employees to senior management. The primary objective is to create a transparent, accountable work environment that upholds moral values in decision-making processes. [\[GRI 2-24\]](#)

Through these various initiatives, BPKH not only demonstrates its formal commitment to combating corruption but also reaffirms its role as a trusted and socially responsible institution managing funds for the community.

Hal yang dipertimbangkan BPKH dalam penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 Matters that BPKH considers in implementing the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP)

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen untuk menjalankan kegiatan pengelola Keuangan Haji sesuai dengan kode etik, ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta tidak melakukan praktik-praktik penyuapan dalam bentuk apapun; 2. Peningkatan kesadaran Sumber Daya Insani terhadap Anti Penyuapan, sehingga tercipta Sumber Daya Insani yang berintegritas, profesional dan beretika sesuai dengan kode etik yang berlaku; 3. Pencegahan, penanganan, pelaporan terjadinya praktik- praktik penyuapan, dan pemutakhiran ketentuan serta peraturan terkait Anti Penyuapan; 4. Pemberian kewenangan kepada Tim Kepatuhan Anti Penyuapan (TKAP) untuk memastikan keefektifan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Commitment to carry out Hajj Fund management activities in accordance with the code of ethics, applicable provisions and regulations, and not to carry out bribery practices in any form; 2. Increase personnel awareness on Anti-Bribery to develop Human Resources with integrity, professionalism and ethics in accordance with the applicable code of ethics; 3. Prevention, management, reporting of bribery practices, and updates to anti-bribery provisions and regulations; 4. Authorizing the Anti-Bribery Compliance Committee (TKAP) to ensure the effective implementation of the Anti-Bribery Management System. |
|--|--|

Komunikasi dan Pelatihan Terkait Kebijakan serta Prosedur Anti Korupsi [GRI 2-24, 205-2]

Communication and Training Related to Anti Corruption Policies and Procedures [GRI 2-24, 205-2]

(dalam satuan jam/in hours)

Uraian Description	2024		2023		2022	
	Jumlah Peserta Number of Participants (orang/people)	%	Jumlah Peserta Number of Participants (orang/people)	%	Jumlah Peserta Number of Participants (orang people)	%
Komunikasi Kebijakan dan Prosedur Anti Korupsi kepada Badan Tata Kelola Communication of Anti-Corruption Policies and Procedures to Governance Bodies	33	86	61	35,88	14	100,00
Komunikasi Kebijakan dan Prosedur Anti Korupsi kepada Karyawan Communication of Anti-Corruption Policies and Procedures to Employees	119	59,20	61	35,88	18	100,00
Komunikasi Kebijakan dan Prosedur Anti Korupsi kepada Mitra Communication of Anti- Corruption Policies and Procedures to Partners	66	100	57	77,02	15	100,00
Pelatihan Anti Korupsi kepada Badan Tata Kelola Anti-corruption Training for Governance Bodies	13	86,67	88	51,76	14	100,00
Pelatihan Anti Korupsi kepada Karyawan Anti-Corruption Training for Employees	146	72,64	0	0	3	16,66

Catatan/Notes:

1. Sebagai lembaga yang mengelola keuangan haji secara menyeluruh di Indonesia, BPKH tidak melakukan segmentasi wilayah kerja. Oleh karena itu, data yang disajikan dalam tabel ini mewakili kondisi nasional.
2. Data tahun 2022 hanya mencakup Divisi Kemaslahatan. Dan selama tahun pelaporan, tidak ada komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur antikorupsi yang diberikan oleh BPKH kepada pegawai di Divisi Kemaslahatan.
1. As an institution responsible for managing Hajj funds throughout Indonesia, BPKH does not segment its operational areas. Therefore, the data presented in this table represents the national condition.
2. The data for 2022 only covers the Benefit Program Field. During the reporting year, there was no communication or training on anti-corruption policies and procedures provided by BPKH to employees in the Benefit Program Field.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap integritas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Abadi Umat, BPKH memastikan bahwa seluruh proses penyaluran dana melalui Program Kemaslahatan dilaksanakan sesuai dengan prinsip antikorupsi dan standar etika yang tinggi. Salah satu upaya utama yang dilakukan BPKH adalah memastikan pemahaman dan penerapan SMAP di lingkungan internal dan eksternal.

Setiap pegawai BPKH, tanpa terkecuali, diwajibkan untuk mengikuti sosialisasi SMAP, yang kemudian dilanjutkan dengan ujian pemahaman guna mengevaluasi efektivitas sosialisasi serta mengukur tingkat pemahaman individu terhadap prinsip-prinsip pencegahan penyuapan. Hasil evaluasi ini digunakan untuk perbaikan berkelanjutan dalam sistem pengendalian internal.

Tidak hanya di internal organisasi, BPKH juga memperluas penerapan SMAP kepada seluruh Mitra Kemaslahatan yang bekerja sama dalam pelaksanaan program. Setiap mitra diwajibkan untuk menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen dalam mendukung dan menerapkan prinsip anti penyuapan dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan. Dokumen ini berfungsi sebagai pernyataan formal bahwa mitra memahami nilai-nilai antikorupsi dan bersedia tunduk pada ketentuan SMAP BPKH. [\[GRI 2-23\]](#)

Sebagai bagian dari upaya preventif terhadap korupsi, BPKH secara berkala melakukan penilaian risiko korupsi pada seluruh unit operasional. Pada tahun 2024, seluruh unit kerja BPKH yang berjumlah 36 divisi (100%) telah dinilai terkait risiko korupsi, baik melalui asesmen internal maupun pemantauan berbasis Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016. Dari hasil penilaian tersebut, tidak ditemukan risiko signifikan yang berpotensi menyebabkan terjadinya korupsi. Hasil ini mencerminkan efektivitas sistem pengendalian internal serta budaya kepatuhan dan integritas yang telah dibangun. Selaras dengan hal tersebut, selama periode pelaporan tahun 2024, tidak terdapat laporan maupun temuan pelanggaran terkait tindak korupsi di lingkungan BPKH. [\[GRI 205-1, GRI 205-3\]](#)

As part of its commitment to integrity and transparency in the management of the Ummah Trust Fund, BPKH ensures that all fund distribution processes through the Benefit Program are carried out in accordance with anti-corruption principles and high ethical standards. One of the main efforts undertaken by BPKH is to ensure understanding and implementation of SMAP within the internal and external environment.

Every BPKH employee, without exception, is required to attend SMAP socialization sessions, which are followed by comprehension tests to evaluate the effectiveness of the socialization and measure individual understanding of the principles of corruption prevention. The results of this evaluation are used for continuous improvement in the internal control system.

Not only within the organization, BPKH also extends the implementation of SMAP to all Benefit Program Partners collaborating in program implementation. Each partner is required to sign an Integrity Pact as a commitment to support and apply anti-bribery principles throughout all stages of activity implementation. This document serves as a formal statement that the partner understands anti-corruption values and is willing to comply with BPKH's SMAP provisions. [\[GRI 2-23\]](#)

As part of its preventive efforts against corruption, BPKH regularly conducts corruption risk assessments on all operational units. In 2024, all BPKH work units, totaling 36 divisions (100%), were assessed for corruption risk, both through internal assessments and monitoring based on the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP). From the results of these assessments, no significant risks were found that could potentially lead to corruption. These results reflect the effectiveness of the internal control system and the culture of compliance and integrity that has been established. In line with this, during the 2024 reporting period, there were no reports or findings of corruption-related violations within BPKH. [\[GRI 205-1, GRI 205-3\]](#)

Sistem Pelaporan Pelanggaran [GRI 2-25, 2-26, 2-27][SEOJK F.24]

BPKH menerapkan sistem *Whistleblowing System* (WBS) sebagai wujud komitmen terhadap transparansi, integritas, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas pengelolaan dana haji. Melalui sistem ini, baik pegawai internal maupun pihak eksternal diberikan saluran resmi dan aman untuk melaporkan dugaan pelanggaran, kecurangan, penyimpangan etika, atau penyalahgunaan wewenang secara anonim tanpa rasa takut akan pembalasan.

Pengelolaan sistem WBS dilakukan secara independen oleh Unit Penanganan Pengaduan dan Unit Penyelesaian Pengaduan, dengan dukungan Tim Pemeriksa. Seluruh pelaksanaan WBS mengacu pada regulasi internal BPKH yang disusun selaras dengan peraturan perundang-undangan nasional terkait pengelolaan pelaporan pelanggaran. Dewan Pengawas, dengan bantuan Komite Audit, melaksanakan pemantauan dan evaluasi sistem secara berkala untuk memastikan efektivitas proses pelaporan dan tindak lanjutnya.

Whistleblowing System [GRI 2-25, 2-26, 2-27][SEOJK F.24]

BPKH implements a Whistleblowing System (WBS) as a manifestation of its commitment to transparency, integrity, and accountability in managing hajj funds. Through this system, both internal employees and external parties are provided with an official and secure channel to report alleged violations, fraud, ethical misconduct, or abuse of authority anonymously without fear of retaliation.

The WBS is managed independently by the Complaint Handling Unit and the Complaint Resolution Unit, with support from the Audit Team. All WBS operations are conducted in accordance with BPKH's internal regulations, which are aligned with national laws and regulations governing the reporting of violations. The Supervisory Board, with the assistance of the Audit Committee, conducts regular monitoring and evaluation of the system to ensure the effectiveness of the reporting process and its follow-up actions.

Kategori Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan Categories of Reportable Violations

Tindakan Curang (tidak adil) Fraudulent (unfair) Acts	Korupsi Corruption	Pencurian/ penggelapan Theft/embezzlement	Pelanggaran kebijakan dan peraturan Violation of policies and regulations
Penyalahgunaan jabatan/ kewenangan Abuse of power/authority	Benturan kepentingan Conflict of interest	Penyuapan Bribery	Penipuan/pemerasan Fraud/extortion

Di sepanjang tahun 2024, tidak terdapat pengaduan pelanggaran yang masuk melalui mekanisme WBS yang dilakukan oleh Insan BPKH dalam lingkup organisasi.

During 2024, no violation complaints were received through the Whistleblowing System (WBS) from any BPKH personnel within the organization.

Komitmen Terhadap Hukum dan Peraturan [GRI 2-27]

Sebagai lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 34 Tahun 2014, BPKH menjunjung tinggi integritas hukum dan etika dalam seluruh aktivitasnya. Pelanggaran seperti korupsi, gratifikasi, manipulasi data, dan praktik monopoli tidak ditoleransi. Selama periode pelaporan, tidak terdapat pelanggaran hukum atau ketidakpatuhan terhadap peraturan yang terjadi baik di lingkungan internal BPKH maupun sepanjang rantai kegiatan mitra kerja BPKH.

Commitment to Laws and Regulations [GRI 2-27]

As an institution mandated by Law No. 34 of 2014, BPKH upholds legal integrity and ethics in all its activities. Violations such as corruption, gratification, data manipulation, and monopolistic practices are not tolerated. During the reporting period, there were no legal violations or non-compliance with regulations occurring either within BPKH or throughout the chain of activities of BPKH's partners.

Setiap laporan yang masuk melalui sistem WBS akan ditelaah secara hati-hati, profesional, dan objektif. Identitas pelapor dijaga dengan ketat, dan BPKH menjamin tidak akan ada bentuk intimidasi, diskriminasi, atau tindakan balasan terhadap pelapor. Jika laporan terbukti tidak benar, maka BPKH bertanggung jawab penuh untuk memulihkan nama baik pihak yang dituduh, sekaligus melakukan evaluasi atas potensi penyalahgunaan sistem WBS.

Every report submitted through the WBS system is reviewed carefully, professionally, and objectively. The identity of the reporter is strictly protected, and BPKH guarantees that there will be no form of intimidation, discrimination, or retaliation against the reporter. If a report is found to be unfounded, BPKH is fully responsible for restoring the reputation of the accused party and conducting an evaluation of potential misuse of the WBS system.

Selama tahun 2024, tidak terdapat laporan terkait pelanggaran pada bidang kemaslahatan maupun entitas mitra yang mengakibatkan pemutusan kerja sama atau tindakan disipliner lainnya. Di tahun 2024, BPKH juga tidak melakukan pembayaran sanksi moneter maupun non moneter. Hal ini menunjukkan efektivitas pengawasan internal dan kesadaran etika seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem kerja BPKH. [GRI 2-25]

During the year 2024, there were no reports of violations in the benefit program sector or involving partner entities that resulted in the termination of cooperation or other disciplinary actions. In 2024, BPKH also did not pay any monetary and non-monetary sanctions. This demonstrates the effectiveness of internal oversight and the ethical awareness of all parties involved in the BPKH work ecosystem. [GRI 2-25]



Pengelolaan Risiko

Risk Management [GRI 2-24, 2-25][SEOJK E.3]

Pengelolaan risiko merupakan fondasi penting dalam kerangka *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) yang diterapkan oleh BPKH. Pendekatan ini dirancang untuk mengenali, menilai, serta menangani berbagai potensi risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis organisasi. Dalam menjalankan mandat pengelolaan dana haji, BPKH mengadopsi prinsip kehati-hatian dan sistem mitigasi yang sistematis untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang timbul dapat diantisipasi dan dikelola secara efisien.

Sebagai bentuk implementasi yang konkret, BPKH membentuk Unit Kerja khusus Bidang Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan BPKH Nomor 3 Tahun 2018. Bidang ini terbagi menjadi dua divisi fungsional, yaitu Divisi Manajemen Risiko Bisnis dan Divisi Manajemen Risiko Korporasi, yang bekerja secara sinergis dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke seluruh proses operasional dan strategis.

Jenis Risiko dan Pendekatan Terintegrasi

BPKH terekspos pada berbagai bentuk risiko yang kompleks dan saling terkait. Terdapat sepuluh kategori risiko utama yang dikelola secara terpadu, yaitu:

1. Risiko Kredit
2. Risiko Pasar
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Investasi
5. Risiko Imbal Hasil
6. Risiko Operasional
7. Risiko Reputasi
8. Risiko Strategis
9. Risiko Hukum
10. Risiko Kepatuhan

Seluruh kategori risiko tersebut dipantau secara berkala untuk menjamin bahwa eksposur risiko tetap berada dalam ambang batas toleransi yang dapat diterima. Pendekatan ini menjadi bagian dari sistem manajemen risiko yang menyatu dengan perencanaan dan pelaksanaan strategi organisasi.

Risk management is an important foundation in the Governance, Risk, and Compliance (GRC) framework implemented by BPKH. This approach is designed to identify, assess, and address various potential risks that could disrupt the achievement of the organization's strategic objectives. In fulfilling its mandate to manage Hajj funds, BPKH adopts a prudent approach and a systematic risk mitigation system to ensure that emerging risks can be anticipated and managed efficiently.

As a concrete form of implementation, BPKH has established a special Risk Management Unit as stipulated in BPKH Regulation No. 3 of 2018. This unit is divided into two functional divisions, namely the Business Risk Management Division and the Corporate Risk Management Division, which work synergistically to integrate risk management into all operational and strategic processes.

Types of Risk and Integrated Approach

BPKH is exposed to various forms of complex and interrelated risks. There are ten main categories of risk that are managed in an integrated manner, namely:

1. Credit Risk
2. Market Risk
3. Liquidity Risk
4. Investment Risk
5. Return Risk
6. Operational Risk
7. Reputation Risk
8. Strategic Risk
9. Legal Risk
10. Compliance Risk

All risk categories are monitored regularly to ensure that risk exposure remains within acceptable tolerance limits. This approach is an integral part of the risk management system, which is integrated with the planning and implementation of the organization's strategy.

Proses Pengendalian Risiko BPKH

Siklus manajemen risiko yang diterapkan oleh BPKH melibatkan tahapan-tahapan berikut:

1. Identifikasi Risiko – Dilakukan secara menyeluruh pada setiap aktivitas, produk, atau kebijakan baru untuk mengantisipasi potensi ancaman di awal proses.
2. Pengukuran Risiko – Menilai tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko untuk menentukan prioritas penanganan.
3. Pemantauan Risiko – Melibatkan pengawasan terhadap eksposur risiko, kesesuaian dengan kebijakan internal, serta efektivitas pengendalian yang diterapkan.
4. Pengendalian Risiko – Mencakup penerapan teknik mitigasi seperti hedging, diversifikasi portofolio, penjaminan aset, dan langkah protektif lainnya yang berbasis pada prioritas risiko.

Penguatan Kompetensi SDM Terkait Manajemen Risiko

Untuk menjamin efektivitas manajemen risiko, BPKH secara aktif membangun kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan program sertifikasi yang berjenjang. Inisiatif ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh pegawai yang terlibat dalam pengelolaan risiko memiliki kompetensi yang memadai, baik dari sisi pemahaman teoretis maupun keterampilan teknis.

Program pelatihan tidak hanya difokuskan pada aspek manajemen risiko konvensional, tetapi juga mencakup isu-isu kontemporer seperti manajemen risiko investasi syariah, risiko reputasi digital, serta penyesuaian terhadap dinamika ekonomi global dan regulasi yang berkembang.

BPKH Risk Control Process

The risk management cycle implemented by BPKH involves the following stages:

1. Risk Identification – Conducted thoroughly for every activity, product, or new policy to anticipate potential threats at the beginning of the process.
2. Risk Measurement – Assessing the level of impact and likelihood of risk occurrence to determine the priority of handling.
3. Risk Monitoring – Involves monitoring risk exposure, compliance with internal policies, and the effectiveness of implemented controls.
4. Risk Control – Includes the application of mitigation techniques such as hedging, portfolio diversification, asset collateralization, and other protective measures based on risk priorities.

Strengthening Human Resource Competence Related to Risk Management

To ensure the effectiveness of risk management, BPKH actively builds human resource capacity through tiered training and certification programs. This initiative is designed to ensure that all employees involved in risk management have adequate competence, both in terms of theoretical understanding and technical skills.

The training programs are not only focused on conventional risk management aspects but also cover contemporary issues such as Islamic investment risk management, digital reputation risk, and adaptation to global economic dynamics and evolving regulations.

Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Tahun 2024

Risk Management Training and Certification in 2024

No.	Topik Pelatihan Training Topics	Jumlah Peserta Number of Participants
1	Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Banking Risk Management Certification	174

Jenis Risiko Utama dan Mitigasi Risiko Tahun 2024

Primary Types of Risk and Risk Mitigation in 2024 [GRI 2-4][SEOJK E.3]

Jenis Risiko Risk Type	Kategori Risiko Risk Category	Pengelolaan Risiko Risk Management
Risiko Kredit Credit Risk	Risiko Keuangan Financial Risk	BPKH mengelola risiko kredit dimulai dari proses identifikasi terhadap calon investasi dan <i>bank counterparty</i>. Selanjutnya dilakukan penilaian sesuai dengan <i>Risk Acceptance Criteria</i> (RAC) untuk mendapatkan mitra investasi dan <i>bank counterparty</i> yang berkualitas baik. Selanjutnya, secara reguler dilakukan pemantauan untuk mendeteksi potensi investasi dan penempatan yang bermasalah. Risiko kredit dapat dimitigasi melalui pengelolaan posisi dan risiko konsentrasi portofolio, tetap konsisten menjaga eksposur risiko kredit dengan limit dan jenis yang telah ditetapkan, menerapkan standar kehati-hatian dan prinsip syariah, penetapan target batasan risiko konsentrasi sesuai peraturan yang berlaku, penetapan tingkat kewenangan dalam proses persetujuan penyediaan dana. BPKH manages credit risk beginning with the identification process of potential investments and counterparty banks. Next, an assessment is carried out in accordance with the Risk Acceptance Criteria (RAC) to obtain quality investment partners and counterparty banks. Furthermore, regular monitoring is carried out to detect potential investments and placements that are problematic. Credit risk can be mitigated through position management and portfolio concentration risk, consistently maintaining credit risk exposure within the established limits and types, applying prudential standards and sharia principles, setting concentration risk limits in accordance with applicable regulations, and establishing levels of authority in the fund provision approval process.
Risiko Investasi Investment Risk	Risiko Keuangan Financial Risk	BPKH mengelola risiko investasi dengan melakukan identifikasi terhadap aktivitas penyediaan dana dengan akad berbasis bagi hasil. Pengukuran dilakukan terhadap konsentrasi portofolio aset dengan akad berbasis bagi hasil untuk selanjutnya dilakukan pemantauan secara reguler terhadap eksposur risiko investasi. Risiko Investasi dapat dimitigasi melalui: 1. <i>Cap and floor limit</i>, dimana mitra investasi akan melakukan hibah atas labanya kepada BPKH jika nilai bagi hasil tidak mencapai angka tertentu (<i>cap</i>), sebaliknya juga BPKH akan melakukan hibah atas pendapatannya kepada <i>counterparty</i> ketika nilai bagi hasilnya melebihi angka tertentu (<i>floor</i>); 2. Menetapkan limit dan mekanisme pengambilan keputusan investasi dengan akad berbasis bagi hasil. BPKH manages investment risk by identifying funding activities with profit-sharing agreements. Measurements are conducted on the concentration of asset portfolios with profit-sharing agreements, followed by regular monitoring of investment risk exposure. Investment risk can be mitigated through: 1. Cap and floor limits, whereby investment partners will grant their profits to BPKH if the profit sharing value does not reach a certain amount (<i>cap</i>), and conversely, BPKH will grant its income to the counterparty when the profit sharing value exceeds a certain amount (<i>floor</i>); 2. Establishing limits and investment decision-making mechanisms with profit-sharing agreements.

Jenis Risiko Risk Type	Kategori Risiko Risk Category	Pengelolaan Risiko Risk Management
Risiko Imbal Hasil Return Risk	Risiko Keuangan Financial Risk	BPKH mengelola risiko imbal hasil melalui pengelolaan tingkat imbal hasil yang kompetitif untuk menghasilkan nilai manfaat yang optimal. BPKH memantau secara reguler kinerja pencapaian nilai manfaat yang berasal dari bagi hasil. Risiko Imbal hasil dapat dimitigasi melalui: 1. Melakukan investasi dan penempatan pada instrumen keuangan yang lebih stabil; 2. Bauran dan diversifikasi portofolio investasi dan penempatan; dan 3. Memantau terhadap pergerakan indikator pasar yang mempengaruhi imbal hasil; 4. Memantau faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkat imbal hasil. BPKH manages return risk by managing competitive return rates to generate optimal value. BPKH regularly monitors the performance of value generated from profit sharing. Return risk can be mitigated through: 1. Investing and placing funds in more stable financial instruments; 2. Mixing and diversifying investment and placement portfolios; and 3. Monitoring market indicators that affect returns; 4. Monitoring economic factors that may affect return rates.
Risiko Pasar Market Risk	Risiko Keuangan Financial Risk	BPKH mengelola risiko pasar dengan mengoptimalkan struktur neraca untuk memperoleh kurs valuta asing yang optimal dalam rangka pemenuhan dana untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pengukuran risiko pasar dilakukan dengan menghitung <i>gap</i> posisi valuta asing yang dimiliki BPKH. Risiko Pasar dapat dimitigasi melalui: 1. Melakukan <i>marked to market</i> dan rekonsiliasi terhadap portofolio yang dimiliki; 2. Melakukan prinsip <i>segregation of duties</i>; 3. Menerapkan strategi lindung nilai; 4. Melakukan pengkajian secara berkala mengenai tingkat volatilitas pasar, pergerakan nilai tukar dan suku bunga, sasaran bisnis, dan faktor-faktor lainnya. BPKH manages market risk by optimizing its balance sheet structure to obtain optimal foreign exchange rates in order to meet the funds required for the costs of organizing the Hajj pilgrimage. Market risk is measured by calculating the gap in BPKH's foreign exchange positions. Market risk can be mitigated through: 1. Performing marked to market and reconciliation of the portfolio owned; 2. Implementing the principle of segregation of duties; 3. Implementing hedging strategies; 4. Conducting periodic reviews of market volatility levels, exchange rate and interest rate movements, business objectives, and other factors.
Risiko Likuiditas Liquidity Risk	Risiko Keuangan Financial Risk	BPKH mengelola risiko likuiditas dengan menjaga aset likuid untuk menjaga rasio likuiditas minimal 2 (dua) kali Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan menjaga <i>mismatch</i> antara jatuh tempo instrumen investasi dan penempatan dengan jatuh tempo kewajiban.

Jenis Risiko Risk Type	Kategori Risiko Risk Category	Pengelolaan Risiko Risk Management
		Risiko Likuiditas dapat dimitigasi melalui: 1. Diversifikasi investasi dan penempatan (produk, jangka waktu dan lainnya); 2. Menganalisa kecukupan aset likuid untuk memenuhi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji; dan 3. Menganalisa perubahan posisi dan kondisi likuiditas. BPKH manages liquidity risk by maintaining liquid assets to maintain a minimum liquidity ratio of 2 (two) times the Cost of Performing the Hajj and maintaining a mismatch between the maturity of investment instruments and placements with the maturity of liabilities. Liquidity risk can be mitigated through: 1. Diversification of investments and placements (products, terms, and others); 2. Analyzing the adequacy of liquid assets to meet Hajj Pilgrimage Costs; and 3. Analyzing changes in liquidity positions and conditions.
Risiko Hukum Legal Risk	Risiko Non-Keuangan Non-Financial Risk	BPKH melakukan pengelolaan risiko hukum dengan menggunakan parameter faktor litigasi, faktor kelemahan perikatan dan faktor ketiadaan/perubahan perundang-undangan. BPKH memiliki Divisi Hukum yang memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab terkait <i>regulatory</i>, <i>advisory</i>, litigasi, advokasi dan bantuan hukum. Risiko Hukum dapat dimitigasi melalui: 1. Memberikan advis hukum dan/atau pendampingan hukum dalam hal terdapat kasus hukum; 2. Standarisasi akad dan perjanjian kerja sama sesuai dengan peraturan yang berlaku; 3. Melakukan tinjauan risiko hukum terkait Perjanjian Kerja Sama/ <i>Non Disclosure Agreement</i> dengan pihak lain; 4. Melakukan kaji ulang secara rutin terhadap format standar perjanjian dan memastikan kesesuaian dengan peraturan perundangundangan serta ketentuan lain yang berlaku. BPKH manages legal risks using parameters such as litigation factors, contract weakness factors, and absence/changes in legislation. BPKH has a Legal Division with functions, duties, and responsibilities related to regulatory, advisory, litigation, advocacy, and legal assistance. Legal Risk can be mitigated through: 1. Providing legal advice and/or legal assistance in the event of a legal case; 2. Standardizing contracts and cooperation agreements in accordance with applicable regulations; 3. Conducting legal risk reviews related to Cooperation Agreements/ Non-Disclosure Agreements with other parties; 4. Conducting regular reviews of standard agreement formats and ensuring compliance with applicable laws and regulations and other applicable provisions.
Risiko Kepatuhan Compliance Risk	Risiko Non-Keuangan Non-Financial Risk	BPKH mengelola risiko kepatuhan dengan memperkuat penerapan GCG dan kode etik, memastikan mematuhi ketentuan perundang-undangan dan prinsip syariah. Untuk memastikan kepatuhan, Divisi Kepatuhan melakukan <i>compliance check list</i>, <i>compliance review</i> dan <i>compliance asesment</i>.

Jenis Risiko Risk Type	Kategori Risiko Risk Category	Pengelolaan Risiko Risk Management
		Risiko Kepatuhan dapat dimitigasi melalui: 1. Memastikan pedoman internal BPKH telah sejalan/harmonis dengan perundang-undangan yang berlaku; 2. Meningkatkan budaya kepatuhan melalui sosialisasi pedoman dan ketentuan kepada seluruh insan BPKH; 3. Meningkatkan <i>responsibility</i> untuk menindaklanjuti setiap temuan dari audit internal maupun eksternal. BPKH manages compliance risk by strengthening the implementation of GCG and code of ethics, ensuring compliance with laws and regulations and sharia principles. To ensure compliance, the Compliance Division conducts compliance checklists, compliance reviews and compliance assessments. Compliance risk can be mitigated through: 1. Ensuring that BPKH internal guidelines are in line with applicable laws and regulations; 2. Enhancing a culture of compliance by disseminating guidelines and regulations to all BPKH personnel; 3. Increasing responsibility to follow up on any findings from internal and external audits.
Risiko Operasional Operational Risk	Risiko Non-Keuangan Non-Financial Risk	BPKH melakukan Pengelolaan Risiko operasional yang bersumber dari kesalahan SDM, proses internal yang kurang memadai. Kegagalan sistem dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional BPKH. BPKH menerapkan proses <i>Risk Control Self Assessment</i> (RCSA) yang dikerjakan oleh <i>Risk Champion</i> secara periodik. Untuk memastikan kelangsungan operasional saat terjadi bencana, BPKH telah memiliki kebijakan <i>Business Continuity Management</i> (BCM) yang dilanjutkan dengan proses pengujian dan simulasi bencana di kantor BPKH. Risiko Operasional dapat dimitigasi melalui: 1. Peningkatan kompetensi dan kapabilitas insan BPKH yang terstruktur dan penguatan implementasi nilai-nilai budaya kerja; dan 2. Pengembangan aplikasi dan infrastruktur untuk mendukung operasional BPKH; 3. Pelaksanaan sosialisasi atas ketentuan yang berlaku melalui program Zoomatan untuk memastikan bahwa ketentuan dipahami oleh Insan BPKH; 4. Pembentukan <i>Crisis Management Team</i> (CMT) untuk mendukung penerapan kebijakan <i>Business Continuity Management</i> (BCM); 5. Peninjauan secara berkala terhadap pedoman, dokumentasi, sistem, rencana kontinjensi dan praktek operasional lainnya. BPKH manages operational risks arising from human resource errors and inadequate internal processes. System failures and external events that affect BPKH operations. BPKH implements a Risk Control Self Assessment (RCSA) process carried out periodically by Risk Champions. To ensure operational continuity in the event of a disaster, BPKH has a Business Continuity Management (BCM) policy, which is followed by disaster testing and simulation processes at the BPKH office.

Jenis Risiko Risk Type	Kategori Risiko Risk Category	Pengelolaan Risiko Risk Management
		Operational risks can be mitigated through: 1. Structured improvement of the competence and capabilities of BPKH personnel and strengthening the implementation of work culture values; and 2. Developing applications and infrastructure to support BPKH operations; 3. Socialization of applicable regulations through the Zoomatan program to ensure that BPKH personnel understand the regulations; 4. Establishing a Crisis Management Team (CMT) to support the implementation of Business Continuity Management (BCM) policies; 5. Regular review of guidelines, documentation, systems, contingency plans, and other operational practices.
Risiko Reputasi Reputational Risk	Risiko Non-Kuangan Non-Financial Risk	BPKH melakukan pengelolaan risiko reputasi melalui pemantauan secara terus menerus terhadap sumber penyebab risiko reputasi seperti publikasi negatif, pengaduan jemaah haji, pelanggaran etika bisnis, dan kelemahan penerapan tata kelola. BPKH mencatat dan menatausahakan setiap kejadian risiko reputasi untuk mendapatkan mitigasi yang efektif. Risiko Reputasi dapat dimitigasi melalui: 1. Penguatan strategi komunikasi internal dan eksternal dalam menyikapi berita atau publikasi negatif serta mencegah berkembangnya informasi ke arah yang cenderung kontraproduktif; 2. Penetapan strategi penanganan keluhan Jemaah haji; 3. Penetapan strategi penggunaan media yang efektif untuk penanganan berita negatif; 4. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berfungsi sebagai pengelola informasi dan dokumentasi; 5. Penetapan prosedur pengelolaan reputasi dalam kondisi krisis; 6. Penerapan strategi keterbukaan informasi kepada masyarakat seperti penyampaian kinerja dan laporan keuangan. BPKH manages reputation risk through continuous monitoring of sources of reputation risk such as negative publications, complaints from pilgrims, business ethics violations, and weaknesses in governance implementation. BPKH records and manages every reputation risk incident to obtain effective mitigation. Reputational risk can be mitigated through: 1. Strengthening internal and external communication strategies in responding to negative news or publications and preventing the spread of information that tends to be counterproductive; 2. Establishing strategies for handling complaints from pilgrims; 3. Establishing effective media usage strategies for handling negative news; 4. Establishing an Information and Documentation Management Officer (PPID) to serve as the manager of information and documentation; 5. Establishing reputation management procedures in crisis situations; 6. Implementation of information disclosure strategies to the public, such as performance reports and financial statements.

Jenis Risiko Risk Type	Kategori Risiko Risk Category	Pengelolaan Risiko Risk Management
Risiko Strategik Strategic Risks	Risiko Non-Keuangan Non-Financial Risks	BPKH mengelola risiko strategik melalui proses perencanaan strategis jangka panjang dan Perencanaan Kerja dan Anggaran Tahunan (jangka pendek). Penyelarasan strategi lembaga (BPKH) telah di-<i>cascading</i> terhadap setiap Bidang. Evaluasi dan pemantauan risiko strategik dilakukan terhadap pencapaian strategi dan target yang sudah ditetapkan. Risiko Strategik dapat dimitigasi melalui: 1. Melakukan reviu terhadap rencana bisnis BPKH dengan mempertimbangkan kondisi makro ekonomi, pihak berkepentingan, kapabilitas internal yang sesuai dengan visi dan misi BPKH; dan 2. Membangun sistem yang dapat memonitor indikator utama pencapaian dan deviasi dari strategi yang ditetapkan; 3. Mendorong strategi keuangan haji yang sustain dalam mendukung operasional haji. BPKH manages strategic risks through long-term strategic planning and Annual Work and Budget Planning (short-term). The alignment of the institution's (BPKH) strategy has been cascaded across divisions. Evaluation and monitoring of strategic risks are carried out against the achievement of predetermined strategies and targets. Strategic risks can be mitigated through: 1. Reviewing BPKH's business plan by considering macroeconomic conditions, stakeholders, and internal capabilities in line with BPKH's vision and mission; and 2. Establishing a system that can monitor key indicators of achievement and deviations from the established strategy; 3. Promoting a sustainable hajj financial strategy to support hajj operations.
Risiko Anak Usaha Subsidiaries Risk	Risiko Keuangan dan Risiko Non-Keuangan Financial and Non-Financial Risks	BPKH mengelola risiko anak usaha seiring dengan kepemilikan mayoritas saham di Bank Muamalat Indonesia dan BPKH <i>Limited</i>. Risiko anak usaha timbul dari kegiatan operasional, keuangan, dan strategi anak usaha yang mempengaruhi kinerja BPKH. Dalam penilaian risiko anak dengan BPKH dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan menambahkan satu jenis risiko dalam perhitungan risiko komposit BPKH. Risiko anak usaha dapat dimitigasi melalui: 1. Penyusunan <i>corporate charter</i> yang mengatur hubungan dan tata kelola antara BPKH sebagai perusahaan induk dengan anak usaha; 2. Penyusunan kebijakan manajemen risiko terintegrasi, meliputi tata kelola risiko, proses manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan penerapan manajemen risiko pada masing-masing anak usaha; 3. Menyelenggarakan pertemuan secara reguler untuk menyampaikan profil risiko masing-masing anak usaha; 4. Penyelarasan visi, misi dan strategi antara BPKH sebagai perusahaan induk dengan anak usaha. BPKH manages subsidiary risks in line with its majority share ownership in Bank Muamalat Indonesia and BPKH <i>Limited</i>. Subsidiary risks arise from the operational, financial, and strategic activities of subsidiaries that affect BPKH's performance. The assessment of subsidiary risks with BPKH is carried out in an integrated manner, namely by adding one type of risk to the BPKH composite risk calculation.

Jenis Risiko Risk Type	Kategori Risiko Risk Category	Pengelolaan Risiko Risk Management
---------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Subsidiaries risk can be mitigated through:

1. The formulation of a corporate charter that regulates the relationship and governance between BPKH as the parent company and its subsidiaries;
2. The formulation of an integrated risk management policy, including risk governance, risk management processes, internal control systems, and the application of risk management in each subsidiary;
3. Holding regular meetings to convey the risk profile of each subsidiary;
4. Aligning the vision, mission, and strategy between BPKH as the parent company and its subsidiaries.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan Stakeholder Engagement [GRI 2-13, 2-29][SEOJK E.4]

BPKH meyakini bahwa keterlibatan pemangku kepentingan merupakan elemen strategis dalam menciptakan tata kelola keuangan haji yang berkelanjutan dan inklusif. Pendekatan ini mencakup interaksi yang konstruktif tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga pada dimensi sosial dan lingkungan, guna menciptakan dampak luas bagi umat.

Dalam pelaksanaannya, BPKH menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap pengelolaan dana haji dan implementasi Program Kemaslahatan. Melalui sinergi ini, BPKH dapat menggali masukan, memperkuat transparansi, serta meningkatkan akuntabilitas dalam setiap kebijakan dan pelaksanaan program.

Melalui Bidang Kemaslahatan, BPKH melakukan pemetaan terhadap pemangku kepentingan berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingannya terhadap program yang dijalankan. Identifikasi ini menjadi dasar dalam menentukan strategi komunikasi dan bentuk keterlibatan yang tepat, baik melalui forum diskusi, konsultasi publik, pelatihan bersama, maupun kemitraan program, serta kegiatan lainnya. Dengan demikian, setiap langkah yang diambil tidak hanya mencerminkan aspirasi umat, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan manfaat yang berkelanjutan secara jangka panjang.

BPKH believes that stakeholder engagement is a strategic element in creating sustainable and inclusive hajj financial management. This approach includes constructive interaction not only in economic aspects, but also in social and environmental dimensions, in order to create a broad impact for the community.

In its implementation, BPKH establishes communication and collaboration with various parties that have an interest and influence on the management of hajj funds and the implementation of the Benefit Program. Through this synergy, BPKH can gather input, strengthen transparency, and improve accountability in every policy and program implementation.

Through the Benefit Program Field, BPKH conducts stakeholder mapping based on their level of influence and interest in the programs being implemented. This identification serves as the basis for determining communication strategies and appropriate forms of engagement, whether through discussion forums, public consultations, joint training, program partnerships, or other activities. As a result, every step taken not only reflects the aspirations of the community but is also directed toward generating sustainable benefits in the long term.

No.	Pemangku Kepentingan Stakeholders	Metode dan Frekuensi Keterlibatan Method and Frequency of Engagement	Kepentingan dan Harapan Interests and Expectation
1	Badan Pelaksana BPKH Executive Board of BPKH	- Rapat badan pelaksana (1x/ minggu) - Rapar koordinasi dengan anggota badan pelaksana (setiap hari) - Meeting of the Executive Board (1x/ week) - Coordination meeting with Members of the Executive Board (every day)	- Penggunaan dana sesuai target - Keberlanjutan program - Kepatuhan peraturan - Eksistensi BPKH (syiar dan <i>branding</i>) - Use of funds according to the target - Program continuity - Regulatory compliance - Existence of BPKH (preaching and branding)
2	Dewan Pengawas BPKH Supervisory Board of BPKH	- Rapat gabungan (1x/bulan) - Laporan bulanan - Rapat evaluasi (3 bulan sekali/ triwulan) - Joint meeting (1x/month) - Monthly report - Quarterly evaluation meeting	- Penggunaan dana sesuai target - Keberlanjutan program - Kepatuhan peraturan - Eksistensi BPKH (syiar dan <i>branding</i>) - Use of funds according to the target - Program continuity - Regulatory compliance - Existence of BPKH (preaching and branding)
3	Kementerian Agama The Ministry of Religious Affairs	Rapat prioritas (awal tahun, atau saat ada perubahan) Priority meeting (beginning of the year, or when changes occur)	- Program prioritas - Program pendukung pelaksanaan ibadah haji - Priority programs - Programs supporting hajj pilgrimage implementation
4	Komisi VIII DPR Commission VIII of DPR	- Laporan pelaksanaan program - Usulan program (proposal) - Report of program implementation - Proposed program (proposal)	- Pengawasan - Pelaksanaan - Oversight - Implementation
5	Mitra Kemaslahatan (lembaga nonprofit) Benefit Program Partners (Non Profit Organization)	- Rapat koordinasi bulanan/mingguan - Rapat Badan Koordinasi (1x per tahun) - Rapat evaluasi program (2x per tahun) - Monthly/weekly coordination meetings - Coordinating body meeting (1x per year) - Program evaluation meeting (2x per year)	- Program - Sumber dan jumlah penggunaan dana - Usulan dan pelaksanaan Kegiatan Kemaslahatan - Programs - Source and amount of use of funds - Proposal and implementation of Benefit Program Activities
6	Penerima Manfaat Beneficiaries	Sosialisasi Socialization	Program Programs
7	Kementerian Keuangan The Ministry of Finance	Rapat penempatan DAU (1x per tahun) DAU placement meeting (1x per year)	Sumber penempatan dana dan jumlah dana Source of fund placement and amount of funds
8	Masyarakat Public	- Sosialisasi - Publikasi kegiatan di berbagai media - Socialization - Publication of activities in various media	- Program - Sumber dan jumlah penggunaan dana - Programs - Source and amount of funds usage
9	Presiden President	Laporan melalui Kementerian Agama Report through the Ministry of Religious Affairs	Kepatuhan peraturan Regulatory compliance
10	Pegawai Employees	Gathering, pelatihan Gathering, training	- Tata kelola - Transparansi - Penilaian kinerja - Pengembangan - Governance - Transparency - Performance assessment - Development

Tantangan Penerapan Aspek Keberlanjutan

Challenges in Sustainability Aspects Implementation [SEOJK E.5]

Dalam upaya mewujudkan pengelolaan keuangan haji yang berorientasi pada keberlanjutan, BPKH masih menghadapi berbagai hambatan yang perlu disikapi secara strategis. Salah satu tantangan utama terletak pada pelaksanaan program-program keberlanjutan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang masih belum optimal. Keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas, serta kapasitas mitra lokal menjadi kendala nyata dalam memperluas jangkauan kemaslahatan di daerah tersebut. Oleh karena itu, BPKH terus mengembangkan pendekatan kolaboratif dengan pemangku kepentingan lokal dan berupaya memperluas cakupan distribusi program agar manfaatnya dirasakan secara lebih merata di seluruh Indonesia.

Selain itu, integrasi aspek lingkungan dalam proses seleksi dan persetujuan proposal Kemaslahatan masih perlu diperkuat. Saat ini, sebagian besar program yang diajukan belum secara eksplisit memasukkan indikator keberlanjutan lingkungan sebagai kriteria evaluasi utama. Ke depan, BPKH berkomitmen untuk mengembangkan kebijakan dan pedoman teknis yang lebih progresif agar pertimbangan lingkungan menjadi bagian integral dalam penilaian proposal, termasuk potensi mitigasi risiko lingkungan dan kontribusi terhadap pelestarian sumber daya alam.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan jumlah program Kemaslahatan yang telah dianalisis menggunakan pendekatan *Social Return on Investment* (SROI). BPKH menyadari pentingnya transparansi dan akuntabilitas berbasis bukti, sehingga secara bertahap akan meningkatkan jumlah program unggulan yang dianalisis dengan pendekatan SROI. Dengan demikian, BPKH dapat menilai sejauh mana program kemaslahatan memberikan nilai sosial yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat luas.

In its efforts to achieve sustainable hajj financial management, BPKH still faces various obstacles that need to be addressed strategically. One of the main challenges lies in the implementation of sustainability programs in disadvantaged, frontier, and outermost (3T) regions, which are still not optimal. Limited infrastructure, accessibility, and the capacity of local partners are real obstacles to expanding the reach of benefit programs in these areas. Therefore, BPKH continues to develop collaborative approaches with local stakeholders and strives to expand the coverage of program distribution so that the benefits are felt more evenly throughout Indonesia.

Additionally, the integration of environmental aspects into the selection and approval process for benefit programs still needs to be strengthened. Currently, most proposed programs do not explicitly include environmental sustainability indicators as primary evaluation criteria. Going forward, BPKH is committed to developing more progressive policies and technical guidelines so that environmental considerations become an integral part of proposal assessment, including the potential for environmental risk mitigation and contribution to natural resource conservation.

Another challenge is the limited number of benefit programs that have been analyzed using the Social Return on Investment (SROI) approach. BPKH recognizes the importance of transparency and evidence-based accountability, and will therefore gradually increase the number of flagship programs analyzed using the SROI approach. This will enable BPKH to assess the extent to which benefit programs deliver measurable social value and direct impacts for the broader community.



TENTANG LAPORAN KEMASLAHATAN BPKH

About BPKH
Kemaslahatan Report



Profil Laporan

Report Profile [GRI 2-2, 2-3]

Laporan Kemaslahatan 2024 menandai edisi keenam yang disusun dan diterbitkan oleh Bidang Kemaslahatan BPKH sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan penyaluran DAU. Laporan ini memuat berbagai kebijakan, program, serta capaian kinerja sepanjang tahun kalender, yang mencerminkan kontribusi Bidang Kemaslahatan dalam mendukung tujuan kemaslahatan umat. Cakupan laporan meliputi seluruh aktivitas yang berlangsung antara 1 Januari hingga 31 Desember 2024, sama dengan periode pelaporan untuk laporan keuangan, dan disusun secara tahunan sebagai bagian dari komitmen pelaporan berkelanjutan. Laporan ini mencakup aktivitas BPKH secara konsolidasi dengan entitas anak sesuai laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit untuk data-data keuangan, dan aktivitas BPKH tanpa konsolidasi entitas anak untuk data-data non-keuangan. Laporan Kemaslahatan 2024 direncanakan terbit pada bulan September 2025, setelah seluruh proses evaluasi dan pengumpulan data selesai dilakukan.

Sementara itu, informasi terkait kinerja keuangan BPKH pada periode yang sama disajikan secara terpisah dalam laporan konsolidasi, yang rutin diterbitkan setiap bulan November. Pemisahan ini bertujuan untuk memastikan fokus dan kedalaman pelaporan masing-masing aspek, baik dari sisi kemaslahatan maupun keuangan.

Pedoman yang Digunakan

Penyusunan Laporan Kemaslahatan 2024 dilakukan dengan mengacu pada standar dan pedoman pelaporan yang diakui secara nasional maupun internasional. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan disusun secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan praktik terbaik pelaporan keberlanjutan.

Adapun acuan utama dalam penyusunan laporan ini meliputi:

- GRI Standards 2021 yang diterbitkan oleh *Global Sustainability Standards Board (GSSB)* sebagai standar internasional untuk pelaporan keberlanjutan, khususnya dalam menyajikan informasi yang material dan relevan bagi para pemangku kepentingan.

The 2024 Kemaslahatan Report marks the sixth edition compiled and published by the Benefit Program Field of BPKH as a form of accountability for the distribution of DAU. This report contains various policies, programs, and performance achievements throughout the calendar year, reflecting the contribution of the Benefit Program Field in supporting the benefit program objectives of the community. The report covers all activities that took place between January 1 and December 31, 2024, the same as the reporting period for the financial statements and is compiled annually as part of a commitment to sustainable reporting. This report covers BPKH's activities on a consolidated basis with its subsidiaries in accordance with the audited consolidated financial statements for financial data, and BPKH's standalone activities for non-financial data. The 2024 Kemaslahatan Report is scheduled to be published in September 2025, after the entire evaluation and data collection process has been completed.

Meanwhile, information related to BPKH's financial performance for the same period is presented separately in a consolidated report, which is routinely published every November. This separation aims to ensure focus and depth in reporting each aspect separately, both from the benefit program and financial perspectives.

References

The 2024 Kemaslahatan Report was prepared in accordance with nationally and internationally recognized reporting standards and guidelines. This is to ensure that the report is prepared in an accountable, transparent, and sustainable manner in line with best practices in sustainability reporting.

The main references used in the preparation of this report include:

- GRI Standards 2021 published by the *Global Sustainability Standards Board (GSSB)* as international standards for sustainability reporting, particularly in presenting material and relevant information to stakeholders.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, sebagai pedoman nasional dalam mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam praktik bisnis dan pelaporan.
- Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, yang digunakan sebagai referensi tambahan dalam struktur dan penyajian laporan secara umum.
- Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, as national guidelines for integrating sustainability aspects into business practices and reporting.
- OJK Circular Letter (SEOJK) No. 16/SEOJK.04/2021 on the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies, which is used as an additional reference in the structure and presentation of reports in general.

Melalui penerapan standar-standar tersebut, BPKH berupaya untuk menyajikan laporan yang tidak hanya informatif dan kredibel, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap tata kelola yang baik dan keberlanjutan jangka panjang.

Through the implementation of these standards, BPKH aims to present reports that are not only informative and credible but also reflect a commitment to good governance and long-term sustainability.

Informasi yang Dinyatakan Ulang [GRI 2-4]

Tidak terdapat informasi yang dinyatakan ulang pada laporan ini.

Restatement of Information [GRI 2-4]

There is no restated information in this report.

Penjaminan Kualitas Laporan [SEOJK G.1]

BPKH senantiasa berkomitmen untuk menyampaikan Laporan Kemaslahatan yang informatif, akurat, dan dapat dipertanggung-jawabkan. Untuk memastikan kualitas laporan, proses telaah dan verifikasi dilakukan secara menyeluruh oleh tim internal yang relevan, di bawah supervisi langsung Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas. Setiap tahap, mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan, dijalankan dengan ketelitian tinggi guna menjamin integritas informasi yang disampaikan. [GRI 2-5, 2-14]

Pada tahun 2024, BPKH tidak melakukan verifikasi dan penjaminan (*external assurance*) namun melakukan *GRI Standards In Accordance Check* oleh *National Center of Corporate Reporting* (NCCR) sesuai arahan dari Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas sebagaimana yang disajikan pada bagian akhir dalam laporan ini. [GRI 2-5]

Report Quality Guarantee [SEOJK G.1]

BPKH is always committed to delivering informative, accurate, and accountable Kemaslahatan Report. To ensure the quality of the reports, the review and verification process is conducted comprehensively by relevant internal teams under the direct supervision of the Governing Board and Supervisory Board. Every stage, from data collection, analysis, to report preparation, is carried out with the highest level of precision to ensure the integrity of the information provided. [GRI 2-5, 2-14]

In 2024, BPKH did not conduct external verification or assurance but performed a *GRI Standards In Accordance Check* by the *National Center of Corporate Reporting* (NCCR) in accordance with the directives of the Executive Board and Supervisory Board as presented at the end part of this report. [GRI 2-5]

Tanggapan Umpan Balik [SEOJK G.3]

Sebagai bentuk keterbukaan dan partisipasi, Bidang Kemaslahatan BPKH menyertakan lembar umpan balik di bagian akhir laporan ini guna

Feedback Response [SEOJK G.3]

As a form of transparency and participation, BPKH's Benefit Program Field has included a feedback form at the end of this report to establish two-way

menjalin komunikasi dua arah dengan para pemangku kepentingan. Lembar ini disediakan agar pembaca dapat menyampaikan pendapat, saran, maupun tanggapan yang dapat menjadi masukan berharga dalam menyempurnakan laporan di masa mendatang.

Selama periode pelaporan tahun 2024, tidak terdapat tanggapan yang masuk melalui lembar umpan balik tersebut. Namun demikian, Bidang Kemaslahatan tetap berkomitmen untuk menerima dan menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan melalui kanal atau platform lainnya sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam penyusunan laporan.

Kontak [GRI 2-3]

Untuk informasi, saran dan pertanyaan lebih lanjut terkait laporan ini, dapat menghubungi kontak kontak yang tertera pada halaman paling akhir laporan ini.

communication with stakeholders. This form is provided so that readers can convey their opinions, suggestions, and responses, which can serve as valuable input for improving future reports.

During the reporting period of 2024, no feedback was received through the feedback form. However, the Benefit Program Field remains committed to receiving and addressing any feedback provided through other channels or platforms as part of our ongoing efforts to improve the report preparation.

Contact [GRI 2-3]

For further information, suggestions, and questions about this report, please contact the listed contacts on the last page of this report.

Topik Material Material Topics

Proses Penentuan Topik Material [GRI 3-1]

Penentuan topik material dalam laporan ini dilakukan dengan mengacu pada prinsip materialitas dan standar pelaporan yang berlaku. Pemilihan topik mempertimbangkan dampak aktual maupun potensial dari kegiatan operasional, harapan pemangku kepentingan, serta kewajiban pengungkapan sesuai POJK No. 51/2017. Aspek ekonomi, sosial, lingkungan, termasuk hak asasi manusia, turut menjadi fokus dalam identifikasi dampak aktual maupun potensial dari Program Kemaslahatan, termasuk hubungan dengan Mitra Kemaslahatan.

Proses identifikasi dan penetapan topik dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan unit terkait dan masukan dari pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Analisis dilakukan dengan menilai tingkat kemungkinan dan keparahan dampak, untuk menentukan mana yang paling signifikan. Penetapan akhir

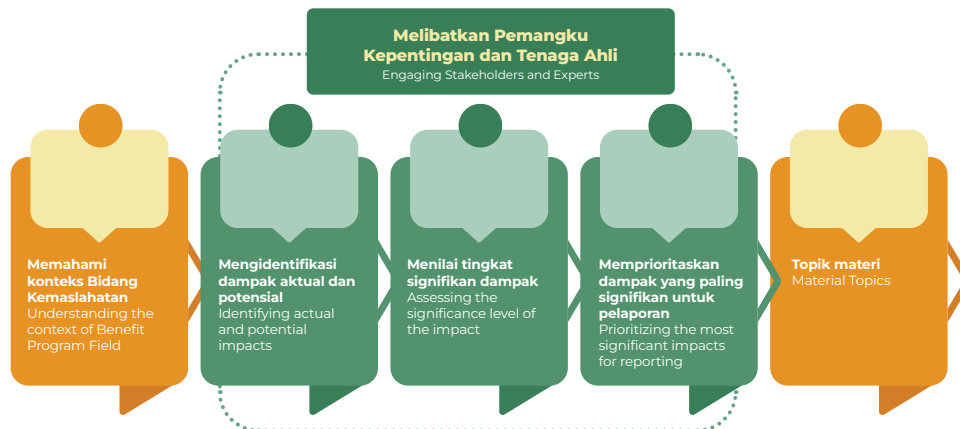
Material Topic Determination Process [GRI 3-1]

The determination of material topics in this report was carried out with reference to the principle of materiality and applicable reporting standards. The selection of topics considers the actual and potential impact of operational activities, stakeholder expectations, and disclosure requirements in accordance with POJK No. 51/2017. Economic, social, and environmental aspects, including human rights, are also focused on in identifying the actual and potential impacts of the Benefit Program, including its relationship with Benefit Program Partners.

The identification and determination of topics were carried out through Focus Group Discussions (FGDs) involving relevant units and input from internal and external stakeholders. Analysis was conducted by assessing the likelihood and severity of impacts to determine which were most significant. The final determination is consulted with sustainability

dikonsultasikan dengan tenaga ahli keberlanjutan dan diajukan untuk ditinjau serta disetujui oleh Dewan. Pada tahun 2024, seluruh topik material tahun sebelumnya telah ditinjau kembali dan dinyatakan masih relevan karena tidak terdapat perubahan signifikan dalam konteks Program Kemaslahatan. [GRI 2-4]

experts and submitted for review and approval by the Board. In 2024, all material topics from the previous year were reviewed and deemed still relevant as there were no significant changes in the context of the Benefit Program. [GRI 2-4]



Daftar Topik Material

[GRI 3-2, 3-3, 2-4]

Pada Laporan Keberlanjutan tahun 2024, tidak terdapat perubahan pada daftar topik material yang digunakan dengan laporan tahun sebelumnya, mengingat seluruh topik tersebut dinilai masih relevan dan mencerminkan isu-isu penting bagi BPKH dan para pemangku kepentingan. Adapun daftar topik material yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

List of Material Topic

[GRI 3-2, 3-3, 2-4]

In the 2024 Sustainability Report, there are no changes to the list of material topics used in the previous year's report, considering that all topics are still relevant and reflect important issues for BPKH and its stakeholders. The list of material topics is as follows:

Topik Material Material Topics	Penjelasan Topik Material Explanation of Material Topics	Korelasi dengan Standar GRI Correlation with GRI Standards	Batasan Limitations			
			Bidang Kemaslahatan Benefit Program Field	BPKH	Masyarakat Community	Mitra Partners
Nilai manfaat yang dihasilkan dan disalurkan Return value generated and distributed	Program Kemaslahatan dilaksanakan untuk memastikan optimalisasi nilai DAU, dan merupakan bentuk pelaksanaan mandate peraturan yang berlaku. Sejalan dengan misi bidang kemaslahatan. The Benefit Program is implemented to ensure the optimization of DAU value, and is a form of implementation of the applicable regulatory mandate that align with the benefit program field's mission.	Tidak ada None	V	V	V	

Topik Material Material Topics	Penjelasan Topik Material Explanation of Material Topics	Korelasi dengan Standar GRI Correlation with GRI Standards	Batasan Limitations			
			Bidang Kemaslahatan Benefit Program Field	BPKH	Masyarakat Community	Mitra Partners
Dampak ekonomi tidak langsung Indirect economic impact	Program Kemaslahatan yang diselenggarakan mencakup dukungan terhadap infrastruktur untuk kemaslahatan umat. The Benefit Program includes infrastructure support for the welfare of the Muslim community.	203-1 203-2	v		v	
Praktik pengadaan Procurement practices	Program Kemaslahatan dilaksanakan bersama mitra kemaslahatan lokal. Part of the institution's governance that must be applied throughout management and employees.	204-1	v			v
Anti Korupsi Anti-corruption	Bagian dari tata Kelola lembaga yang harus diterapkan di seluruh manajemen dan pegawai. Part of institutional governance that must be implemented throughout management and staff.	205-2 205-3	v	v		v
Pendidikan dan pelatihan Education and training	Memiliki pegawai dengan kompetensi yang mumpuni memungkinkan kegiatan dapat dilakukan secara optimal. Having employees with qualified competencies allows activities to be conducted optimally.	404-1	v			
Masyarakat lokal Local community	Program Kemaslahatan ditujukan untuk masyarakat lokal, khususnya umat Islam. The Benefit Program is aimed at the local community, especially Muslims.	413-1 413-2	v		v	v

Topik Material Material Topics	Penjelasan Topik Material Explanation of Material Topics	Korelasi dengan Standar GRI Correlation with GRI Standards	Batasan Limitations			
			Bidang Kemaslahatan Benefit Program Field	BPKH	Masyarakat Community	Mitra Partners
Penilaian sosial mitra Partner social assessment	Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Kemaslahatan merupakan kegiatan sosial yang spesifik untuk kemaslahatan umat. Maka penting bagi Lembaga untuk bekerja sama dengan mitra yang memiliki visi yang sama. The Benefit Program Field's activities are specific social activities for the welfare of the ummah. So it is essential for the institution to work with partners who share our vision.	414-1	v			v
Kesehatan dan keselamatan penerima manfaat Beneficiary health and safety	Tujuan program adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi umat, Kesehatan dan keselamatan tentunya menjadi bagian dari hal ini. The program's objective is to provide welfare for Muslim community, which makes health and safety part of the objective.	416-2	v		v	v
Memberikan peluang yang sama (penyaluran manfaat) Providing equal opportunities (distribution of benefits)	Menjadi kuantitatif aspek kinerja utama bidang kemaslahatan, cakupan jangkauan kegiatan. Being a quantitative aspect of the benefit program field's main performance and the range's scope of the activities.	Tidak ada None	v		v	v



LAMPIRAN

Appendix



Indeks Konten GRI

GRI Content Index

Pernyataan Penggunaan Statement of use	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Telah Melaporkan Sesuai Dengan Standar GRI Untuk Periode 01 Januari – 31 Desember 2024 Hajj Fund Management Agency (BPKH) has reported in accordance with the GRI Standards for the period 01 January - 31 December 2024
GRI 1 YANG DIGUNAKAN GRI 1 used	GRI 1: LANDASAN 2021 GRI 1: Foundation 2021

Standar GRI/ Sumber Lain GRI Standard/ Other Source	Pengungkapan Disclosure		Lokasi Location	Yang Tidak Dicantumkan Omission		
				Persyaratan Yang Tidak Dicantumkan Requirement(s) Omitted	Alasan Reason	Penjelasan Explanation
Pengungkapan umum General disclosures						
GRI 2: Pengungkapan Umum 2021 General Disclosures 2021	2-1	Rincian organisasi Organizational details	30, 32			
	2-2	Entitas yang disertakan dalam pelaporan keberlanjutan Perseroan Entities included in the organization's sustainability reporting	32, 174			
	2-3	Periode pelaporan, frekuensi, dan poin kontak Reporting period, frequency and contact point	174, 176, 192			
	2-4	Informasi yang dinyatakan ulang Restatements of information	35, 163, 175, 177			
	2-5	Penjaminan eksternal External guarantor	175			
	2-6	Aktivitas, rantai nilai, dan hubungan bisnis lain Activities, value chain and other business relationships	32, 38, 42			
	2-7	Ketenagakerjaan Employees	122-124			
	2-8	Pekerja yang bukan pekerja Langsung Workers who are not employees	124, 129			
	2-9	Struktur tata kelola dan komposisinya Governance structure and composition	137-141			
	2-10	Pencalonan dan pemilihan badan tata kelola tertinggi Nomination and selection of the highest governance body	147			

Standar GRI/ Sumber Lain GRI Standard/ Other Source	Pengungkapan Disclosure	Lokasi Location	Yang Tidak Dicantumkan Omission		
			Persyaratan Yang Tidak Dicantumkan Requirement(s) Omitted	Alasan Reason	Penjelasan Explanation
	2-11 Ketua badan tata kelola tertinggi Chair of the highest governance body	138, 141, 143			
	2-12 Peran badan tata kelola tertinggi dalam mengawasi manajemen dampak Role of the highest governance body in overseeing the management of impacts	141-143, 150			
	2-13 Delegasi penanggung-jawab dalam pengelolaan dampak Delegation of responsibility for managing impacts	143, 169			
	2-14 Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan Role of the highest governance body in sustainability reporting	142, 175			
	2-15 Konflik kepentingan Conflicts of interest	154-155			
	2-16 Komunikasi masalah penting Communication of critical concerns	145			
	2-17 Pengetahuan kolektif dari badan tata kelola tertinggi Collective knowledge of the highest governance body	146			
	2-18 Evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi Evaluation of the performance of the highest governance body	150-151			
	2-19 Kebijakan remunerasi Remuneration policies	148-149			
	2-20 Proses untuk menentukan remunerasi Process to determine remuneration	148			
	2-21 Rasio kompensasi total tahunan Annual total compensation ratio	150			

Standar GRI/ Sumber Lain GRI Standard/ Other Source	Pengungkapan Disclosure	Lokasi Location	Yang Tidak Dicantumkan Omission		
			Persyaratan Yang Tidak Dicantumkan Requirement(s) Omitted	Alasan Reason	Penjelasan Explanation
	2-22	Pernyataan strategi pembangunan berkelanjutan Statement on sustainable development strategy	9-17, 34-35, 53-57		
	2-23	Komitmen kebijakan Policy commitments	33, 129-130, 151-152, 158		
	2-24	Menanamkan komitmen kebijakan Embedding policy commitments	129, 151-152, 156-157, 161		
	2-25	Proses untuk memperbaiki dampak negatif Processes to remediate negative impacts	152, 159, 161-162		
	2-26	Mekanisme untuk mencari nasihat dan mengemukakan masalah Mechanisms for seeking advice and raising concerns	159-160		
	2-27	Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan Compliance with laws and regulations	159-160		
	2-28	Keanggotaan asosiasi Membership associations	42		
	2-29	Keterlibatan pemangku kepentingan Approach to stakeholder engagement	169-170		
	2-30	Perjanjian perundingan kolektif Collective bargaining agreements	126-127		
Topik Material Material Topics					
GRI 3: Topik Material 2021 Material topics 2021	3-1	Proses untuk menentukan topik material Process to determine material topics	176-177		
	3-2	Daftar topik material List of material topics	177-179		
Nilai Manfaat Yang Dihasilkan dan Disalurkan Generated and Distributed Return Value					
GRI 3: Topik Material 2021 Material topics 2021	3-3	Manajemen topik material Management of material topics	36		

Standar GRI/ Sumber Lain GRI Standard/ Other Source	Pengungkapan Disclosure	Lokasi Location	Yang Tidak Dicantumkan Omission		
			Persyaratan Yang Tidak Dicantumkan Requirement(s) Omitted	Alasan Reason	Penjelasan Explanation
Penyaluran Nilai Manfaat Return Value Distribution	-	Dana Abadi Umat (DAU) Ummah Trust Fund	36		
Dampak Ekonomi Tidak Langsung Indirect Economic Impacts					
GRI 3: Topik Material 2021 Material topics 2021	3-3	Manajemen topik material Management of material topics	101		
GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung 2016 Indirect Economic Impacts 2016	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan Infrastructure investments and services supported	101		
	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan Significant indirect economic impacts	104		
Praktik Pengadaan Procurement Practices					
GRI 3: Topik Material 2021 Material topics 2021	3-3	Manajemen topik material Management of material topics	38		
GRI 204: Praktik Pengadaan 2016 Procurement Practices 2016	204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal Proportion of spending on local suppliers	39		
Anti Korupsi Anti-corruption					
GRI 3: Topik Material 2021 Material topics 2021	3-3	Manajemen topik material Management of material topics	155		
GRI 205: Anti- Korupsi 2016 Anti-corruption 2016	205-1	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi Operations assessed for risks related to corruption	158		
	205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi Communication and training about anti- corruption policies and procedures	157-158		

Standar GRI/ Sumber Lain GRI Standard/ Other Source	Pengungkapan Disclosure	Lokasi Location	Yang Tidak Dicantumkan Omission		
			Persyaratan Yang Tidak Dicantumkan Requirement(s) Omitted	Alasan Reason	Penjelasan Explanation
	205-3 Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil Confirmed incidents of corruption and actions taken	158			
Pendidikan dan Pelatihan Training and Education					
GRI 3: Topik Material 2021 Material topics 2021	3-3 Manajemen topik material Management of material topics	127			
GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016 Training and Education 2016	404-1 Rata-rata jam pelatihan per tahun per pegawai Average hours of training per year per employee	128			
	404-2 Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs	128-129			
	404-3 Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews	129			
Masyarakat Lokal Local Communities					
GRI 3: Topik Material 2021 Material topics 2021	3-3 Manajemen topik material Management of material topics	58			

Standar GRI/ Sumber Lain GRI Standard/ Other Source	Pengungkapan Disclosure	Lokasi Location	Yang Tidak Dicantumkan Omission		
			Persyaratan Yang Tidak Dicantumkan Requirement(s) Omitted	Alasan Reason	Penjelasan Explanation
GRI 413: Masyarakat Setempat 2016 Local Communities 2016	413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat setempat, penilaian dampak, dan program pengembangan Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs	58-100, 103		
	413-2	Operasi yang secara aktual dan berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat setempat Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities	55		
Penilaian Sosial Mitra Kemaslahatan Social Assessment of Benefit Program Partners					
GRI 3: Topik Material 2021 Material topics 2021	3-3	Manajemen topik material Management of material topics	38		
GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok 2016 Supplier Social Assessment 2016	414-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria mitra New suppliers that were screened using Benefit Program Partners criteria	39		
	414-2	Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil Negative social impacts in the supply chain and actions taken			Tidak berlaku/tidak relevan dengan operasional BPKH. Melihat aktivitas inti BPKH, secara langsung tidak ada rantai pasok yang kompleks seperti perusahaan/manufaktur. Not applicable/not relevant to BPKH operations. Looking at BPKH's core activities, there is no direct complex supply chain like a company/manufacturer.
Kesehatan dan Keselamatan Penerima Manfaat Beneficiary Health and Safety					
GRI 3: Topik Material 2021 Material topics 2021	3-3	Manajemen topik material Management of material topics	129		

Standar GRI/ Sumber Lain GRI Standard/ Other Source	Pengungkapan Disclosure	Lokasi Location	Yang Tidak Dicantumkan Omission		
			Persyaratan Yang Tidak Dicantumkan Requirement(s) Omitted	Alasan Reason	Penjelasan Explanation
GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan 2016 Customer Health and Safety 2016	416-1	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa Assessment of the health and safety impacts of product and service categories			Tidak berlaku/tidak relevan dengan operasional BPKH. Peran utama BPKH adalah mengelola dana haji dan menyalurkannya untuk kemaslahatan umat Islam. Secara langsung, produk atau jasa yang dihasilkan BPKH mungkin tidak sebanding dengan aspek komersial yang diatur oleh GRI 416-1.
	416-2	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa Incidents of non-compliance concerning the health and safety impacts of products and services			Not applicable/not relevant to BPKH operations. The main role of BPKH is to manage Hajj funds and channel them for the benefit of the Muslim community. Directly, the products or services produced by BPKH may not be comparable to the commercial aspects regulated by GRI 416-1.
Memberikan Peluang yang Sama (Penyaluran Manfaat) Providing Equal Opportunities (Benefit Distribution)					
GRI 3: Topik Material 2021 Material topics 2021	3-3	Manajemen topik material Management of material topics	50		
	-	Penyaluran nilai manfaat yang merata Return value distribution	52		

Daftar Pengungkapan Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 16/SEOJK.04/2021

List of Disclosures According to Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) Number 16/SEOJK.04/2021 [SEOJK G.4]

No	Nama indeks Index name	Halaman Page
A. Strategi Keberlanjutan Sustainability Strategy		
A.1.	Penjelasan strategi keberlanjutan Explanation of sustainability strategy	34
B. Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan Sustainability Aspect Performance Highlights		
B.1.	Aspek ekonomi Economic aspect	6
B.2.	Aspek lingkungan hidup Environmental aspects	6
B.3.	Aspek sosial Social aspect	7
C. Profil Organisasi Organization profile		
C.1.	Visi, misi, dan nilai keberlanjutan Vision, mission and sustainability values	33
C.2.	Alamat Organisasi Organization's address	32
C.3.	Skala usaha Business scale	32
C.4.	Produk, layanan, dan kegiatan usaha yang dijalankan Products, services, and business activities carried out	32
C.5.	Keanggotaan pada asosiasi Association membership	42
C.6.	Perubahan Perusahaan yang bersifat signifikan Significant Company changes	42
D. Sambutan Pimpinan Chairman's remarks		
D.1.	Sambutan Pimpinan BPKH BPKH Chairman's remarks	9, 12
E. Tata Kelola Keberlanjutan Sustainability Governance		
E.1.	Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan Responsible for Implementing Sustainable Finance	141
E.2.	Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan Berkelanjutan Competency Development Related to Sustainable Finance	146
E.3.	Penilaian Risiko Atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan Risk Assessment of the Implementation of Sustainable Finance	161
E.4.	Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan Relations with Stakeholders	169
E.5.	Permasalahan Terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Problems Against the Implementation of Sustainable Finance	171
F. Kinerja Keberlanjutan Sustainability Performance		
F.1.	Kegiatan membangun budaya keberlanjutan Activities to build a culture of sustainability	53

No	Nama indeks Index name	Halaman Page
Kinerja Ekonomi Economic Performance		
F.2.	Uraian mengenai kinerja ekonomi dalam tiga tahun terakhir Overview of economic performance over the past three years	37
F.3.	Uraian mengenai kinerja keberlanjutan Overview of sustainability performance	6-7
Kinerja Lingkungan Hidup Environmental Performance		
F.4.	Biaya lingkungan The amount and intensity of energy used	116-117
F.5.	Material: Pengurangan penggunaan kertas Material: Saving paper	111-112
F.6.	Jumlah dan intensitas energi yang digunakan The amount and intensity of energy used	114
F.7.	Upaya dan pencapaian efisiensi energi yang dilakukan termasuk penggunaan sumber energi terbarukan Energy efficiency efforts and achievements include the use of renewable energy sources	113
F.8.	Penggunaan Air Water usage	110
F.9.	Dampak terhadap keanekaragaman hayati Impact to biodiversity	115
F.10.	Upaya konservasi keanekaragaman hayati Biodiversity conservation effort	115
F.11.	Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan Berdasarkan jenisnya Number and intensity of emissions produced by type	114-115
F.12.	Upaya dan pencapaian pengurangan emisi yang dilakukan Efforts and achievement of emission reductions made	113
F.13.	Jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan berdasarkan jenis Amount of waste and effluent generated by type	111
F.14.	Pengelolaan sampah domestik Domestik waste treatment	110
F.15.	Tumpahan Spills	111
F.16.	Pengaduan terkait lingkungan hidup Complaints related to environment	111
Kinerja Sosial Social Performance		
F.17.	Komitmen kesetaraan dalam program kemaslahatan Equality commitment in benefit program	41
F.18.	Pernyataan kesetaraan kesempatan bekerja Statement of equal employment opportunity	122
F.19.	Tenaga kerja anak dan tenaga kerja paksa Child labour and forced labour	122
F.20.	Upah minimum regional Regional minimum wage	126
F.21.	Lingkungan bekerja yang layak dan aman Decent and safe work environment	129
F.22.	Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai Training and capacity building of employees	127-128
F.23.	Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar Impact of Operations on Surrounding Communities	101

No	Nama indeks Index name	Halaman Page
F.24.	Pengaduan Masyarakat Community Complaints	159
F.25.	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Environmental Social Responsibility Activities (CSR)	115
F.26.	Inovasi berkaitan dengan aspek keberlanjutan Innovation related to sustainability aspect	6, 112
F.27.	Produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan Products and services that have been evaluated for safety for customers	105
F.28.	Dampak Produk dan/ Jasa Impact of Products and/ Services	58
F.29.	Tingkat persetujuan proposal Proposal approval rate	41
F.30.	<i>Social return on investment</i> Social return on investment	40, 104
G. Lain-lain Others		
G.1.	Verifikasi tertulis dari pihak independen (jika ada) Written verification from an independent party (if any)	175
G.2.	Lembar Umpan Balik Feedback Sheet	191
G.3.	Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelumnya Responses to Feedback on the Previous Year's Sustainability Report	175
G.4.	Daftar Pengungkapan Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik List of Disclosures According to Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 about the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies	188

Lembar Umpan Balik

Feedback Form [SEOJK G.2]

Laporan Kemaslahatan ini memuat informasi mengenai kegiatan Program Kemaslahatan yang dijalankan dari 01 Januari – 31 Desember 2024.

Kami mengucapkan terima kasih saudara telah membaca Laporan Kemaslahatan ini dan kami berharap bisa mendapatkan masukan dalam rangka peningkatkan kualitas laporan. Respon saudara sangat berarti bagi kami, oleh karena itu izinkan kami menanyakan beberapa hal terkait laporan ini.

This Kemaslahatan Report covers information on the Benefit Program activities from January 01 - December 31, 2024.

We thank you for reading this Kemaslahatan Report and we hope to get feedback in order to improve the report's quality. Your response means a lot to us, so please allow us to ask you some questions about this report.

Profil Pemangku Kepentingan

Stakeholder Profiles

() **Presiden RI**
President of the Republic of Indonesia

() **Badan Pelaksana BPKH**
Executive Board of BPKH

() **Dewan Pengawas BPKH**
Supervisory Board of BPKH

() **Kementerian Agama**
Ministry of Religion

() **Kementerian Keuangan**
Ministry of Finance

() **Komisi VIII DPR**
House of Representatives
Commission VIII of the
Republic of Indonesia

() **Mitra Kemaslahatan (Lembaga Non-Profit)**
Benefit Partners (Non-Profit Institution)

() **Penerima Manfaat**
Beneficiaries

() **Masyarakat umum**
Public

() **Pegawai**
Employee

() **Lainnya**
Others

Nama
Name :

Institusi/Perusahaan
Institution/Company :

Email
Email :

Telp/HP
Phone/HP :

No.	Pertanyaan Questions	Ya Yes	Tidak No
1.	Laporan ini mudah dimengerti This report is easy to understand	()	()
2.	Laporan ini memberikan informasi secara menyeluruh dan transparan This report provides comprehensive and transparent information	()	()
3.	Laporan ini menarik dan dirancang dengan baik The report is interesting and well designed	()	()
4.	Topik apakah yang paling bermanfaat menurut anda? What topics did you find most useful?	()	()
5.	Materi apa yang dirasa perlu ditingkatkan? What material do you feel needs improvement?	()	()
6.	Selain yang telah disajikan, informasi apakah yang ingin anda peroleh melalui laporan ini? Other than what has been presented, what information would you like to gain from this report?	()	()
7.	Kontribusi apa yang dirasa perlu ditingkatkan BPKH? What contributions do you feel BPKH needs to improve?	()	()
8.	Saran dan masukan lain: Other suggestions and inputs:	()	()

**TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI BAPAK/IBU.
MOHON AGAR LEMBAR UMPAN BALIK INI DIKIRIMKAN
KEMBALI KE ALAMAT:**

Thank you for your participation. Please send back this
feedback form to the address:



**Bidang Kemaslahatan
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)**

Benefit Program Field Haji Fund Management Agency (BPKH) [2-3]

Muamalat Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940, Indonesia

 (021) 83793001  +62 821 9090 6002  info@bphk.go.id  www.bphk.go.id



**Laporan Kesesuaian dengan Standar GRI dan
SEOJK 16/OJK.04/2021**
**Statement of GRI Standards and SEOJK 16/OJK.04/2021
in Accordance Check**

National Center for Corporate Reporting (NCCR) telah melakukan pengecekan kesesuaian dengan Standar GRI dan SEOJK 16 OJK.04/2021 atas Laporan Keberlanjutan Badan Pengelola Keuangan Haji 2024 ("Laporan"). Pengecekan dilakukan untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana Standar GRI dan SEOJK 16/OJK.04/2021 telah diterapkan dalam Laporan tersebut. Pengecekan ini bukan merupakan opini atas kinerja keberlanjutan maupun kualitas informasi yang dimuat dalam Laporan tersebut.

Kami menyimpulkan bahwa Laporan ini telah disusun sesuai dengan Standar GRI dan SEOJK 16/OJK.04/2021.

Jakarta, 3 Oktober 2025

The National Center for Corporate Reporting has conducted a GRI Standards and SEOJK 16/OJK.04/2021 in Accordance Check on Badan Pengelola Keuangan Haji 2024 ("Report"). The check communicates the extent to which the GRI Standards and SEOJK 16/OJK.04/2021 have been applied in the Report. The check does not provide an opinion on the sustainability performance of the reporter or the quality of the information provided in the Report.

We conclude that this report has been prepared in accordance with GRI Standards and SEOJK 16/OJK.04/2021.

Jakarta, October 3, 2025

National Center for Corporate Reporting
GRI Standards Aligning Service

Andrew K. Twohig, BCom, BA (Hons), MA, CSRA
Director



Head Office

Muamalat Tower,
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18,
Jakarta 12940, Indonesia

T. +62.21 837 93001

